RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2025-2045

BELITUNG MAJU
(MANDIRI DAN BERKELANJUTAN)







PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara bertahap di Kabupaten Belitung;

b. bahwa untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah agar penyelenggaraan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan efektif, efisien, konsisten dan bersasaran perlu disusun dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat:....

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

   Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

7. Peraturan....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG

dan

BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
6. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

10. Perencanaan....

10. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
11. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
13. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
14. Penyelarasan adalah proses sinkronisasi muatan antara dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah agar tercapai sinergi pembangunan dalam pencapaian tujuan nasional secara koheren.
15. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025-2045 adalah dasar hukum Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025-2045 yang berpedoman pada RPJP Nasional.
17. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan

Bangka....

Bangka Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 20425-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan RPJM Nasional.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
24. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Belitung adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode 1 (satu) tahun.
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

26. Rencana....

26. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
27. Visi Indonesia Emas 2045 adalah pandangan bangsa Indonesia mengenai keadaan bangsa yang diinginkan pada100 (seratus) tahun kemerdekaannya.
28. Misi Pembangunan adalah agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045.
29. Arah Pembangunan adalah strategi untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional jangka panjang.
30. Indonesia Emas (IE) adalah Arah Pembangunan dalam 20 tahun ke depan dengan menggunakan paradigma baru.
31. Permasalahan Pembangunan Daerah adalah kesenjangan antara realita/capaian pembangunan daerah dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
32. Isu Strategis Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
33. Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan visi nasional.
34. Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi daerah dengan memperhatikan misi nasional.
35. Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan visi daerah.
36. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi daerah pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

37. Pembangunan....

37. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
38. Pelaku Pembangunan adalah pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan:

a. penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, dan RTRW.
b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Belitung bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belitung yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung.
(2) Tujuan penetapan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
    a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;

b. menjamin....

b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antarwaktu, serta antarfungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. menjamin terciptanya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistimatika RPJPD Tahun 2025-2045, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas 6 (enam) bab yaitu:

a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi daerah;
c. permasalahan dan isu strategis
d. visi dan misi daerah;
e. arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
f. penutup.

Pasal 5

Isi beserta uraian RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045.
(2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
    a. Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD Tahun 2025-2045;
    b. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPN Tahun 2025-2045;

c. Konsistensi....

c. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;
d. Konsistensi antara RPJPD Tahun 2025-2045 dengan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034; dan
e. Kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

BAB VI

PERUBAHAN

Pasal 7

(1) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila:
a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(3) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

(4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman penetapan Perubahan RPJMD.

BAB....

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
(2) RPJPD tahun 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan Pembangunan sampai dengan tahun 2045 dan dapat diberlakukan sebagai program transisi dan pedoman dalam penyusunann rancangan teknokratik RPJMD Tahun 2045-2049 sebelum tersusunnya RPJPD tahun 2045-2065.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 November 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,

ttd.

MIKRON ANTARIKSA

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal November 2024

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MARZUKI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

WIGMAN WUDIE SETIAWAN, S.H.,M.Si
NIP. 19720607 200003 1 004

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (11.59/2024).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk periode tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Belitung bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Belitung yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Belitung untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, dan RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034.

RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Dengan....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 96

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 memuat rumusan visi dan misi Kabupaten Belitung selama 20 (dua puluh) tahun kedepan berdasarkan isu strategis Pembangunan daerah.

RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 ini disusun berdasarkan kajian akademis serta penjaringan aspirasi dengan pemerintah daerah dan *stakeholder*. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan gagasan strategis dalam upaya mewujudkan Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Berkelanjutan (Maju) ditahun 2045.

Dokumen RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 disusun dalam 6 (enam) bab yang terdiri dari Penduhuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah, Visi Misi Daerah, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah, serta Penutup.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pedoman dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Belitung dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut aktif mewujudkan rencana pembangunan jangka panjang. Akhir kata, tim penyusun mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyusunan RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **I**

DAFTAR ISI ..... **II**

DAFTAR TABEL ..... **IV**

DAFTAR GAMBAR ..... **XII**

BAB I PENDAHULUAN **2**

1.1 LATAR BELAKANG 2

1.2 DASAR HUKUM 4

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN 8

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN 11

1.4.1 Maksud *11*

1.4.2 Tujuan *12*

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 12

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH **18**

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI 18

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT 28

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM 53

2.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH 173

2.5 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005 – 2025 202

2.6 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK 213

2.7 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH 222

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS **238**

3.1 ANALISIS PERMASALAHAN 238

3.2 ANALISIS ISU STRATEGIS 288

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH **309**

4.1 VISI 309

4.2 MISI 313

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK 319

5.1 ARAH KEBIJAKAN 319

5.2 SASARAN POKOK PEMBANGUNAN 336

BAB VI PENUTUP 382

6.1 KAIDAH PELAKSANAAN 382

6.2 MEKANISME PENGENDALIAN DAN EVALUASI 383

6.3 PEMBIAYAAN 385

6.4 MANAJEMEN RISIKO 385

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 19
Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 24
Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan..... 25
Tabel 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan 26
Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (Rp 000) 29
Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 (dalam %) 32
Tabel 2.7 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 39
Tabel 2.8 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 53
Tabel 2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 54
Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 60
Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (dalam jiwa)..... 61
Tabel 2.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Dasar Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 65
Tabel 2.13 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 65

Tabel 2.14 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 66
Tabel 2.15 Angka Kelahiran Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 . 68
Tabel 2.16 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 . 69
Tabel 2.17 Angka Kematian Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 70
Tabel 2.18 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 72
Tabel 2.19 Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 78
Tabel 2.20 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 81
Tabel 2.21 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Belitung (Km), Tahun 2020 – 2023 83
Tabel 2.22 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Kondisi (Km) Tahun 2019 – 2023 84
Tabel 2.23 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Kondisi (Km) Tahun 2019-2023 85
Tabel 2.24 Jaringan Irigasi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 85
Tabel 2.25 Jumlah Sekolah di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 87
Tabel 2.26 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Belitung Tahun 2023 87
Tabel 2.27 Peruntukan Ruang di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 88
Tabel 2.28 Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 89
Tabel 2.29 Fungsi Pola Ruang Kabupaten Belitung 91
Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 93
Tabel 2.31 Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung (Unit) Tahun 2019-2023 . 94
Tabel 2.32 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung Tahun 2023 94
Tabel 2.33 Angka Kriminalitas Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 95

Tabel 2.34 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 96
Tabel 2.35 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 97
Tabel 2.36 Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 102
Tabel 2.37 Pelatihan Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 103
Tabel 2.38 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 105
Tabel 2.39 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per kapita per tahun Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 110
Tabel 2.40 Skor PPH Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019 - 2023 111
Tabel 2.41 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2019 - 2023 112
Tabel 2.42 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 .. 113
Tabel 2.43 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 114
Tabel 2.44 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 115
Tabel 2.45 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 116
Tabel 2.46 Uji Pencemaran Air dan Udara Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 117
Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 119
Tabel 2.48 Jumlah Desa berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 122
Tabel 2.49 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 122
Tabel 2.50 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 124

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 124
Tabel 2.52 Nilai Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 127
Tabel 2.53 Capaian Kinerja Telekomunikasi Belitung Tahun 2019 - 2023 .. 127
Tabel 2.54 Realisasi Terintegrasinya Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2022-2023 128
Tabel 2.55 Daftar Media Website yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2023 128
Tabel 2.56 Daftar Media Sosial yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2023 128
Tabel 2.57 Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai Tahun 2023 128
Tabel 2.58 Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupatan Belitung Tahun 2019 –2023 132
Tabel 2.59 Kinerja Penanaman Modal, Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 133
Tabel 2.60 Nilai Investasi berdasarkan Sektor Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 134
Tabel 2.61 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 137
Tabel 2.62 Kinerja Statistik Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 138
Tabel 2.63 Kinerja Persandian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023..... 139
Tabel 2.64 Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 140
Tabel 2.65 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 145
Tabel 2.66 Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 146
Tabel 2.67 Kinerja SubSektor Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 147
Tabel 2.68 Kinerja Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 149
Tabel 2.69 Kinerja Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 152

Tabel 2.70 Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 152
Tabel 2.71 Luas Panen Tanaman Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 153
Tabel 2.72 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 154
Tabel 2.73 Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 – 2023 156
Tabel 2.74 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 156
Tabel 2.75 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 157
Tabel 2.76 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 160
Tabel 2.77 Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 162
Tabel 2.78 Kinerja Keuangan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 ... 163
Tabel 2.79 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 166
Tabel 2.80 Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 168
Tabel 2.81 Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 170
Tabel 2.82 Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 172
Tabel 2.83 Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 174
Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 175
Tabel 2.85 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 177
Tabel 2.86 Nilai Tukar Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 178

Tabel 2.87 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 180
Tabel 2.88 Lalu Lintas Penerbangan di Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2019-2023 181
Tabel 2.89 Arus Penumpang di Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2019–2023 183
Tabel 2.90 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 183
Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 184
Tabel 2.92 Potensi Bahaya di Kabupaten Belitung..... 185
Tabel 2.93 Jumlah Bank dan Perusahaan Asuransi beserta Cabangnya di Kabupaten Belitung Tahun 2020 - 2023 189
Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 190
Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023 190
Tabel 2.96 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 ... 191
Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023..... 192
Tabel 2.98 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Genggam di Kabupaten Belitung .. 193
Tabel 2.99 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Mengakses Internet di Kabupaten Belitung..... 193
Tabel 2.100 Indeks Kesulitan Geografis Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2021 195
Tabel 2.101 Jumlah Demo di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 197
Tabel 2.102 Rata- rata lama perijinan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 198
Tabel 2.103 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 201

Tabel 2.104 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 202
Tabel 2.105 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 203
Tabel 2.106 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 214
Tabel 2.107 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 218
Tabel 2.108 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 218
Tabel 2.109 Proyeksi kebutuhan Air Minum Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 219
Tabel 2.110 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 219
Tabel 2.111 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampaham Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 220
Tabel 2.112 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 221
Tabel 2.113 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 221
Tabel 3.1 Analisis Permasalahan Ekonomi 242
Tabel 3.2 Analisis Permasalahan SDM 248
Tabel 3.3 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan 273
Tabel 3.4 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup 284
Tabel 3.5 Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur 287
Tabel 3.6 Analisis Isu Internal 300
Tabel 4.1 Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 311
Tabel 4.2 Penyelarasan Sasara Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 312

Tabel 4.3 Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Belitung dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 316
Tabel 5.1 Arah Kebijakan 322
Tabel 5.2 Tahapan Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 324
Tabel 5.3 Tahapan Arah Kebijakan Misi 2 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 327
Tabel 5.4 Tahapan Arah Kebijakan Misi 3 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 328
Tabel 5.5 Tahapan Arah Kebijakan Misi 4 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 330
Tabel 5.6 Tahapan Arah Kebijakan Misi 5 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 331
Tabel 5.7 Tahapan Arah Kebijakan Misi 6 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 332
Tabel 5.8 Tahapan Arah Kebijakan Misi 7 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 334
Tabel 5.9 Tahapan Arah Kebijakan Misi 8 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 335
Tabel 5.10 Perumusan Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 338
Tabel 5.11 Arah Kebijakan Transformasi 355
Tabel 5.12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 376

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan 9
Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah .. 10
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung 19
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 24
Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 27
Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 31
Gambar 2.5 Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Penting 2014-2023 (persen) 33
Gambar 2.6 Pendapatan per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (dalam rupiah) 35
Gambar 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Belitung, Propinsi Banka Belitung dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (dalam %) 37
Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Belitung, Propinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 - 2023 41
Gambar 2.9 Capaian Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Nasional, Tahun 2019-2023 42
Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 44
Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 45
Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 46
Gambar 2.13 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam ribu rupiah) 47

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam ribu orang) 48
Gambar 2.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 49
Gambar 2.16 Posisi Relatif Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2023 49
Gambar 2.17 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 50
Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022 51
Gambar 2.19 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 52
Gambar 2.20 Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 56
Gambar 2.21 Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 57
Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 58
Gambar 2.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 59
Gambar 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (dalam jiwa) 60
Gambar 2.25 Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Belitung Tahun 2020-2023 63
Gambar 2.26 Jumlah Pernikahan Dini Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 64

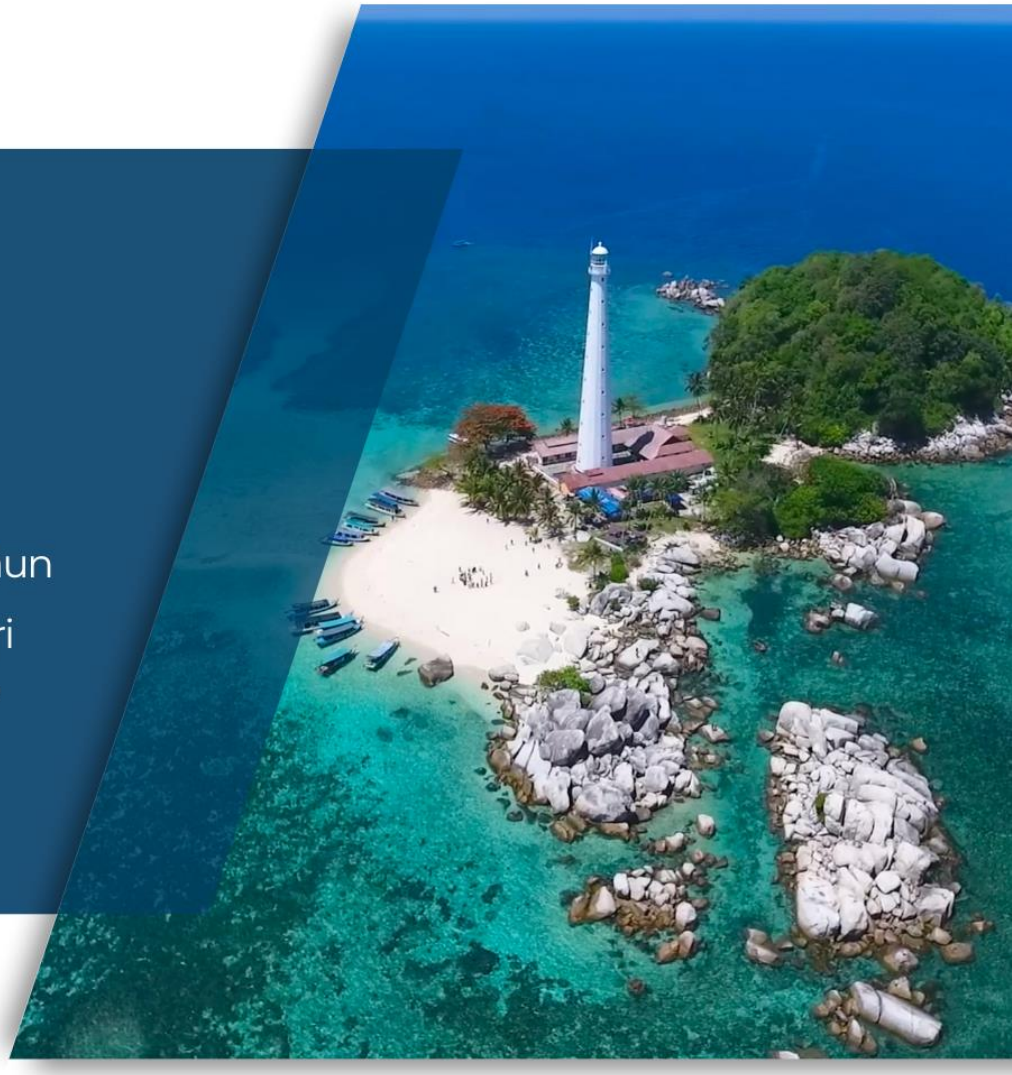
Gambar 2.27 Angka Kelahiran Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 69
Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 70
Gambar 2.29 Angka Kematian Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 71
Gambar 2.30 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 72
Gambar 2.31 Angka Kelahiran dan Ibu hamil Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 73
Gambar 2.32 Gizi Kurang di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 75
Gambar 2.33 Gizi Buruk di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 76
Gambar 2.34 Angka Stunting di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 77
Gambar 2.35 Angka Kesakitan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 78
Gambar 2.36 PHBS di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 80
Gambar 2.37 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 99
Gambar 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Menurut Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2020-2022 100
Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Menurut Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2019-2022 101
Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020-2023..... 104
Gambar 2.41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 105
Gambar 2.42 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 106
Gambar 2.43 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Keatas dengan Pendidikan SMA Ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 107
Gambar 2.44 Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023..... 107

Gambar 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 108
Gambar 2.46 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023 109
Gambar 2.47 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019-2023 110
Gambar 2.48 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 126
Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 142
Gambar 2.50 Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 144
Gambar 2.51 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Tambang di Kabupaten Belitung Tahun 2019 -2023 159
Gambar 2.52 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Tambang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023 159
Gambar 2.53 Peta Bahaya Banjir 186
Gambar 2.54 Peta Bahaya Kekeringan 187
Gambar 2.55 Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Belitung Tahun 2018-2021 195
Gambar 2.56 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang ditamatkan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 199
Gambar 2.57 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung 200
Gambar 2.58 Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (Persen) 215
Gambar 2.59 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 . 216
Gambar 2.60 PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS 232
Gambar 2.61 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG 233
Gambar 2.62 PETA RENCANA POLA RUANG 234
Gambar 2.63 Tema Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung 236

Gambar 4.1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Belitung dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 311
Gambar 5.1 Pentahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Belitung 320
Gambar 5.2 Misi 1 Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas 324
Gambar 5.3 Misi 2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing 326
Gambar 5.4 Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat 328
Gambar 5.5 Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas Daerah 329
Gambar 5.6 Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan 331
Gambar 5.7 Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 332
Gambar 5.8 Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan 333
Gambar 5.9 Misi 8 Kesinambungan Pembangunan 335

BAB I
PENDAHULUAN

"Penyusunan Ranwal RPJPD Merupakan Amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017"



Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat daerah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional.

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Dokumen RPJPD yang merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah nantinya disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 sampai dengan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *Bottom-Up* dengan *Top-Down Planning*. Adapun secara substansi,

penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan berikutnya yaitu integratif, menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam Upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Selanjutnya pendekatan spasial, yaitu mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Undang-Undang 25 Tahun 2004 pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selain itu, pasal 263 ayat 2 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Pengaturan tentang penyusunan RPJPD bagi daerah lebih detail dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Pasal 16 ayat 1 Permendagri 86/2017 tersebut dijelaskan bahwa RPJPD harus disusun dengan berbagai tahapan. Mulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.

RPJPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan

dapat menjadi inspirasi bagi para calon Kepala Daerah untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2023 berlandaskan pada beberapa dasar hukum, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

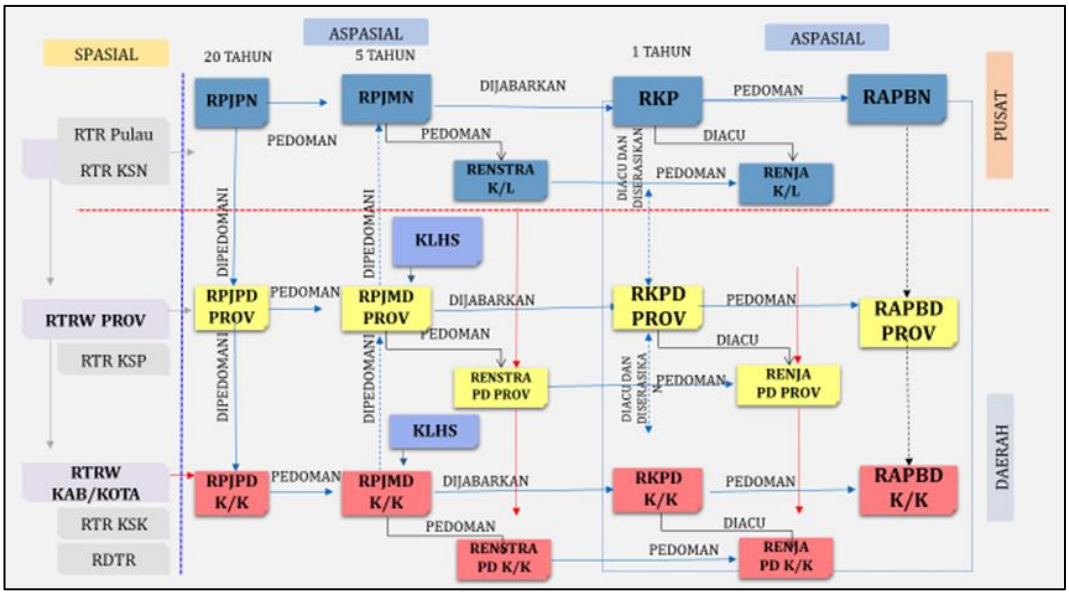
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana terlah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);

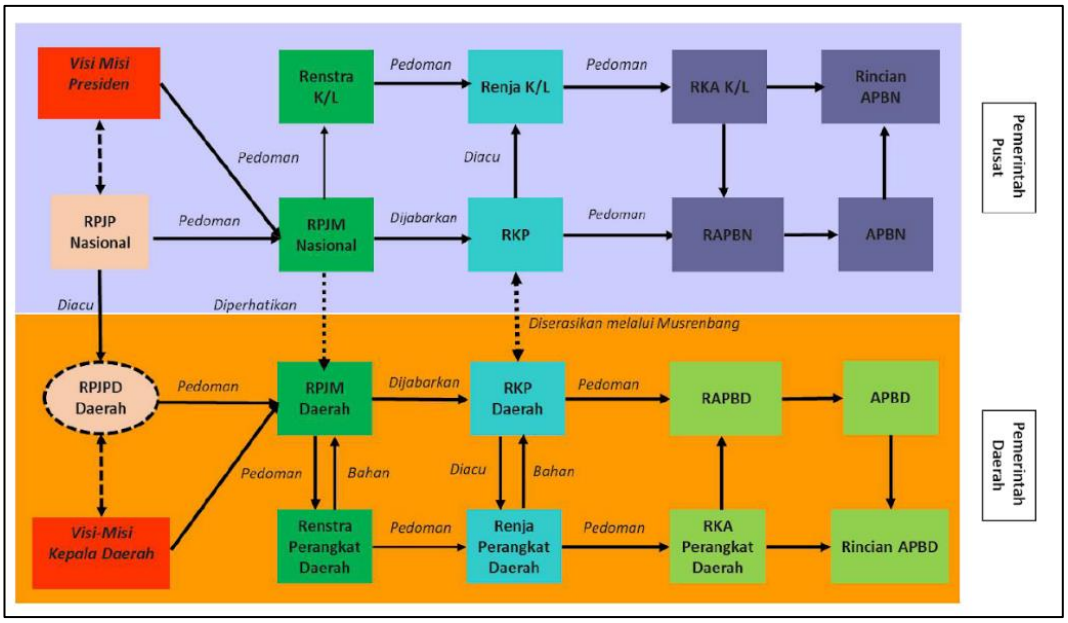
1.3 Hubungan Antar Dokumen

Merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota, diamanatkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. RPJPD Kabupaten Belitung merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah. Dalam proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.



Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.



Gambar 1.2 Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah

Sumber : diolah dari UU Nomor 25 Tahun 2004

Dalam penyusunannya, RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, serta memperhatikan RTRW pada level nasional, provinsi maupun Kabupaten Belitung. RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 (dua puluh) tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya. RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Belitung pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya, RPJMD dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut RKPD yang menjadi acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Dengan kata lain, RPJMD

merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang dan menjadi dasar rencana jangka pendek sampai ke penganggarannya.

Penyusunan dokumen RPJPD daerah juga memperhatikan dokumen RPJPD daerah lainnya, dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang daerah dengan daerah-daerah lain, terutama yang berbatasan. Hasil telaah RPJPD daerah lainnya dimaksudkan sebagai sumber informasi dalam hal identifikasi isu-isu strategis. Telaah dokumen RPJPD daerah lain dilakukan karena adanya persamaan kepentingan/tujuan serta upaya strategis yang harus disinergikan; adanya persamaan permasalahan pembangunan yang memerlukan upaya pemecahan bersama; adanya agenda pembangunan kewilayahan yang menentukan kewenangan bersama; serta adanya kebijakan pemerintah yang menetapkan suatu daerah sebagai bagian dari kesatuan wilayah/kawasan pembangunan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 dengan maksud menyiapkan dokumen pembangunan untuk 20 tahun mendatang dan sekaligus menjadi arahan serta pedoman penyelenggaraan pembangunan daerah oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Belitung.

1.4.1 Maksud

Maksud dari penyusunan dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 adalah untuk menyediakan sebuah dokumen awal perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dan arah penyelenggaraan Pembangunan dan pemerintahan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan.

Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 akan menjadi landasan dokumen perencanaan daerah RPJMD, RKPD, maupun dokumen perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 yaitu merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok jangka panjang Kabupaten Belitung yang berpedoman pada RPJP Nasional dan RTRW, dalam rangka :

1. Menciptakan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah Kabupaten Belitung dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan; serta
4. Mewujudkan upaya pencapaian kesejahteraan bersama dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rancangan RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 disusun berdasarkan sistematika yang tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan secara ringkas mengenai isi dokumen secara keseluruhan memuat sekurang-kurangnya latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran umum tentang kondisi Kabupaten Belitung sebagai salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan RPJPD yang memuat sekurang-kurangnya:

1. Aspek Geografi dan Demografi
   a. Geografi

      Menjelaskan peran startegis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.
   b. Demografi

      Menjelaskan karakteristik demografi daerah.
2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
   a. Kesejahteraan Ekonomi

      Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
   b. Kesejahteraan Sosial Budaya

      Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
3. Aspek Daya Saing
   a. Daya Saing Ekonomi Daerah

      Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
   b. Daya Saing SDM

      Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
   c. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

      Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
   d. Daya Saing Iklim Investasi

      Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
4. Aspek Pelayanan Umum

   Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

   Menyajikan hasil capaian pembangunan dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 untuk penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

   Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini sekurang-kurangnya memuat:

   a. Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua.
   b. Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, dan pendidikan.

7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

   Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Bab ini menjelaskan hasil olahan data kinerja dan informasi pembangunan lainnya yang memuat sekurang-kurangnya.

1. Permasalahan

   Menguraikan tentang permasalahan utama yang merupakan faktor penghambat yang mengikat dan apabila ditangani dapat melepaskan potensi daerah yang tertahan secara signifikan, yang disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.

2. Isu Strategis Daerah

   Memuat kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. Lebih jauh, bagian ini menguraikan isu-isu strategis daerah yang berdampak luas dan memiliki konsekuensi jauh ke depan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan biaya yang makin besar.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjabarkan visi dan misi daerah berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang secara terukur dan spesifik memuat sekurang-kurangnya:

1. Visi daerah Tahun 2025-2045

   Visi daerah adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan Tahun 2045.
2. Misi daerah Tahun 2025-2045

   Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Bab ini memuat tentang arah kebijakan pembangunan jangka panjang untuk menjelaskan keterhubungan Sasaran Pokok dengan pentahapan pembangunan dilakukan pada tiap lima tahun selama 4 periode. Sasaran Pokok merupakan kuantifikasi (penargetan dengan indikator kinerja) visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 .

Memuat sekurang-kurangnya :

1. Arah Kebijakan

   Arah kebijakan ini merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah meliputi:

   a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029;

b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034;
c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039;
d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045.

Yang sejalan dengan arah kebijakan dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah.

2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Sasaran pokok RPJPD Provinsi Tahun 2025-2045 memuat 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045 memuat Arah Pembangunan, Arah Kebijakan Transformasi Daerah, dan Indikator Utama Pembangunan, sesuai dengan karakteristik daerah yang mencerminkan keotonomian daerah.

BAB VI PENUTUP

Bab ini memuat salah satunya tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui menajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran Pembangunan di daerah.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

"Gambaran umum dan kondisi daerah menggambarkan kondisi capaian pembangunan Kabupaten Belitung selama 20 tahun terakhir"



Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

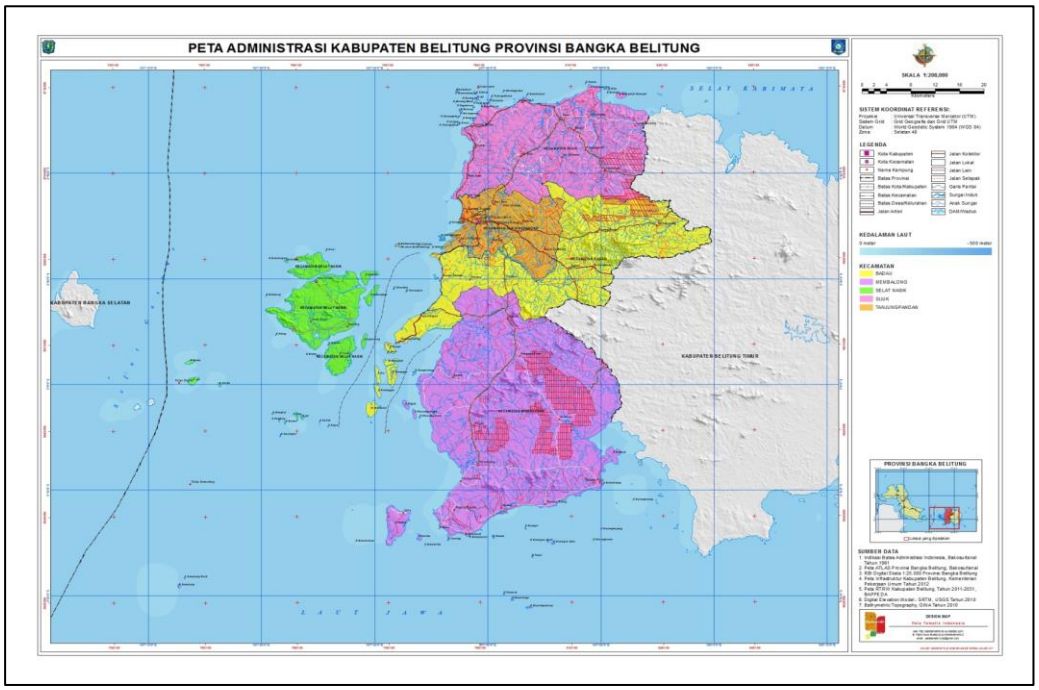
Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Belitung dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing daerah. Uraian dari aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Luas dan Batas Administrasi

Kabupaten Belitung merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan provinsi ke-31 di Indonesia. Kabupaten Belitung dengan Ibu Kota di Tanjung Pandan dengan cakupan wilayah meliputi 5 kecamatan dan Kabupaten Belitung Timur dengan Manggar sebagai ibukotanya dengan cakupan wilayah meliputi 4 (empat) kecamatan. Secara geografis, Kabupaten Belitung memiliki luas 229.369 ha atau 2.293,69 km^2 dan terletak pada 107°08'-107°58' BT dan 02°30'-03°15' LS serta berbatasan dengan :

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Gaspar
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Belitung Timur



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Belitung

Wilayah Kabupaten Belitung sebagian besar berada di Pulau Belitung dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil di sekitarnya. Dengan kondisi geografis kepulauan, Kabupaten belitung terbagi menjadi 5 kecamatan dengan 4 kecamatan di Pulau Belitung dan 1 kecamatan di Pulau Mendanau. Adapun kecamatan yang terdapat di Pulau Belitung ialah Kecamatan Badau berada di tengah Pulau Belitung, Kecamatan Membalong berada di bagian selatan, Kecamatan Sijuk berada di sebelah utara dan Kecamatan Tanjung Pandan berada di sebelah barat dan menjadi ibu kota Kabupaten Belitung. Sedangkan terdapat Kecamatan Selat Nasik yang berada di Pulau Mendanau. Hingga saat ini, Kabupaten Belitung terdiri dari 49 desa/ kelurahan yang tersebar di lima kecamatan.

Tabel 2.1 Jumlah Desa/ Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Membalong	12	12	12	12	12
Tanjung Pandan	16	16	16	16	16

Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
Badau	7	7	7	7	7
Sijuk	10	10	10	10	10
Selat Nasik	4	4	4	4	4
Belitung	**49**	**49**	**49**	**49**	**49**

Sumber: Kabupaten Belitung Dalam Angka, 2024

2.1.2 Luas Wilayah, Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Belitung memiliki luas wilayah sebesar 229.369 ha atau 2.293,69 km^2. Luasan ini hampir 13,97% dari luasan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Secara topografi, Kabupaten Belitung merupakan kabupaten kepulauan dengan satu pulau besar yaitu Pulau Belitung dan dikelilingi dengan pulau-pulau kecil yang berjumlah 163 pulau. Dengan topografi kepulauan, Kabupaten Belitung memiliki garis pantai yang panjang serta teluk dan tanjung yang indah. Pantai yang terkenal sebagai daerah wisata diantaranya Pantai Tanjung Tinggi, Pantai Tanjung Kelayang dan Pantai Lengkuas. Kondisi kepulauan ini kemudian menciptakan topografi yang bervariasi dengan perairan yang memisahkan satu pulau dengan pulau lainnya. Daratan terbesar di Kabupaten Belitung berada di pulau utama dengan struktur berbukit-bukit di beberapa wilayah dengan kemiringan sekitar 500 mdpl dengan puncak tertinggi di Gunung Tajam. Perbukitan ini menciptakan relief yang dapat mempengaruhi tata air dan pertanian lokal.

2.1.3 Geologi dan Tanah

Kabupaten Belitung terletak di wilayah geologi yang dikenal sebagai Cekungan Bangka, yang merupakan bagian dari Sabuk Lipatan Sunda. Cekungan ini memiliki berbagai macam litologi, termasuk batuan sedimen seperti batu kapur, batu pasir, dan lempung. Keadaan tanah di daratan Kabupaten Belitung pada umumnya didominasi oleh kuarsa dan pasir, batuan aluvial dan batuan granit. Menurut letaknya, batuan kuarsa dan pasir tersebar secara merata di seluruh wilayah kecamatan di

Kabupaten Belitung dengan luas mencapai 266.865 ha atau 56,98 persen dari luas Kabupaten Belitung. Untuk batuan aluvial dapat ditemukan hampir di seluruh wilayah kecamatan, kecuali Kecamatan Selat Nasik dengan luas total seluruhnya mencapai 133,5 Km2 atau 5,82 persen dari total luas wilayah Belitung. Terdapat beberapa jenis mineral diantaranya timah dan granit yang terdapat di sebagian wilayah.

2.1.4 Hidrologi

Kabupaten Belitung memiliki sumber daya perairan yang bervariasi mengingat kabupaten ini merupakan daerah kepulauan. Sumber air didapatkan dari sungai, danau, air laut, sumur serta air tanah. Secara hilir, Kabupaten Belitung terdiri atas beberapa daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Buding di sebelah utara, DAS Pala dan Kembiri di sebelah selatan serta DAS Brang dan Cerucuk di sebelah barat. Sungai-sungai yang ada berhulu di daerah pegunungan dan mengalir ke daerah pantai, sedangkan daerah aliran sungai mempunyai pola aliran sungai yang berbentuk seperti pohon.

2.1.5 Klimatologi

Kabupaten Belitung memiliki iklim tropis dengan pengaruh musim hujan dan musim kemarau yang khas. Iklim cenderung basah dengan curah hujan 0,60 mm sampai 726,60 mm. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun, dengan puncak curah hujan selama musim hujan. Namun, ada variasi spasial dalam curah hujan, dengan beberapa wilayah mungkin mengalami hujan lebih banyak daripada yang lain. Kondisi ini akan mempengaruhi sektor pertanian, ketersediaan air, dan risiko banjir. Dengan iklim tropis dan berada di daerah kepulauan, suhu di Kabupaten Belitung cenderung panas dengan rata-rata 26,70°c dan suhu maksimum 33,80°c serta suhu minimum 23,00°c. Dilihat dari kelembaban udara, Kabupaten Belitung memiliki kelembaban udara yang cenderung tinggi dengan rata-rata 90,70%, minimum 62,0% dan maksimum 100%.

2.1.6 Potensi Pengembangan Wilayah

Kegiatan pembangunan daerah tidak terlepas dari proses perencanaan yang holistik dengan melihat berbagai aspek yang salah satunya ialah potensi pengembangan wilayah. Kabupaten Belitung dengan kondisi geografis, geologi dan topografi di atas memiliki beberapa potensi yang dapat mendukung pengembangan berbagai sektor. Dilihat dari luasnya, pertanian di Kabupaten Belitung memiliki potensi seluas 74.095 Ha dengan produk padi, hortikultura dan palawija. Lahan padi sawah tahun 2023 terluas berada di Kecamatan Membalong, yaitu 117 hektar dengan luas panen 127 Ha dan produksi padi sebanyak 410,59 ton. Sedangkan untuk komoditi sayur- sayuran tahun 2023 adalah cabai dan mentimun yaitu mencapai 11.092 kuintal dan 10.105 kuintal dan produksi buah – buahan tahun 2023 adalah komoditi Pepaya dan Durian yaitu 64.698 dan 13.608 kuintal sedangkan untuk produksi perkebunan pada tahun 2023 areal tanamam perkebunan terluas adalah komoditi lada dan kelapa sawit yaitu 8.309,80 Hektar dan 7.033,70 Hektar produksi tanaman perkebunan terbanyak adalah Kelapa sawit dan Lada sebanyak 13.572,60 ton dan 3.885,00 ton. Luasan potensi pengembangan wilayah kedua adalah pertambangan yang memiliki potensi seluas 40.464 Ha. Tambang timah dan monasit menjadi komoditi utama di sektor pertambangan. Potensi pengembangan wilayah permukiman seluas 29.190 Ha dengan sebaran terbanyak di Kecamatan Tanjung Pandan. Sektor pariwisata memiliki luasan potensi pengembangan wilayah sebesar 11.602 Ha, disusul dengan sektor industri dengan 1.414 Ha, sektor perikanan dengan luasan 429,48 Ha dan sisanya luasan wilayah peruntukan lainnya sebesar 298 Ha.2.1

2.1.7 Aspek Demografi

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat 2 yang dimaksud penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penduduk suatu negara atau daerah

bisa didefinisikan menjadi dua, yaitu orang yang tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut dan orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut (Bidarti, 2020). Dalam sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu.

Penduduk dalam suatu daerah dapat bertumbuh negatif maupun positif. Pertumbuhan pendudukan adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk di suatu wilayah pada masa yang akan datang. Dengan diketahui jumlah penduduk, maka akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk dalam aspek sosial, ekonomi maupun politik. Pertumbuhan penduduk mempengaruhi secara langsung upaya peningkatan mutu maupun pemanfaatan sumber daya manusia (Bidarti, 2020). Pertumbuhan penduduk juga akan berpengaruh terhadap kemampuan sumber daya alam untuk memberikan daya dukung dan daya tampung.

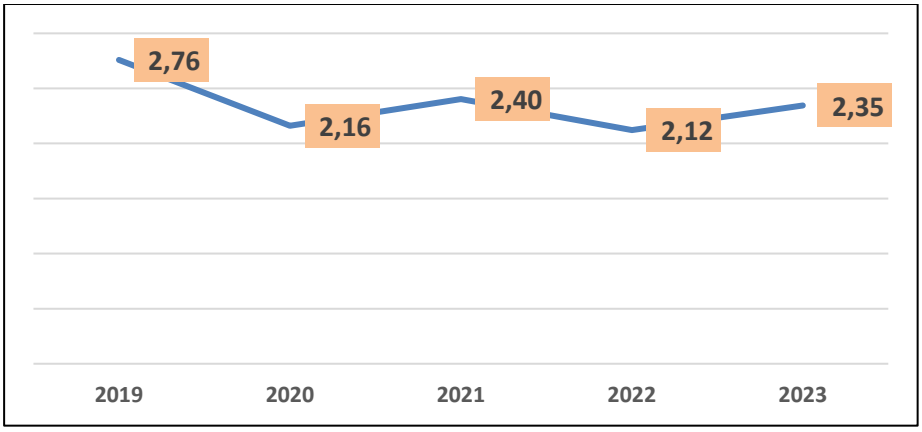
Berdasarkan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung tahun 2023 Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk sebesar 189.945 jiwa. Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung masih mendominasi dan lebih tinggi daripada perempuan. Namun demikian perbedaannya tidak terlalu besar, hanya selisih 1,65 persen dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 96.541 jiwa (50,83 persen) dan penduduk perempuan sebesar 93.404 jiwa (49,17 persen) sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jenis Kelamin		Total	Sex Ratio
		Laki-laki	Perempuan		
1.	2019	88.177	85.540	173.717	103,08
2.	2020	90.176	87.296	177.472	103,30
3.	2021	92.259	89.476	181.735	103,11
4.	2022	94.225	91.366	185.591	103,13
5.	2023	96.541	93.404	189.945	103,36

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung cenderung fluktuatif dengan laju pertumbuhan 2,76% pada tahun 2019 yang mengalami penurunan sampai tahun 2020, yaitu 2,16%. Selanjutnya mengalami kenaikan pada tahun 2021, yaitu 2,40 persen dan pada tahun 2022 turun kembali menjadi 2,12 persen. Kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan kembali, yaitu 2,35%. Selain itu jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Belitung lebih banyak daripada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin/*sex ratio* lebih dari 100 persen. Artinya terdapat 103 jiwa penduduk laki-laki dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan. Selain itu kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung selalu mengalami

peningkatan dalam rentang lima tahun terakhir dengan rata-rata kenaikan sebesar 2,36 persen tiap tahunnya.

Adapun kepadatan penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2023 rata-rata mencapai 82,81 jiwa/km^2 dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Tanjungpandan (285,38 jiwa/km^2) dan kepadatan terendah adalah di Kecamatan Membalong (29,77 jiwa/km2). Jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 56 tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka Kecamatan Tanjungpandan termasuk dalam kategori "cukup padat" karena berada di kisaran 251 – 400 km^2. Sementara itu Kecamatan Membalong, Kecamatan Badau dan Kecamatan Selat Nasik masuk dalam kategori "tidak padat" karena kurang dari 50 jiwa per km^2. Hanya Kecamatan Sijuk yang berada dalam kategori " kurang padat" dengan kepadatan 79,72 jiwa per km^2.

Tabel 2.3 Kepadatan Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Luas Daerah (km^2)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km^2)
1	Tanjung Pandan	16	378,45	285,38
2	Membalong	12	909,55	29,77
3	Selat Nasik	4	133,50	46,76
4	Sijuk	10	413,99	79,72
5	Badau	7	458,20	34,08
Jumlah		**49**	**2.293,69**	**82,81**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2024

Penduduk Kabupaten Belitung tersebar di 49 Desa/Kelurahan, kondisi persebaran penduduk di Kabupaten Belitung masih belum merata, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk disetiap kecamatan sangat bervariasi, hal ini disebabkan oleh penyebaran penduduk yang tidak merata dan luas wilayah kecamatan yang berbeda-beda, namun permukiman penduduk terpadat terkonsentrasi di Tanjung Pandan, Hal ini terjadi karena Tanjungpandan merupakan ibu kota Kabupaten dan merupakan pusat perdagangan, perhotelan, rumah

makan/restoran dan juga pusat pendidikan. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Belitung adalah kecamatan Tanjungpandan sebesar 56,86 persen, dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Belitung secara keseluruhan, sedangkan kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Selat Nasik sebesar 3,29 persen.

Tabel 2.4 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023 Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Tanjung Pandan	102,02
2	Membalong	105,47
3	Selat Nasik	105,84
4	Sijuk	104,31
5	Badau	106,11
Belitung		**103,36**

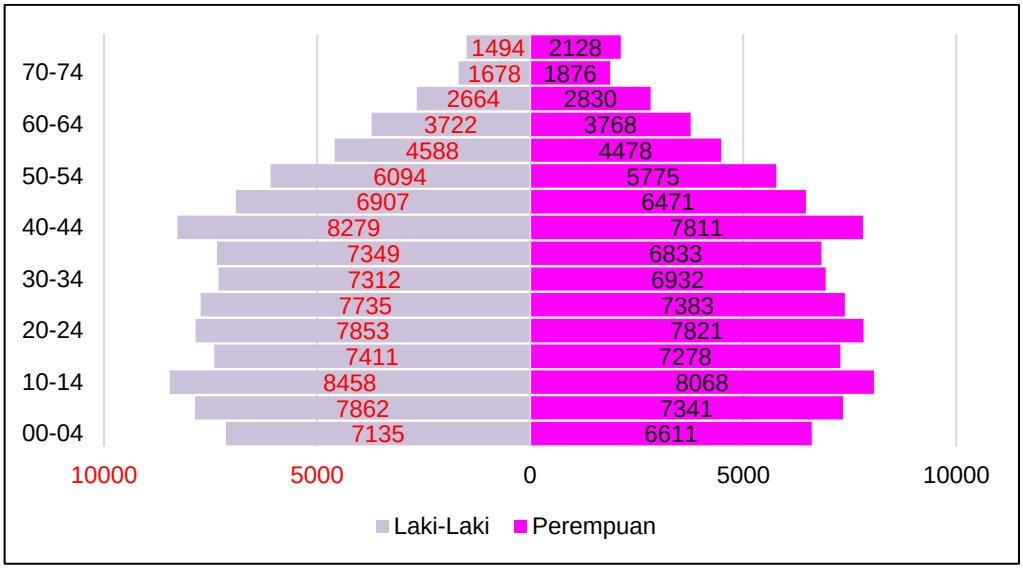
Sumber : Belitung Dalam Angka, 2024

Pada Tabel 2.4 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan di setiap kecamatan dengan rasio jenis kelamin antara 102,02 sampai 106,11. Adapun Kecamatan Selat Nasik berada di pulau tersendiri yang terpisah dari Pulau Belitung dan dengan luas wilayah yang juga tidak terlalu besar.

Adapun komposisi penduduk Kabupaten Belitung sebagian besar didominasi oleh kelompok muda, tingkat kelahiran bayi yang tinggi, kelompok balita dan remaja masih sangat besar serta pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Kabupaten Belitung memiliki penduduk usia sekolah dan usia produktif yang tinggi. Dengan demikian. terdapat implikasi terhadap kebijakan penyediaan layanan pendidikan yang memadai sekaligus didukung penyediaan lapangan kerja segala sektor. Struktur penduduk penting untuk diketahui sebagai bahan menentukan prioritas program dalam

memaksimalkan penyediaan layanan dasar dan ketenagakerjaan. Berdasarkan usianya pada tahun 2022 proporsi usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,59 persen. usia muda (0-14 tahun) ada 22,37 persen. dan usia lanjut (65 tahun ke atas) sebesar 7,03 persen.

Apabila ditinjau dari piramida penduduk tahun 2023. Kabupaten Belitung memiliki bentuk yang cenderung rata mulai dari kelompok usia 44 tahun ke bawah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan struktur penduduk kabupaten Belitung dimana tingkat kelahiran mulai menurun walau cenderung melambat. Gambaran dari karakteristik penduduk ini menyimpan potensi usia produktif yang tinggi, sebagaimana disajikan dalam Gambar berikut.



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2023

Grafik di atas memperlihatkan bahwa penduduk berusia 10-14 tahun baik laki-laki maupun perempuan memiliki jumlah terbesar dari total penduduk atau 8,70 persen. Selain itu proporsi usia penduduk produktif mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk usia muda. Meskipun sudah mengarah ke bentuk yang lebih stasioner, piramida penduduk Kabupaten Belitung tahun 2023 masih cenderung berbentuk lebar di bawah (ekspansif). Sehingga dapat

digolongkan sebagai piramida penduduk muda yang dapat diartikan bahwa penduduk usia produktif atau usia kerja dan usia muda masih mendominasi pertumbuhan penduduk di Kabupaten Belitung. Dominasi jenis kelamin laki-laki tampak pada hampir semua golongan umur kecuali pada kelompok usia tua atau >65 tahun yang menandakan bahwa perempuan cenderung hidup lebih panjang dibandingkan laki-laki di Kabupaten Belitung. Adapun cekungan pada kelompok usia 15-19 tahun mengindikasikan bahwa terdapat migrasi keluar daerah untuk menempuh pendidikan.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan aspek yang menunjukkan kondisi kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pada umumnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan memberikan perhatian pada tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Belitung akan dapat melakukan perencanaan yang baik dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Aspek kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan pembangunan daerah ditunjukkan dalam berbagai kondisi terkait gambaran perekonomian dan kondisi kualitas sumber daya manusia di suatu daerah. Pada bagian ini disajikan gambaran umum kondisi perekonomian Kabupaten Belitung berupa PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, tingkat inflasi, dan ketimpangan penghasilan yang ada di masyarakat Kabupaten Belitung.

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Struktur Ekonomi Wilayah

Tabel 2.5 Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (Rp 000)

No	Sektor	2019		2020		2021		2022		2023	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	1.657.637,30	25,50	1.781.709,20	28,05	1.855.831,10	27,66	1.859.482,10	26,21	1.917,21	25,56
2.	Pertambangan dan Penggalian	546.868,10	8,41	484.231,10	7,62	508.719,30	7,58	504.005,40	7,11	502,14	6,69
3.	Industri Pengolahan	733.657,00	11,29	734.688,30	11,56	770.095,50	11,48	839.826,80	11,84	881,17	11.75
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	9.817,10	0,15	9.724,60	0,15	10.549,00	0,16	10.124,20	0,14	10,38	0,14
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah	1.890,40	0,03	2.053,50	0,03	2.163,50	0,03	2.266,00	0,03	2,28	0,03
6.	Konstruksi	832.641,80	12,81	798.606,40	12,57	839.436,60	12,51	832.058,80	11,73	904,38	12,06
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	726.347,90	11,17	661.396,80	10,41	700.944,30	10,45	798.570,10	11,26	814,80	10,86
8.	Transportasi dan Pergudangan	399.198,90	6,14	316.707,30	4,99	343.383,50	5,12	467.912,20	6,60	516,97	6.89
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makanan	231.508,70	3,56	206.872,00	3,26	229.162,10	3,42	261.608,90	3,69	288,37	3,84
10.	Informasi dan Komunikasi	244.714,10	3,76	285.403,80	4,49	308.691,70	4,60	341.061,00	4,81	388,69	5,18
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	154.133,70	2,37	142.334,20	2,24	155.015,80	2,31	164.358,30	2,32	189,46	2,53
12.	Real Estat	208.538,50	3,21	211.003,30	3,32	221.950,90	3,31	234.106,40	3,30	244,05	3,25
13.	Jasa Perusahaan	21.955,10	0,34	17.505,10	0,28	18.468,50	0,28	22.588,70	0,32	24,62	0,33
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan, dan Jaminan Sosial Wajib	418.570,00	6,44	398.269,00	6,27	420.650,50	6,27	416.640,90	5,87	442,99	5,91
15.	Jasa Pendidikan	129.019,40	1,98	124.854,10	1,97	127.957,40	1,91	131.686,30	1,86	146,22	1,95
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130.008,40	2,00	131.366,60	2,07	148.830,70	2,22	153.016,20	2,16	167,08	2,23
17.	Jasa Lainnya	53.910,80	0,83	46.133,30	0,73	48.156,30	0,72	54.043,00	0,76	60,18	0,80
	PDRB	6.500.417,20	100	6.352.858,60	100	6.710.006,70	100	7.093.355,30	100	7.500,99	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

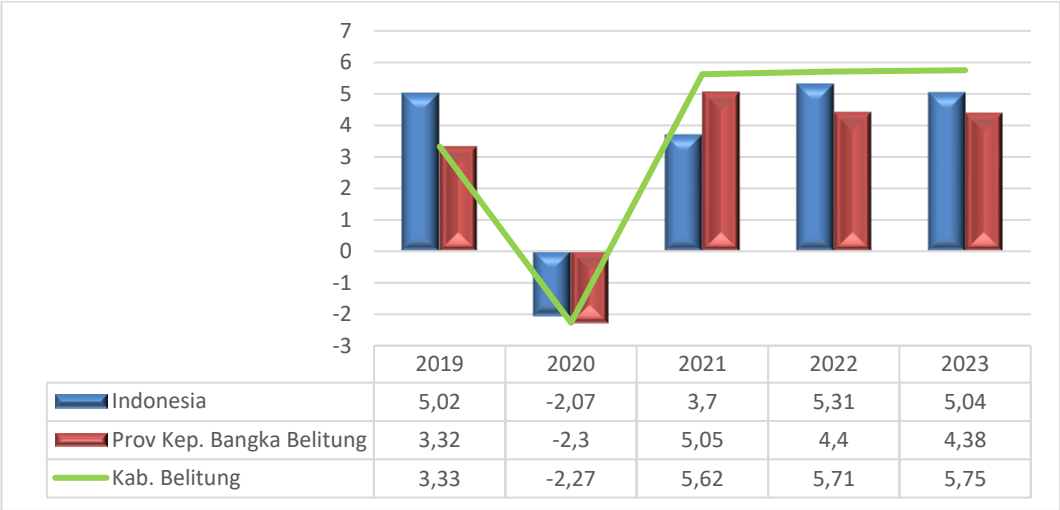
Berdasarkan data yang disajikan di dalam tabel di atas, kontribusi sektor terbesar terhadap PDRB Kabupaten Belitung berasal dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan selama 5 (lima) tahun ke belakang yaitu sebesar 25,50% pada tahun 2019 dan meningkat hingga 25,56% pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan mata pencaharian sebagian

besar penduduk Belitung yang merupakan petani dan nelayan sehingga sektor tersebut adalah penggerak utama PDRB Kabupaten Belitung. Terlihat sektor pertambangan dan penggalian, meskipun masih menjadi primadona di berbagai lokasi, bukan merupakan kontributor terbesar bagi PDRB Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir yang hanya menyumbang angka 8,41% pada tahun 2019 dan menunjukkan penurunan selama lima tahun menjadi 6,69% pada tahun 2023.

Kontributor PDRB terbanyak berikutnya adalah sektor industri dengan jumlah kontribusi sebesar 12,81% pada tahun 2019 dan cenderung stabil hingga tahun 2023 sebesar 12,06%. Hal ini menunjukkan Kabupaten Belitung melakukan pembangunan infrastruktur yang cenderung stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kontributor PDRB berikutnya yang menunjukkan kontribusi cukup besar adalah sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Belitung sebesar 11,29% pada tahun 2019 dan meningkat hingga tahun 2023 sebesar 11,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung memiliki industri pengolahan yang juga merupakan salah satu sektor primadona di Kabupaten Belitung.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pergerakan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi pada tabel di bawah dibedakan menjadi pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan secara Nasional dengan tujuan untuk membandingkan pertumbuhan ekonomi pada ketiga wilayah tersebut.



	2019	2020	2021	2022	2023
Indonesia	5,02	-2,07	3,7	5,31	5,04
Prov Kep. Bangka Belitung	3,32	-2,3	5,05	4,4	4,38
Kab. Belitung	3,33	-2,27	5,62	5,71	5,75

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan gambar di atas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung menunjukkan kinerja yang lebih baik dari laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Bangka Belitung dan nasional selama lima tahun terakhir. Meskipun laju pertumbuhan sempat menyentuh angka minus 2,27% pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19, namun segera membaik pada tahun berikutnya yang menunjukkan angka 5,62%. Tren pertumbuhan menunjukkan peningkatan positif pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,71% dan naik lagi 0,04 poin pada tahun 2023 menjadi 5,75% yang didukung dari sektor utama pertumbuhan dari pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pemulihan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung yang terbilang lebih baik dari Provinsi Bangka Belitung dan Nasional, terlihat dari sektor pertumbuhan yang dapat segera bangkit pasca pandemi Covid-19.

Tabel 2.6 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Sektor/ Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023 (dalam %)

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,73	7,48	4,16	0,19	3,11
2.	Pertambangan dan Penggalian	0,24	-11,45	5,06	-0.93	-0,37
3.	Industri Pengolahan	-6,38	0,14	4,82	9,05	4,92
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	-1,05	-0,94	8,48	-4,03	2,52
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,03	8,63	5,35	4,74	0,77
6.	Konstruksi	8,37	-4,09	5,11	-0,88	8,69
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,35	-8,54	5,98	14,25	1,75
8.	Transportasi dan Pergudangan	1,16	-20,66	8,42	36,27	10,49
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-10,64	10,77	14,16	10,23
10.	Informasi dan Komunikasi	15,71	16,63	8,16	10,49	13,97
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,60	-7,66	8,91	6,03	15,27
12.	Real Estat	2,91	1,18	5,19	5,48	4,25
13.	Jasa Perusahaan	2,77	-20,27	5,50	22,31	8,99
14.	Administrasi Pemerintahan	9,10	-4,85	5,62	-1,44	6,85
15.	Jasa Pendidikan	7,88	-3,23	2,49	2,91	11,04
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial	9,33	1,04	13,29	2,81	9,19
17.	Jasa lainnya	9,36	-14,43	4,39	12,22	11,35
T o t a l		**3,33**	**-2,27**	**5,62**	**5,71**	**5,75**

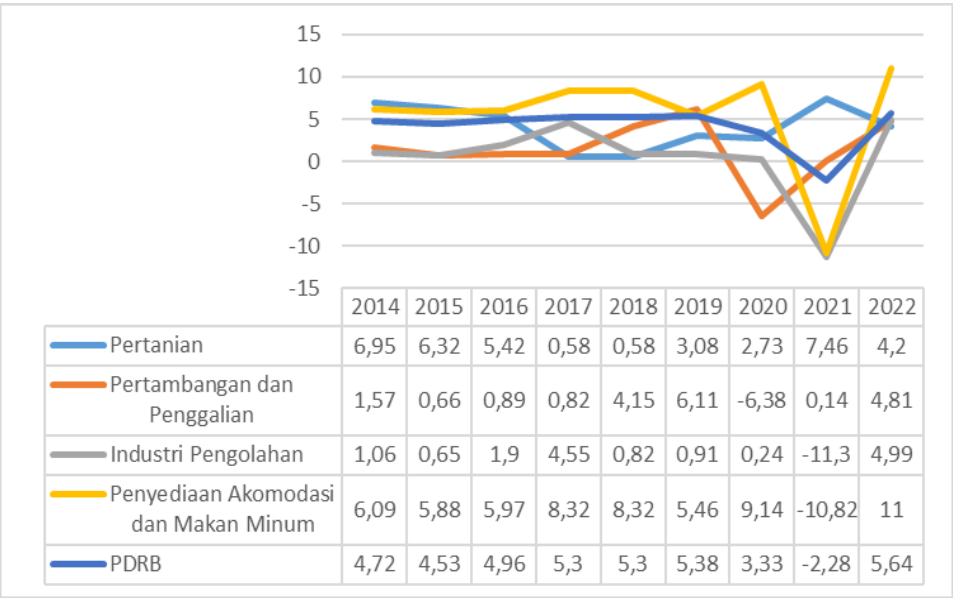
Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

Pada tahun 2019, sektor pertanian belum memberikan pertumbuhan yang signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung yaitu hanya sebesar 2,73%. Sektor pertanian menunjukkan pertumbuhan yang tinggi pada tahun 2020 menjadi 7,48% atau naik

sebesar 4,75% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan mulai merebaknya pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor perekonomian. Sehingga banyak orang kembali beralih profesi di sektor pertanian. Namun, pada tahun 2023, sektor pertanian diproyeksikan tumbuh sebesar 3,11%.

Selama lima tahun terakhir, sektor pertambangan dan penggalian tidak menunjukkan laju pertumbuhan yang signifikan dan menunjukkan tren yang terus menurun. Bahkan, sebagai akibat dari pandemi COVID-19, sektor ini mengalami penurunan sebesar 11,45% pada tahun 2020. Selain itu pada tahun 2023 pertumbuhan Sektor ini menurun sebesar 0,37%.

Sektor keuangan dan asuransi menunjukkan pertumbuhan sebesar 15,27% pada tahun 2023, diikuti oleh sektor informasi dan komunikasi sebesar 13,97%, yang menunjukkan tren positif dalam lima tahun terakhir. Sektor jasa lainnya juga menunjukkan pertumbuhan sebesar 13,95% pada tahun 2023.



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian	6,95	6,32	5,42	0,58	0,58	3,08	2,73	7,46	4,2
Pertambangan dan Penggalian	1,57	0,66	0,89	0,82	4,15	6,11	-6,38	0,14	4,81
Industri Pengolahan	1,06	0,65	1,9	4,55	0,82	0,91	0,24	-11,3	4,99
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,09	5,88	5,97	8,32	8,32	5,46	9,14	-10,82	11
PDRB	4,72	4,53	4,96	5,3	5,3	5,38	3,33	-2,28	5,64

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.5 Pertumbuhan Beberapa Sektor Ekonomi Penting 2014-2023 (persen)

Gambar diatas menyajikan pertumbuhan beberapa sektor penting di Belitung. Sebagaimana diuraikan di atas sektor pertanian masih

mendominasi sebagai sektor dengan penduduk terbanyak terlibat di dalamnya. Namun demikian dari angka pertumbuhan yang terjadi dapat dilihat bahwa sektor ini hanyalah sektor yang "tidak disukai dan hanya menjadi cadangan saat dibutuhkan". Ketika pertumbuhan sektor lain terpuruk maka pertumbuhan sektor pertanian meningkat dan sebaliknya. Fluktuasi ini mengirimkan pesan bahwa sektor pertanian akan dikerjakan ketika sektor lain tidak menguntungkan, namun ketika sektor lain tidak menguntungkan pelaku ekonomi (masyarakat) kembali ke sektor pertanian.

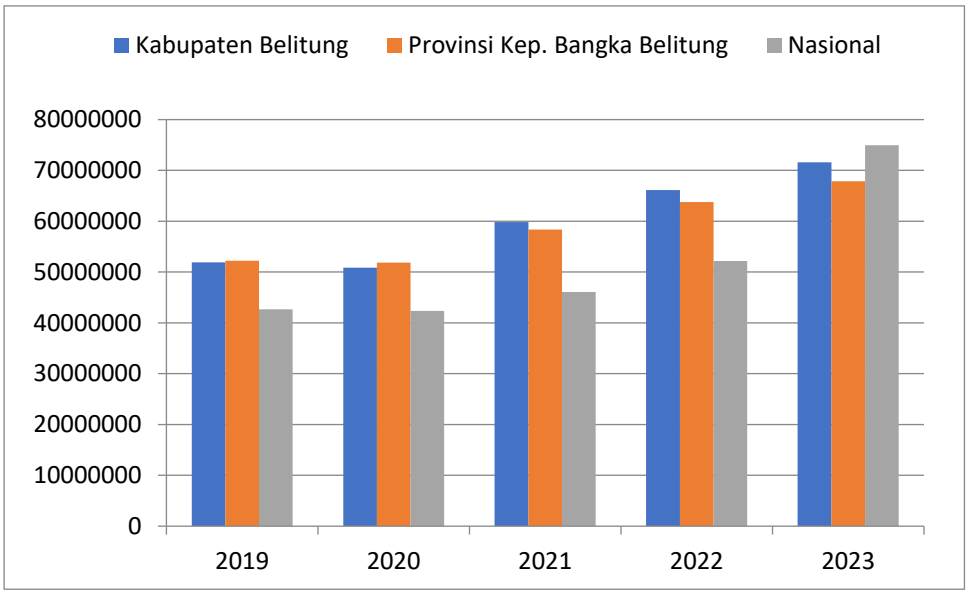
Sejak dicanangkan KEK Tanjung Kelayang pada tahun 2016, sektor pertambangan mengalami tren penurunan sejak 2019. Ini menunjukkan bahwa pertambangan tidak lagi merupakan komponen utama penyumbang nilai PDRB di Kabupaten Belitung.

Walaupun tren pertumbuhan industri pengolahan meningkat setiap tahunnya dari tahun 2019, penetapan KEK Tanjung Kelayang belum mampu meningkatkan peran industri dalam kontribusinya terhadap PDRB. Ini disebabkan oleh fakta bahwa industri pengolahan Belitung sebagian besar berfokus pada pengolahan bahan tambang, terutama tepung kaolin, sementara sektor yang berfokus pada pengolahan berbasis sumber daya lokal yang lestari masih kurang berkembang.

Salah satu sektor yang paling dekat untuk mengembangkan pariwisata sebuah wilayah adalah akomodasi dan makan minum. Sejak didirikannya KEK Pariwisata, sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lain. Pada tahun 2023, pertumbuhannya sebesar 10,23%, tetapi belum banyak meningkat jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB. Pada tahun 2023, kontribusi sektor ini terhadap PDRB adalah 3,84%. Dengan demikian, pariwisata Belitung saat ini berfokus pada pariwisata minat khusus.

C. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan rata-rata nilai tambah per orang di suatu wilayah geografis tertentu pada waktu kurun waktu tertentu pula. Angka pendapatan per kapita dapat menjadi cerminan rata-rata kesejahteraan penduduk di suatu wilayah. Kondisi pendapatan per kapita di Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir dibandingkan dengan angka Provinsi Bangka Belitung dan nasional disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Kabupaten Belitung	51.925.733	50.847.912	59.847.912	66.130.000	71.619.823
Provinsi Kep. Bangka Belitung	52.232.761	51.878.665	58.350.047	63.753.132	67.885.258
Nasional	42.681.403	42.358.683	46.099.491	52.185.216	74.964.701

Gambar 2.6 Pendapatan per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (dalam rupiah)

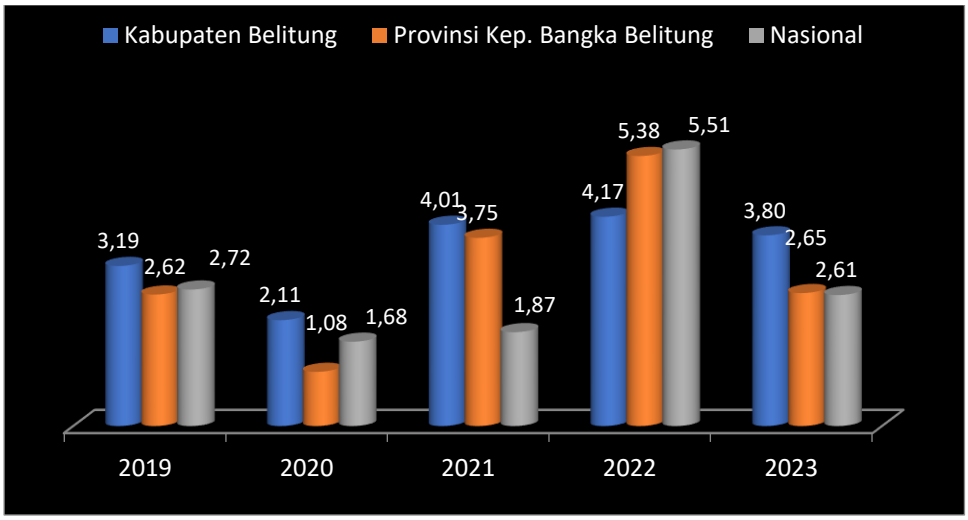
Pada tahun 2019, dan 2020 pendapatan per kapita Kabupaten Belitung masih berada di bawah Provinsi Bangka Belitung, namun lebih baik daripada pendapatan per kapita secara nasional. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2022, pendapatan per kapita Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang lebih baik dari pendapatan per kapita Provinsi Bangka Belitung dan nasional. Secara umum, tren pendapatan per kapita

Kabupaten Belitung mengalami tren positif sejak tahun 2019, namun mengalami penurun pada tahun 2020 sebagai akibat adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 hingga tahun 2023, trend pendapatan per kapita Kabupaten Belitung kembali menunjukkan trend yang positif yang menandakan pertumbuhan ekonomi yang juga positif di Kabupaten Belitung.

Kondisi endemik saat ini, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung menunjukkan trend yang positif dengan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung yang ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap menunjukkan trend positif pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung karena sektor tersebut merupakan pekerjaan terbanyak yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Belitung dan memiliki permintaan yang cenderung stabil.

D. Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang menunjukkan peningkatan harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam kurun waktu tertentu. Inflasi yang terjadi secara umum dapat menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi yang ada di Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir ditunjukkan dalam gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Belitung, Propinsi Banka Belitung dan Nasional Tahun 2019 - 2023 (dalam %)

Inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang cukup rendah di tahun 2019 sebesar 3,19% dan menurun menjadi 2,11 % pada tahun 2020 dan itu merupakan angka terendah selama lima tahun terakhir, namun meningkat menjadi 4,01% pada tahun 2021 dan menjadi 4,17% pada tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 3,80%. Secara umum inflasi di kabupaten Belitung menunjukkan kondisi yang lebih fluktuatif dibandingkan provinsi maupun nasional.

Fluktuasi inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung disebabkan adanya perubahan harga komoditi yang dipengaruhi oleh faktor cuaca maupun musim berlayar yang ada di Kabupaten Belitung. Kondisi yang bersumber dari komoditas yang beredar dipasaran luar daerah, diperparah dengan kondisi cuaca yang kurang baik sehingga menyebabkan pasokan komoditi menjadi berkurang. Hal ini salah satu penyebab yang menyebabkan kelangkaan pasokan sehingga harganya menjadi naik. Begitu pun dengan adanya momen perayaan atau peringatan tertentu di masyarakat, ditambah musim berlayar yang dapat mempengaruhi ketersediaan bahan makanan hasil laut dimana

kelangkaan hasil laut akan menyebabkan kenaikan harga bahan makanan tersebut.

Melihat perbandingan dengan provinsi dan nasional, pada tahun 2019-2021 tingkat inflasi di Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang lebih tinggi. Namun pada tahun 2022 tingkat inflasi di Kabupaten Belitung menunjukkan angka yang lebih rendah daripada tingkat inflasi yang ada secara provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan kenaikan harga-harga yang lebih tinggi di wilayah Kabupaten Belitung dibandingkan dengan kenaikan harga secara provinsi maupun secara nasional. Jika menilik dari tingkat inflasi yang ditunjukkan pada tingkat provinsi, Kabupaten Belitung masih memiliki peluang untuk memperbaiki tingkat inflasi agar lebih rendah mengingat kondisi geografis wilayah yang ada di Provinsi Bangka Belitung cenderung identik.

Pada tahun 2022, tingkat inflasi Kabupaten Belitung mencapai puncaknya selama lima tahun terakhir yaitu menyentuh angka 4,17%. Kemudian mengalami penurunan sebesar 3,80% pada tahun 2023. Tingkat inflasi di Kabupaten Belitung lebih tinggi jika melihat perbandingan dengan tingkat inflasi Provinsi Bangka Belitung dan Nasional. Hal ini menunjukkan kondisi kenaikan harga-harga di daerah yang memang mengalami kenaikan secara umum. Dalam kondisi ini, Pemerintah Daerah perlu melakukan intervensi pada komoditas yang memberikan andil besar pada inflasi. Termasuk Cabai, ayam, daging, bawang merah, bawang putih, ditambah faktor harga tiket pesawat yang turut menyumbang kenaikan inflasi.

Meskipun inflasi pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun tidak seluruhnya harga barang-barang konsumsi mengalami kenaikan pada tahun yang sama. Untuk melihat perbandingan harga-harga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Indeks Harga Konsumen Menurut Kelompok Pengeluaran Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Kelompok pengeluaran	Indeks Harga Konsumen				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Makanan minuman dan tembakau	153,68	108,89	116,82	115,80	121,40
2.	Pakaian dan alas kaki	136,49	103,19	103,25	104,28	105,65
3.	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	141,13	102,77	104,60	108,18	108,60
4.	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	n/a	105,32	106,55	107,83	109,13
5.	Kesehatan	146,22	105,14	107,23	106,99	108,93
6.	Transportasi	145,04	107,44	110,10	136,44	144,04
7.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	145,04	99,76	99,19	98,08	97,92
8.	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	162,72	119,21	119,48	125,32	125,66
9.	Pendidikan	162,72	110,62	112,64	117,32	123,95
10.	Penyediaan Makanan dan Minuman	151,16	107,39	113,24	125,82	127,56
11.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	n/a	108,70	112,41	116,80	119,34
12.	Umum	147,92	106,64	110,92	115,54	121,63

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

Indeks Harga Konsumen merupakan indikator perekonomian yang dapat digunakan untuk mengukur terjadinya inflasi atau deflasi di suatu periode tertentu. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terjadi peningkatan harga atas berbagai sektor yang ada sebagai akibat dari terjadinya inflasi di Kabupaten Belitung. Tren penurunan harga terjadi secara umum terhadap seluruh sektor pada tahun 2019 hingga tahun 2020. Sementara itu, peningkatan harga cenderung melambat pada tahun 2020 hingga tahun 2023 meskipun masih terjadi peningkatan harga pada hampir seluruh sektor. Sektor yang tidak mengalami peningkatan harga pada tahun 2020 sampai tahun 2023 adalah sektor Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan yang menunjukkan angka berturut 99,76% - 97,92%. Sektor yang mengalami tren peningkatan harga tertinggi berasal dari sektor Transportasi yang menunjukkan angka 136,44% pada tahun 2022 dan 144,04% pada tahun 2023. Meskipun indeks menunjukkan penurunan pada tahun 2020 hingga tahun 2023, sektor rekreasi, olahraga, dan budaya masih merupakan salah satu kontributor utama kenaikan indeks harga konsumen menurut pengeluaran di Kabupaten Belitung.

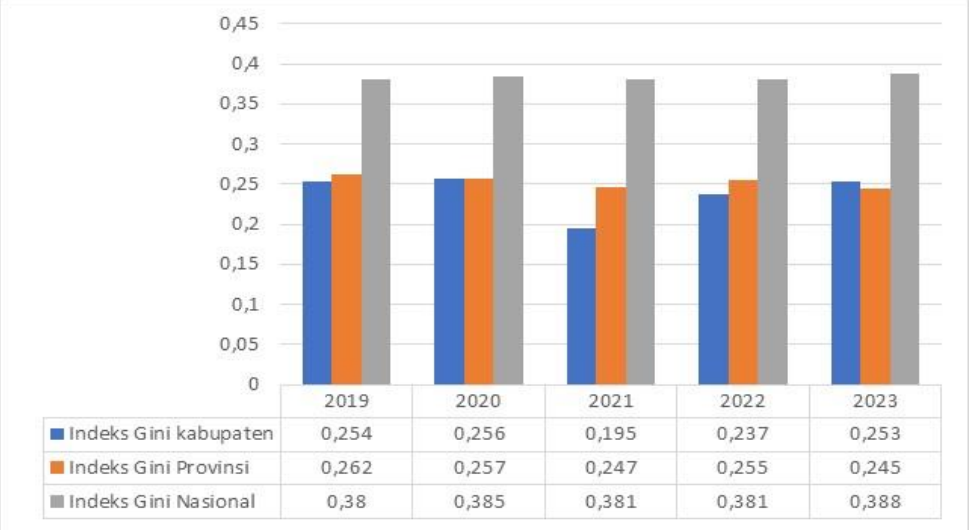
Selain itu, sektor yang menjadi penyumbang terbesar bagi indeks di atas adalah sektor transportasi yang menunjukkan angka 136,44%

pada tahun 2022 dan 144,04% pada tahun 2023, meningkat signifikan dari tahun 2021 dimana sebelumnya menunjukkan angka 110,10%. Sektor lain yang menunjukkan peningkatan pada tahun 2023 adalah sektor penyediaan makanan dan minuman yang meningkat dari 125,82% pada tahun 2022 menjadi 127,56% pada tahun 2023. Kenaikan harga transportasi pada tahun 2023 ini secara signifikan disebabkan oleh pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2022 seperti yang disebutkan di atas.

Peningkatan yang signifikan ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Belitung agar menyusun rencana pembangunan daerah yang menyentuh sektor-sektor tersebut untuk menekan angka inflasi yang terjadi di Kabupaten Belitung pada periode berikutnya. Faktor pasokan makanan dan minuman yang masih dipasok dari luar Kabupaten Belitung yang dapat menyumbang terjadi inflasi pada sektor tersebut juga perlu mendapatkan perhatian agar tidak terjadi kelangkaan sehingga dapat menciptakan harga yang cenderung stabil. Pulau Belitung yang masih sangat bergantung pada transportasi laut dan udara juga turut menyumbang angka inflasi dari sektor transportasi. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Belitung diharapkan dapat menyusun strategi pembangunan daerah untuk mengantisipasi permasalahan dari sektor transportasi tersebut.

E. Indeks Gini

Indeks gini adalah sebuah metrik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan atau kekayaan dalam suatu populasi. Perbandingan Indeks Gini di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional disajikan sebagai berikut:



	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Gini kabupaten	0,254	0,256	0,195	0,237	0,253
Indeks Gini Provinsi	0,262	0,257	0,247	0,255	0,245
Indeks Gini Nasional	0,38	0,385	0,381	0,381	0,388

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.8 Indeks Gini Kabupaten Belitung, Propinsi Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Berdasarkan gambar di atas, secara umum kesenjangan yang ada di Kabupaten Belitung tergolong rendah, artinya bahwa tingkat ketimpangan atau ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan atau kekayaan tidak terlalu tinggi. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Belitung masih memiliki ruang perbaikan dalam pemerataan pendapatan dengan mengurangi kesenjangan pendapatan dan tentunya juga meningkatkan tingkat partisipasi angkatan kerja.

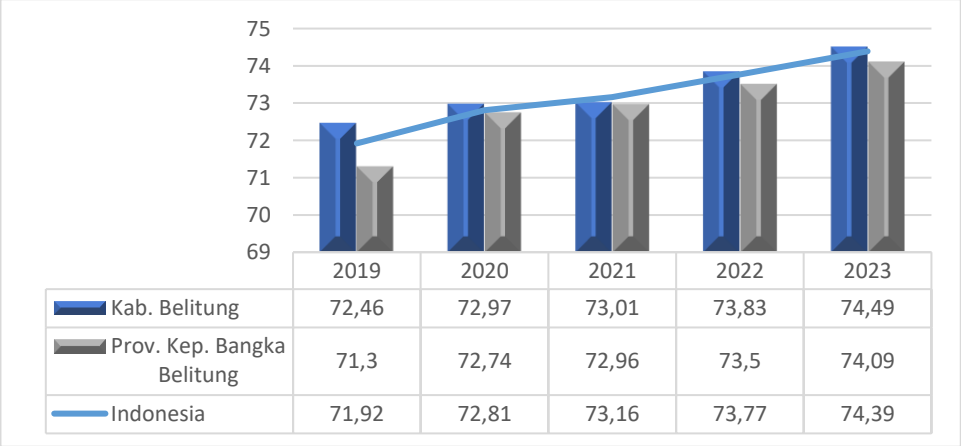
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

A. Indeks Pembangunan Manusia

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuan mereka menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan suatu negara atau daerah, bukan pertumbuhan ekonomi (UNDP 2022; Hamzah, Risqiani, & Sofilda, 2012). Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia (suatu daerah) berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup masyarakat. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, mencakup (1) umur panjang dan hidup

sehat, (2) pengetahuan (pendidikan), dan (3) standar hidup layak. Ketiga dimensi ini memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Khususnya dimensi pengetahuan, dimensi pengetahuan ini diukur melalui tingkat pendidikan yaitu menggunakan gabungan indikator Harapan Lama Sekolah (*expected years of schooling*) dan Rata-rata Lama Sekolah (*mean years of schooling*) (BPS, 2022).

IPM Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 adalah sebesar 74,49 dengan kenaikan 0,66 poin dari capaian tahun sebelumnya. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung meningkat sebesar 0,77 poin. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung berada pada kelompok status pembangunan manusia "tinggi". Nilai IPM Kabupaten Belitung juga berada diatas nilai IPM provinsi dan nasional. Pada tahun 2023 Kabupaten Belitung menempati peringkat ke-2 IPM tertinggi dari 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu dengan capaian IPM Kabupaten Belitung yang berfluktuasi namun berada pada level "tinggi" dapat diartikan bahwa pemenuhan dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak di Kabupaten Belitung telah mengalami peningkatan yang lebih baik selama lima tahun terakhir. (Lihat Gambar 2.9).



	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Belitung	72,46	72,97	73,01	73,83	74,49
Prov. Kep. Bangka Belitung	71,3	72,74	72,96	73,5	74,09
Indonesia	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS. 2019-2023 (diolah)

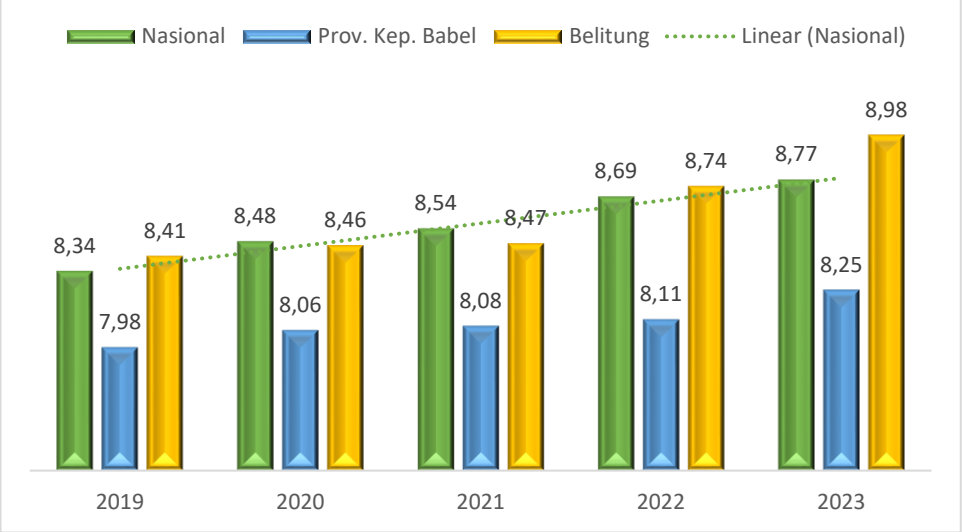
Gambar 2.9 Capaian Angka Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung Nasional, Tahun 2019-2023

1) Dimensi Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan komponen penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat tercermin dari komponen pendidikan yang di bangun pada suatu daerah. Komponen pertama pada sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menempuh semua jenis pendidikan yang dijalani. indikator kedua pada aspek pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS).

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan ukuran lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mendapatkan segala jenis pendidikan pada waktu tertentu.

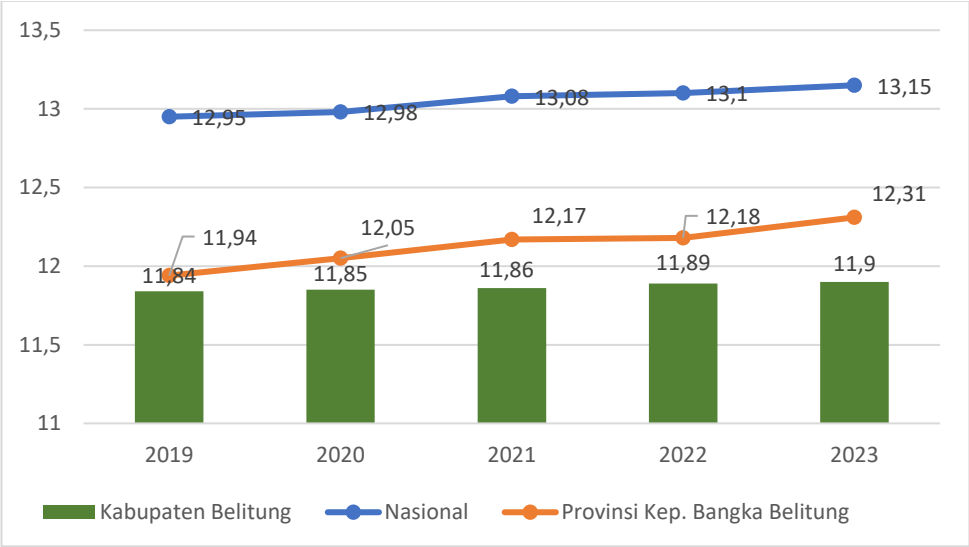
Gambar 2.10 menunjukkan kondisi Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Belitung tahun 2023 meningkat sebesar 0,24 persen dari tahun 2022. Hal ini relevan dengan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah yang terjadi pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia yang juga sama-sama mengalami peningkatan. Dengan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 8,98 tahun, maka dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Belitung yang telah berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8 tahun 8 bulan 3 hari atau setara dengan kelas VIII Sekolah Menengah Pertama. Peningkatan pembangunan urusan pendidikan di Kabupaten Belitung terus dilakukan karena telah memberikan kontribusi positif terhadap kualitas pendidikan daerah yang ditunjukkan dengan kenaikan angka Rata-rata Lama Sekolah. Berbagai upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan akses pembiayaan pendidikan, peningkatan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia Pendidikan.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.10 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

Kondisi harapan masyarakat dalam bersekolah ditunjukkan dari perhitungan harapan lama sekolah masyarakat. Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Harapan Lama Sekolah dihitung pada usia 7 (tujuh) tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Belitung terus mengalami trend kenaikan dari tahun ke tahun. Anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung memiliki harapan menamatkan pendidikan mereka hingga kelas 11 SMA atau sederajat dengan Angka Harapan Lama Sekolah yang telah mencapai 11,90 tahun 2023 atau meningkat 0,01 tahun dari capaian tahun 2022.

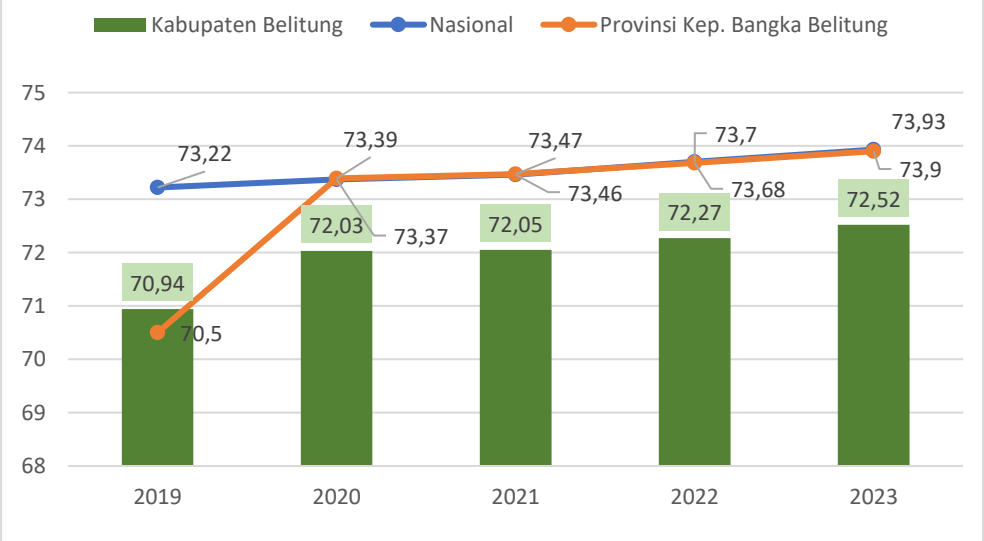


Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024(diolah)

Gambar 2.11 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

2) Dimensi Kesehatan

Angka Harapan Hidup di Kabupaten Belitung terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,25 persen, peningkatannya mulai mengalami perlambatan di tahun 2021 yang hanya tumbuh 0,02 persen dan tahun 2022 hanya sebesar 0,22 persen. Pada tahun 2023 harapan hidup bagi bayi yang baru lahir di Kabupaten Belitung adalah sebesar 72,52 tahun, melebihi target yang ditetapkan yaitu 71,54 tahun tahun dengan capaian sebesar 101,02 persen. Apabila dibandingkan dengan Nasional, Angka Harapan Hidup Kabupaten Belitung lebih rendah 1,41 poin dan sedikit lebih rendah 1,38 poin dari capaian Angka Harapan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Semakin tinggi angka harapan hidup di Kabupaten Belitung, menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.12 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

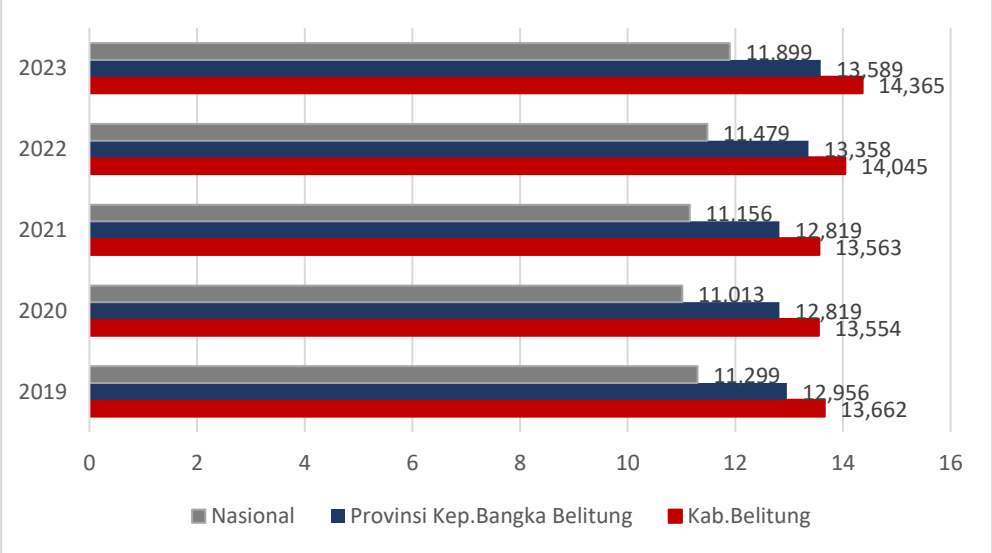
3) Dimensi Hidup yang Layak

Kriteria Hidup Layak (KHL) secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 27 Ayat 2 yakni "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dalam cakupan luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi (Bhakti dkk., 2014).

Ukuran ini menunjukkan tingkat kemampuan individu atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka dapat menjalankan kehidupan sehari-harinya secara layak. Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP menggunakan GNP riil yang disesuaikan. Produk nasional bruto perkapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran perkapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

Pada tahun 2023 pengeluaran per kapita masyarakat Kabupaten Belitung mencapai Rp.14.365 juta per tahun. Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung mencapai Rp.13.589,- juta per tahun, dan pengeluaran per kapita Nasional mencapai Rp.11.899 juta pertahun. Pada Grafik di bawah ini terlihat bahwa Pengeluaran per Kapita masyarakat Kabupaten Belitung selalu berada di atas nilai pengeluaran per kapita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Indonesia dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran masyarakat untuk hidup secara layak di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah sebesar Rp 14.365.000,- atau Rp 1.197.000,- per bulan. Angka ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan pengeluaran masyarakat pada tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 13.662.000,- atau Rp. 1.138.000,- per bulan.



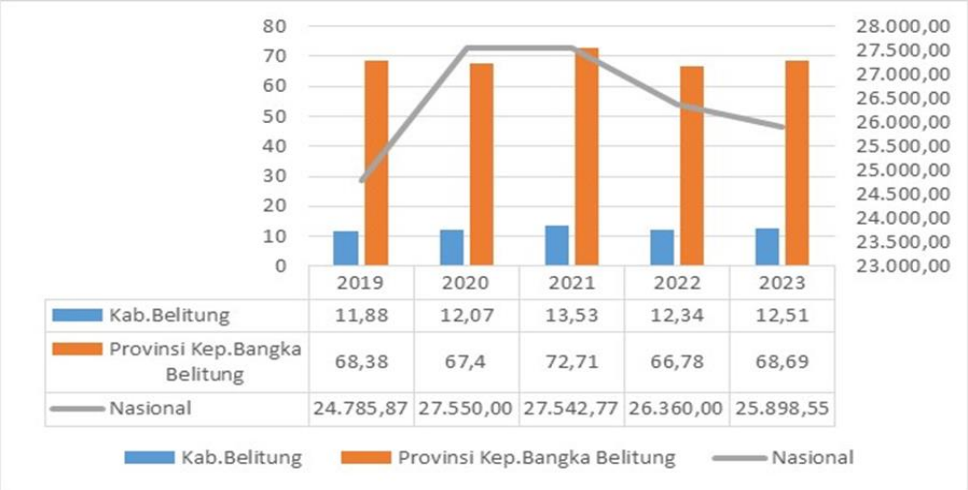
Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.13 Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam ribu rupiah)

B. Angka Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Belitung selaras dengan persentase penduduk miskin. Penduduk miskin di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 terjadi penambahan sebesar 170 jiwa dari 12.340 di tahun 2022 menjadi 12.510 jiwa atau 6,46 persen dari total jumlah penduduk. Kondisi jumlah penduduk miskin antara Kabupaten Belitung,

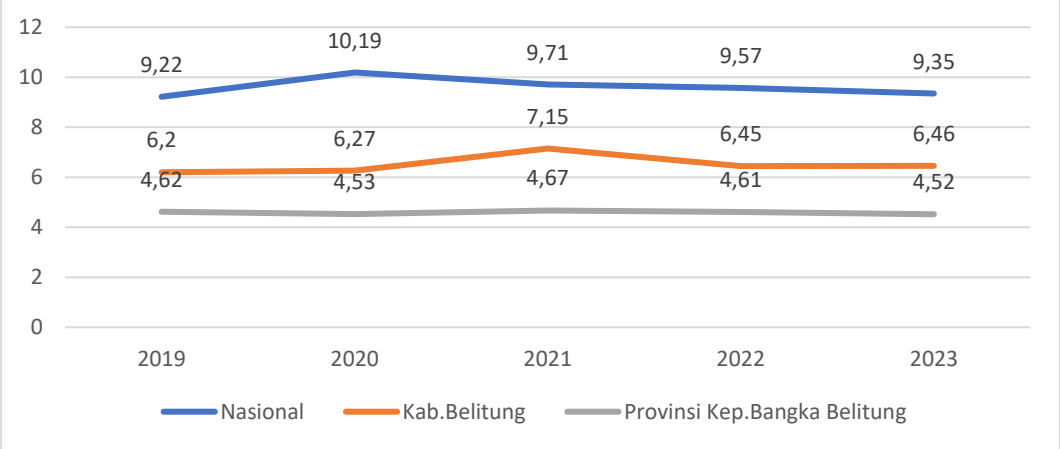
Provinsi dan Nasional. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Belitung mengalami perkembangan yang tidak lebih baik jika dibandingkan dengan penurunan di tingkat provinsi maupun nasional.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.14 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023 (dalam ribu orang)

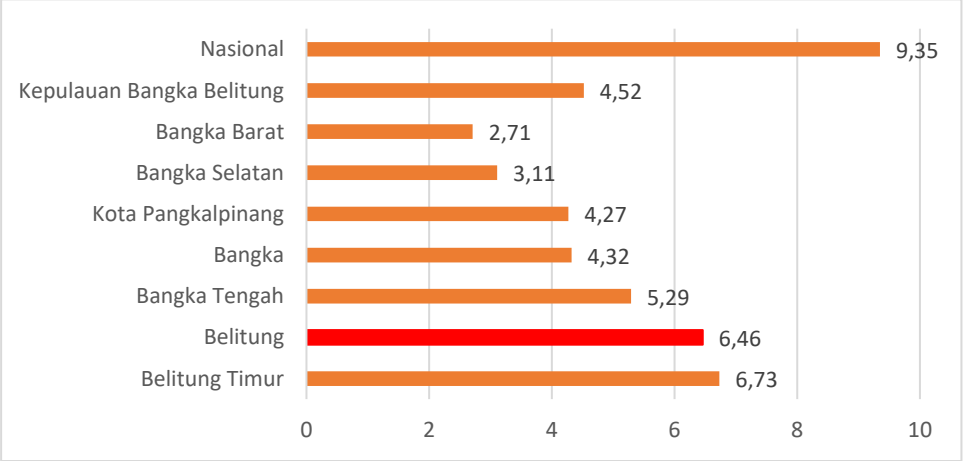
Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung dalam kurun waktu lima tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 berfluktuasi. Dengan angka kemiskinan tertinggi terjadi tahun 2021 yaitu 7,15% yang merupakan puncak dari dampak Covid-19, kemudian turun perlahan sampai diangka 6,46 tahun 2023. Sama halnya ditingkat provinsi juga berfluktuatif dalam lima tahun terakhir, karena persentase penduduk miskin merupakan kontribusi dari wilayah di kabupaten/kota. Meski demikian persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih berada di bawah nasional yaitu sebesar 9,35% atau selisih 2,89 point pada tahun 2023.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.15 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung menempati urutan kedua tertinggi Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, setelah Kabupaten Belitung Timur. Angka ini sudah diatas persentase penduduk miskin provinsi namun masih dibawah persentase penduduk miskin nasional.

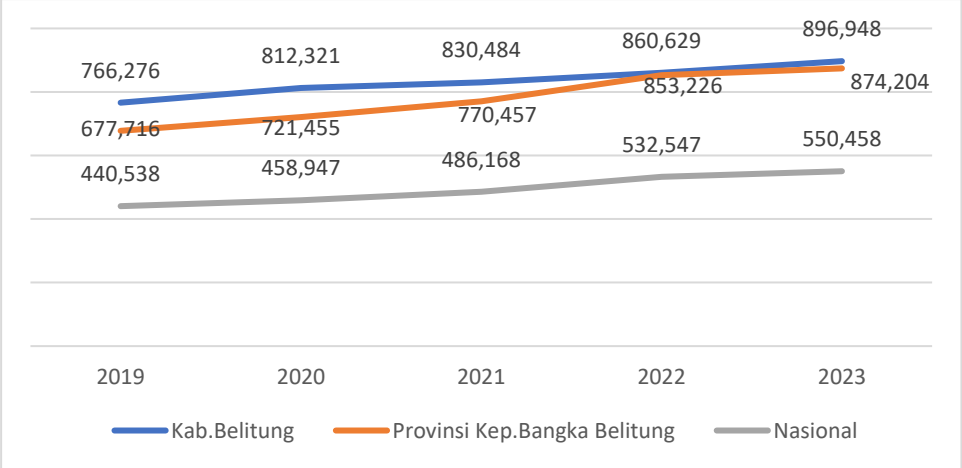


Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.16 Posisi Relatif Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2023

Gambar 2.16 diatas menunjukkan kenaikan garis kemiskinan Kabupaten Belitung yang lebih tinggi daripada provinsi dan nasional. Pada tahun 2023 garis kemiskinan Kabupaten Belitung mencapai Rp 896.948,- atau bertambah sebesar Rp 130.672,- dari tahun 2019 yang

sebesar Rp 766.276,-. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang tinggal di wilayah Kabupaten Belitung akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari Rp 896.948,-. Jika dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, garis kemiskinan Kabupaten Belitung tergolong tinggi, bahkan jauh melebihi garis kemiskinan nasional yang hanya sebesar Rp 550.458,- pada tahun 2023 atau memiliki selisih Rp 346.490,- dan selisih Rp 22.744,- dari garis kemiskinan Provinsi Kep. Bangka Belitung yang sebesar Rp 874.204,- di tahun yang sama. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingginya garis kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung umumnya dan Kabupaten Belitung khususnya, antara lain disebabkan harga kebutuhan pokok yang relatif mahal karena sebagian besar dipasok dari luar daerah.

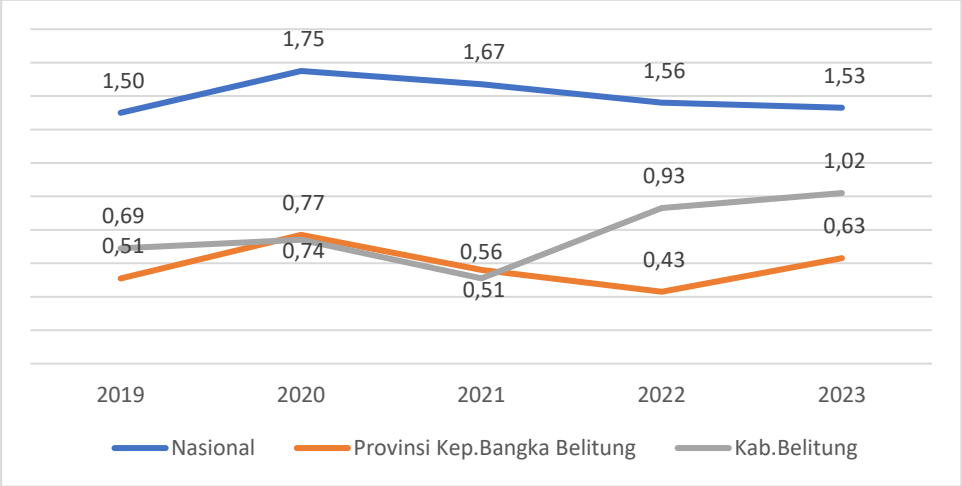


Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.17 Garis Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebesar 1,02 naik sebesar 0,09 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,93 pada tahun 2022. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin jauh dari garis kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk miskin yang semakin susah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun P1

Kabupaten Belitung lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional, meskipun sudah diatas P1 Provinsi Kep Bangka Belitung.



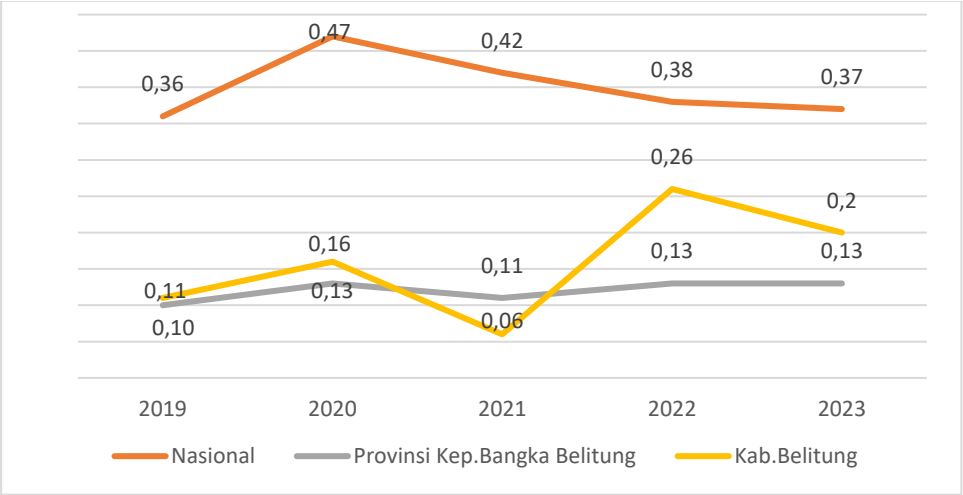
Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.18 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2018-2022

Indeks Keparahan Kemiskinan, menurut BPS merupakan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Belitung cenderung berfluktuatif selama kurun waktu 2019 – 2023. Pada tahun 2023 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu menjadi sebesar 0,20 dari sebelumnya 0,26. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin di Kabupaten Belitung semakin rendah.

.



Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.19 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2019-2023

2.2.3 Fokus Seni dan Budaya

Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkokoh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Maka budaya saat ini menjadi salah satu unsur dalam pembangunan berkelanjutan yang dilakukan pada setiap daerah.

Potret Seni dan budaya di Kabupaten Belitung ditunjukkan dari Tabel 2.8, dimana jumlah grup kesenian di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan di tahun 2019 ke 2020 yakni sebanyak 52 grup kesenian menjadi 62 grup kesenian di tahun 2020, namun tidak terjadi perubahan selama 3 tahun berikutnya hingga 2023 jumlah grup kesenian masih sebanyak 62 grup.

Hal ini serupa kondisi klub olahraga di Kabupaten Belitung yang sejak tahun 2019-2023 terus mengalami penurunan yakni pada tahun 2019 sebanyak 342, menjadi 213 pada tahun 2023. Demikian juga dengan kondisi Jumlah gedung olahraga di Kabupaten Belitung mengalami penurunan secara jumlah dari total 333 gedung olahraga pada tahun 2019 menjadi 232 gedung olahraga pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan penurunan minat atas kesenian dan olahraga yang ada di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.8 Kinerja Fokus Seni dan Budaya Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Grup Kesenian per 1.000 Penduduk	52	62	62	62	62
Jumlah Klub Olahraga per 1.000 Penduduk	342	291	213	213	213
Jumlah Gedung Olah raga per 1.000 Penduduk	333	350	232	232	232

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, 2024

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, disebutkan bahwa kemudahan persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur yang jelas; waktu penyelesaian yang singkat, biaya/tarif yang murah; produk spesifikasi jenis layanan yang sesuai standar; pelaksana yang berkompeten, perilaku pelaksana yang ramah; penanganan pengaduan, saran dan masukan yang jelas; sarana dan prasarana yang memadai menjadi kunci dalam peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pada tabel xx

di bawah dapat diidentifikasi capaian indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Belitung terhadap pelayanan publik yang diterima.

Tabel 2.9 Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	IKM Pelayanan perizinan	3,21	3,40	3,56	3,70	3,55
2	IKM pelayanan kependudukan	3,30	3,30	3,30	3,47	3,46
3	IKM pelayanan Pendidikan	3,48	3,49	3,33	3,42	3,47
4	IKM pelayanan Kesehatan	3,39	3,40	3,24	3,86	3,95
5	IKM pelayanan Perpustakaan	3,43	3,44	3,61	3,59	3,70
6	IKM Kecamatan Tanjungpandan	3,19	3,36	3,38	3,42	3,46
7	IKM Kecamatan Badau	3,26	3,61	3,76	3,69	3,66
8	IKM Kecamatan Membalong	3,35	3,60	3,41	3,35	3,57
9	IKM Kecamatan Sijuk	3,62	3,49	3,47	3,14	3,52
10	IKM Kecamatan Selat Nasik	3,26	3,17	3,17	3,44	3,30

Sumber : Laporan Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023, Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Ditilik lebih dalam dari data di atas, terdapat beberapa indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Belitung yang mengalami fluktuasi, yaitu IKM Pelayanan perizinan, walaupun sudah mulai naik pada tahun 2022 namun belum mencapai nilai maksimal, begitu pula dengan IKM Pelayanan Pendidikan, sejak tahun 2019-2020 mengalami kenaikan, namun tahun 2021 mengalami penurunan dan kembali naik pada tahun 2022 dan 2023. Kemudian IKM Pelayanan Kesehatan dan IKM pelayanan Perpustakaan juga mengalami fluktuatif. Selain itu, IKM Kecamatan Tanjungpandan, IKM

Kecamatan Badau, IKM Kecamatan Membalong, IKM Kecamatan Sijuk, dan IKM Kecamatan Selat Nasik juga mengalami fluktuatif.

IKM yang fluktuatif adalah isyarat bahwa ada tantangan yang perlu diatasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penyebab fluktuasi terjadi pada IKM antara lain adanya perubahan kebijakan, krisis ekonomi dan kesehatan, dan ketidakpuasan terhadap layanan kunci. Dengan pendekatan yang tepat, seperti konsistensi dalam kebijakan, komunikasi yang baik, dan perbaikan layanan kunci, fluktuasi dalam IKM dapat diatasi. Ini akan membantu membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan di daerah tersebut.

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

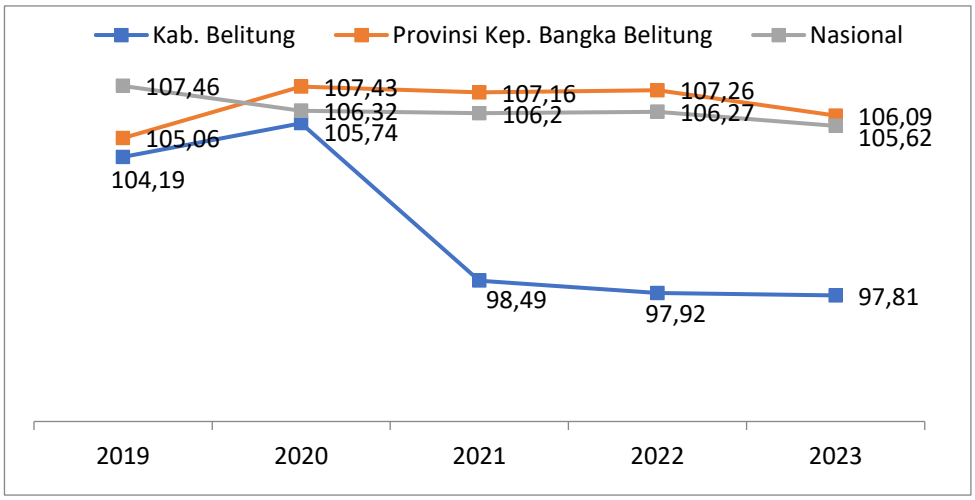
A. Pendidikan

Harapan penduduk dalam rangka melanjutkan pendidikan juga dapat dilihat dari angka partisipasi penduduk. Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Perhitungan atas APK bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah jenjang pendidikan tertentu. Makin tinggi APK berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di jenjang pendidikan tertentu atau banyak anak di luar usia sekolah (Kemendikbud, 2022).

Selain itu, APK juga dapat menggambarkan kondisi atas jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa melihat status usia) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Maka, APK memilki fungsi dalam menunjukan seberapa besar tingkat partisipasi penduduk pada suatu pendidikan dan berapa besar kapasitas

sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu.

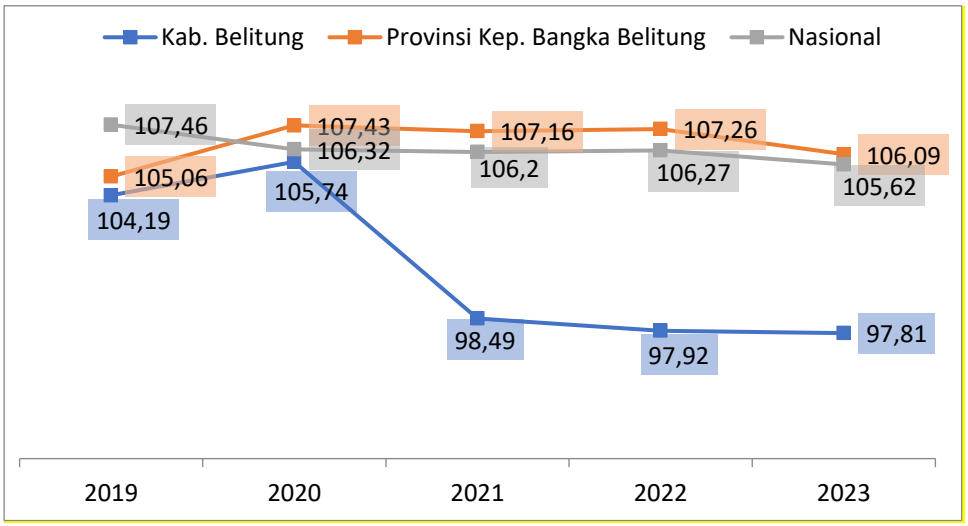
APK tahun 2023 secara nasional menunjukkan angka 105,62 persen. Artinya, rata-rata pada tingkat provinsi telah mencapai 100 persen masyarakat yang dapat bersekolah pada jenjang SD sederajat dan terdapat 5,6 persen penduduk Indonesia yang tidak berusia 7-12 tahun bersekolah pada jenjang SD sederajat. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung berfluktuatif. Penurunan yang besar terjadi pada tahun 2021 hingga 2023. Pada tahun 2020 sebesar 105,74 persen menjadi 98,49 persen pada tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 97,92 persen (2022), kemudian mengalami sedikit penurunan kembali pada tahun 2023 menjadi 97,81 persen. Angka yang fluktuatif, dan cenderung menurun pada tiga tahun terakhir ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung belum dapat mengakomodir 2,19 persen penduduk yang berusia 7-12 tahun untuk bersekolah pada jenjang SD sederajat di tahun 2023. Sehingga masih terdapat anak yang tidak menempuh pendidikan SD sebagaimana terlihat pada Gambar 2.20.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.20 Angka Partisipasi Kasar SD Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), secara umum kondisi APK nasional selama tahun 2019-2023 meningkat setiap tahunnya dengan perolehan pada tahun 2023 sebesar 92,51. Situasi dan kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat anak-anak usia SMP sederajat (13-15 tahun) tidak bisa mengakses atau bersekolah di jenjang SMP sederajat baik pada level Nasional sebanyak 7,49 persen. Kondisi tersebut lebih rendah dibandingkan APK SMP yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Belitung yakni pada tahun 2023 meningkat menjadi 90,59 persen. Dengan terjadinya penurunan APK pada jenjang SMP di Kabupaten Belitung, sehingga masih terdapat 9,41 penduduk yang berusia 13-15 tahun yang tidak melanjutkan pendidikan di jenjang SMP/sederajat sebagaiman terlihat pada Gambar 2.21.



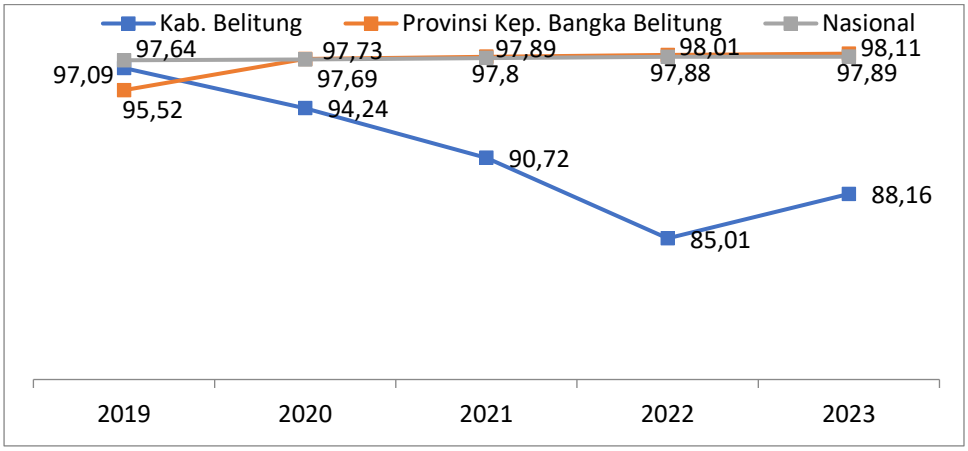
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.21 Angka Partisipasi Kasar SMP Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang pendidikan dengan penduduk usia yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Artinya, semakin tinggi nilai APM berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tertentu, yakni SD, SMP, dan SMA sederajat. Maksimal nilai APM adalah 100 persen. Tujuan penggunaan APM adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia

sekolah yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA sederajat (Kemendikbud, 2020). Dalam konteks ini, usia sekolah jenjang SD sederajat (7-12 tahun), usia sekolah jenjang SMP sederajat (13-15 tahun), dan usia sekolah jenjang SMA sederajat (16-18 tahun) termasuk memperhitungkan Pendidikan Non Formal, yaitu Paket A, Paket B, dan Paket C (BPS, 2022).

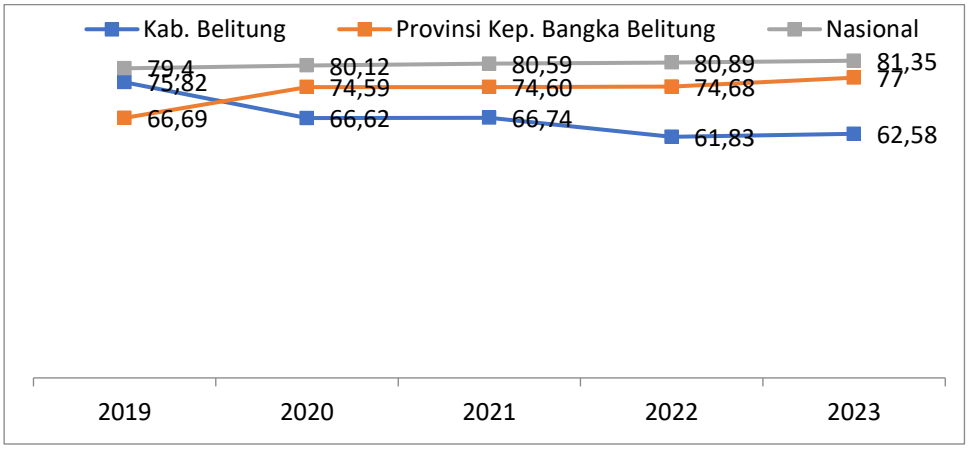
Berdasarkan data pada Gambar 2.19 ini juga dapat diketahui bahwa capaian tren perkembangan APM SD nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Sebaliknya tren perkembangan APM Kabupaten Belitung menunjukkan fluktuatif, namun laju pertumbuhan sejak tahun 2019-2023 menunjukkan angka negatif atau penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, APM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan capaian sebesar 97,09 persen, angka tersebut menurun menjadi 94,24 pada tahun 2020, kembali menurun menjadi 90,72 tahun 2021 dan 85,01 tahun 2022. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 88,16 persen (Lihat Gambar 2.21). Hal ini bermakna bahwa jumlah anak-anak yang sesuai usia 7-12 tahun di Kabupaten Belitung yang mengenyam pendidikan SD sederajat mengalami penurunan yang tinggi.



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni (APM) SD Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

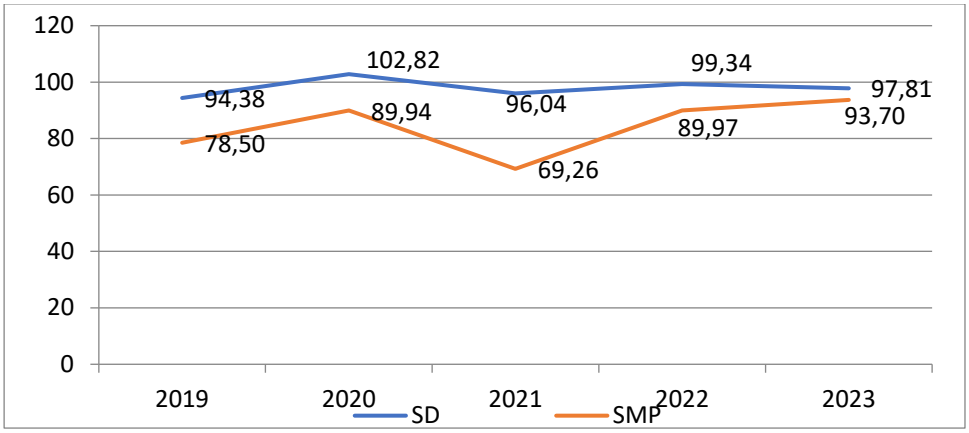
APM penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah sebesar 62,58 persen. Capaian APM ini berarti bahwa anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah di jenjang SMP sebanyak 37,42 persen. Adanya anak-anak dengan usia di 13-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan SMP sederajat dapat disebabkan karena beberapa anak putus sekolah ataupun tidak melanjutkan pendidikan SMP karena faktor biaya atau usia awal saat masuk SD (Lihat Gambar 2.23).



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.23 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP Sederajat Tingkat Nasional, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Rendahnya APK dan APM penduduk Kabupaten Belitung dibuktikan dengan kondisi APS Tahun 2019-2022. APS pada jenjang SD menunjukkan jumlah murid usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan SD mengalami peningkatan pada tahun 2021-2023, namun masih terdapat penduduk pada usia tersebut yang tidak menempuh pendidikan jenjang SD dengan belum kondisi persentase APS yang belum menyentuh angka 100 persen. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 19.486 penduduk usia 7-12 tahun, namun hanya tercatat 19.024 penduduk yang menempuh pendidikan SD. (Lihat Gambar 2.24).



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.24 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (dalam jiwa)

Rendahnya APK dan APM penduduk Kabupaten Belitung dibuktikan dengan kondisi APS Tahun 2019-2023. APS pada jenjang SD menunjukkan jumlah murid usia 7-12 tahun yang menempuh pendidikan SD mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023. Ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat penduduk pada usia tersebut yang tidak menempuh pendidikan jenjang SD dengan belum kondisi persentase APS yang belum menyentuh angka 100 persen. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 sebanyak 19.486 penduduk usia 7-12 tahun, namun hanya tercatat 19.024 penduduk yang menempuh pendidikan SD. Data tersebut menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan di Kabupaten Belitung, semakin rendah pula angka partisipasi sekolah, sehingga menggambarkan kondisi dimana masih terdapat anak yang tidak melanjutkan sekolah.

Tabel 2.10 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Sekolah Dasar	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah murid usia 7-12 tahun	n/a	19.672	18.696	19.378	18.772
	Laki-laki	n/a	10.149	9.580	9.876	9.666
	Perempuan	n/a	9.523	9.116	9.502	9.106
2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	18.421	19.132	19.467	19.506	19.193

No	Sekolah Dasar	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Laki-laki	9.413	9.797	10.001	9.975	9.885
	Perempuan	9.008	9.335	9.466	9.531	9.308
3	APS SD	n/a	102,82	96,04	99,34	97,81
	Laki-laki	n/a	103,59	95,79	99,01	98,06
	Perempuan	n/a	102,01	96,30	99,70	97,17

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Kondisi serupa juga terjadi pada angka partisipasi pada jenjang pendidikan SMP. Dimana jumlah penduduk pada usia 13-15 tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2019-2022. Namun pada tahun 2023 jumlah penduduk yang menempuh pendidikan SMP berada di bawah jumlah total penduduk yang berumur 13-15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022-2023 tidak semua anak pada tahun 13-15 tahun menempuh pendidikan SMP (lihat Tabel 2.11).

Tabel 2.11 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 (dalam jiwa)

No	Sekolah Menengah Pertama	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1,1	Jumlah murid usia 13-15 tahun	n/a	7.945	6.258	8.384	8.524
	Laki-laki	n/a	3.966	3.129	4.216	4.245
	Perempuan	n/a	3.979	3.129	4.168	4.279
1,2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.304	8.837	9.035	9.319	9.097
	Laki-laki	4.228	4.530	4.605	4.837	4.668
	Perempuan	4.076	4.307	4.430	4.482	4.429
1,3	APS SMP/MTs	n/a	89,91	69,26	89,97	93,70
	Laki-laki	n/a	87,55	67,95	87,16	90,94
	Perempuan	n/a	92,38	70,63	92,99	96,61

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Literasi dan numerasi merupakan kemampuan dasar yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi adalah kemampuan membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sedangkan numerasi adalah kemampuan memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Kompetensi literasi dan numerasi dinilai berdasarkan keterampilan berpikir logis-sistematis, keterampilan bernalar, dan keterampilan memilah serta mengolah informasi. Berdasarkan raport pendidikan tahun 2022, capaian rata-rata kompetensi literasi tingkat SD adalah

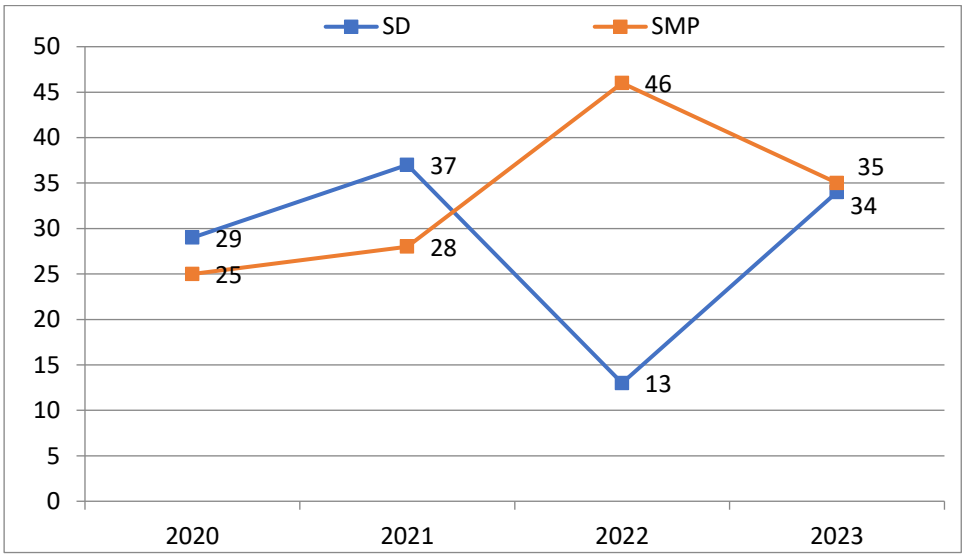
sebesar 71,06 meningkat menjadi 77,81 tahun 2023 sedangkan untuk tingkat SMP tahun 2022 sebesar 79,45 meningkat menjadi 83,31 tahun 2023.

Berdasarkan rapor pendidikan tahun 2023, rata-rata kompetensi numerasi tingkat SD sebesar 61,54 dari sebelumnya sebesar 49,32 tahun 2022, sedangkan untuk tingkat SMP, rata-rata kompetensi numerasi tahun 2023 sebesar 74,59 dari sebelumnya sebesar 54,75 tahun 2022. Jika melihat dalam dua tahun capaian rata-rata kompetensi literasi dan numerasi baik tingkat SD maupun tingkat SMP terjadi peningkatan. Artinya kualitas pembelajaran di Kabupaten Belitung semakin baik setiap tahunnya.

Asesmen Kompetensi Minimun (AKM) merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Komponen AKM terdiri dari numerasi yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan pengetahuan matematika yang dimilikinya dalam menjelaskan kejadian, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan literasi membaca adalah kemampuan peserta didik untuk memahami, menggunakan, merefleksi, dan berinteraksi dengan teks tulis agar seseorang mampu meraih tujuan pribadi, mengembangkan pengetahuan dan potensinya, sehingga dia mampu berpartisipasi sebagai warga masyarakat.

Persentase satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada literasi membaca dan numerasi di Kabupaten Belitung dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan. Tahun 2022 persentase satuan pendidikan yang mencapai kompetensi minimum pada literasi membaca dan numerasi adalah sebesar 66,31 meningkat menjadi 74,09 pada tahun 2023.

Pemerintah telah mengatur terkait rasio ideal pendidik dan tenaga kependidikan maupun rasio ideal sarana prasarana kependidikan melalui Permendikbud No 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, rasio antara rombongan belajar dan ketersediaan ruang kelas di atur. Rasio sekolah dan penduduk usia sekolah dasar Kabupaten Belitung tahun 2019-2020 mengalami peningkatan, namun fluktuatif sejak tahun 2021 hingga 2023 yakni sebanyak 63,04. Kondisi ini ditimbulkan dari meningkatnya jumlah penduduk usia SD yang tidak diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah. (Lihat Tabel 2.12) Kondisi tersebut sejalan dengan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung pada Grafik berikut ini.

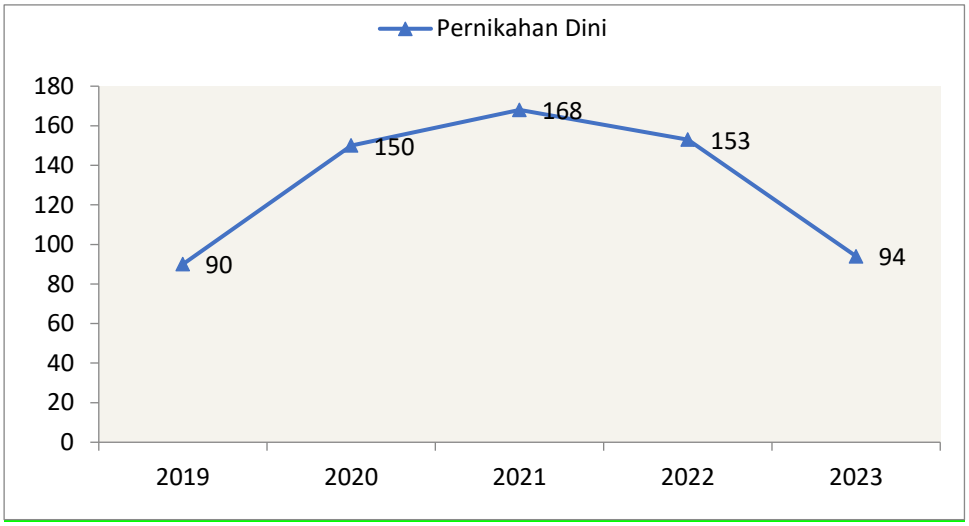


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.25 Angka Putus Sekolah Jenjang SD dan SMP Kabupaten Belitung Tahun 2020-2023

Penduduk putus sekolah pada tingkat SD dan SMP di Kabupaten Belitung salah satu penyebabnya yakni dari adanya pernikahan dini yang cukup tinggi di Kabupaten Belitung. Jumlah Pernikahan dini di Kabupaten Belitung terus meningkat sejak tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019 sebanyak 90, meningkat menjadi 150 pada tahun 2020, kembali meningkat menjadi 168 di tahun 2021. Pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 153, kemudian mengalami penurunan kembali sebanyak 94 pada tahun 2023. Kondisi ini menggambarkan

bahwa anak dengan usia dini yang menikah tidak dapat melanjutkan pendidikan. Selain itu masyarakat yang putus sekolah tidak terlepas dari rendahnya kemampuan ekonomi keluarga untuk menyekolahkan anaknya, disisi lain jumlah anak dalam keluarga masih cukup tinggi di Kabupaten Belitung (DKT, 17 Juli 2023) Selain itu Orang tua dengan ekonomi yang kurang mampu, lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, dikarenakan untuk membantu mereka bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi menjadi alasan anak menjadi putus sekolah (Hasil DKT. 17 Juli 2023).



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.26 Jumlah Pernikahan Dini Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Kondisi jumlah penduduk usia sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan ketersediaan gedung sekolah SD jumlahnya meningkat pada tahun 2022 menjadi 121 sekolah. Namun pada jenjang SMP menunjukkan jumlah yang konstan sejak tahun 2019-2023 yakni sebanyak 32 gedung. Tabel 2.12 menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia 13-15 tahun pada tahun 2023 mencapai 63,04 persen. Kondisi tersebut menunjukkan fasilitas pendidikan jenjang SD di Kabupaten Belitung masih kurang. Terlebih lagi adanya kendala yang dihadapi

yakni akses menuju fasilitas pendidikan yang terbatas, sehingga menghambat proses siswa untuk memperoleh akses pendidikan yang mudah (Hasil FGD. 17 Juli 2023).

Tabel 2.12 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Dasar Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

SD	Tahun					Tren
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 7-12 Tahun	19.122	15.805	18.717	18.552	19.193	
Jumlah Gedung Sekolah (Negeri dan swasta)	120	120	120	121	121	
Rasio	62,76	75,93	64,113	56,06	63,04	Fluktuatif

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Sedangkan rasio sekolah dan penduduk usia sekolah menengah pertama Kabupaten Belitung mengalami fluktuatif dan terus menurun sejak tahun 2021 hingga tahun 2023. Kondisi ini ditimbulkan dari meningkatnya jumlah penduduk usia SMP yang tidak diiringi dengan ketersediaan gedung sekolah (Lihat Tabel 2.13).

Tabel 2.13 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Sekolah Menengah Pertama	Tahun					Tren
	2019	2020	2021	2022	2023	2019-2023
Jumlah Penduduk Kelompok Usia 13-15 Tahun	7.815	5.161	7.822	7.836	9.586	
Jumlah Gedung Sekolah (Negeri dan swasta)	29	29	29	29	32	
Rasio	37,11	56,19	37,07	37,01	33,38	Menurun

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Selain sarana dan prasarana penunjang fasilitas pendidikan untuk dapat mendukung kualitas sumber daya manusia yang ada di suatu daerah, ketersediaan guru juga menjadi salah satu pendukung dalam memberikan layanan pendidikan (Omega. 2019). Tren ketersediaan guru sekolah dasar terhadap siswa yang ada di Kabupaten Belitung menunjukkan tren fluktuatif sejak tahun 2019-2023. Jumlah Guru SD di Kabupaten Belitung menurun sejak tahun 2019 yakni sebanyak 1.159

menjadi 1.040 pada tahun 2022, meningkat kembali menjadi 1.190 pada tahun 2023. Hal juga ditunjukkan rasio guru dan siswa SD di Kabupaten Belitung yakni sebesar 15,77 persen pada tahun 2023 (Lihat Tabel 2.14). Kondisi ini menunjukkan bahwa satu guru SD mendampingi 15-16 siswa. Walaupun rasio ini telah sesuai dengan standar ideal rasio guru dan siswa dalam Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008, namun kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Belitung yakni persebaran guru yang ada di Kabupaten Belitung. Sedangkan pada jenjang SMP saat ini semakin terbatas (DKT, 9 Oktober 2023).

Kondisi tren rasio guru dan murid pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Belitung cukup fluktuatif (Lihat Tabel 2.14). Kondisi ini menggambarkan peningkatan jumlah guru SMP dan jumlah murid SMP namun ketersediaan guru tersebut belum memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan jumlah murid yang ada di Kabupaten Belitung. Rasio guru SMP Kabupaten Belitung masih yakni sebesar 16,89 pada tahun 2023. Kondisi ini serupa dengan kondisi guru SD dimana kendala yang dihadapi oleh Kabupaten Belitung yakni persebaran guru yang ada di Kabupaten Belitung (Hasil DKT. 17 Juli 2023), walaupun rasio hampir memenuhi standar ideal pemerintah.

Tabel 2.14 Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Sekolah Dasar	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah guru paud	300	300	306	274	278
Jumlah murid paud	n/a	5.189	4.394	4.205	4.256
Jumlah Guru SD*)	1.086	1.159	1.134	1.040	1.190
Jumlah murid	19.122	15.805	18.717	19.024	18.772
Jumlah Guru SMP *)	442	497	466	427	514
Jumlah murid	7.815	5.161	7.822	8.524	8.684
Rasio Guru SD	17,93	16,53	16,85	13,34	15,77
Rasio Guru SMP	19,17	17,76	17,97	15,97	16,89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

B. Kesehatan

Salah satu Indikator keberhasilan pembangunan pada suatu daerah dilihat dari kualitas derajat kesehatan masyarakatnya. Baiknya kondisi kesehatan masyarakat berimplikasi dengan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan merupakan suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik. Hal ini selaras dengan tujuan pembangunan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Menciptakan masyarakat yang sehat bukanlah perkara yang mudah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pada saat ini lebih ditekankan kepada upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Masyarakat yang sehat dapat diartikan masyarakat yang bebas dari penyakit, kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, serta tercapainya kesejahteraan fisik, sosial dan mental masyarakat itu sendiri. Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat dimulai dari perencanaan terhadap masyarakat yang tepat. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi pencapaian derajat kesehatan yaitu lingkungan, perilaku manusia, pelayanan kesehatan, dan keturunan/ genetik. Baiknya pelayanan kesehatan serta ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya derajat kesehatan masyarakat. Terlepas dari keempat faktor tersebut, Banyak faktor lain diyakini juga berperan dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat diantaranya dipengaruhi sektor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, budaya dan sektor lainnya. Umumnya parameter yang digunakan sebagai indikator tercermin dalam ukuran epidemiologi seperti kondisi morbiditas, mortalitas, dan status gizi. Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Belitung dapat dilihat melalui Angka Harapan Hidup, Angka Kematian

Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Angka Kematian Ibu (AKI), dan angka morbiditas beberapa penyakit.

Angka Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kelahiran Bayi atau angka kelahiran total merupakan rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang wanita selama masa subur. TFR digunakan untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan meningkatkan rata-rata usia kawin, dan meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan denyut nadi. Angka kelahiran bayi di Kabupaten Belitung tahun 2019 sebesar 2.926 yang berfluktuasi dan cenderung menurun pada tahun 2023 sebesar 2.638. Nilai TFR menunjukkan rata-rata seorang Ibu melahirkan 2-3 anak pada masa suburnya.

Tabel 2.15 Angka Kelahiran Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Keterangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Angka Kelahiran Bayi	1.530	1.396	1.633	1.564	1.630	1.476	1.450	1.326	1.408	1.230

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.27 Angka Kelahiran Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Sedangkan, Angka kematian bayi (AKB) menggambarkan banyaknya kematian bayi berusia di bawah satu tahun, per 1.000 kelahiran hidup pada suatu tahun tertentu. Fungsi dari indikator ini adalah untuk menggambarkan keadaan sosial ekonomi masyarakat dimana angka kematian itu dihitung. Salah satu capaian bidang kesehatan adalah menurunnya angka kematian bayi per 1.000 KH. Jumlah kematian Bayi Kabupaten Belitung berfluktuatif yang mana pada tahun 2023 tercatat sebanyak 34 kematian bayi, atau sebanyak 12,9 per 1000 kelahiran hidup sebagai angka kematian bayi. Angka ini cukup tinggi yang menunjukkan bahwa kualitas kesehatan bayi di Kabupaten Belitung tidak baik (Lihat Gambar 2.28).

Tabel 2.16 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Keterangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	19	16,5	19	9,6	17,2	10,8	13,8	14,3	14,2	11,4



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

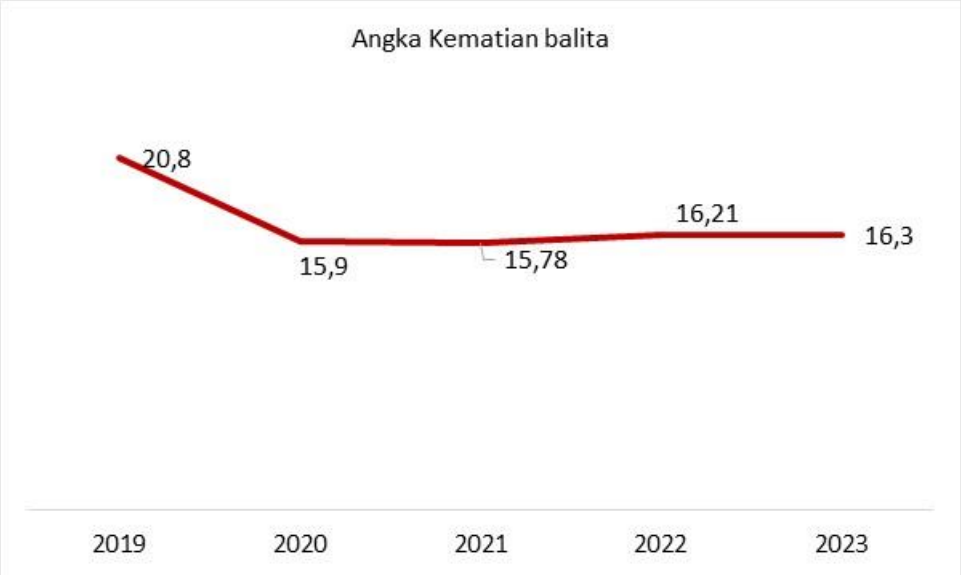
Gambar 2.28 Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian balita umur 12-59 bulan dibandingkan dengan jumlah kelahiran hidup. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi, penyakit infeksi dan sebab lainnya. Angka Kematian Balita (AKABA) Kabupaten Belitung memiliki angka yang tidak jauh berbeda dengan angka kematian bayi. Dimana AKBA Kabupaten Belitung cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir, dengan kondisi tahun terakhir yakni pada tahun 2023 meningkat menjadi 16,30 (Lihat Gambar 2.29).

Tabel 2.17 Angka Kematian Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Keterangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	15,9	14,6	15,9	16,6	18,4	12,9	15,9	16,6	17,8	14,6



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.29 Angka Kematian Balita di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

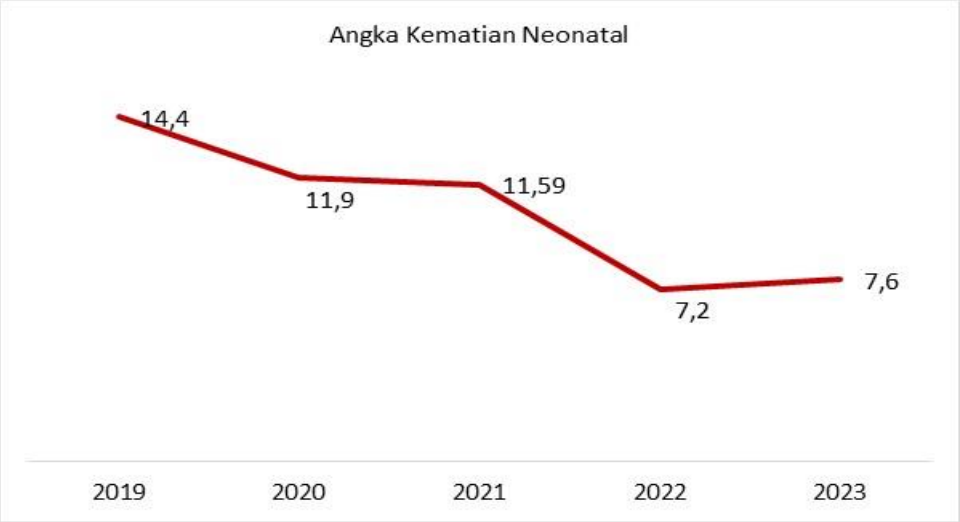
Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Indikator ini menunjukkan jumlah kematian bayi pada masa neonatus (kurang dari satu bulan) dalam 1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Neonatal Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir (2019-2023) berfluktuasi, dimana pada tahun 2019 sebesar 14,4, turun menjadi 11,9 di tahun 2020, mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 11,59, kembali menurun pada tahun 2022 sebesar 7,2 dan meningkat menjadi 7,6 pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan penanganan atas komplikasi neonatal mulai berangsur membaik, walaupun masih terbilang cukup tinggi. Angka Kematian Bayi di Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah 16,3 per 1000 kelahiran hidup mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan didominasi pada masa neonatal sebanyak 20 orang dan terjadi di masa post neonatal 14 orang sehingga total 34 orang bayi yang meninggal pada tahun 2023. Penyebab kematian neonatal tersebut sebagian besar karena BBLR dan Prematuritas (10 orang), Asfiksia (4 orang), Kelainan Kongenital (1

orang), dan lain-lain sebanyak 5 orang. Sedangkan penyebab kematian pada bayi post neonatal antara lain Pneumonia (2 orang), Kelainan Kongenital Jantung (2 orang), Kelainan Kongenital Lainnya (2 orang) dan penyebab lainya (7 orang) (Profil Kesehatan Kabupaten Belitung tahun 2023). Kondisi ini disebabkan oleh Kesadaran Ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan lengkap masih kurang sehingga rawan mengalami masalah kesehatan ibu dan bayi, kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi yakni hanya sebesar 7,4 persen pada tahun 2023, adanya pernikahan dini, (DKT, 9 Oktober 2023).

Tabel 2.18 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Keterangan	2019		2020		2021		2022		2023	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup	16,3	12,2	15,9	7,7	13,5	9,5	7,6	6,8	9,2	5,7



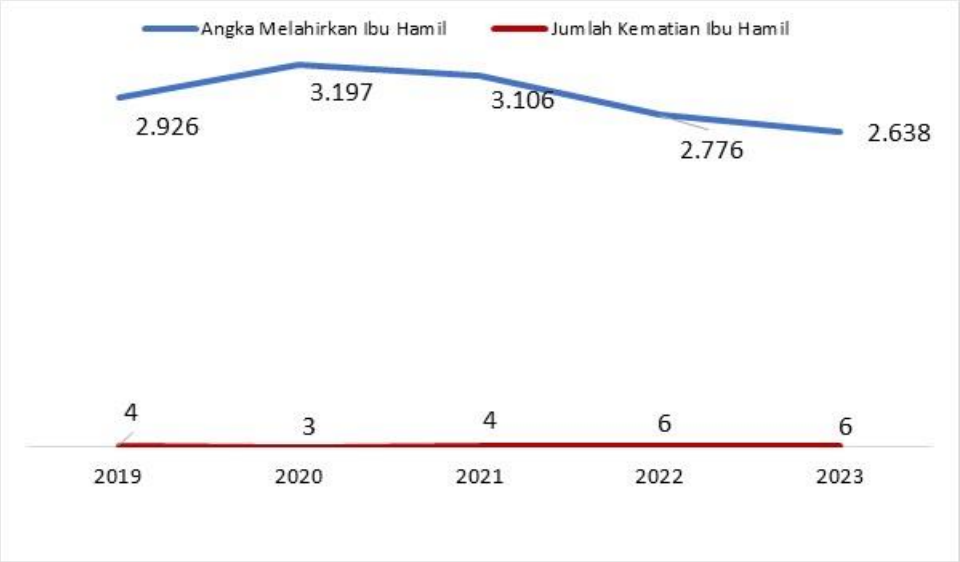
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.30 Angka Kematian Neonatal di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Angka Melahirkan Ibu Hamil dan Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan angka yang dihitung berdasarkan kematian yang terjadi pada ibu karena peristiwa

kehamilan, persalinan, dan masa nifas per 100.000 kelahiran hidup. Indikator AKI dapat dipengaruhi status kesehatan secara umum, pendidikan, pelayanan selama antenatal (K4), dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan. Kondisi kematian ibu di Kabupaten Belitung berfluktuasi selama tahun lima tahun ke belakang (2019-2023). Kondisi terakhir yakni pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dengan angka kematian ibu sebanyak 6 orang. Kematian ibu dipengaruhi oleh beberapa risiko seperti keadaan sosial ekonomi dan kesehatan yang kurang baik menjelang kehamilan, adanya kejadian komplikasi pada kehamilan dan kelahiran, dan tingkat tersedianya dan penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi AKI Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.31.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.31 Angka Kelahiran dan Ibu hamil Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Status Gizi

Indikator kesehatan daerah dilihat pada status gizi yang ada di masyarakat. Status gizi yang ada dinilai dari 3 indeks yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan

menurut tinggi badan (BB/TB). Pemantauan Status Gizi ini memberikan informasi tentang status gizi secara berkesinambungan, yang diharapkan dapat dipergunakan dalam penentuan arah kebijakan perbaikan gizi masyarakat agar lebih efektif, efisien dan tepat sasaran. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap tercapainya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Status gizi anak balita berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 terdapat 3 indeks status gizi anak yakni: berat badan menurut umur (berat badan sangat kurang berat badan kurang, berat badan normal, risiko berat badan lebih), panjang badan/ tinggi badan menurut umur (sangat pendek, pendek, normal, tinggi) dan berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan (gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, berisiko gizi lebih, gizi lebih, obesitas).

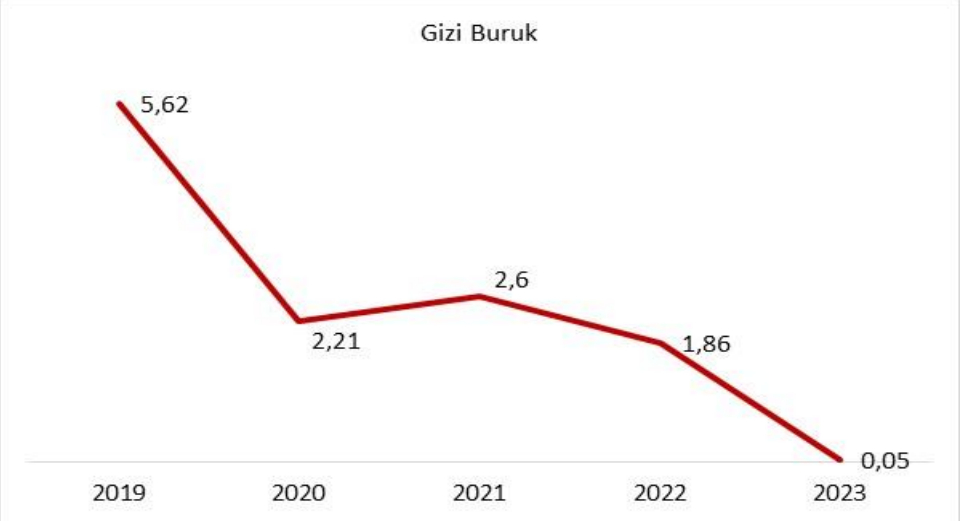
Permasalahan Gizi yang terjadi pada kelompok umur 0-2 tahun akan berdampak pada tumbuh kembang bayi menuju dewasa. Pada rentan usia tersebut disebuat sebagai *golden period* yang mana menjadi umur krusial untuk dapat membentuk imun seseorang tidak hanya untuk kesehatan dimasa ini namun juga dimasa yang akan datang. Selama tahun 2019-2023 di Kabupaten Belitung persentase *Underweight* (gizi kurang) 9,38 persen tahun 2019, menurun menjadi 5,56 persen tahun 2020, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 6,9 persen dan menurun lagi menjadi 6,38 persen tahun 2022. Namun tahun 2023 menurun tajam menjadi 2,3 persen tahun 2023. Kondisi ini berfluktuatif dan menggambarkan permasalahan gizi masih terjadi di Kabupaten Belitung (Lihat Gambar 2.32).



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.32 Gizi Kurang di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

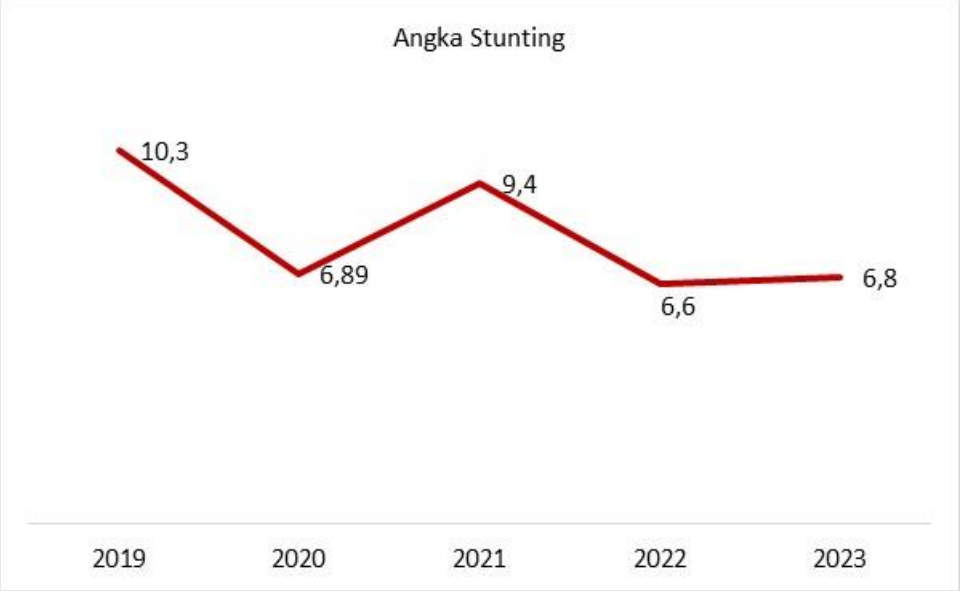
WHO menyebutkan bahwa banyak faktor dapat menyebabkan gizi buruk, yang sebagian besar berhubungan dengan pola makan yang buruk, infeksi berat dan berulang terutama pada populasi yang kurang mampu. Diet yang tidak memadai, dan penyakit infeksi terkait erat dengan standar umum hidup, kondisi lingkungan, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan dan perawatan kesehatan (WHO, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya gizi buruk, diantaranya adalah status sosial ekonomi, ketidaktahuan ibu tentang pemberian gizi yang baik untuk anak, dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Untuk kasus gizi buruk di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 sebanyak 9,38 persen, menjadi 5,56 persen pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 2,6 persen di tahun 2021, dan kembali menurun menjadi 1,86 persen pada tahun 2022 dan turun lagi menjadi 0,05 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan selama 5 tahun permasalahan gizi buruk berangsur membaik di Kabupaten Belitung. Walaupun demikian perhatian terhadap permasalahan gizi masih harus tetap diperhatikan hingga kasus tidak ditemukan lagi.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.33 Gizi Buruk di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Sedangkan kondisi stunting di Kabupaten Belitung berfluktuasi sejak tahun 2019-2023 dimana pada tahun 2019 persentase stunting sebesar 10,3 persen, tahun 2020 menurun menjadi 6,89 persen, kembali meningkat pada tahun 2021 menjadi 9,4 persen dan menurun pada tahun 2022 sebesar 6,6 persen, meningkat 2 poin menjadi 6,8 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan perbaikan positif atas status gizi balita di Kabupaten Belitung (Lihat Gambar 2.34). Rendahnya status gizi masyarakat disebabkan oleh pernikahan dini dan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan ekonomi masyarakat, namun pola asuh dan pola makan juga dipengaruhi oleh kesadaran dan kemampuan orang tua. (DKT, 9 Oktober 2023).



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.34 Angka Stunting di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular

Aspek penting yang turut mempengaruhi kualitas fisik penduduk adalah status kesehatan yang antara lain diukur melalui angka kesakitan (morbiditas). Penduduk yang mengalami keluhan kesehatan pada sebulan terakhir mengakibatkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat Kesehatan dari penduduk suatu wilayah Sebaliknya, semakin sedikit penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, maka semakin tinggi derajat kesehatan penduduk suatu wilayah. Kondisi atas angka kesakitan di Kabupaten Belitung mengalami penurunan selama lima tahun kebelakang (2019-2023). Tahun 2023 Angka Kesakita Kabupaten Belitung sebesar 36,6, turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Angka kesakitan dapat mencerminkan keadaan kesehatan yang sesungguhnya karena mempunyai hubungan yang erat dengan faktor lingkungan seperti kemiskinan, kurang gizi,

penyakit infeksi, perumahan, air minum yang sehat, kebersihan lingkungan dan pelayanan kesehatan.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.35 Angka Kesakitan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung diketahui bahwa 3 kasus penyakit menular terbanyak sejak tahun 2019-2023 di Kabupaten Belitung adalah Diare 2.288 kasus (2023), DBD sebanyak 628 kasus (2023), dan TBC sebanyak 424 kasus pada tahun 2023 dan didominasi oleh laki-laki. Selama 5 tahun terakhir DBD menjadi penyakit menular yang terus meningkat setiap tahunnya. Sedangkan penyakit tidak menular didominasi oleh penyakit Hipertensi, Diabetes Melitus dan ODGJB yakni pada tahun 2023 sebesar 37.206 penderita penyakit hipertensi, sebanyak 2.966 penderita penyakit Diabetes Melitus dan sebanyak 327 ODGJB (Lihat Tabel 2.19).

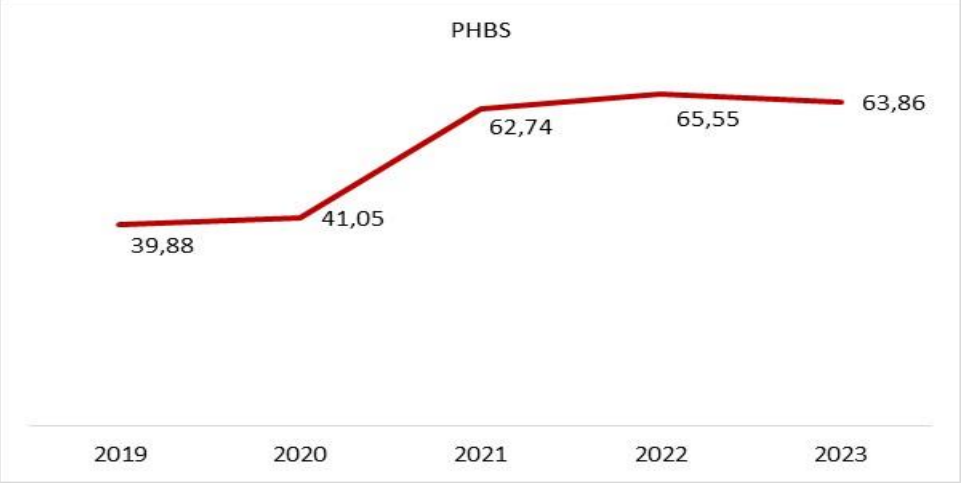
Tabel 2.19 Angka Kesakitan Penyakit Menular dan Tidak Menular Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Penyakit	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
	Menular										
1	Diare	2.312		1.486		1.064		1.269		2.288	
2	TBC	218	117	152	72	152	74	285	180	258	166

No	Penyakit	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
3	Pneumonia	211	168	75	63	37	42	105	55	105	93
4	HIV	18	10	16	3	18	7	24	9	26	11
5	Kusta	9	4	2	3	6	3	3	2	10	7
6	DBD	204	153	304	294	64	83	93	101	329	299
7	Malaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Filariasis	7	8	11	6	11	9	10	10	8	8
	Tidak Menular										
1	Hipertensi	4.864	13.671	6.846	10.377	10.678	13.657	12.248	18.974	15.489	21.717
2	Diabetes Militus	3.200		2.917		3.108		2.935		2.966	
3	ODGJB	221		288		296		342		327	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Tingginya kasus penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Belitung disebabkan oleh beberapa faktor yakni rendahnya perilaku hidup sehat masyarakat (PHBS). Walaupun persentase PHBS Kabupaten Belitung terus meningkat setiap tahunnya namun masih berada pada kategori rendah. Pada tahun 2019 sebesar 39,88 persen, meningkat menjadi 41,05 persen di tahun 2020, meningkat menjadi 62,74 persen pada tahun 2021, meningkat kembali pada tahun 2022 menjadi sebesar 65,55 persen dan turun kembali pada tahun 2023 menjadi 63,86 persen. Walaupun meningkat namun kondisi PHBS Kabupaten Belitung masih sangat rendah (Lihat Gambar 2.36).



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.36 PHBS di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Sarana Kesehatan dan Paramedis

Arah pembangunan kesehatan adalah meningkatkan mutu, jangkauan dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dalam upaya mencapai tujuan tersebut maka penyediaan sarana/ fasilitas pelayanan kesehatan sangat penting artinya. Seperti yang kita ketahui bahwa upaya kesehatan hanya dapat diwujudkan dalam suatu wadah pelayanan kesehatan (health services). Pelayanan kesehatan adalah tempat atau sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Posyandu menjadi sarana kesehatan yang basisnya bersumberdaya masyarakat. Posyandu merupakan jenis UKM yang paling dikenal di masyarakat dewasa ini. Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Kondisi Posyandu di Kabupaten Belitung ditunjukkan dari rasio Posyandu per 100 Balita. Dimana selama lima tahun terakhir (2019-2023) stagnan yaitu 1,4 per 100 Balita, namun pada tahun 2023 sedikit mengalami

peningkatan menjadi 1,6 per 100 Balita. Data rasio posyandu di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.20 Rasio Penduduk terhadap Sarana Kesehatan dan Paramedis Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Bidang/Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio Posyandu per 100 balita	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6
2.	Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk	5,32	5,18	5,07	4,95	4,85
3.	Rasio Pustu per 100.000 penduduk	18,34	17,85	17,47	17,06	16,70
4.	Rasio tenaga medis per 100.000 penduduk	67,43	65,62	67,62	100,15	85,13
5.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	83,67	75,51	95,9	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Selain sarana penunjang kesehatan, tenaga medis menjadi salah satu pendukung layanan kesehatan yang ada di suatu daerah. Untuk menghitung jumlah dan rasio tenaga medis maka dihitung berdasarkan akumulasi dari jumlah tenaga yang ada di Puskesmas serta tenaga yang bekerja di Rumah Sakit. Yang termasuk tenaga medis adalah dokter umum, dokter gigi, Dr/Drg spesialis. Secara keseluruhan kondisi ketersediaan paramedis di Kabupaten Belitung memiliki angka yang fluktuatif selama tahun 2019-2023. Rasio tenaga medis per satuan penduduk pada tahun 2023 sebesar 85,13.

Cakupan Desa/Kelurahan UCI

Desa atau Kelurahan UCI adalah desa/kelurahan dimana 80 persen dari jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapat imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun. Sedangkan imunisasi dasar

lengkap adalah Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang telah mendapatkan 1 dosis imunisasi Hepatitis B0, 1 dosis imunisasi BCG, 3 dosis DPT- HB-HIB, 4 dosis imunisasi polio oral, dan 1 dosis imunisasi campak/MR. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Imunisasi juga memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia termasuk peningkatan umur harapan hidup.

Cakupan desa UCI selama lima tahun terakhir di Kabupaten Belitung, pada tahun 2019 yaitu 100 persen, tahun 2019 yaitu 100 persen kemudian pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 83,67 persen dan di tahun 2021 masih mengalami penurunan menjadi 75,51 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2022 dan tahun 2023 menjadi 95,9 dan 100 persen.

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Terdapat beberapa aspek dalam urusan pekerjaan umum dan tata ruang, diantaranya adalah sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana sosial dan penataan ruang.

Sarana dan Prasarana Umum

Pada bagian ini disajikan data dan informasi mengenai saran jalan dan pengairan**.**

Tabel 2.21 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Belitung (Km), Tahun 2020 – 2023

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2020	2021	2022	2023
Negara	106,56	106,56	106,56	106,56
Provinsi	135,16	135,16	135,16	135,16
Kebupaten	666,02	666,02	666,02	666,02

Sumber : BPS, 2024

Ketersediaan akses jalan memiliki peran penting dalam pembangunan, pertumbuhan dan kesejahteraan suatu daerah. Hal ini karena akses jalan memiliki dampak yang signifikan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat daerah tersebut. Berbagai faktor yang akan dipengaruhi oleh ketersediaan jalan diantaranya pertumbuhan ekonomi, pengembangan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata, akses terhadap layanan dasar hingga konektivitas antar daerah akan berjalan. Kabupaten Belitung memiliki kewenangan jalan sepanjang 666,02 km. Angka tersebut tidak meningkat dari tahun 2019 hingga 2023. Dengan kata lain selama lima tahun berturut-turut tidak ada penambahan panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung. Kondisi tersebut akan menjadi kontraproduktif dengan perencanaan Kabupaten Belitung yang menjadikan sektor pariwisata sebagai lokomotif pembangunan daerah Kabupaten Belitung. Dengan berkembangnya sektor pariwisata tentu akses atau pintu masuk ke wilayah dan jaringan antar kecamatan menjadi prasyarat utama. Untuk itu perlu adanya upaya peningkatan jaringan jalan sesuai dengan kebutuhan daerah sehingga tidak akan menimbulkan dampak negatif yang timbul dikarenakan tidak adanya penambahan panjang jalan.

Tabel 2.22 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Kondisi (Km) Tahun 2019 – 2023

No.	Kondisi Jalan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kondisi Baik	634,72	674,21	697,80	632,68	642,43
2.	Kondisi Sedang Rusak	86,06	64,89	52,14	73,4	66,41
3.	Kondisi Rusak	50,86	62,08	34,51	83,53	73,57
4.	Kondisi Rusak Berat	29,54	0,00	16,73	11,58	18,77
5.	Jalan secara keseluruhan (nasional, provinsi, dan kabupaten)	801,18	801,18	801,18	801,18	801,18

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Selain menghadapi permasalahan ketidak pertambahan panjang jalan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Belitung selama lima tahun berturut-turut, kondisi jalan kabupaten juga membutuhkan perhatian lebih. Berdasarkan data diatas, panjang jalan dengan kondisi baik mengalami *trend* peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021 namun kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022. Pada tahun 2021 terdapat 697,80 km jalan dengan kondisi baik turun menjadi 632,68 km pada tahun 2022. Dan mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 642,43 km. Peningkatan panjang jalan dengan kondisi baik mengindikasikan bahwa terdapat penurunan panjang jalan dengan kondisi sedang rusak, rusak dan rusak berat. Jalan dengan kondisi rusak sedang menunjukkan trend penurunan dari tahun 2019 hingga 2021 namun meningkat pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 mengalami penurunan. Jalan dengan kondisi rusak menunjukkan angka yang cukup fluktuatif dari tahun ke tahun namun mulai tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan. Hal yang perlu menjadi catatan ditemukan pada kondisi jalan rusak berat. Pada kurun waktu tahun 2020 tidak terdapat kondisi jalan rusak berat, namun pada tahun 2023 terdapat 18,77 km jalan dengan kondisi rusak berat.

Tabel 2.23 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Belitung Menurut Jenis Kondisi (Km) Tahun 2019-2023

Tahun	Kondisi Jalan				Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	
2019	555,76	34,46	46,26	29,54	666,02
2020	580,25	26,95	58,82	00,00	666,02
2021	587,84	26,94	51,24	00,00	666,02
2022	543,17	37,50	74,58	10,78	666,02
2023	552,92	30,51	64,63	17,96	666,02

Sumber : Kabupaten Belitung dalam Angka, 2024

Apabila dibandingkan dengan data lain, panjang jalan Kabupaten di Belitung dengan kewenangan provinsi dan kabupaten menurut jenis kondisi kerusakan jalan dengan kategori berat terjadi mulai tahun 2021. Berdasarkan data diatas, kondisi jalan dengan kategori rusak berat terjadi pada tahun 2021 dengan panjang 16,73 km dan meningkat pada tahun 2023 menjadi 18,77 km. Sedangkan berdasarkan data panjang jalan menurut jenis kondisi dengan kewenangan kabupaten, kondisi jalan rusak berat baru muncul pada tahun 2022. Dengan kata lain bahwa kerusakan jalan pada tahun 2021 merupakan jalan di bawah kewenangan pengelolaan provinsi.

Tabel 2.24 Jaringan Irigasi Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Jaringan Irigasi	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jaringan Primer	3.491 m	3.563 m	3.635 m	3.710 m	3.710 m
2.	Jaringan Sekunder	78.711 m	80.317 m	81.956 m	83.629 m	83.629 m
3.	Jaringan Tersier	NA	NA	20.923 m	20.923 m	20.923 m
4.	Luas lahan budidaya	96.285,00	84.964,75	84.964,75	84.964,75	84.943,75

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2024

Untuk menunjang sektor pertanian diperlukan adanya upaya penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air. Upaya ini disebut irigasi dimana para petani dapat mengendalikan debit air yang dibutuhkan

untuk mengairi lahan pertanian ataupun membuang aliran air ke jaringan pembuangan supaya mencapai hasil panen yang berkualitas dan berkelanjutan. Irigasi didukung oleh berbagai komponen yang kemudian disebut sebagai jaringan irigasi. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Jaringan irigasi terbagi menjadi jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier. Dengan luas potensi pertanian sebesar 74.095 Ha, Kabupaten Belitung memiliki jaringan irigasi primer 3491 m pada tahun 2019 dan mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2023 terdapat 3710 m jaringan irigasi primer yang artinya rasio jaringan irigasi primer pada tahun 2023 ialah 19.97 m per 1 Ha lahan pertanian. Penambahan panjang jaringan irigasi juga terlihat pada jaringan irigasi sekunder. Pada tahun 2019 terdapat 78.711 m jaringan dan terus meningkat hingga menjadi 83629 m pada tahun 2023. Peningkatan panjang jaringan irigasi yang telah terbangun menunjukkan hal yang positif bagi keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Belitung.

Sarana dan Prasarana Sosial

Prasarana sosial merupakan sarana fisik yang dibangun oleh pemerintah atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, peribadatan, olahraga, dan kebudayaan. Prasarana sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kerukunan masyarakat. Prasarana sosial juga merupakan salah satu indikator pembangunan daerah yang dapat mengukur tingkat pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Adapun data prasarana sosial di Kabupaten Belitung tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25 Jumlah Sekolah di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

JENJANG PENDIDIKAN	Tahun 2019-2020	Tahun 2020-2021	Tahun 2021-2022	Tahun 2022-2023	Tahun 2023-2024
TK-RA	107	105	102	55	55
SD/MI	122	122	122	122	123
SMP/MTS	32	32	32	33	33
Total	261	259	256	210	211

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Tabel 2.25 menunjukkan bahwa jumlah sekolah di Kabupaten Belitung mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2023. Penurunan tersebut dapat kita lihat pada tingkat TK-RA yang semula 107 sekolah menjadi 55. Hal ini bisa berarti terdapat wilayah yang masih mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan usia dini. Selain itu, penurunan ini bisa menjadi ancaman bagi penduduk untuk mengakses pendidikan dasar di lokasi yang lebih jauh dari tempat tinggalnya.

Tabel 2.26 Rasio Tempat Ibadah Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2023		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Masjid/Musholla/langgar	288	172.212	0,002
2.	Gereja Kristen	15	3.306	0,005
3.	Gereja Katholik	1	1.261	0,001
4.	Pura	5	792	0,006
5.	Vihara	8	9.269	0,001
6.	Klenteng	6	188	0,032
7.	Lainnya (Aliran Kepercayaan)	-	10	0,000
Jumlah		**323**	**187.038**	**-**

Sumber:
1) Kementerian Agama, 2023
2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah masjid masih sangat dominan dibandingkan dengan tempat ibadah lainnya. hal ini

mengindikasikan bahwa masjid relatif lebih banyak dalam melayani penduduk dibandingkan dengan tempat ibadah lainnya. Analisis ini dapat membantu untuk memetakan distribusi tempat ibadah dan pemeluk agama di Kabupaten Belitung.

Penataan Ruang

Penataan ruang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan ruang sesuai dengan perencanaan pembangunan daerah. Penataan ruang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dalam pemanfaatan ruang. Penataan ruang juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Pemerintah Kabupaten Belitung telah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 sebagai pedoman dalam penataan ruang di wilayahnya. RTRW Kabupaten Belitung mengatur tentang fungsi, pola, dan arah pemanfaatan ruang di wilayah daratan dan laut Kabupaten Belitung. RTRW Kabupaten Belitung juga mengatur tentang rencana rinci tata ruang di tingkat kecamatan dan desa.

Untuk mengetahui kinerja penataan ruang di Kabupaten Belitung, dapat dilihat dari beberapa indikator yang terkait dengan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai berikut.

Tabel 2.27 Peruntukan Ruang di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha	0,037 % 103,36 Ha

Sumber: Perda No.03 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034

Tabel 2.28 Hasil Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No	Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Pekerjaan Umum:						
1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	83,44	83,44	84,15	87,10	78,97
2	Persentase Jalan Mantap Kabupaten		n/a	70,88	66,95	67,78
3	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah Ada (%)	52,10	52,10	54,02	54,54	55,07
4	Persentase Pengendalian daya rusak air (%)	7,18				
5	Persentase Sumber Daya Air yang Terkelola dengan Baik		n/a	40,57	43,03	48,02
6	Persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan		80,48	81,85	82,78	83,29
7	Persentase pengolahan air limbah permukiman		53,88	53,98	54,79	54,79
8	Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik		12,73	15,83	20,02	23,04
9	Persentase jalan lingkungan yang tertangani	14,93	15,87	18,59	21,30	24,02
10	Persentase bangunan Gedung yang memenuhi standar		13,06	14,25	14,82	16,21
11	Persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten		60,00	70,00	90,00	90,00
Penataan Ruang:						
12	Ketaatan terhadap RTRW (%)	99,08	97,60	98,03	98,24	97,26
13	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital (%)	100%	100%	100%	100%	100%
14	Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya (%)	100%	100%	100%	100%	100%
15	Tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota (%)	30%	30%	30%	30%	30%
16	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	99,08	97,60	98,03	98,24	97,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Pada bidang pekerjaan umum, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan kinerja, seperti proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, persentase sumber daya air yang terkelola dengan baik, persentase penduduk dengan akses air minum yang aman dan berkelanjutan, persentase pengolahan air limbah permukiman, persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik, persentase jalan lingkungan yang tertangani, persentase bangunan gedung yang memenuhi standar, dan persentase layanan jasa konstruksi tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung telah berupaya untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik di bidang pekerjaan umum. Namun, terdapat juga beberapa indikator yang menunjukkan penurunan kinerja, seperti persentase jalan mantap kabupaten, tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada jaringan irigasi yang sudah ada, dan persentase pengendalian daya rusak air. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di bidang pekerjaan umum.

Pada bidang penataan ruang, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan kinerja yang baik dan stabil, seperti ketaatan terhadap RTRW, tersedianya informasi mengenai RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital, terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan daerah tentang RTR Wilayah Kabupaten beserta rencana rincinya, tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan kota, dan persentase penyelenggaraan penataan ruang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten telah menerapkan prinsip-prinsip penataan ruang yang sesuai dengan peraturan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Namun, terdapat juga beberapa indikator yang tidak tersedia data atau belum dilaporkannya data secara lengkap dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat

kekurangan dalam sistem monitoring dan evaluasi penataan ruang di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.29 Fungsi Pola Ruang Kabupaten Belitung

No	Fungsi Pola Ruang	Hectares
I	**RTH Kawasan/Zona Lainnya (ATR BPN)**	
1	Hutan Lindung	40.159,642
2	Hutan Produksi	41.530,554
3	Hutan Produksi Konversi	522,512
4	Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam	2.557,687
5	Sempadan Sungai	297,917
II	**RTH Berdasarkan Perda RTRW No. 3 Tahun 2014**	
1	Ruang Terbuka Hijau	103,358
	Luas Total	**85.171,670**
	Luas Wilayah Tahun 2019	273.486,558
	Presentase	**31,14 %**

Sumber :RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034

Berdasarkan data fungsi pola ruang RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034, dapat diketahui bahwa Kabupaten Belitung memiliki luas wilayah sebesar 273.486,558 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 31,14 % atau 85.171,670 hektar digunakan sebagai fungsi pola ruang. Fungsi pola ruang terdiri dari hutan lindung, hutan produksi, hutan produksi konversi, kawasan suaka alam / kawasan pelestarian alam, ruang terbuka hijau, dan sempadan sungai. Fungsi pola ruang tersebut merupakan fungsi konservasi dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Fungsi pola ruang tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca, mencegah bencana alam, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dari data tambahan tersebut, dapat dilihat bahwa Kabupaten Belitung memiliki potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang cukup besar. Namun, potensi tersebut juga harus diimbangi dengan pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penataan ruang di Kabupaten Belitung harus memperhatikan aspek-aspek seperti ketersediaan lahan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, industri, permukiman, dan fasilitas umum; keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup; peningkatan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik; serta partisipasi dan koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Kemudian, dari data tersebut juga dapat dipahami bahwa persentase ruang terbuka hijau di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 hingga tahun 2023 menunjukkan angka 0,037%. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada peningkatan luasan lahan yang diperuntukan untuk ruang terbuka hijau. Untuk ketersediaan luasan lahan yang digunakan sebagai ruang terbuka hijau pada tahun 2019 dan 2020 menunjukan persentase 30%. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 disebutkan bahwa pengembangan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan perkotaan capaian tersebut sudah sesuai dengan Perda.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Aspek perumahan rakyat dan kawasan permukiman menjadi sangat penting dalam menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk menganalisis kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman selama periode tertentu, kita dapat mempertimbangkan beberapa indikator kunci yang mencerminkan kondisi dan perkembangan dalam hal ini. Salah satu indikator penting

adalah Rasio Rumah Layak Huni, yang mengukur proporsi rumah di wilayah ini yang memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kenyamanan. Rasio Luas Permukiman Layak Huni adalah parameter yang menunjukkan seberapa besar luas wilayah yang telah dibangun dengan permukiman yang memadai. Persentase Luas Permukiman Kumuh adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana wilayah ini menderita dari permukiman yang tidak layak. Indikator lain yang relevan adalah Persentase Jaringan Irigasi, yang mencerminkan sejauh mana wilayah ini memiliki infrastruktur penting untuk pertanian dan distribusi air. Selain itu, Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Limbah atau Sanitasi Layak menunjukkan sejauh mana penduduk memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang aman dan sehat. Terakhir, Persentase Drainase Skala Kota dalam Kondisi Baik mencerminkan kemampuan wilayah ini dalam mengelola air hujan dan meminimalkan risiko banjir serta dampak lingkungan lainnya.

Melalui pemantauan dan analisis indikator-indikator ini, kita dapat memahami kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kabupaten Belitung selama periode 2019-2023, mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan, dan merencanakan tindakan yang sesuai untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk yang tersedia pada tabel 2.30 berikut.

Tabel 2.30 Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Rumah Layak Huni	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
2	Rasio luas permukiman layak huni	-	-	-	-	
3	Persentase Luas Permukiman Kumuh	16.76	15.39	52.60	28.69	28.69

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Tabel 2.31 Jumlah Rumah di Kabupaten Belitung (Unit) Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Tidak Layak Huni	8.230	8.188	8.054	8.030	8.014
2	Rumah Layak Huni	27.828	27.870	28.004	35.014	35.030
3	Total Rumah	36.058	36.058	36.058	43.044	43.044

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan yang cukup signifikan pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni diiringi dengan penambahan jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Belitung. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Kabupaten Belitung memiliki rencana strategis untuk meningkatkan kualitas rumah layak huni dan mencegah adanya rumah tidak layak huni, termasuk pengembangan kawasan perumahan layak huni.

Tabel 2.32 Luasan Kawasan Kumuh di Kabupaten Belitung Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan*	Luas Kumuh (Ha)**	Capaian Pengurangan Luasan Kumuh 2022 (Ha)***	Sisa Luasan Kumuh (Ha)
1	Tanjung Pandan	Pangkal Lalang	26,15	13,60	12,55
2		Lesung Batang	18,57	10,38	8,19
3		Kampong Damai	4,59	4,59	0
4		Parit	12,7	12,7	0
5		Air Saga	0	0	0
Jumlah Luasan (Ha)			**62,01**	**41,27**	**20,74**

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

D. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Angka kriminalitas di Kabupaten Belitung terus meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan kasus kriminal dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 terjadi tindak kriminal sebanyak 82 kasus,

sempat mengalami penurunan tahun 2020, namun mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 angka kriminalitas terus meningkat. Kasus terbanyak yang tercatat adalah kasus pencurian, diikuti kasus narkoba, kasus penganiayaan dan kasus penipuan. Tingginya kasus narkoba mengindikasikan bahwa kriminalitas semakin mengarah kepada kriminalitas yang "tidak nyata". Angka ini menunjukkan bahwa kriminalitas yang terjadi menjadi semakin berat.

Tabel 2.33 Angka Kriminalitas Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Jenis Kriminal	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kasus Narkoba	12	13	19	23	32
2	Jumlah Kasus Pembunuhan	1	1	3	2	1
3	Jumlah Kejahatan Seksual	1	0	0	0	7
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	17	12	8	12	13
5	Jumlah Kasus Pencurian	38	33	27	31	43
6	Jumlah Kasus Penipuan	13	9	10	11	13
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	0	0	0	0	0
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun		147	99	100	97	109
Jumlah Penduduk		173.717	177.472	181.735	185.591	189,945
Angka Kriminalitas (8)/(9)		**0,0008**	**0,0005**	**0,0005**	**0,0005**	**0,0006**

Sumber: Polres Kabupaten Belitung, 2024

Secara umum kinerja perangkat daerah dalam penanganan terhadap gangguan ketertiban dan keamanan cukup baik. Persentase penegakan PERDA dan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kabupaten Belitung pada tahun 2019-2023 sudah mencapai nilai yang sangat baik seperti terlihat pada tabel 2.31. Terutama pada tingkat penyelesaian pelanggaran K3 yang masih mempertahankan kinerja yang baik yaitu 100% hingga tahun 2023. Persentase penegakan PERDA Kabupaten Belitung juga sudah sangat baik, walau terjadi fluktuatif pada tahun 2020 mengalami penurunan yaitu pada angka 96,52%, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Belitung agar kedepannya dapat mempertahankan nilai yang sudah baik.

Tabel 2.34 Kinerja Pelayanan Umum Perlindungan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3	100%	100%	100%	100%	100%
2	Persentase Penegakan PERDA	100%	96,52%	100%	100%	100%
3.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,3	1,6	1,5	2,3	2,2
4.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	28,4	26,9	26,6	26,3	25,8
5	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	2,5	2,5	2,6	2,5	2,5
6.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	14,44 menit	18,55 menit	17,05 menit	19.58 menit

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung, 2024
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Untuk menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan dibutuhkan personil yang memadai. Dapat dilihat pada tabel 2.34 rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk mengalami penurunan pada tahun 2020 dan 2021, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2022 dengan angka 2,3, angka yang sama pada saat pada tahun 2019, dan selanjutnya kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Kemudian Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk terus mengalami penurunan sejak tahun 2019-2023 dan hal ini akan berdampak pada tingkat ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan mengalami fluktuatif, meskipun pada tahun 2021 sudah naik di angka 2,6 yang sebelumnya 2,5, namun kemudian turun kembali pada tahun 2023 di angka 2,5. Indikator di atas sangat mempengaruhi tingkat indeks kriminal di Kabupaten Belitung. Fluktuasi dalam indikator kinerja pelayanan umum perlindungan masyarakat mencerminkan kompleksitas dalam mengelola faktor-faktor yang memengaruhi keamanan dan ketertiban umum. Dengan perencanaan yang baik, analisis data yang cermat, dan keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah dapat mengatasi fluktuasi ini dan meningkatkan pelayanan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.

E. Sosial

Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan teridentifikasi di dalamnya yakni terpenuhinya kebutuhan materiil, spiritual, dan sosial warga negara untuk dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya. Seseorang atau keluarga dengan kondisi dimana memiliki hambatan atau gangguan dalam menjalankan fungsi sosialnya dan oleh sebab itu tidak dapat menjalankan hubungan yang baik dengan lingkungannya yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar, seseorang dengan kondisi tersebut disebut sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Setiap daerah memiliki kewajiban dalam memberikan perhatian terhadap PMKS.

Dalam urusan sosial, pemerintah Kabupaten Belitung mengupayakan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian bantuan sosial pada PMKS. Namun dari tahun 2019 hingga 2023 masih terdapat masyarakat PMKS yang tidak memperoleh bantuan sosial. Ini ditunjukkan dari fluktuasi persentase PMKS yang menerima bantuan sosial dari tahun 2019 hingga 2023. Dimana pada tahun 2023 persentase PMKS memperoleh bantuan sosial, tertangani dan memperoleh bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebesar 98,29 persen. (Lihat Tabel 2.35).

Tabel 2.35 Indikator Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah PMKS yang seharusnya memperoleh bantuan sosial	14.337	13.631	14.829	14.686	12.194
2.	Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	12.028	12.841	14.487	14.509	11.986
3.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	83,89	94,20	97,69	98,79	98,29
4.	Persentase PMKS yang tertangani	83,89	94,20	97,69	98,79	98,29

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	83,89	94,20	97,69	98,79	98,29

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2024

2.3.2 Fokus Layanan Pemerintah Wajib Non-Dasar

A. Tenaga Kerja

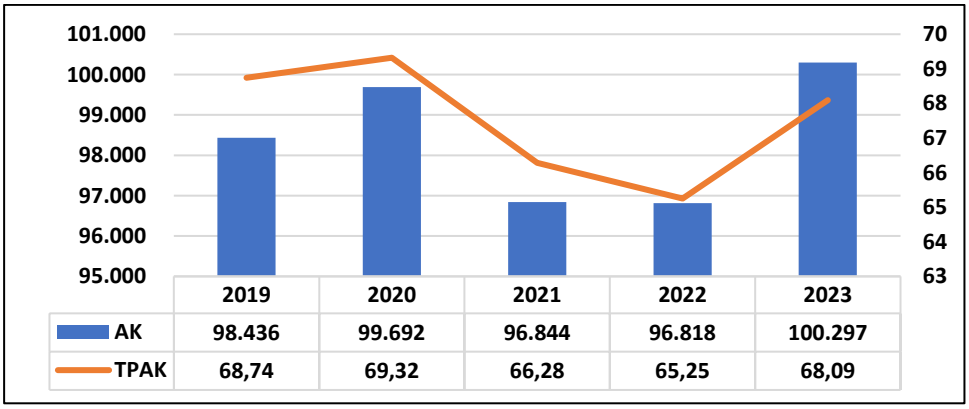
Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang disediakan oleh sumber daya manusia. Faktor ini dibedakan menurut sifat dan kemampuannya. Bedasarkan sifat, ada tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani, sedangkan berdasarkan kemampuan yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Adapun besarnya persentase penduduk yang telah bekerja belum merupakan satu ukuran dalam menentukan apakah masalah ketenagakerjaan dapat dikatakan berhasil. Banyak faktor yang memengaruhi aspek ketenagakerjaan pada suatu daerah. Selain banyaknya penduduk yang telah terserap dalam kegiatan ekonomi, kualitas dari tenaga kerja tersebut juga akan memengaruhi output produksi.

Salah satu indikator struktur tenaga kerja Kabupaten Belitung adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Partisipasi angkatan kerja dapat digunakan sebagai gambaran atas tingkat kesulitan atau kemudahan angkatan kerja dalam mendapatkan pekerjaan. Angka yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja. Sebaliknya, angka tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia.

Pada tahun 2023 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Belitung meningkat sebanyak 1.889 orang, atau menjadi 100.297 orang bila dibandingkan angkatan kerja tahun 2019. Sebaliknya pada kelompok

bukan angkatan kerja terjadi penurunan sebesar 4,63 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung terus bertambah setiap tahunnya.

Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan (TPAK) di Kabupaten Belitung diketahui mencapai 68,09 persen di tahun 2023. Kondisi ini meningkat signifikan jika dibandingkan dengan capaian dua tahun sebelumnya yaitu 66,28 persen pada tahun 2021 dan 65,25 persen pada tahun 2022. Kenaikan persentase TPAK sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang masuk sebagai Angkatan kerja dan penduduk usia kerja 15 tahun keatas.



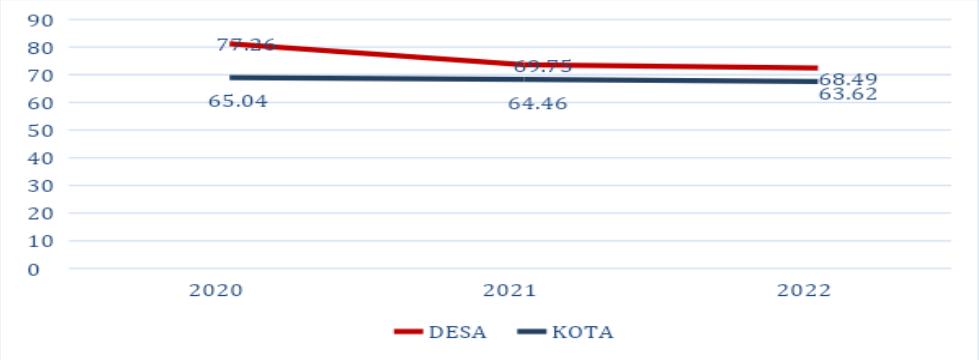
	2019	2020	2021	2022	2023
AK	98.436	99.692	96.844	96.818	100.297
TPAK	68,74	69,32	66,28	65,25	68,09

Sumber: BPS, 2024 (diolah)

Gambar 2.37 Jumlah Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Dilihat dari wilayah tempat tinggalnya, TPAK Belitung tahun 2022 pada wilayah perdesaan lebih besar yaitu 68,49 persen dibandingkan dengan TPAK di wilayah perkotaan yaitu 63,62 persen. Hal ini dikarenakan karakteristik lapangan kerja wilayah perdesaan di Belitung yang beragam dan cenderung sederhana, sehingga persentase penduduk usia kerja yang tinggal di Belitung wilayah pedesaan lebih cenderung untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dibandingkan dengan penduduk usia kerja yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk usia kerja di wilayah pedesaan lebih banyak terserap pada

kegiatan ekonomi dibandingkan dengan wilayah perkotaan (Gambar 2.38).



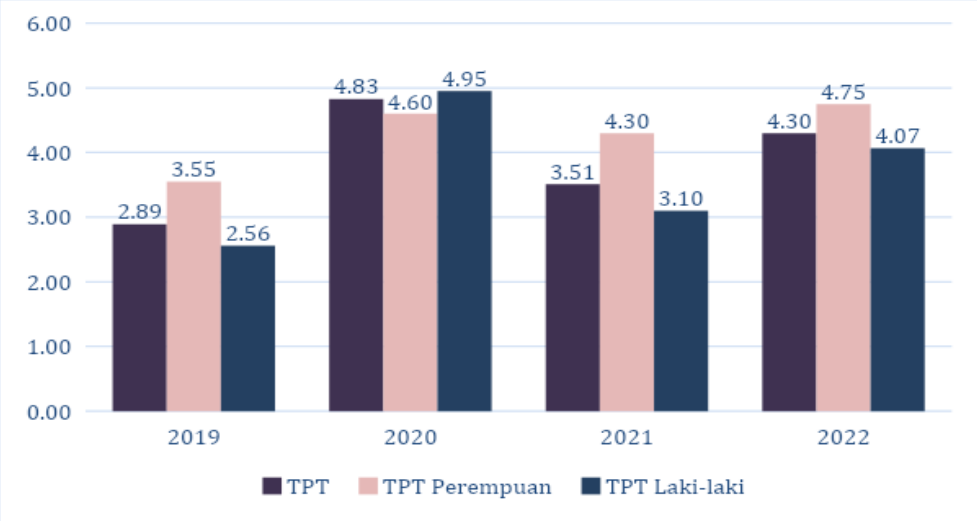
Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.38 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Belitung Menurut Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2020-2022

Sedangkan jumlah pengangguran terbuka di Kabupaten Belitung berfluktuasi sejak tahun 2019-2023 dimana pada tahun 2019 sebesar 2,89 persen (2019), meningkat kembali menjadi 4,82 persen (2020), kembali mengalami penurunan menjadi 3,51 persen (2021) dan meningkat menjadi 4,30 persen (2022) dan akhirnya turun 0,16 poin menjadi 4,14 persen di tahun 2023.

Dilihat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 di Kabupaten Belitung, jumlah TPT laki-laki mengalami kenaikan dan penurunan. Pada tahun 2020 TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 2,39 poin persen dari tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 1,85 poin persen dari tahun 2020. Pada tahun 2022 (4,07 persen) TPT laki-laki mengalami kenaikan sebesar 0,97 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan TPT perempuan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 1,05 poin persen dari tahun 2019. Namun pada tahun 2021 TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 0,30 poin persen dari tahun 2020, sedangkan pada tahun 2022 (4,75 persen) TPT perempuan mengalami kenaikan sebesar 0,45. Jika TPT dilihat berdasarkan jenis kelamin seperti pada TPT perempuan di Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 4,75 persen artinya dari 100 penduduk

perempuan yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat 4 - 5 orang wanita yang menganggur. Sedangkan TPT laki-laki di Kabupaten Belitung tahun 2022 sebesar 4,07 persen yang artinya dari 100 penduduk laki- laki yang termasuk dalam angkatan kerja terdapat sekitar 4 orang laki – laki yang menganggur.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Belitung Menurut Wilayah Tempat Tinggal Tahun 2019-2022

Kondisi partisipasi angkatan kerja juga tergambar melalui data pemerintah Kabupaten Belitung atas jumlah pencari kerja yang ditempatkan pada tahun 2019-2023. Data pencari kerja yang ditempatkan berfluktuasi dan penurunan signifikan terjadi pada tahun 2023 dimana hanya sebanyak 45 orang pencari kerja yang ditempatkan. Rendahnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan beriringan dengan tingginya tingkat pengangguran dan partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Belitung. (Lihat Tabel 2.36).

Tabel 2.36 Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Angkatan Kerja Bekerja	95.583	94.886	93.445	92.658	96.145
2.	Pencari kerja yang ditempatkan	204	133	58	80	45
3.	Jumlah Pekerja/Buruh Peserta Jamsostek	17.723	18.735	21.675	24.712	16.225
4.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	38	34	17	7	14
5.	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	38	34	17	7	0

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2024

Ditinjau dari permasalahan tenaga kerja sangat bervariatif dan dapat timbul dari berbagai aspek. Salah satunya berkaitan dengan konflik antar pekerja dan pengusaha. Tabel 2.36 menunjukkan jumlah angka sengketa pengusaha dengan pekerja yang fluktuatif yakni pada tahun 2019 sebanyak 38 sengketa turun menjadi 14 sengketa pada tahun 2023. Data tersebut beriringan dengan jumlah perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan daerah. Kondisi ini menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung masih terdapat permasalahan antara pengusaha dan pekerja yang terjadi dalam lima tahun terakhir.

Pada sisi jaminan kesejahteraan pekerja yang ada di Kabupaten Belitung telah teridentifikasi untuk memperoleh jaminan kesejahteraan pekerja melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Besaran pekerja yang menjadi peserta Jamsostek mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023 yakni sebanyak 17.723 pekerja di tahun 2019 menjadi 16.225 pekerja (Lihat Tabel 2.34). Namun jumlah tersebut hanya 16,88 persen pekerja yang menerima Jamsostek dari total jumlah angkatan kerja yang bekerja pada tahun 2023. Sehingga masih terdapat 83,12 persen pekerja yang belum memiliki jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal tersebut dapat disebabkan dari jenis pekerjaan

yang tidak memfasilitasi jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerjanya.

Selain jaminan kesejahteraan sebagai salah satu kewajiban pemerintah untuk dapat diberikan kepada warga negara sebagai pekerja. Salah satu upaya dalam meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan pekerja juga dapat didukung melalui pengembangan dan peningkatan kompetensi. Tenaga kerja Kabupaten Belitung telah terfasilitasi dalam pelatihan berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat berfluktuasi sejak tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 71 orang meningkat menjadi 320 orang pada tahun 2023. Sebaliknya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat mengalami penurunan menjadi 50 orang di tahun 2023. Menurunnya tren tersebut menunjukkan semakin sedikit tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan dan terlatih. Selain itu jumlah tenaga kerja yang memperoleh pelatihan masih sangat rendah dibandingkan jumlah angkatan kerja pada tahun bersangkutan (Lihat Tabel 2.37).

Tabel 2.37 Pelatihan Ketenagakerjaan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

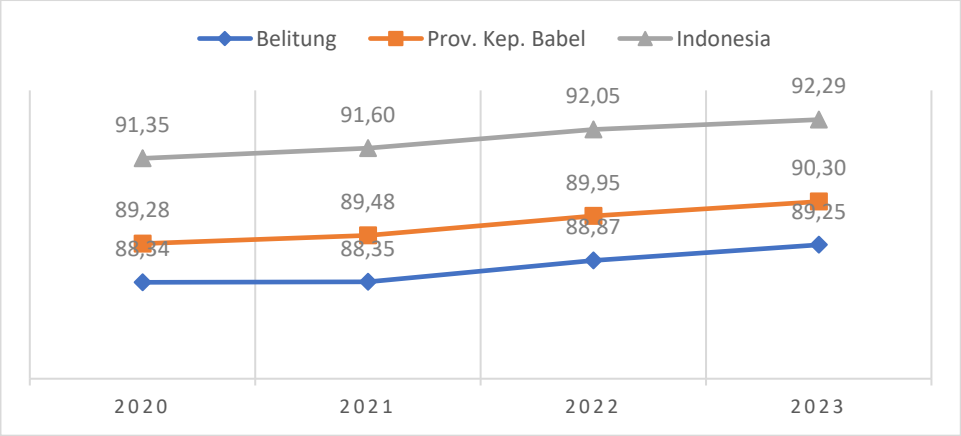
No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	71	13	0	0	320
2.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	96	128	0	0	50
3.	Jumlah Angkatan Kerja	98.436	99.692	96.844	98.818	100.297

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2024

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Salah satu cara untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat adalah dengan menempatkan fokus pembangunan yang berbasis gender. Sampai saat ini, masih ada perbedaan antara laki-laki

dan perempuan di Kabupaten Belitung dalam hal pembangunan. Ini ditunjukkan oleh indeks pembangunan gender Kabupaten Belitung yang berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2023, dengan nilai 89,25 persen pada tahun 2023. Nilai ini masih lebih rendah dari kondisi pembangunan gender di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 90,30 dan nasional sebesar 92,29. (Lihat Gambar 2.40).



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.40 Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2020-2023

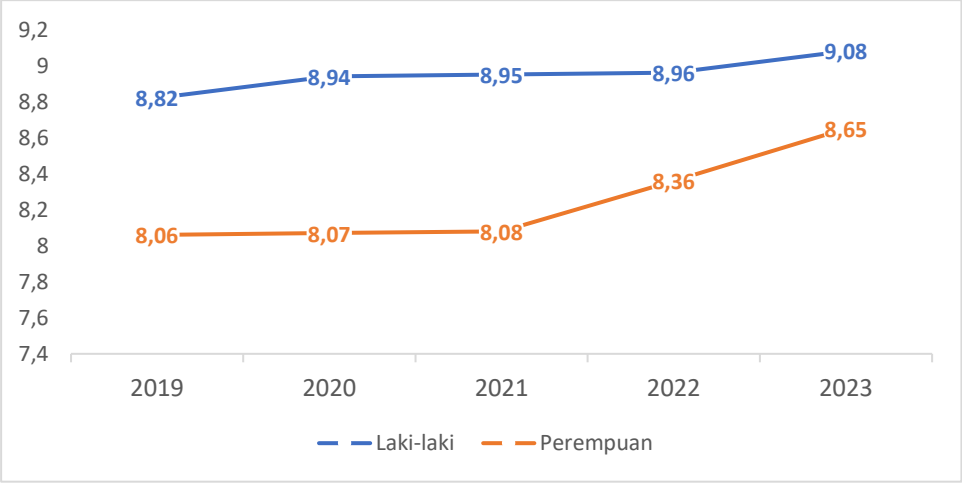
Perempuan dan anak menghadapi banyak hambatan untuk memiliki kebebasan dalam berpartisipasi dan mendapatkan haknya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk kemiskinan, pernikahan dini, kriminalitas, dan kekerasan berbasis gender. Di Kabupaten Belitung, kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat sebanyak 44 kasus pada tahun 2019, turun menjadi 28 kasus pada tahun 2020 dan 2021, tetapi kembali meningkat menjadi 32 kasus pada tahun 2022 dan 51 kasus pada tahun 2023. Sementara itu jumlah kasus kekerasan anak pada tahun 2019 sebanyak 18 kasus, pada tahun 2020 turun menjadi 10 kasus dan 8 kasus pada tahun 2021, tetapi kembali meningkat menjadi 13 kasus pada tahun 2023.(Lihat Tabel 2.38).

Tabel 2.38 Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kasus Kekerasan Anak	18	10	10	8	13
2.	Jumlah Kekerasan dalam rumah tangga	44	28	28	32	51

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2024

Pembangunan gender juga terlihat dari sisi pendidikan, kemandirian ekonomi, hingga pemberdayaan. Rendahnya IPM di Kabupaten Belitung sejalan dengan kurangnya kesempatan bagi perempuan di Kabupaten Belitung untuk melanjutkan pendidikan. Selama lima tahun terakhir, perempuan di Kabupaten Belitung rata-rata lebih sedikit menempuh pendidikan dibandingkan laki-laki, seperti yang ditunjukkan oleh rata-rata lama sekolah laki-laki pada tahun 2023 sebesar 9,06 sedangkan rata-rata lama sekolah perempuan sebesar 8,65. (Lihat Gambar 2.41).

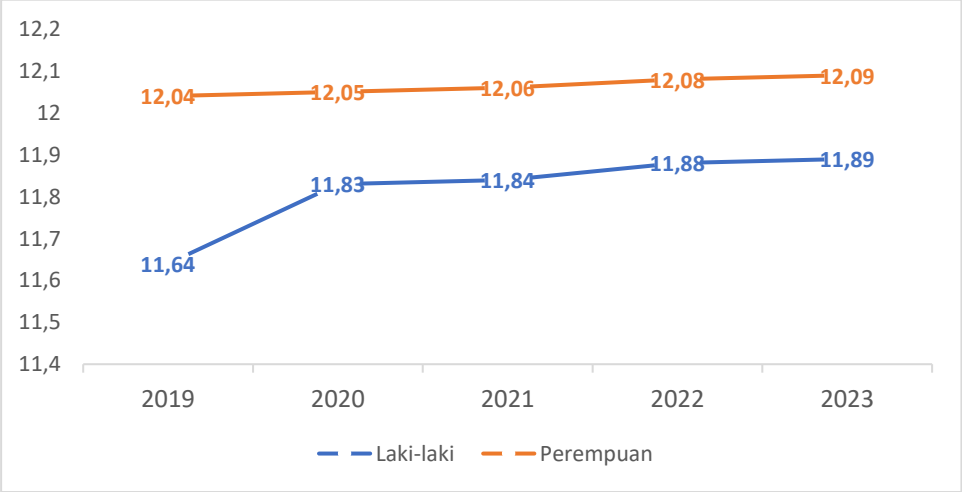


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.41 Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Pendidikan perempuan di Kabupaten Belitung dapat dikatakan lebih rendah dari laki-laki karena masih ada perempuan yang tidak melanjutkan sekolah, seperti yang ditunjukkan oleh rata-rata lama

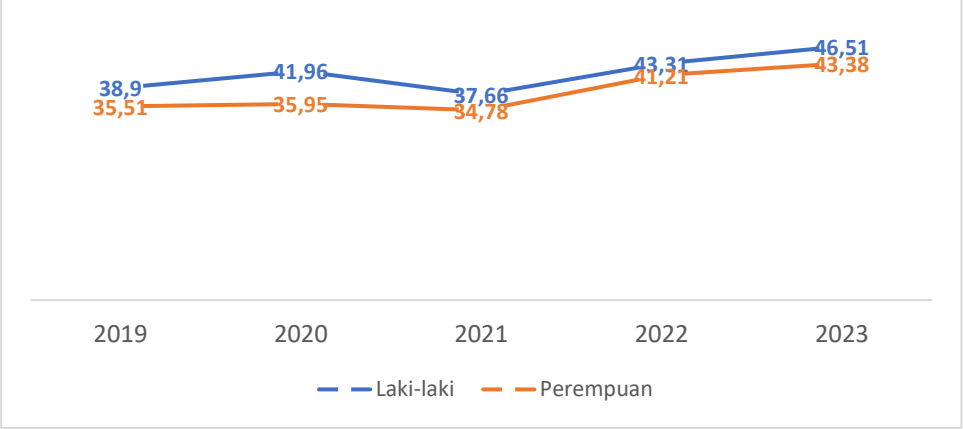
sekolah perempuan dibandingkan laki-laki di Kabupaten Belitung. Namun, sejak lima tahun terakhir, harapan pendidikan perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pada tahun 2022, harapan lama sekolah perempuan sebesar 12,09, atau setara dengan jenjang akhir SMA, sedangkan harapan lama sekolah laki-laki sebesar 11,89, atau setara dengan 11-12 tahun.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.42 Harapan Lama Sekolah Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

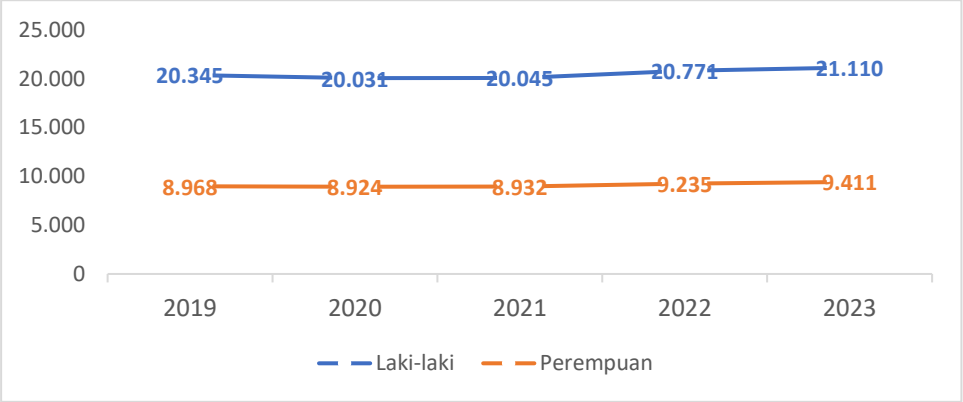
Selain itu, perempuan di Kabupaten Belitung juga memiliki kesempatan yang lebih sedikit daripada laki-laki untuk melanjutkan pendidikan. Sejak tahun 2019-2023, persentase penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Belitung dengan pendidikan SMA ke atas masih didominasi oleh laki-laki dengan angka 46,51 persen sedangkan perempuan hanya 43,38 persen. Ini menunjukkan tingkat pendidikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. (Lihat Gambar 2.43).



Sumber: Belitung dalam Angka, 2024

Gambar 2.43 Persentase Penduduk Usia 25 Tahun Keatas dengan Pendidikan SMA Ke atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Dari sisi kemandirian ekonomi perempuan di Kabupaten Belitung juga masih lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Data menunjukkan bahwa pengeluaran per-kapita perempuan masih jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki sejak tahun 2019-2023. Dimana pada tahun 2023 pengeluaran laki-laki sebesar 21.110 sedangkan perempuan hanya sebesar 9.411. Kondisi ini menunjukkan belum mandirinya perempuan di Kabupaten Belitung secara ekonomi. (Lihat Gambar 2.44).

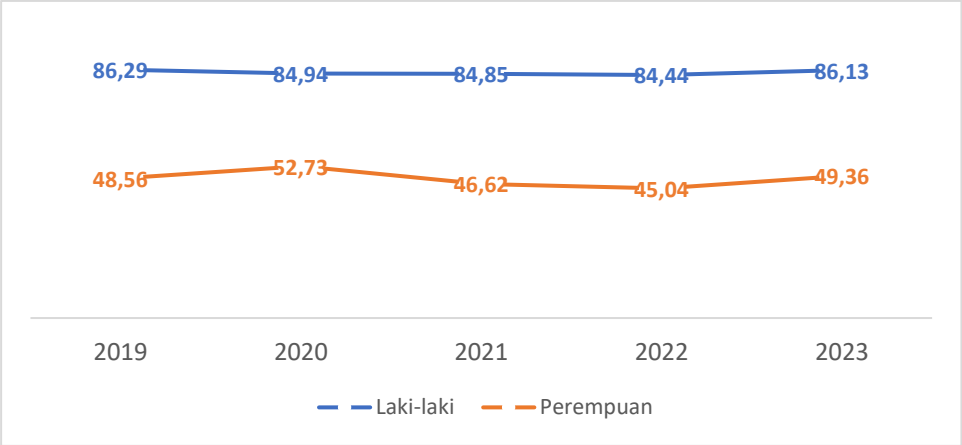


Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.44 Pengeluaran Per Kapita Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Pada tahun 2023, keterlibatan perempuan dalam angkatan kerja hanya 49,36 persen, jauh lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki

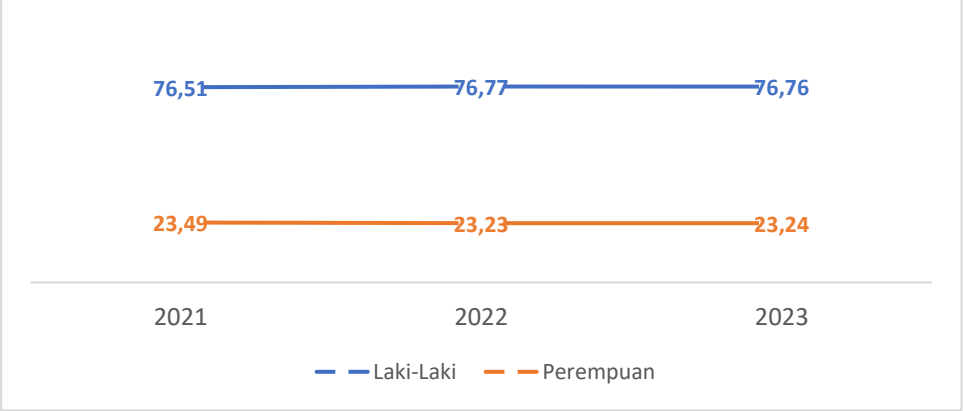
mendominasi dengan 86,13 persen. Perempuan yang telah menerima pendidikan tidak hanya ingin menjadi orang yang mandiri dan berpengetahuan, tetapi juga ingin membantu keluarga dan masyarakat mereka. Selain itu, peran perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dan dinilai dalam pekerjaan mereka. Meskipun demikian, perempuan seringkali tidak terlihat bekerja karena mereka biasanya terlibat dalam pekerjaan rumahan atau tidak menghasilkan upah. Mayoritas angkatan kerja di Kabupaten Belitung selama lima tahun ke belakang adalah laki-laki. (Lihat gambar 2.45).



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.45 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

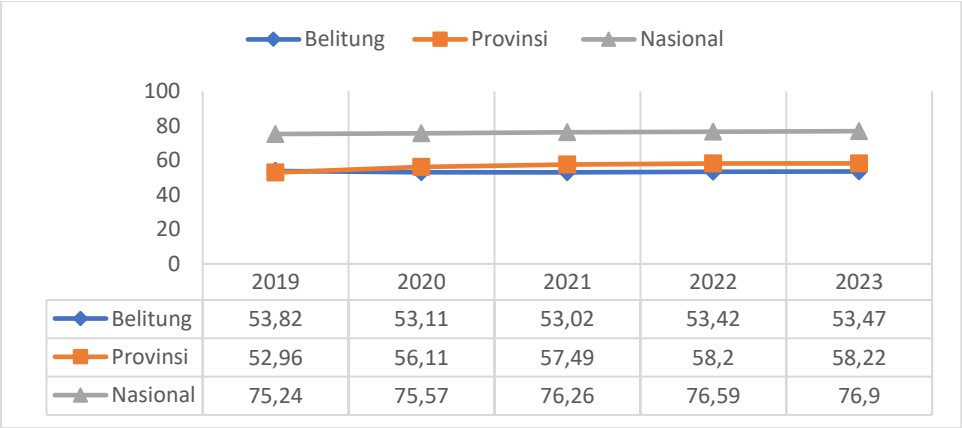
Tidak mengherankan sumbangan pendapatan perempuan lebih rendah dari laki-laki di Kabupaten Belitung karena pendidikan, partisipasi angkatan kerja, dan pendapatan yang rendah. Pada tahun 2023, sumbangan pendapatan perempuan hanya sebesar 23,24 persen, sedangkan sumbangan pendapatan laki-laki sebesar 76,76 persen. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Belitung belum mampu memberdayakan perempuan dalam pembangunan daerahnya (lihat gambar 2.46).



Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.46 Sumbangan Pendapatan Perempuan di Kabupaten Belitung Tahun 2021-2023

Belum mandirinya, perempuan di Kabupaten Belitung dipengaruhi oleh kurangnya pemberdayaan perempuan. Ini terjadi karena perempuan di Kabupaten Belitung kurang terlibat dalam politik, baik dari pemahaman politik maupun keterlibatan politik. Selain itu, perempuan yang tidak diberdayakan tidak memiliki keandalan untuk mandiri secara keuangan dan berpenghasilan sebagai pekerja profesional. Meskipun bervariasi, Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Belitung rendah, sebesar 53,82% pada tahun 2019. Kemudian turun menjadi 53,11% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 53,02% pada tahun 2021, dan kembali meningkat menjadi 53,47% pada tahun 2023. Namun, angka ini masih lebih rendah daripada indeks pemberdayaan gender nasional sebesar 76,9% (Lihat Gambar 2.47).



	2019	2020	2021	2022	2023
Belitung	53,82	53,11	53,02	53,42	53,47
Provinsi	52,96	56,11	57,49	58,2	58,22
Nasional	75,24	75,57	76,26	76,59	76,9

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.47 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019-2023

C. Pangan

Ketersediaan pangan merupakan hal yang sangat krusial sebagai perhatian setiap Pemerintah Daerah. Tidak terkecuali Kabupaten Belitung yang memiliki jumlah penduduk per tahun 2023 sebanyak 189.945 jiwa (BPS, 2024) juga harus memperhatikan ketersediaan pangan yang ada di Kabupaten Belitung. Berdasarkan data yang diperoleh, data kebutuhan, produksi, dan ketersediaan pangan per kapita tahun 2023 ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.39 Kebutuhan, Produksi dan Ketersediaan Pangan Per kapita per tahun Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

Tahun	Kebutuhan Pangan (Ton)	Ketersediaan Pangan Berdasarkan Produksi (Ton)	Ketersediaan Pangan dari Luar Daerah (Ton)	Ketersediaan Pangan (Ton)
2019	15.990	931,13	14.836	15.767,13
2020	15.346	1.410,98	16.321	17.731,98
2021	15.763	1.008,87	18.486	19.494,87
2022	15.559	454,68	19.824	20.278,68
2023	18.428	442,00	23.477	23.919,00

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas diketahui bahwa Kabupaten Belitung masih sangat bergantung pada pasokan pangan yang berasal

dari luar wilayah Kabupaten Belitung. Hal ini terlihat dari jumlah ketersediaan pangan selama lima tahun terakhir dimana jumlah ketersediaan pangan dari luar daerah selalu lebih banyak dari jumlah ketersediaan pangan atas hasil produksi sendiri. Kebutuhan pangan yang masih sangat bergantung terhadap pasokan dari luar daerah ini tergantung dari kondisi cuaca dimana pengiriman bahan pangan sebagian besar dikirim menggunakan transportasi udara ataupun laut. Faktor cuaca dapat membuat Kabupaten Belitung tidak dapat mengontrol harga pangan dengan baik dan berpotensi menimbulkan inflasi yang siklikal bila terjadi kendala pengiriman akibat cuaca ekstrem.

Kabupaten Belitung perlu memikirkan strategi dalam meningkatkan ketersediaan bahan pangan dari produksi dalam daerah untuk menghindari kelangkaan pasokan dari luar daerah. Hal ini untuk menanggulangi produksi dalam daerah yang cenderung menurun selama tiga tahun terakhir dimana tahun 2023 menjadi yang paling sedikit yaitu sebanyak 442,00 ton dari tahun sebelumnya sebanyak 454,68 ton. Meskipun ketersediaan pangan dalam daerah menurun, kebutuhan pangan penduduk cenderung stabil hanya sedikit meningkat pada tahun 2023 sebesar 18.428 ton. Sehingga diperlukan tambahan pasokan dari luar daerah untuk menutup kebutuhan pangan tersebut.

Untuk melihat keragaman konsumsi pangan masyarakat dapat dilihat dari pola pangan harapan yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.40 Skor PPH Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung, dan Nasional Tahun 2019 - 2023

Tahun	Kabupaten Belitung	Propinsi Bangka Belitung	Nasional
2019	76,50	83,8	87,9
2020	81,70	83,4	86,3
2021	78,90	81,1	87,2
2022	79,90	83,1	92,9
2023	82,20	87,9	94,1

Sumber: Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung, 2019 – 2023 & Buku Direktori Perkembangan Konsumsi Pangan Tahun 2019 - 2023

Pola Pangan Harapan adalah indikator yang digunakan untuk melihat keragaman konsumsi bahan pangan penduduk di suatu wilayah tertentu. Skor PPH yang semakin tinggi menandakan semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk yang ada di daerah tersebut. Berdasarkan tabel di atas skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Belitung menunjukkan skor yang fluktuatif. Skor PPH Kabupaten Belitung menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2023 dan selama lima tahun terakhir mengalami penurunan dimana angka terendah ada pada tahun 2019. Hal ini menandakan variasi konsumsi bahan pangan penduduk yang ada di Kabupaten Belitung masih mengandalkan bahan pangan utama berupa beras yang belum diimbangi dengan konsumsi bahan makanan lain seperti buah-buahan, sayur-sayuran, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.

Jika dibandingkan dengan pola pangan harapan secara provinsi, skor PPH Kabupaten Belitung cenderung lebih rendah selama lima tahun terakhir yang menandakan pola konsumsi penduduk secara rata-rata di wilayah provinsi Bangka Belitung masih lebih beragam. Bila dibandingkan dengan PPH secara nasional yang menunjukkan skor yang lebih baik lagi, pola konsumsi penduduk di Kabupaten Belitung masih ketinggalan cukup jauh dimana rata-rata konsumsi penduduk secara nasional sudah cenderung beragam.

Tabel 2.41 Persentase Konsumsi RT Non-Pangan Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2022	2023
1.	Total pengeluaran RT non Pangan	n/a	917.281	797.998	870.831	985.795
2.	Total pengeluaran	n/a	1.752.785	1.626.741	1.775.224	1.887.037
3.	Rasio	n/a	1:2	1:2	1:2	1:2

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi masyarakat Kabupaten Belitung terhadap non-pangan menunjukkan rasio 1:2 yang berarti sebagian jumlah pengeluaran masyarakat dihabiskan untuk konsumsi

non pangan. Rasio tersebut cenderung stabil selama empat tahun terakhir yang menunjukkan bahwa baik peningkatan maupun penurunan tingkat pendapatan masyarakat selalu diikuti oleh tingkat konsumsi RT-non pangan dengan perbandingan 1:2 selama empat tahun terakhir. Tingginya angka konsumsi non pangan mengindikasikan sejahteranya penduduk, sebab ketika penduduk belum sejahtera, maka pendapatan terbanyak akan digunakan untuk konsumsi, sejalan dengan bertambahnya pendapatan, maka proporsi pengeluaran untuk konsumsi semakin menurun.

D. Pertanahan

Bagian krusial dari pelayanan atas lahan adalah kejelasan kepemilikan lahan. dari tabel di bawah dapat diketahui bahwa hingga tahun 2023, luas lahan yang bersertifikat baru mencapai angka 52,47%, masih jauh dari ideal. Ketidakjelasan status kepemilikan lahan akan membawa masalah yang pelik di kemudian hari, tidak hanya melemahkan semangat investasi, namun juga akan berujung pada konflik. Dampak dari ketidakpastian kepemilikan lahan terlihat dari kinerja penyelesaian ijin lokasi yang sangat fluktuatif dan cenderung rendah.

Tabel 2.42 Kinerja Pertanahan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	n/a	n/a	n/a	46,01%	52,47%
2.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	0	11	9	11	0
3.	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	133,33%	17,14%	9,52%	53,33%	59,09%

Sumber :

1. *Kantor Pertanahan Kabupaten Belitung, 2024*
2. *Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Belitung, 2024*

E. Lingkungan Hidup

Kinerja aspek lingkungan hidup dapat diukur melalui Indeks Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.43 Kinerja Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,11	67,62	68,09	69,25	68,9
2.	Indeks Kualitas Air	54,48	53,16	56,75	59,9	59,71
3.	Indeks Kualitas Udara	96,32	92,63	91,69	91,67	90,43
4.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	40,18	46,19	43,89	43,83	44,89

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

Indeks kualitas lingkungan hidup memberikan gambaran dari kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Belitung dari tahun 2019 hingga 2023 masih pada kategori sedang. Pada tahun 2019, Indeks kualitas lingkungan hidup menunjukkan angka 68,11 kemudian mengalami penurunan menjadi 67,62 pada tahun 2020. Nilai indeks kualitas lingkungan hidup mengalami peningkatan kembali menjadi 68,09 pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 menjadi 69,25. Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan menjadi 68,9. Indeks kualitas lingkungan hidup didapatkan berdasarkan kontribusi dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas tutupan lahan. Indeks kualitas air di Kabupaten Belitung mengalami tren peningkatan pada tahun 2019-2022, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 59,71 dan berada pada kategori sedang. Dari 99 (sembilan puluh sembilan) titik, terverifikasi 68 (enam puluh delapan) titik air sungai dan danau yang memenuhi baku mutu sebanyak 34 titik (35%), sedangkan 33 titik (24,26%) cemar ringan dan 1 titik (0,4%) cemar sedang.

Indeks kualitas udara menunjukkan kategori sangat baik pada tahun 2019 hingga 2023. Meskipun demikian, angka indeks kualitas udara mengalami penurunan dari tahun 2019 hingga 2023. Meskipun indeks kualitas udara masih sangat baik namun demikian seiring berjalan dan tumbuhnya aktivitas ekonomi masyarakat kualitas udara dapat mengalami ancaman. Nilai IKU dihitung berdasarkan hasil pengujian parameter SO_2 dan NO_2. Rata-rata nilai SO_2 dan NO_2 tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Kenaikan konsentrasi SO_2 salah satunya disebabkan oleh gas buang kendaraan ke udara. Emisi gas buang kendaraan berdampak paka meningkatnya nilai NO_2 pada area perkantoran yang berdekatan dengan jalan raya yang menjadi akses kendaraan dalam melintas. Banyaknya kejadian kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau akibat dampak El Nino juga menyebabkan kondisi lingkungan pada tahun 2023 menjadi lebih berdebu.

Sedangkan untuk indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan tren fluktuatif. Pada tahun 2019 indeks kualitas tutupan lahan menunjukkan angka 40,18 dengan kategori kurang. Pada Tahun 2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 46,19 meskipun masih dalam kategori kurang. Pada tahun 2021 dan 2022 juga mengalami penurunan menjadi 43,89 dan 43,83 dan kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 44,89. Berdasarkan ketiga indeks kontributor indeks kualitas lingkungan hidup diatas, indeks kualitas tutupan lahan menjadi indeks yang perlu perhatian khusus karena kategori kurang dan menunjukkan tren penurunan.

Tabel 2.44 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah sampah yang ditangani (ton)	-	10.116,90	11.699,76	19.673,74	19.829,21
2.	Jumlah Volume produksi sampah (ton)	-	25.910,91	26.533,31	26.864,58	27.200,03

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3.	Persentase tidak tertangani	-	60,96	55,91	26,77	27,10
4.	Persentase tertangani	-	39,04	44,09	73,23	72,90

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

Jumlah volume produksi sampah sisa aktivitas masyarakat di Kabupaten Belitung terus meningkat. Adanya peningkatan volume sampah di tahun 2023 harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung dalam penanganan sampah dengan menggunakan pendekatan yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah menjadi krusial untuk menjaga kebersihan dan mencegah dampak negatif yang timbul di masyarakat dan alam. Melihat data jumlah sampah yang ditangani menunjukkan adanya tren peningkatan pada tahun 2020 hingga 2023. Adapun secara persentase sampah tertangani tercatat sebesar 39,04% pada tahun 2020, meningkat menjadi 44,09% pada tahun 2021 dan meningkat cukup drastis menjadi 73,23% pada tahun 2022, sedikit menurun pada tahun 2023 sebesar 72,90%. Hal ini mengindikasikan adanya upaya yang cukup efektif dalam mengelola sampah di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.45 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah TPS	25	25	25	25	28
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	16.200	16.200	16.200	16.200	18.144
3.	Jumlah Penduduk	189.824	182.079	184.004	186.331	189.945
4.	Rasio Daya Tampung TPS terhadap Jumlah Penduduk	85.34	88.97	88.04	86.94	95,52

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

Peningkatan jumlah penduduk memiliki dampak pada peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan dari berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka

akan berimplikasi pada peningkatan konsumsi masyarakat, limbah aktivitas ekonomi dan industri, limbah konstruksi pembangunan infrastruktur dan perumahan, peningkatan aktivitas pariwisata yang mendatangkan banyak wisatawan, dan lain lain. Selain mengadopsi pendekatan pengelolaan sampah yang efisien perlu adanya dukungan infrastruktur tempat pembuangan sampah atau TPS. Kabupaten Belitung memiliki TPS 25 titik pada tahun 2019 dengan daya tampung 16.200 ton dan baru meningkat menjadi 28 pada tahun 2023 dengan daya tampung 18.144 ton. Pada tahun 2020 hingga 2022 tidak terdapat penambahan titik TPS. Hal ini berdampak pada rasio daya tampung TPS terhadap jumlah penduduk. Pada tahun 2019 hingga 2020 rasio daya tampung TPS mengalami tren peningkatan dikarenakan adanya penurunan jumlah penduduk. Namun pada tahun 2021 hingga 2022, rasio daya tampung TPS mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk meskipun nilai rasio masih tergolong baik yaitu di angka 86,94%. Rasio daya tampung TPS kembali meningkat di tahun 2023 karena adanya penambahan jumlah TPS seiring dengan penambahan jumlah penduduk.

Tabel 2.46 Uji Pencemaran Air dan Udara Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Uji pencemaran air	58 titik	57 titik	57 titik	57 titik	44 titik
2.	Uji pencemaran udara	4 titik	11 titik	14 titik	4 titik	4 titik

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

Uji pencemaran air dan udara merupakan cara untuk memantau dan menjaga kualitas lingkungan di suatu daerah. Proses ini dilakukan dengan cara pengambilan sampel dari beberapa titik kemudian diuji untuk mendeteksi potensi yang dapat menimbulkan permasalahan lingkungan dan pencemaran yang muncul dan perlu adanya penanganan. Uji pencemaran air di Kabupaten Belitung pada tahun 2019 dilakukan terhadap 58 titik kemudian menurun menjadi 57 titik di tahun 2020

hingga 2022, dan kembali menurun hanya menjadi 44 titik di tahun 2023. Berkurangnya titik yang diuji oleh Pemerintah Kabupaten Belitung disebabkan karena sebagian titik tersebut menjadi kewajiban dari perusahaan untuk melakukan uji pencemaran air. Uji pencemaran air pada sungai cukup hanya 3 (tiga) segmen yaitu pada hulu, tengah dan hilir. Pada uji pencemaran udara di tahun 2019 terdapat 4 titik, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11 titik dan pada tahun 2021 menjadi 14 titik. Uji Pencemaran udara mengalami penurunan kembali pada tahun 2022 dan 2023 menjadi hanya 4 titik. Hal ini disebabkan karena lokasi sampling ditentukan berdasarkan 4 (empat) kriteris lokasi, yaitu:

1. Kepadatan transportasi, dilakukan sampling di lokasi Terminal Bus Tanjungpandan, Jl. Jendral Sudirman.
2. Kepadatan pemukiman, dilakukan sampling di lokasi Kantor Desa Aik Pelempang Jaya, Jl. Nusantara RT.04 RW.02.
3. Lokasi perkantoran, dilakukan sampling di area perkantoran dekat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
4. Lokasi industri, dilakukan sampling di Kawasan Industri Suge, Jl. TS RUU, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau.

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah salah satu pilar dasar dari pemerintahan. Ini adalah sistem yang mencatat informasi penting tentang penduduk suatu negara atau wilayah, termasuk kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, dan identifikasi personal lainnya untuk membantu memastikan hak-hak dasar individu, mendukung kebijakan pemerintah, dan melindungi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, sistem ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh populasi yang dapat dinilai berdasarkan capaian kinerja pelayanan penduduk. Di Kabupaten Belitung dilihat pada tabel 2.42, indikator-indikator untuk melihat

capaian kinerja pelayanan kependudukan dilihat berdasarkan; Rasio penduduk ber KTP, Rasio bayi berakte kelahiran, Rasio pasangan berakte nikah, Kepemilikan KTP, Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk, Ketersediaan *database* kependudukan skala kabupaten dan Penerapan KTP Nasional berbasis NIK.

Tabel 2.47 Capaian Kinerja Pelayanan Kependudukan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rasio penduduk ber KTP	97.61	98.21	98.47	99.36	97,46
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	95,91	96,68	97,33	98,43	99,65
3.	Rasio pasangan berakte nikah	68,98	67,06	76,07	76,51	80,32
4.	Kepemilikan KTP	97,61	98,21	98,47	99,36	97,46
5.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	648	670	684	697	708
6.	Persentase Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	100	100	100	100	100
7.	Persentase Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung, 2024

Rasio penduduk ber KTP Kabupaten Belitung tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 pada angka 97.61, kemudian mengalami kenaikan sejak tahun 2020-2022. Pada tahun 2023, rasio penduduk Kabupaten Belitung yang memiliki KTP per satuan penduduk adalah sebesar 97,46% ada penurunan dibanding tahun 2022. Masih ada penduduk yang sering menunda-nunda untuk mengurus KTP, terutama wajib KTP pemula, sehingga pada tahun 2023 rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk masih belum bisa mencapai angka 100%.

Rasio bayi berakta Kelahiran (0-1 th) pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,9% dari tahun 2022. Artinya semua bayi yang lahir pada tahun 2022 mengalami penurunan dalam memiliki akta kelahiran. Dan di tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan, Hal ini penunjukkan bahwa masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mengurus akta kelahiran. Penurunan ini akibat masih adanya

masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk mengurus Akta kelahiran putra putrinya untuk berbagai kepentingan, khususnya persyaratan masuk sekolah. Rasio bayi berakta kelahiran tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 98,75. Dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 99,65%.

Rasio pasangan berakte nikah mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 di Kabupaten Belitung pada angka 68,98, kemudian turun pada tahun 2020, dan meningkat hingga tahun 2023. Kepemilikan KTP masyarakat Kabupaten Belitung mengalami peningkatan pada tahun 2020 hingga tahun 2022 dengan angka 99,36. Namun turun kembali pada tahun 2023 menjadi 97,46. Kemudian Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk mengalami kenaikan dari tahun 2019-2023, hal ini menunjukkan bahwa adanya upaya masyarakat dan pemerintah Belitung untuk memastikan hak-hak individu masyarakat.

Database kependudukan skala Kabupaten di Kabupaten Belitung sudah ada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung terus berupaya meningkatkan pelayanan dan selalu berinovasi agar masyarakat Belitung selalu terlayani dengan baik dan proses pelayanan dapat berjalan dengan optimal. Inovasi-inovasi layanan yang telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diantaranya inovasi PANTAS (Pelayanan Antar Prioritas), BEKAWAN (Membuat KIA lewat Online), Matang Pohon (Melayani Pindah Datang yang dimohonkan di tempat Tujuan) dan PADUKART (Pelaporan Duka ke Ketua RT).

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga sudah dilaksanakan dan sudah berjalan dari tahun tahun sebelumnya, karena kegunaan dari NIK adalah pada dasarnya menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Dengan demikian, jelas bahwa digit dalam NIK bukanlah serangkaian nomor acak. Tiap digit dalam NIK memiliki perannya sendiri-sendiri. NIK memiliki fungsi untuk memastikan bahwa

penduduk yang memilikinya telah terekam dalam Pusat Bank Data Kependudukan Nasional. Lebih lanjut, NIK juga berfungsi untuk mengintegrasikan penduduk dengan berbagai pelayanan publik yang ada. Oleh karena itu, keberadaan NIK dalam KTP patut mendapat perhatian lebih.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang terbentuk dari 3 (tiga) jenis indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi untuk menuju desa maju dan mandiri diperlukan kerangka kerja membangun berkelanjutan pada aspek social, ekonomi dan ekologi dan menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indeks Desa Membangun dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan integrase, afirmasi dan sinergi pembangunan, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat desa yang sejahtera, adil dan mandiri. IDM mengklasifikasikan desa menjadi 5 (lima) status, yaitu Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal, dan Desa Sangat Tertinggal. Klasifikasi IDM untuk mempertajam penatapan status perkembangan desa sekaligus sebagai rujukan intervensi kebijakan.

Indeks Desa Membangun di Kabupaten Belitung di tahun 2019-2023 mengalami perkembangan yang signifikan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.48 Jumlah Desa berdasar Klasifikasi Desa Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Klasifikasi Desa	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Desa Mandiri	0	0	0	9	17
2.	Desa Maju	19	23	29	28	23
3.	Desa Berkembang	23	19	13	5	2
3.	Desa tertinggal	0	0	0	0	0
4.	Desa sangat tertinggal	0	0	0	0	0
Jumlah Desa		**42**	**42**	**42**	**42**	**42**

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2024

Sedangkan capaian pemberdayaan masyarakat Kabupaten Belitung yang dilihat dari rata-rata jumlah kelompok binaan PKK, jumlah LSM, PKK aktif, dan posyandu aktif sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.49 Capaian Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Pemberdayaan Masyarakat	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	100	100	100	100	100
2.	Jumlah LSM	116	120	129	137	141
3.	PKK aktif	100	100	100	97,96	100
4.	Posyandu aktif	100	100	85,16	85,16	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2024

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penduduk merupakan obyek dan subyek dalam pembangunan. Apabila dikelola dengan baik, maka penduduk akan menjadi modal pembangunan yang sangat esensial untuk maju dan terus berkembang. Penduduk dan pembangunan memiliki kaitan yang erat. Hubungan antara keduanya adalah bersifat timbal balik atau resiprokal. Artinya di

satu sisi, perubahan yang terjadi pada variabel-variabel kependudukan disebabkan oleh pembangunan di bidang sosial dan ekonomi. Tetapi di sisi lain, pembangunan juga dipengaruhi oleh perubahan variabel-variabel kependudukan. Salah satu aspek penting dari proses demografi yang terkena dampak pembangunan adalah fertiltas atau kelahiran. Sementara itu variabel penting dalam menjelaskan fertilitas adalah usia perkawinan.

Kabupaten Belitung memiliki laju pertumbuhan penduduk yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2023, namun cenderung mengalami penurunan yakni pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Belitung sebesar 2,28 persen, menurun menjadi 1,93 persen, kembali menurun menjadi 1,26 persen di tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 1,23 persen dan turun menjadi 1,17 persen tahun 2023. Begitu pula dengan angka kelahiran total yang berfluktuasi yakni pada tahun 2019 sebesar 2,30 persen, meningkat menjadi 2,42 persen pada tahun 2020 dan menurun menjadi 2,08 persen tahun 2022 dan 2023. Angka kelahiran total yang menurun dapat disebabkan oleh pola perkawinan yang berubah, efektivitasnya kontrasepsi, maupun adanya kondisi ketidaksuburan pada masa menyusui. Hal ini sejalan dengan data akseptor program KB aktif di tahun 2023 walaupun meningkat dibandingkan dari tahun 2022 namun masih lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni hanya 81,01 persen masyarakat di Kabupaten Belitung sebagai aseptor KB. Kondisi ini pun selaras dengan jumlah anak pada keluarga yang rata-rata memiliki 2 hingga 3 anak per keluarga. (Lihat Tabel 2.50).

Tabel 2.50 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator Kinerja	Capaian				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	2,28	1,93	1,26	1,23	1,17
2.	Total Fertility Rate (TFR)	2,30	2,42	2,42	2,08	2,18
3.	Rata-Rata Jumlah Anak Per Keluarga	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
4.	Persentase Akseptor KB	81,01	82,07	78,55	78,95	79,54

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Belitung, 2024

I. Perhubungan

Capaian kinerja perhubungan Kabupaten Belitung dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu Indeks Konektivitas Antar Kecamatan (Pulau), Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum (Semua Angkutan Umum), Jumlah Izin Trayek, Jumlah Uji KIR Angkutan Umum, Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum, Persentase Layanan Angkutan Umum, Tingkat Ketersediaan Rambu, dan Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Bidang Perhubungan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

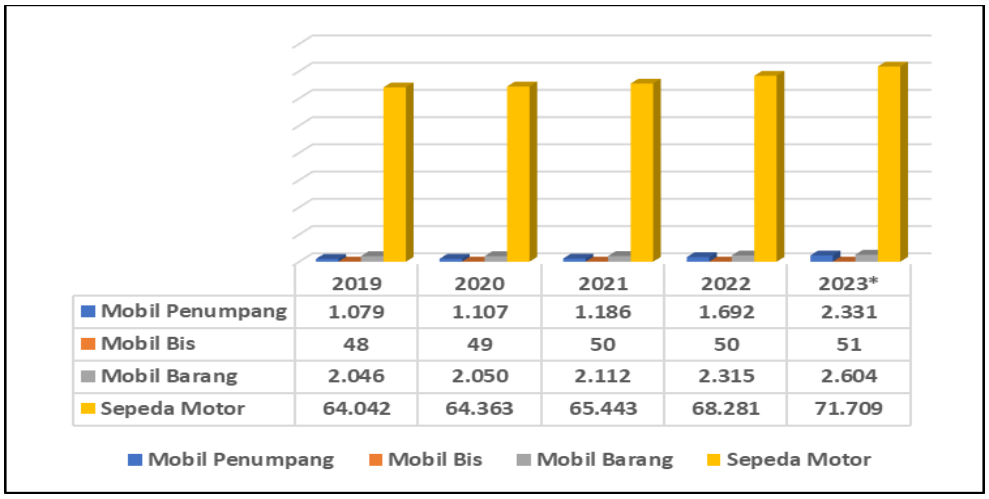
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio konektivitas antar kecamatan (pulau)	51	65	77	52.50	52.50
2	Jumlah arus penumpang angkutan umum (semua angkutan umum)	Turun : 10.638 Naik: 8.325	Turun: 8725 Naik: 6.310	Turun: 12.683 Naik: 9.365	Turun: 9.745 Naik: 12.518	Turun: 6.250 Naik: 12.518
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	305	2.065	2.179	1.248	1.292
4	Persentase layanan angkutan umum	65 %	65 %	65 %	65 %	65%
5	Tingkat ketersediaan rambu	66 %	69 %	69 %	69 %	70%
6	Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan	0,28	0,28	0,29	0,29	0,29

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2024

Menjadi bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki 163 pulau besar dan kecil, Kabupaten Belitung memiliki daratan dan pulau-pulau kecil. Daratan terbesar ada di Pulau Belitung

yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil berpenghuni salah satunya pulau Mendanau. Pulau Mendanau terletak di sebelah barat Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Kecamatan Selat Nasik. Kecamatan Selat Nasik merupakan salah satu dari 5 kecamatan di Kabupaten Belitung yang letaknya terpisah dari pulau utama. Dengan adanya kondisi geografis ini diperlukan dukungan infrastruktur untuk menjaga konektivitas antar wilayah khususnya antar pulau atau kecamatan. Berdasarkan data Indeks konektivitas antar kecamatan (pulau), pada tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan angka 59,6% artinya belum maksimalnya perencanaan pengembangan regional, transportasi, ekonomi, dan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Keterhubungan antar kecamatan atau pulau saat dipengaruhi oleh adanya fasilitas transportasi laut dan pelabuhan. Kabupaten Belitung memiliki 3 pelabuhan namun tidak setiap hari terdapat kapal yang beroperasi mengangkut penumpang dan barang (Hasil wawancara). Hal ini didukung dengan data persentase layanan angkutan umum mengalami tren stagnan dari tahun 2019 hingga 2023 yaitu 65%. Adapun tingkat ketersediaan rambu mengalami peningkatan meskipun masih tergolong rendah yaitu 66% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 70% di tahun 2023. Pentingnya rambu lalu lintas tidak bisa dikesampingkan karena berdampak langsung pada keselamatan, kelancaran perjalanan, dan pengaturan arus lalu lintas.

Kelancaran transportasi diantaranya didukung oleh ketersediaan kendaraan. jumlah kendaraan bermotor kabupaten Belitung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Kendaraan terbanyak di dominasi oleh kendaraan pribadi berupa sepeda motor. Bertambahnya jumlah kendaraan ini di satu sisi menjadi kekuatan untuk peningkatan arus transportasi, namun di sisi lain akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kualitas udara.



	2019	2020	2021	2022	2023*
Mobil Penumpang	1.079	1.107	1.186	1.692	2.331
Mobil Bis	48	49	50	50	51
Mobil Barang	2.046	2.050	2.112	2.315	2.604
Sepeda Motor	64.042	64.363	65.443	68.281	71.709

*Ket. *) sampai dengan bulan September 2023*

Sumber : UPT Badan Wilayah Kabupaten Belitung Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

Gambar 2.48 Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

J. Komunikasi dan Informatika

Kinerja aspek komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung mengalami fluktuatif. Hal tersebut terlihat pada capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2023 sebesar 3,11 dengan predikat baik atau naik 0,09 poin bila dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 3,02 yang juga mendapatkan predikat baik. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaran pemerinah yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalan melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan public kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi dan nepotisme melalui penerapan sisitem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Tabel 2.52 Nilai Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator Kinerja	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,79	3,07	2,40	3,02	3,11

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Pemerintah menyadari pentingnya peran SPBE untuk mendukung semua sektor pembangunan. Upaya untuk mendorong penerapan SPBE telah dilakukan oleh pemerintah dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan sektoral yang mengamanatkan perlunya penyelenggaraan sistem informasi atau SPBE.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Telekomunikasi Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat tingkat kecamatan	6	6	6	6	7
2.	Persentase penduduk yang menggunakan telepon/HP	71,89	74,89	76,71	78,56	75,73
3.	Persentase rumah tangga dengan akses internet	51,22	57,33	67,82	69,43	73,82
4.	Persentase terintegrasinya sistem indormasi	82,75	90,63	96,87	100	100
5.	Diseminasi informasi	NA	100	100	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Derasnya arus informasi di era digital menuntut adanya pengelolaan keterbukaan informasi publik. Hal ini berguna untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan transparan. Kunci keberhasilan dari keterbukaan informasi publik adalah kolaborasi yang baik, antara pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023, Kabupaten Belitung mendapatkan predikat Informatif dengan memperoleh nilai rata-rata 93,12. Komponen penilaian keterbukaan informasi badan publik antara lain Sarana Prasana 94,44%, Kualitas Informasi 100%, jenis Informasi

89,66%, Komitmen organisasi 79,37%, Digitalisasi 95,25%, dan Barang dan Jasa 100%.

Tabel 2.54 Realisasi Terintegrasinya Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2022-2023

No	Indikator	Tahun	
		2021	2022
1	Jumlah sistem informasi yang terintegrasi	46 sistem	47 sistem
2	Jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE yang ada	46 sistem	47 sistem

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Tabel 2.55 Daftar Media Website yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2023

No.	Alamat	Keterangan
1	http://kominfo.belitung.go.id/	Website Dinas Kominfo
2	http://portal.belitung.go.id/	Website Pemkab Belitung
3	http://mediacenter.belitung.go.id/	Website Media Center Dinas Kominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Tabel 2.56 Daftar Media Sosial yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Belitung tahun 2023

NO	Jenis Media Sosial	Keterangan
1	Facebook	http://www.Facebook.com/kominfobelitung
2	Instagram	http://www.instagram.com/kominfobelitung
3	Twitter	http://twitter.com/kominfobelitung
4	Youtobe	http://www.youtobe.com/channel
5	Tiktok	http://www.tiktok.com/@kominfobelitung

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Tabel 2.57 Persentase Data yang Dapat Berbagi Pakai Tahun 2023

No	Aplikasi	Sub Domain	Status	Ket
I	**LAYANAN PUBLIK**			
1	Layanan Cloud Kabupaten Belitung	https://cloud.belitung.go.id	1	Diskominfo
2	Portal Aplikasi Kabupaten Belitung	https://aplikasi.belitung.go.id	1	Diskominfo
3	Media Center Kabupaten Belitung	https://mediacenter.belitung.go.id	1	Diskominfo

No	Aplikasi	Sub Domain	Status	Ket
4	Sistem Informasi Pelayanan Masyarakat	https;//sipmas.belitung.go.id	1	Diskominfo
5	Belitung SaluraN Aspirasi dan Pengaduan	https://besadu.belitung.go.id	1	Diskominfo
6	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	https://ppid.belitung.go.id	1	Diskominfo
7	Layanan Pendaftaran Online RSUD Kabupaten Belitung	https://rsud-marsidijudono.belitung.go.id/pendaftar	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
8	Sistem Manajemen Dokumen Akreditasi	http://sismadak.belitung.go.id	1	RSUD dr. H. Marsidi Judono
9	Sistem Pemantauan Kualitas Air Online	http://siabel.belitung.go.id	1	Dinas Lingkungan Hidup
10	Perijinan Terpadu Satu Pintu	https://oss.go.id	1	DPMPTSPP
11	Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan	http://begalor.belitung.go.id	1	Disdukcapil
12	Sistem Informasi Bantuan Sosial	https://begalor.belitung.go.id	1	Diskominfo
13	Pelayanan Digital Laboratorium Lingkungan	http://petaling.belitung.go.id	1	Dinas Lingkungan Hidup
14	Besadu Rakyat Seputar Lingkungan	http://berasan.belitung.go.id	1	Dinas Lingkungan Hidup
15	Aplikasi Persetujuan Lingkungan secara Online	http://pelilean.belitung.go.id	1	Dinas Lingkungan Hidup
16	Survey Kepuasan Masyarakat	https://skm.belitung.go.id	1	Dinas Kominfo
II	**ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN UMUM**			
1	Beliitung Satu Data	https://data.belitung.go.id	1	Diskominfo
2	Aplikasi Data Terkini	http://adat.belitung.go.id	1	Diskominfo
3	Whistle Blowing System	http://wbs.belitung.go.id	1	Inspektorat
4	e-office Kabupaten Belitung	http://srikandi.arsip.go.id	1	Diskominfo

No	Aplikasi	Sub Domain	Status	Ket
5	Sistem Pengadaan Barang Jasa	http://lpse.belitung.go.id	1	LPSE
6	Sistem Informasi Pelaporan Kegiatan	http://sipelempang.belitung.go.id	1	Bagian Adpem
7	Sistem Informasi Tukang Berkarya (SIKaya)	https://sikaya.belitung.go.id	1	DPUPR
8	Sistem Utilitas Pengelolaan Aik Kite (SUGAK)	https://sugak.belitung.go.id	1	DPUPR
9	Sistem Informasi Keuangan Desa	https://siskeudes.belitung.go.id	1	DPMKBPMD
10	Sistem Informasi Pengawasan Keuangan Desa	https://siswaskeudes.belitung.go.id	1	Inspektorat
11	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Umum	https://fllaj.belitung.go.id	1	Dinas Perhubungan
12	Sistem pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah	https://simpai.belitung.go.id	1	Bappeda
13	Sistem Informasi Rapat	https://sirapat.belitung.go.id	1	Diskominfo
III	**ADMINISTRASI LEGISLASI**			
1	JDIH Kabupaten Belitung	https://jdih.belitung.go.id	1	Bagian Hukum
2	JDIH DPRD Kabupaten Belitung	https://jdih.dprd.belitung.go.id	1	Setwan
IV	**MANAJEMEN PEMBANGUNAN**			
1	e-Planning	https://sipd.kemendagri.go.id	1	Bappeda
2	e-Planning SIMPAI	https://simpai.belitung.go.id	1	Bappeda
V	**SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH**			
1	Simda BMD	Sistem Informasi Aset dan Barang Daerah	1	BPKAD
2	Simda Keuangan	Sistem Informasi Keuangan (e-budgeting)	1	BPKAD
3	Sim Gaji	Sistem Informasi Gaji	1	BPKAD
4	Simda Pendapatan	Sistem Informasi Pendapatan	1	BPPRD

No	Aplikasi	Sub Domain	Status	Ket
VI	SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH			
1	Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	https://simpeg.belitung.go.id	1	BKPSDM
2	e-SKP	https://skp.belitung.go.id	1	BKPSDM
3	e-Absensi	https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/	1	BKPSDM
4	e-Arsip	https://earsip.belitung.go.id	1	BKPSDM
5	e-TPP	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/	1	BKPSDM
6	e-SIDAK	https://aktivitas.belitung.go.id/v2/	1	BKPSDM
7	e-KGB	https://KGB.belitung.go.id	1	BKPSDM
8	e-TPP PPPK	https://e-kinerja.belitung.go.id/tpp/pppk	1	BKPSDM
9	e-Lapkin	https://e-kinerja.belitung.go.id/lapkin/pppk	1	BKPSDM
10	e-Absensi Non PNS	https://e-kinerja.belitung.go.id/absen/nonpns	1	BKPSDM
JUMLAH			47	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

K. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan bentuk organisasi ekonomi yang selaras dengan sistem ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Koperasi dan UMKM sangat penting perannya dalam perkembangan ekonomi masyarakat karena dapat memperluas kesempatan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara merata kepada masyarakat, berpengaruh dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Kopearsi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, diharapkan keberadaan koperasi kedepannya dapat mendorong

pertumbuhan ekonomi masyarakat. Gambaran Koperasi, Usaha Mikro , Kecil, dan Menengah yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Jumlah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupatan Belitung Tahun 2019 –2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase koperasi aktif	71	71	71	72	73,06
2	Omset per koperasi aktif (ribu rupiah)	65.230.643	78.302.227	93.098.521	89.183.860	96.586.230
3	Jumlah BPR/LKM	2.790	3.546	4.282	4.586	n/a
4	Omset per usaha Mikro	NA	NA	NA	365.686.000	220.000.000
5	Jumlah koperasi aktif	133	135	138	139	141
6	Jumlah usaha mikro	18.320	20.503	19.671	20.324	23.776
7	Jumlah usah kecil	NA	822	774	774	774
8	Jumlah usaha menengah	NA	63	7	7	7

Sumber: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, persentase koperasi aktif yang ada di Kabupaten Belitung cenderung stagnan meskipun sempat ada peningkatan pada dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, persentase koperasi aktif meningkat menjadi 73,06% dari tahun sebelumnya sebanyak 72% atau bertambah sebanyak 1,06%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Belitung cukup baik, namun belum didorong secara optimal agar jumlahnya semakin bertambah baik.

Selanjutnya jumlah BPR/LKM mengalami fluktuasi dalam kurun 2019-2022 dengan belum diperolehnya data jumlah BPR/LKM tahun terakhir. Hingga tahun 2022, jumlah BPR/LKM terus meningkat menjadi 4.586 yang menunjukkan membaiknya kondisi perekonomian masyarakat. Dengan demikian, pertambahan jumlah BPR/LKM sebagai penopang usaha mikro, kecil, dan menengah diharapkan dapat menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung.

L. Penanaman Modal

Sektor penanaman modal merupakan salah satu indikator yang menunjukkan gambaran iklim investasi yang ada di Kabupaten Belitung. Iklim investasi yang baik dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang mencakup berbagai sektor. Gambaran investasi yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.59 Kinerja Penanaman Modal, Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN)	94	313	150	126	316
2.	Jumlah Investor Berskala Nasinal (PMA)	34	160	80	69	89
3.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN) (dalam juta rupiah)	317.849,2	497.256,8	390.381,2	968.699,3	985.565,2
4.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA) (dalam US$)	19.457.600	20.652.000	7.239.700	3.173.800	7.184,7

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah nilai investasi yang bersumber dari dalam negeri (PMDN) mengalami fluktuasi pada tiga tahun pertama kemudian mengalami peningkatan di tahun 2022 dan 2023. Peningkatan yang cukup drastis terjadi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.390.381.200.000,- meningkat menjadi Rp.968.699.000.000,- di tahun 2022 kemudian meningkat kembali di tahun 2023 menjadi Rp.985.565.200.000,-. Angka ini menunjukkan minat investor dalam negeri untuk menanamkan modal di Kabupaten Belitung bertambah di tahun 2023. Sementara itu jumlah investasi yang berasal dari luar negeri (PMA) menurun dua tahun berturut sejak tahun 2021 yang mana sebelumnya di tahun 2020 sebesar US$ 20.652.000,- menjadi US$

7.239.700,- ditahun 2021 kemudian turun kembali ditahun 2022 menjadi sebesar US$ 3.178.800 setelah itu di tahun 2023 baru ada peningkatan menjadi US$ 7.184.700. Hal ini menunjukkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Belitung belum sepenuhnya pulih pasca pandemi Covid-19 yang menyebabkan pembatasan atas pergerakan masyarakat sehingga juga turut menurunkan jumlah investasi baik dari dalam maupun luar negeri.

Pada tahun 2023, investasi dalam negeri menunjukkan tren peningkatan begitupun investasi dari luar negeri kendati demikian dampak dari pandemi Covid-19 seperti adanya pengurangan akses dari luar negeri ke Kabupaten Belitung dimana hingga saat ini belum ada penerbangan internasional yang langsung menuju ke Kabupaten Belitung dari luar negeri serta masih terbatasnya jumlah penerbangan dalam negeri dari daerah lain ke Kabupaten Belitung maupun sebaliknya perlu segera di atasi untuk menjaga kestabilan investasi di dalam wilayah Kabupaten Belitung.

Untuk melihat gambaran investasi di berbagai sektor yang ada di Kabupaten Belitung dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 2.60 Nilai Investasi berdasarkan Sektor Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Sektor	Nilai (dalam juta rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan	NA	12.478,90	5.018,00	483.434,50	95.107,8
2.	Pertambangan	NA	53.481,50	15.794,20	139.979,90	134.377,0
3.	Industri Makanan	NA	158.836,20	0	125.352,10	553.734,6
4.	Hotel dan Restoran	NA	312.072,30	128.573,40	122.095,80	66.674,8
5.	Industri Karet dan Plastik	NA	0	0	35.000,00	0
6.	Perdagangan dan Reparasi	NA	26.163,80	9.470,10	29.999,80	21.972,0
7.	Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi	NA	5.760,00	0	28.377,40	25.102,4

No	Sektor	Nilai (dalam juta rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
8.	Industri Mineral Non Logam	NA	2.855,50	0	17.143,90	38,818.1
9.	Perikanan	NA	5.158,10	3.035,70	13.147,60	10.142,0
10.	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	NA	19.765,70	4.656,50	12.220,00	18.069,5
11.	Konstruksi	NA	13.046,20	3.012,10	6.650,00	4.069,8
12.	Jasa Lainnya	NA	84.411,80	10,5	664,2	9.849,5
13.	Listrik, Gas dan Air	NA	90.017,20	309.413,70	113,1	5.717,0
14.	Industri Kertas dan Percetakan	NA	65	0	65	0
15.	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain	NA	0	0	0	0
16.	Industri Lainnya	NA	0	17.096,60	0	0
17.	Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik,	NA	10.500,50	0	0	0
18.	Industri Tekstil	NA	33	0	0	0
19.	Industri Kimia dan Farmasi	NA	NA	NA	NA	120,0
20.	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	NA	NA	NA	NA	1.810,7

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, pada tahun 2023 investasi terbesar ada pada sektor industri makanan sebesar Rp.553.734.600.000,- menunjukkan bahwa kualitas usaha mikro yang ada di Kabupaten Belitung sudah cukup baik meskipun perekonomian masih belum stabil pasca pandemi Covid-19. Pemerintah daerah dan masyarakat terus bersinergi dan berperan aktif dalam pemulihan ekonomi daerah, dengan berbagai upaya antara lain pemberian fasilitasi peningkatan permodalan usaha kecil menengah, pembinaan dan pendampingan usaha mikro kecil serta promosi produk UMKM dalam bentuk Bazar dan pameran Ekspo.

Pada sektor Hotel dan restoran mengalami penurunan dari tahun 2022 menunjukkan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Belitung yang

sebelumnya menjadi sektor primadona belum bisa kembali pulih di tahun 2023 setelah pasca pandemi Covid-19 dan masih memerlukan perhatian tinggi dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan Kabupaten Belitung.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dalam definisi tersebut, maka karakteristik penduduk di Kabupaten Belitung didominasi oleh pemuda dengan usia angkatan kerja. Penduduk usia angkatan kerja tersebut seharusnya menjadi potensi bagi kemajuan Belitung, namun upaya optimal untuk pemberdayaan pemuda ini belum cukup dilakukan. Persentase organisasi pemuda yang aktif tidak mengalami peningkatan yang signifikan dari 2019 hingga 2023. Ini hanya sebesar 85% pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 88% pada tahun 2020. Namun, angka ini tetap stagnan hingga 2023.

Di Kabupaten Belitung, terdapat 30 organisasi olahraga dan 730 atlet berprestasi, yang telah meningkat dalam 5 tahun terakhir. Pencapaian ini menunjukkan perkembangan organisasi pemuda dan pengembangan diri pemuda dalam hal olahraga di Kabupaten Belitung. (Lihat Tabel 2.61).

Tabel 2.61 Organisasi Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Organisasi pemuda yang aktif	85	87,50	88	88	88
2.	Persentase Wirausaha Muda terhadap total wirausaha	NA	0,27	0,40	1,31	1,25
3.	Jumlah organisasi olahraga	24	26	30	30	30
4.	Jumlah prestasi olahraga (Orang)	577	86	39	347	730
5.	Jumlah atlet berprestasi (Orang)	577	86	39	347	730
6.	Jumlah pemuda berwirausaha (Orang)	109	566	566	566	566
7.	Jumlah pemuda berprestasi selain olahraga (Orang)	102	86	6	11	8

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belitung, 2024

Di sisi kewirausahaan, persentase pemuda yang berwirausaha di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 hanya mencapai 1,25 persen dari total wirausaha. Ada peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 109 orang, naik menjadi 566 orang pada tahun 2020, tetapi jumlah ini stagnan hingga 2023. Selain itu, prestasi pemuda di Kabupaten Belitung menurun sejak tahun 2019-2023, dengan prestasi 8 orang di luar bidang olahraga pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa pemuda Kabupaten Belitung memiliki keinginan dan peluang untuk melakukan hal-hal seperti berwirausaha dan lainnya. Oleh karena itu, hal ini memerlukan pengembangan lebih lanjut. (Lihat Tabel 2.58).

N. Statistik

Kinerja statistik adalah elemen kunci dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk memahami realitas sosial, ekonomi, dan lingkungan di sekitar kita. Statistik adalah alat penting bagi pembuat kebijakan, peneliti, bisnis, dan masyarakat umum untuk membuat keputusan yang informatif dan cerdas. Kinerja statistik

Kabupaten Belitung dilihat dari jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan.

Tabel 2.62 Kinerja Statistik Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Dokumen Statistik yang telah diterbitkan	1	2	2	2	2

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Pada tahun 2019, jumlah dokumen statistik yang telah diterbitkan adalah 1 dokumen, kemudian bertambah menjadi 2 dokumen pada tahun 2020-2023. Pemerintah Belitung harus melakukan peningkatan kinerja statistik karena masih sangat rendah, padahal hal ini sangat penting bagi keterbukaan informasi yang akuntabilitas kepada masyarakat, yang akan berdampak pada kinerja lainnya.

O. Persandian

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah bertujuan untuk menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan Persandian untuk pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi; dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Pelaksanaan persandian di Kabupaten Belitung dapat dilihat dari Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah Tahun 2019-2023 pada tabel 2.63.

Tabel 2.63 Kinerja Persandian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	40	40	40	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, 2024

Kinerja persandian Kabupaten Belitung pada tahun 2019-2021 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dan tetap pada angka 40%. Kemudian mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 sebesar 100%. Hal ini menunjukkan adanya upaya dan perhatian pemerintah Kabupaten Belitung terhadap keamanan data dan informasi. Namun, hal ini tetap harus menjadi kinerja yang harus diperhatikan agar tidak mengalami penurunan kedepannya.

P. Kebudayaan

Kebudayaan memiliki peran penting dalam pembangunan, dengan menekankan hubungan yang erat dan saling terkait antara pembangunan dan kebudayaan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu nilai budaya dan sikap mental seperti etos kerja, motivasi berprestasi, ulet, dan daya juang dapat menjadi pendorong produktivitas dan kemajuan bangsa. Nilai budaya dan mentalitas menjadi penentu untuk mencapai kemajuan dalam suatu proses pembangunan. Undang-undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa arah dalam pembangunan kebudayaan dengan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. Melalui pemajuan kebudayaan, diharapkan kebudayaan dapat memperkokoh jati diri dan karakter bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa, meningkatkan

kesejahteraan rakyat, dan mampu mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia.

Potret Seni dan budaya di Kabupaten Belitung di tunjungan dari Tabel 2.64 dimana penyelenggara festival seni dan budaya cenderung menurun sejak tahun 2019-2023. Cagar budaya yang dikelola stagnan yakni sebanyak 38 cagar budaya sejak tahun 2019-2023. Dari sisi karya budaya mengalami sedikit peningkatan menjadi 4 karya budaya dalam merevitalisasi dan inventarisasi. Meningkat 1 buah dari sejak tahun 2021-2022 hanya 3 karya budaya. Dari sisi pelestarian atas benda, situs, dan kawasan cara budaya telah dilestarikan secara keseluruhan. (Lihat Tabel 2.64).

Tabel 2.64 Jumlah Festival Seni Budaya Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	24	8	9	4	4
2.	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	100	100	100	100	100
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	2	2	3	3	4
4.	Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu	38	38	38	38	38

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung, 2024

Q. Perpusatakan

Indonesia menjadi negara pada urutan kedua terbawah pada ruang lingkup literasi yang ada di dunia, kondisi ini menggambarkan kondisi minat baca masyarakat di Indonesia sangat rendah yakni sebesar 0,001 persen (UNESCO. 2022). Angka tersebut bermakna dari 1.000 orang Indonesia, hanya 1 orang yang rajin membaca. Pusat Analisis Perpustakaan Dan Pengembangan Budaya Baca memberikan laporan bahwa di tahun 2023 tingkat kegemaran membaca masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada di angka 66,77 termasuk dalam

kategori “sedang” dengan durasi membaca 10 jam 19 menit per minggu dan 5-6 bahan bacaan per triwulan (Perpustakaan Nasional RI, 2024).

Kondisi pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Belitung 74,27 lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional pada tahun 2023 sebesar 69,42 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya upaya dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat perbedaan formula Penghitungan IPLM tahun 2023 dari tahun sebelumnya dimana hasil Penghitungan IPLM secara Nasional yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. di expose dan di publikasikan secara luas. Berbeda dengan konsep pengukuran dalam kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebelumnya, pada pengukuran ini skor indeks menggunakan skala level 1-100, dimana skor 0-29,9 sama dengan level sangat rendah, skor 30-49,9 level rendah, skor 50-79,9 level sedang, skor 80-89,9 level tinggi dan skor 900-100 level sangat tinggi. Untuk Level sangat rendah dan rendah masuk dalam kategori butuh pembinaan berdasarkan kelemahan dan kekurangan pada komponen serta didasarkan pada dikotomi kewenangan ranah pusat, provinsi dan/atau kab/kota, selanjutnya untuk level sedang di kategorikan memenuhi standar, kemudian level tinggi berkategori baik dan level sangat tinggi artinya perpustakaan percontohan/model.

Adapun formula penghitungan IPLM tahun 2023 sebagai berikut:

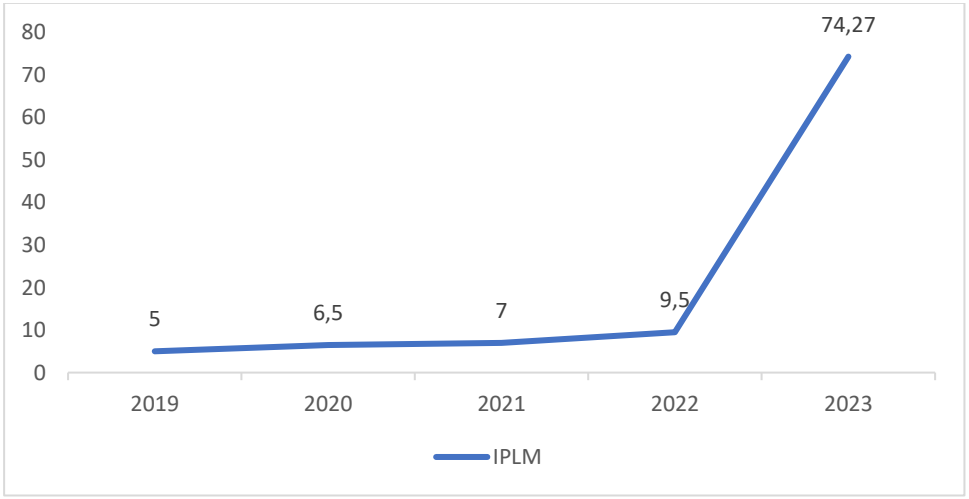
$$UPLM_i = \frac{\text{KabKota + Kec + Desa/Kel + SD/MI + SMP/Mts + SMA/MA + Perguruan Tinggi + Khusus}}{\frac{AM_i}{k_i}}$$

Keterangan:

$UPLM_i$: Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

AM_i : Aspek Masyarakat Kab/Kota sesuai dengan UPLM yang dihitung

k_i : Standarisasi sesuai dengan UPLM yang dihitung



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, dan Perpusnas RI, 2024

Gambar 2.49 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

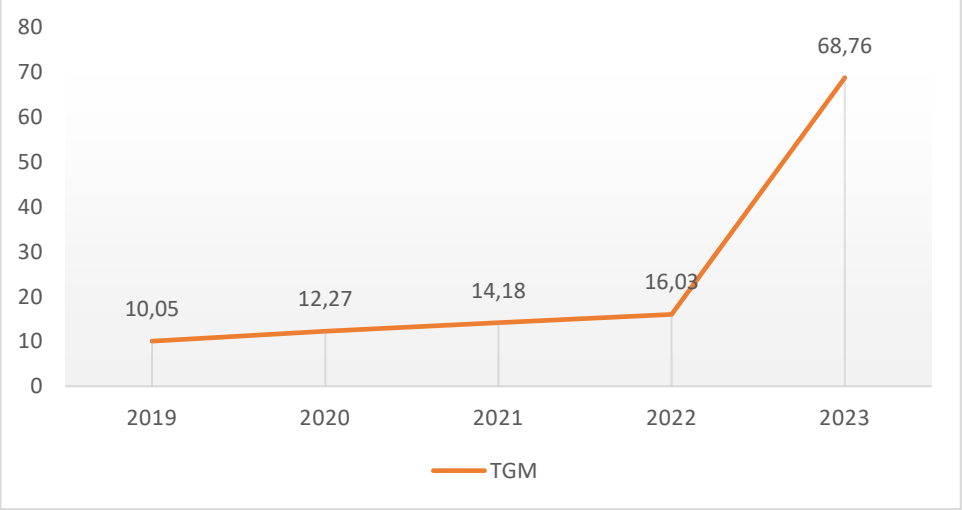
Berdasarkan surat Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Nomor:S.7326/4/PPM.05/XII.2023 tanggal 6 Desember 2023 tentang penyampaian hasil kajian IPLM dan TGM Tahun 2023 IPLM Kabupaten Belitung mendapatkan skor 74,27. Adapun perbedaan dengan penghitungan dengan tahun sebelumnya adalah identifikasi kesalahan data (data teridentifikasi kurang logis apabila masuk dalam kondisi kurang dari 1 revisi data menjadi sama dengan 1, Jika tidak ada unit perpustakaan pada UPLM 1, maka data pada UPLM 2 sd UPLM 7 juga harus kosong Jika data tahun ini kosong sementara tersedia data di tahun lalu, maka akan menggunakan data tahun lalu.

Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tahun Anggaran 2023 menghasilkan simpulan sebagai berikut: Penilaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Belitung Tahun 2023 memperoleh nilai 74,27 dan termasuk ke dalam kategori “Sedang”. Nilai tersebut telah mencapai target diatas IPLM Nasional RI yaitu sebesar 69,42 atau setara dengan 14,58 pada tahun 2023.

Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) Kabupaten belitung memperoleh nilai sebesar 0,7937, artinya pencapaian layanan

perpustakaan sebesar 80,00% dari standar. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM 2) kabupaten Belitung memperoleh nilai sebesar 0,3763, artinya pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 38,00% dari standar. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM 3) kabupaten belitung memperoleh nilai sebesar 1,0000 artinya pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100,00% dari standar. Tingkat Kunjungan Perpustakaan/hari (UPLM4) kab belitung memperoleh nilai 0,0293, artinya pencapaian kunjungan perpustakaan sebesar 30,00% dari standar. Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (UPLM5) kab belitung memperoleh nilai 1,000, artinya pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100% dari standar yang telah ditetapkan. Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) Nasional memperoleh nilai 1,000. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan yaitu sebesar 100%, dari standar . Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan sudah melebihi standar yang ditetapkan sebesar 2% dari populasi penduduk. Anggota Perpustakaan (UPLM7) Kabupaten Belitung memperoleh nilai 1,000. Tingkat engagement anggota perpustakaan sebesar 19,98%, artinya terdapat 19,98% masyarakat yang menjadi anggota Perpustakaan Kab Belitung . Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota perpustakaan sudah melebihi standar yang ditetapkan sebesar 2% dari populasi penduduk.

Pembangunan literasi juga mengarah pada kondisi daya dukung pemerintah untuk mendorong meningkatkan masyarakat dalam berliterasi. Namun tidak hanya dari daya dukung pemerintah, masyarakat pun berperan atas kemampuan pribadi untuk dapat memiliki kemampuan literasi yang baik. Kondisi tingkat kegemaran membaca masyarakat menunjukan nilai sebesar 68,76 persen. Angka tersebut masuk dalam kategori sedang. Kondisi pembangunan literasi masyarakat di Kabupaten Belitung digambarkan sebagai berikut:



Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Gambar 2.50 Tingkat Gemar Membaca Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Terdapat perbedaan formula Penghitungan TGM tahun 2023 dari tahun sebelumnya dimana hasil Penghitungan TGM secara Nasional yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional RI. Berdasarkan data diatas pada tahun 2023 Nilai TGM kabupaten Belitung 68,76 termasuk dalam kategori sedang, dengan Frekuensi membaca 5-6 kali/minggu, dengan durasi baca per hari 1 jam 37 menit, durasi baca per minggu 9 jam 22 menit, buku yang dibaca 6 buku per triwulan, frekuensi akses internet 6 kali per minggu, durasi akses internet per hari 2 jam 0 menit, durasi akses internet perminggu 12 jam 50 menit.

Level sedang literasi dan minta membaca masyarakat di Kabupaten Belitung saat ini tidak terlepas dari daya dukung sarana literasi yakni Perpustakaan. Di Kabupaten Belitung, data perkembangan perpustakaan umum selama 5 (Lima) tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023 dilihat dari jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, rasio perpustakaan persatuan penduduk, jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, persentase pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat, dan jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan per tahun.

Tingkat kunjungan pada perpustakaan di Kabupaten Belitung selama tahun 2019 hingga 2022 dipengaruhi oleh pandemi covid-19 yang mana terdapat kebijakan Pemberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Pada tahun 2019 tercatat jumlah pengunjung sebanyak 10.005 orang, menurun menjadi 3.410 orang ditahun 2020, kemudian meningkat menjadi 3.410 orang ditahun 2021, dan meningkat kembali di tahun 2022 menjadi 6.328 orang, serta mencapai jumlah pengunjung tertinggi selama 5 tahun terakhir yaitu di tahun 2023 sebanyak 15.706 orang. Berdasarkan data kunjungan pemustaka ke semua jenis layanan perpustakaan di atas, ketika dilakukan perbandingan dengan jumlah penduduk Kabupaten Belitung sebagai pengguna potensial perpustakaan, hanya sekitar 8,2 persen penduduk Kabupaten Belitung yang mengunjungi perpustakaan.

Kendati minat masyarakat umum untuk berkunjung ke Perpustakaan masih relatif rendah, namun pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan pelayanan di perpustakaan diantaranya penambahan Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah serta penambahan pustakawan yang tersedia yang ada di Kabupaten Belitung yakni berjumlah 11 orang di tahun 2023. Dapat dilihat pada data tabel dibawah ini.

Tabel 2.65 Jumlah Perpustakaan, Pengunjung dan Koleksi Buku Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	10.005	3.410	3.934	6.328	15.706
2.	Jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah	13.079	13.932	14.934	15.608	16.270
3.	Jumlah pustakawan	3	3	3	6	11
4.	Jumlah tenaga teknis	2	2	5	5	5
5.	Jumlah penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	0	0

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6.	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun (2018-2022)	8.107	8.107	8.107	8.107	7.876

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, 2024

R. Kearsipan

Pengelolaan arsip daerah merupakan aspek penting dari administrasi pemerintahan yang seringkali terlupakan tetapi memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi, akuntabilitas, dan pemeliharaan warisan sejarah daerah. Pengelolaan kearsipan daerah atau kinerja pengelolaan arsip daerah merupakan faktor penting dalam pemeliharaan sejarah, efisiensi operasional, dan akuntabilitas pemerintahan daerah Kabupaten Belitung, dapat dilihat dari Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku pada tabel 2.66.

Tabel 2.66 Kinerja Pengelolaan Arsip di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	19,03	36,59	43,85	64,1	79,49

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Belitung, 2024

Kinerja pengelolaan arsip daerah Kabupaten Belitung meningkat dari waktu ke waktu, hal ini ditunjukkan dari semua perangkat daerah yang telah melakukan pengelolaan arsip secara baku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala ANRI Republik Indonesia mencapai 79,49%. Kendati demikian pemerintah daerah Kabupaten Belitung masih perlu memperhatikan pengelolaan

arsip daerah yang lebih efektif dan efisien, salah satunya dengan mengadopsi sistem arsip secara elektronik.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

A. Kelautan dan Perikanan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

Sektor perikanan yang merupakan salah satu sektor yang mempunyai peran terhadap PDRB. Dengan demikian juga dapat diartikan kalau semakin tinggi nilai persentase PDRB sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Belitung dapat diartikan bahwa semakin tinggi juga penagruh ektor perikanan dalam meningkatkan ekonomi Kabupaten Belitung yang didalamnya diperoleh banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat dalam hal ini nelayan, pembudidaya ikan dan pelaku sektor perikanan lainnya. Kesempatan kerja yang tinggi ini akan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya perekonomian pelaku sektor perikanan juga semakin baik.

Tabel 2.67 Kinerja SubSektor Perikanan Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)	16,37	19,91	21,67	22,07	23,25
2.	Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN)	102,01	110,30	114,40	113,35	112,52
3.	Indikator Kinerja Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	98,48	100,40	102,60	104,80	106,02

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2024

Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Tukar Nelayan (NTN); Indikator ini digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan nelayan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan selama satu tahun dan merupakan perbandingan antara harga produksi dengan harga konsumsi nelayan yang ada di seluruh kecamatan se-Kabupaten Belitung.

Pencapaian realisasi target tahun 2023 sebesar 112,52 dari 113 nilai yang ditargetkan dan nilai ini menurun sedikit dari tahun 2022 sebesar 113,35 dari 112 nilai yang ditargetkan. Target untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 memang mengalami penurunan dibanding tahun 2020 dan 2019 pada saat perubahan Renstra dilakukan dalam rangka menyesuaikan indikator pada Revisi RPJMD Kabupaten Belitung. Realisasi indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan tangkap dan bidang lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan tangkap di kabupaten Belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Tangkap memberikan kotribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Nelayan ini.

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator produksi untuk mengetahui tingkat kesejahteraan pembudidaya ikan, sebagai persentase dari perbandingan indeks harga yang diterima pembudidaya ikan terhadap indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan.

Pencapaian realisasi target Tahun 2023 sebesar 106,02 dari 106 nilai yang ditargetkan dan nilai ini meningkat sedikit dari Tahun 2022 yang hanya sebesar 104,8 dari 104 nilai yang ditargetkan. Peningkatan indikator ini diperoleh bukan hanya semata-mata dari pelaksanaan

kegiatan saja melainkan pencapaian target tersebut juga diperoleh dari pelaksanaan tupoksi bidang perikanan Budidaya dan Bidang Lainnya dalam menyelenggarakan aktifitas pengembangan perikanan budidaya di kabupaten belitung. Pada dasarnya semua kegiatan yang termasuk dalam program pengembangan Perikanan Budidaya memberikan kotribusi kepada peningkatan indikator Nilai Tukar Pembudidaya Ikan ini. Hasil perhitungan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) di Kabupaten Belitung pada Tahun 2023 sebesar 106,02 menunjukan bahwa pendapatan hasil budidaya lebih tinggi dengan biaya produksi dan biaya kebutuhan rumah tangga atau pembudidaya ikan dikatakan sejahtera.

B. Pariwisata

Sebagai salah satu kontributor PDRB Kabupaten Belitung, sektor pariwisata merupakan sektor yang memerlukan perhatian penting dari pemerintah Kabupaten Belitung dimana fokus pertumbuhan ekonomi akan dititikberatkan pada sektor ini. Pertumbuhan sektor pariwisata akan memberikan peningkatan terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat dimana akan memberikan dampak yang luas terhadap sektor lainnya yang secara langsung maupun tidak berkaitan langsung. Potensi terhadap daya tarik pariwisata Kabupaten Belitung telah dikenal secara internasional dimana terlihat dari kunjungan wisatawan yang datang ke Kabupaten Belitung bukan hanya wisatawan lokal, namun juga wisatawan mancanegara.

Tabel 2.68 Kinerja Pariwisata Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Kunjungan wisata	348.157	134.266	184.570	301.906	301.870
2.	Lama Kunjungan Wisata	2,81	4,00	2,36	2,36	1,66
3.	Jumlah destinasi wisata	66	67	68	73	76

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola obyek wisata	16	18	20	20	21

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas jumlah kunjungan wisatawan ke wilayah Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi setiap tahun. Selama lima tahun terakhir jumlah kunjungan wisatawan cenderung menurun dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Puncak penurunan yang paling drastis adalah pada tahun 2020 dimana pandemi Covid-19 sedang terjadi dan pembatasan pergerakan masyarakat dilakukan. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung menunjukkan peningkatan pada tahun 2022 yaitu dari 184.570 orang pada tahun 2021 menjadi 301.906 orang pada tahun 2022. Kemudian kembali sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 yaitu menjadi 301.870 orang. Hal ini disebabkan beberapa factor, antara lain : Tingginya harga tiket pesawat sepanjang tahun 2023, Berkurangnya operator penerbangan pada bulan November s.d Desember 2023 dari 5 (lima) maskapai menjadi 4 (empat) maskapai, Kurangnya penerbangan langsung dari dan ke Belitung untuk destinasi selain Jakarta dan Pangkalpinang, tidak adanya penerbangan langsung internasional/tidak langsung (transit via Jakarta) dari dan ke Belitung sepanjang tahun 2023. Akan tetapi, jika dilihat dari jumlah penurunan yang relative rendah, hal ini masih menunjukkan kepercayaan wisatawan terhadap daerah wisata di Kabupaten Belitung masih mempunyai daya tarik yang baik.

Pertambahan jumlah destinasi wisata pada tahun 2023 sebanyak 3 destinasi dari tahun sebelumnya juga masih memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan wisatawan dengan bertambahnya alternatif tujuan wisata di wilayah Kabupaten Belitung, walaupun pada kenyataannya jumlah kunjungan wisatawan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023 yang disebabkan kenaikan harga tiket

pesawat dan berkurangnya operator penerbangan yang merupakan pintu gerbang masuknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Jika dapat terus dikembangkan, bukan tidak mungkin potensi wisata Kabupaten Belitung yang masih belum tergali dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitung. Pariwisata Kabupaten Belitung yang menonjolkan wisata alam memiliki berbagai jenis tujuan wisata seperti danau kaolin, pulau, pantai, kuliner, dan dermaga yang menawarkan berbagai keunikannya tersendiri. Selain itu, kawasan hutan mangrove dan desa digital yang ada di Belitung juga menjadi salah satu destinasi wisata dapat memberikan alternatif tambahan untuk menarik kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung.

C. Pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung. Komoditi utama yang ada di Kabupaten Belitung adalah lada dan kelapa sawit yang memiliki areal terluas. Namun demikian, jumlah pekerja yang ada di sektor ini, meskipun bukan menjadi pekerjaan utama bagi penduduk Kabupaten Belitung, menyerap pekerja yang tidak sedikit. Sebagai salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, sektor pertanian sebaiknya mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Belitung agar tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun juga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung. Untuk itu gambaran kinerja pertanian Kabupaten Belitung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.69 Kinerja Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB (%)	25,01	27,74	28,22	26,82	26,56

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Belitung mengalami fluktuatif dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Meskipun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2021, kontribusi sektor pertanian kembali menurun pada tahun 2022 dan juga menurun lagi pada tahun 2023. Penurunan angka ini menandakan Pemerintah Kabupaten Belitung hendaknya memberikan perhatian agar produksi bahan pangan tidak terhambat sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan di wilayah Kabupaten Belitung.

Sebagai salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, sektor pertanian sebaiknya mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Belitung agar tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun juga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.70 Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Sektor / Sub Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Produksi tanaman pangan terhadap PDRB	1.454,89 Ton	2.204,66 Ton	1.576,37 Ton	710,4 Ton	679,66 ton
2.	Produksi Hortikultura	420,1 Ton	471,46 Ton	328,38 Ton	412, 62 Ton	1.716,945 ton
3	Produksi daging ternak besar (sapi, kambing, ...)	786,064 Ton	586,742 Ton	484,580 Tonrma.	482,681 Ton	505,092 ton

No	Sektor / Sub Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4	Produksi daging ayam	3.790,456 Ton	3.398,861 Ton	7.441,128 Ton	6.296,330 Ton	5.236.790 ton
5	Produksi telur	2.351,712 Ton	2.429,762 Ton	1.065,496 Ton	1.618,016 Ton	2.184.698 ton

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi fluktuatif tapi menunjukkan penurunan jumlah produksi tanaman pangan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Penurunan tersebut terbilang cukup ekstrem selama lima tahun terakhir, dimana angka tertinggi pada tahun 2020 sebesar 2.204,66 ton menjadi hanya 679,66 Ton pada tahun 2023. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Belitung hendaknya memberikan perhatian agar produksi bahan pangan tidak terhambat sehingga mengakibatkan kelangkaan bahan pangan di wilayah Kabupaten Belitung. Sebagai salah satu hal penting yang dibutuhkan oleh masyarakat, sektor pertanian sebaiknya mendapatkan perhatian yang cukup dari Pemerintah Kabupaten Belitung agar tidak hanya memberikan kontribusi yang cukup bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun juga untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.71 Luas Panen Tanaman Pertanian Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Sektor / Sub Sektor	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Tanaman pangan (Ha)	619	548	490	223	211
2.	Tanaman hortikultura (Ha)	82	83,7	76,37	109,7	170,28

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung, 2024

Kabupaten Belitung memiliki luas tanaman yang cenderung mengalami penurunan sejak tahun 2019 hingga 2023. Seiring dengan perubahan iklim yang juga mempengaruhi hasil produksi pangan di Kabupaten Belitung, alih fungsi lahan pertanian menjadi peruntukan yang lain membuat luas tanaman pangan semakin berkurang. Hal ini

memiliki relasi dengan masih banyaknya masyarakat, termasuk petani, yang beralih ke sektor lainnya seperti pertambangan yang cenderung memberikan tingkat *return* yang lebih baik pada musim tertentu. Disamping itu, luas tanaman hortikultura sempat mengalami penurunan, namun kembali meningkat pada tahun 2022, dan meningkat kembali pada tahun 2023. Sebagai salah satu penyokong perekonomian Kabupaten Belitung, tanaman lada sebagai bagian dari hortikultura masih menjadi idola dimana Kabupaten Belitung dikenal luas sebagai salah satu sentra penghasil lada yang memiliki kualitas yang baik di dunia. Dengan mempertahankan produksi yang baik, hasil dari tanaman lada dapat memberikan *return* yang baik bagi masyarakat Kabupaten Belitung mengingat tanaman lada dapat memberikan *return* yang berkelanjutan.

D. Energi dan Sumber Daya Mineral

Secara persentase, rasio elektrifikasi di Kabupaten Belitung sudah cukup baik meskipun belum mencakup 100%. Elektrifikasi yang baik dapat membantu memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat terutama bagi sektor industri. Sektor industri sebagai terdampak utama akan merasakan dampak dari penggunaan alat-alat elektronik yang membutuhkan listrik. Dengan ketersediaan listrik yang stabil dan berkelanjutan, akan membuat sektor industri dapat berkembang dengan baik yang pada akhirnya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.72 Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase rumah tangga pengguna listrik	**98,77**	98,25	98,62	99,62	99,86

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024

E. Kehutanan

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 579/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2016, telah ditetapkan Hutan Konservasi Gunung Lalang di Kabupaten Belitung menjadi Taman Hutan Rakyat dengan luas kawasan adalah 2.557,68 Ha.

Sebagaimana dilansir dari laman id.wikipedia.org bahwa Tahura merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan umum sebagai tujuan penelitian, ilmu pengetahuan dan Pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 terdapat dua Kawasan perlindungan keanekaragaman hayati yaitu Kawasan suaka alam dan Kawasan pelestarian. Dilansir dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ada 34 Tahura di Indonesia, salah satunya terdapat di Kabupaten Belitung, yaitu Taman Hutan Rakyat Gunung Lalang.

Sebagai bagian dari kawasan pelestarian, Tahura memiliki fungsi sebagaimana taman nasional dan taman wisata alam, yaitu perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Keanekaragaman hayati di Kabupaten Belitung merupakan aset berharga yang menjadi daya tarik wisata alam sekaligus kekayaan ekologis daerah. Hutan-hutan Belitung menjadi habitat bagi banyak spesies endemik dan eksotik, seperti tarsius, kancil, dan berbagai jenis burung. Tumbuhan khas daerah ini, seperti kantong semar dan anggrek hutan, menambah keanekaragaman flora yang jarang ditemukan di tempat lain. Upaya konservasi menjadi semakin penting untuk melindungi habitat alami dan spesies endemik Belitung. Berbagai pihak kini telah melakukan upaya konservasi, termasuk pemerintah daerah

dan masyarakat setempat, yang berkolaborasi dalam pengembangan ekowisata.

Tabel 2.73 Pengelolaan/Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 – 2023

No	Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif di hutan dan lahan; perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil	3 Kelompok	3 Kelompok	3 Kelompok

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

F. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belitung secara umum mengalami penurunan yang tidak signifikan, namun belum menunjukkan kinerja yang positif selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.74 Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan Dalam PDRB	11,23	10,35	10,22	10,91	10,60
2.	Pertumbuhan sektor perdagangan	2,35	-8,94	5,98	14,25	1,75
3.	Jumlah Pedagang	1325	1325	1325	1325	1325
4.	Jumlah kelompok pedagang	3	3	3	3	3
5.	Nilai ekspor bersih perdagangan	139.190.627,46	172.948.745,51	281.112.658,04	215.050.586,01	214.519.007,93

Sumber: Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Belitung, 2024

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB cenderung turun dalam kurun lima tahun terakhir, dimana angka kontribusi turun dari 11,23% pada tahun 2018 menjadi 10,60% pada tahun 2023 yang menunjukkan semakin lesunya perdagangan yang terjadi di Kabupaten Belitung. Penurunan kontribusi ini berkebalikan jika dibandingkan

dengan jumlah ekspor Kabupaten Belitung yang justru menunjukkan tren positif selama lima tahun terakhir meskipun sempat turun pada tahun 2022-2023 (lihat tabel di atas). Kondisi ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Belitung cukup banyak didukung oleh kegiatan ekspor, sementara nilai perdagangan dalam daerah mengalami penurunan.

Data jumlah pedagang dan jumlah kelompok pedagang tidak menunjukkan perubahan selama lima tahun terakhir. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan upaya untuk meningkatkan kontribusi sektor perdagangan salah satunya dengan meningkatkan jumlah pedagang yang ada ataupun dengan meningkatkan kemampuan pedagang untuk dapat menembus pasar yang lebih luas lagi.

G. Perindustrian

Sektor industri dapat menjadi salah satu penggerak dalam pertumbuhan perekonomian suatu wilayah. Hal ini dapat terjadi karena sektor industri dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang ada dengan menyerap tenaga kerja yang bersifat padat karya. Pertumbuhan industri yang baik akan memberikan dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk melihat bagaimana gambaran pertumbuhan industri yang ada di Kabupaten Belitung disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.75 Kontribusi Sektor dan Pertumbuhan Industri Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	11,41	11,94	12,33	13,27	13,01
2	Pertumbuhan sektor industri	-6,38	0,14	4,82	9,05	4,92

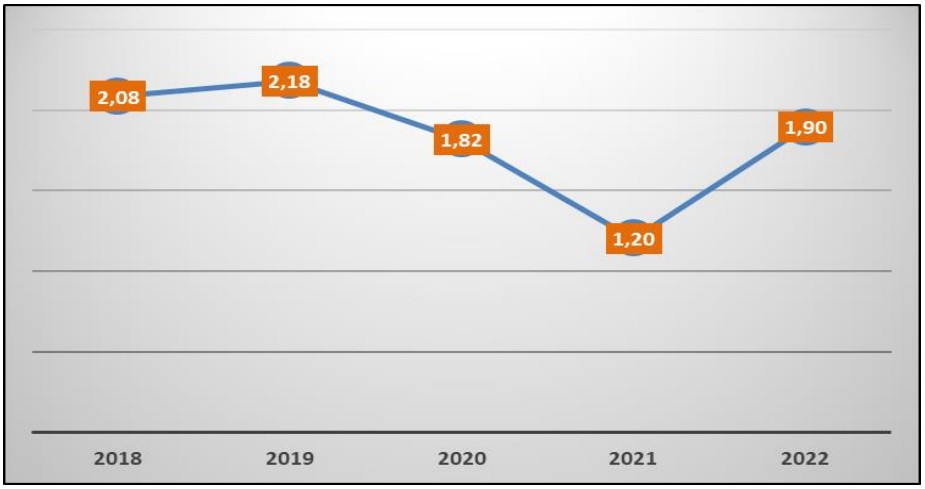
No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Pertumbuhan Industri (Unit Usaha)	2.202	2.242	2.272	2.312	2.352
4	Cakupan bina kelompok pengrajin	20	20	20	20	22

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel diatas pertumbuhan industri di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam jangka waktu lima tahun terkahir, Tahun 2019 berada pada -6,38 mengalami kenaikan menjadi 0,14 pada tahun 2020 kemudian meningkat di tahun 2021 mencapai 4,82 dan kembali meningkat di tahun 2022 mencapai 9,05 kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 4,92. Kondisi ini tidak berbeda dengan Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB yang mengalami kenaikan di tahun 2019 sebesar 11,41 menjadi 11,94 ditahun 2020, kemudian mengalami kenaikan di tahun 2021 menjadi 12,33 dan kembali naik di tahun 2022 sebesar 13,27 kemudian mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 13,01. Sedangkan untuk Pertumbuhan unit usaha Industri mengalami perkembangan yang cukup baik memiliki trend yang positif dari tahun 2019 hingga tahun 2023 meningkat sebesar 150 unit usaha dengan demikian terdapat rata-rata 50 unit usaha industri baru setiap tahunnya. Dan untuk Cakupan bina kelompok Pengrajin tahun 2019 sampai 2023 terdapat peningkatan 2 kelompok pengrajin. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian Pemerintah daerah agar terus ditingkatkan jika sektor industri diharapkan mampu menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung.

Berdasar data yang dikutip dari www.daftarperusahaan.com/bisnis/area/belitung, tahun 2023 tercatat sekitar 40 perusahaan, dari angka tersebut 24 tercatat sebagai perusahaan kecil yang menghasilkan tepung kaolin, 8 perusahaan menghasilkan olahan produk perikanan, 2 perusahaan CPO dan 1

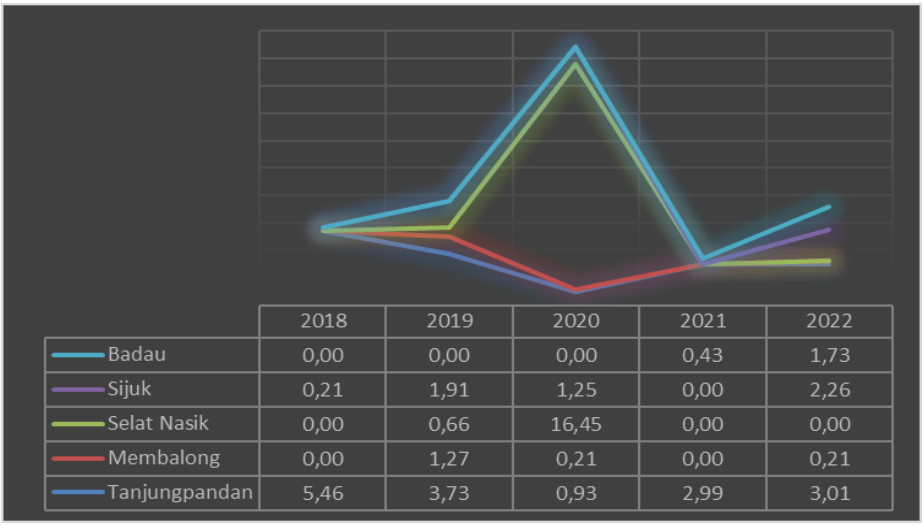
perusahaan timah batangan, 1 perusahaan surat kabar dan 1 perusahaan penghasil kayu bakar. Pertumbuhan industri non tambang memiliki pertumbuhan yang cenderung terus menurun.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Gambar 2.51 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Tambang di Kabupaten Belitung Tahun 2019 -2023

Industri pengolahan tersebar di seluruh kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.52.



	2018	2019	2020	2021	2022
Badau	0,00	0,00	0,00	0,43	1,73
Sijuk	0,21	1,91	1,25	0,00	2,26
Selat Nasik	0,00	0,66	16,45	0,00	0,00
Membalong	0,00	1,27	0,21	0,00	0,21
Tanjungpandan	5,46	3,73	0,93	2,99	3,01

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung Tahun 2024 (diolah)

Gambar 2.52 Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Tambang Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2018 – 2023

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan

Dalam rangka menjalankan proses bisnis utama penyelenggaraan pemerintahan yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan, maka roda manajemen harus digerakkan oleh tata kelola pemerintahan yang baik. Terdapat sepuluh prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, kesetaraan, data tanggap kepala pemangku kepentingan, berorientasi pada visi, akuntabilitas, pengawasan, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. Pada konteks Indonesia, tata kelola pemerintahan yang baik diukur melalui indikator kinerja makro yaitu indeks reformasi birokrasi. Terdapat tiga sasaran reformasi birokrasi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel dengan indikator kinerja Nilai SAKIP, Opini BPK dan Indeks Persepsi Anti Korupsi; birokrasi yang kapabel dengan indikator kinerja Indeks Kelembagaan, Indeks SPBE dan Indeks Profesionalitas ASN; serta pelayanan publik yang prima dengan indikator kinerja indeks pelayanan publik. Adapun capaian kinerja tata kelola pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel 2.76.

Tabel 2.76 Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C (40,2)	CC (53,94)	CC (54,62)	CC (57,71)	BB (75,14)
2.	Opini BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	CC (52,14)	B (60,03)	B (60,90)	B (60,98)	B (63,52)
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,302	3,394	3,6	3,72	3,531

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Apabila dikaji lebih dalam, kinerja tata kelola pemerintah Kabupaten Belitung mengalami peningkatan pada indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2019 pada kategori baik kurang (C), dan terus

mengalami peningkatan pada tahun 2021-2022 pada kategori cukup (CC). Pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai 74,14. Pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi yang berada pada kategori "Sangat Baik" merupakan tantangan untuk tetap mempertahankan dan bahkan lebih meningkatkan sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi birokrasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan komitmen tinggi dari pemimpin daerah, perbaikan kapasitas SDM, dan keterlibatan aktif masyarakat. Belitung telah dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para *stakeholdernya* (publik/masyarakat), dilihat pada tahun 2020-2022 tetap mempertahankan opini BPK pada tingkat WTP. Nilai AKIP mengalami kenaikan pada tahun 2020-2023 walaupun sebelumnya pada kategori cukup (CC), namun sejak tahun 2022 hingga 2023 naik dengan predikat B. Kemudian Belitung telah dapat mengupayakan Indeks Kepuasan Masyarakat yang semakin naik pada tahun 2019-2022, namun sedikit mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut perlu mendapat perhatian untuk meningkatkan lagi, karena masih di bawah nilai maksimal.

A. Perencanaan Pembangunan

Dalam rangka meraih cita-cita Indonesia sebagai negara yang maju dan berdaya saing global, perencanaan pembangunan daerah telah menjadi fondasi utama yang mendorong transformasi nasional. Sebagai negara kepulauan yang luas dan kaya akan sumber daya alam serta budaya, Indonesia memiliki tantangan unik dalam merumuskan strategi perencanaan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi instrumen utama yang memandu arah serta prioritas pembangunan pada tingkat lokal. RPJMD adalah dokumen strategis yang merinci langkah-langkah konkrit yang akan diambil oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan.

Menilai persentase konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD, persentase konsistensi Program RKPD ke dalam APBD dan kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW, merupakan sasaran strategis untuk meningkatnya konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan daerah. Adapun capaian kinerja perencanaan pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel 2.77.

Tabel 2.77 Kinerja Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	87,22	94,30	99,35	91,02	95,20%
2.	Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Persentase keselarasan penjabaran program RPJMD kedalam RKPD adalah jumlah program RKPD tahun bersangkutan dibagi dengan jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan. Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD yang konsisten hampir mencapai 100 persen dengan pertahunnya mengalami peningkatan persentasenya. Sedangkan pada Tahun 2022 konsistensi tersebut mengalami penurunan menjadi 91,02 persen, dikarenakan terdapat 142 program yang dilaksanakan dari 156 program yang direncanakan dalam RPJMD tahun rencana 2022. Dan ditahun 2023 menjadi 95,20 persen dikarenakan dari 146 program yang direncanakan dalam RPJMD terdapat 139 program yang dilaksanakan.

Persentase Konsistensi Program RKPD ke dalam APBD Kabupaten Belitung sudah dapat mencapai 100% dan dapat mempertahankan angka tersebut sejak tahun 2019-2023, hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam pengelolaan APBD yang optimal untuk pembangunan daerah.

B. Keuangan

Kinerja keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai stabilitas, kemandirian, efisiensi, dan efektivitas keuangan pemerintah daerah. Menganalisis berbagai aspek kinerja keuangan daerah merupakan langkah penting dalam mengukur stabilitas dan kesehatan keuangan pemerintah daerah. Setiap indikator memberikan wawasan yang berbeda tentang bagaimana keuangan daerah dikelola, apakah itu secara efisien, mandiri, dan efektif. Kinerja keuangan daerah dilihat dari indikator Persentase SILPA terhadap APBD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah, dan Persentase Peningkatan PAD. Kinerja Keuangan Kabupaten Belitung pada tahun 2019-2023 dalam dilihat pada tabel 2.78.

Tabel 2.78 Kinerja Keuangan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase SILPA terhadap APBD	15,57	10,46	13,16	14,66	16,75
2.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	16,41	16,94	18,29	16,97	20,05
3.	Rasio Efisiensi Keuangan Daerah	617,90	636,53	535,39	571,25	99,20
4.	Rasio Efektivitas Keuangan Daerah	115,10	111,766	124,68	118,41	126,83
5.	Persentase Peningkatan PAD	0,93	0,91	1,15	1,01	-0,76

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung, 2024

Apabila dianalisis lebih dalam, Fluktuasi dalam Persentase SILPA terhadap APBD selama lima tahun terakhir mencerminkan tantangan dalam mengelola anggaran pemerintah daerah Belitung. Terlalu tingginya persentase SILPA pada tahun 2019 (15,57%) dan 2023 (16,75%) mengindikasikan kemungkinan penggunaan anggaran yang kurang efisien, sementara penurunan drastis pada tahun 2020 (10,46%) menunjukkan usaha untuk memaksimalkan penggunaan dana. Pemerintah daerah mungkin masih kesulitan dalam menjaga konsistensi dalam pengelolaan anggaran. Perubahan prioritas, perubahan dalam kondisi ekonomi, atau perubahan dalam tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi cara dana dialokasikan.

Fluktuasi dalam Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Belitung selama lima tahun terakhir mencerminkan tantangan dalam diversifikasi sumber pendapatan dan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2023, tingginya rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang mencapai 20,05 mencerminkan upaya pemerintah daerah Kabupaten Belitung dalam menghasilkan pendapatan sendiri. Jadi sudah ada upaya untuk meningkatkan pendapatan internal. Seperti halnya dengan peningkatan signifikan pada tahun 2021 (18,29) merupakan sinyal positif yang menandakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Belitung telah berhasil mengurangi ketergantungan pada transfer pusat.

Fluktuasi dalam Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir mencerminkan perubahan dalam efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah daerah. Pada tahun 2023 Rasio Efisiensi Keuangan Daerah adalah sebesar 99,20 atau turun hingga 518,70 poin dari tahun 2019. Penurunan ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang memengaruhi penggunaan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan program-program.

Fluktuasi dalam Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Belitung selama lima tahun terakhir mencerminkan tantangan dalam memastikan bahwa penggunaan dana publik menghasilkan hasil yang diharapkan.

Pada tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Belitung berhasil meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, dengan kenaikan Rasio Efektivitas yang menunjukkan hasil yang lebih baik per unit anggaran yang dihabiskan bila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Fluktuasi dalam Persentase Peningkatan PAD selama lima tahun terakhir mencerminkan tantangan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, terutama dalam menghadapi situasi ekonomi yang berubah-ubah. Peningkatan yang signifikan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa pemerintah daerah Belitung berhasil mengambil tindakan yang efektif untuk memulihkan pendapatan asli daerah dalam kondisi yang mungkin masih dipengaruhi oleh pandemi. Namun, penurunan yang terjadi pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa tantangan tetap ada dalam menjaga konsistensi peningkatan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah Belitung perlu terus berupaya dalam diversifikasi sumber pendapatan, meningkatkan administrasi pajak dan retribusi, serta mempromosikan investasi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah Belitung.

C. Pengawasan

George R. Terry menyebutkan bahwa terdapat empat fungsi organisasi yaitu *planning, organizing, actuating* dan *controlling*. Guna menjaga fungsi *actuating* yang harus sesuai dengan *planning* maka fungsi *controlling* mempunyai peranan yang penting. Pada sektor publik, fungsi controlling dikenal sebagai pengawasan dengan menjalankan mekanisme pengendalian dan evaluasi. Kinerja pengawasan di Kabupaten Belitung tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.79.

Tabel 2.79 Kinerja Pengawasan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	C (40,20)	CC (53,94)	CC (54,62)	CC (57,71)	BB (75,14)
2.	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	NA	NA	86,10	85,53	76,61
3.	Indeks Survei Penilaian Integritas (SPI)	NA	NA	80,72	73,35	76,61
4.	Nilai maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3
5.	Persentase tindak lanjut temuan	79,5	100	80,8	69,2	35,71%
6.	Jumlah temuan BPK	12	6	11	10	26
7.	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Belitung, 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Indeks Reformasi Rirokrasi Kabupaten Belitung dari tahun 2019 sampai dengan 2022 nilainya mengalami kenaikan, walaupun belum mencapai target, tetapi untuk tahun 2023 nilainya telah mencapai target. Tahun 2019 sampai dengan 2020 target nilainya adalah B dan tahun 2021 sampai dengan 2023 target nilainya adalah BB. Belum tercapainya target pada tahun 2019 sampai dengan 2022 disebabkan karena beberapa unsur/elemen pendukung nilai RB realisasinya masih rendah. Adapun unsur/elemen pendukung nilai RB antaralain adalah:

- Indeks Indeks Profesionalitas ASN
- Indeks Sistem Merit
- Indeks SPBE
- Kapabilitas APIP
- Maturitas SPIP
- Nilai SAKIP
- Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
- Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Sedangkan untuk tahun 2023 Indeks Reformasi Rirokrasi Kabupaten Belitung nilainya adalah 75,14 atau kategori BB (mencapai target), tetapi hasil ini tidak dapat diperbandingkan dengan hasil tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang

Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya terdapat perubahan kerangka logis.

Untuk Nilai maturitas SPIP Kabupaten Belitung dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah berada pada Level 2, dan pada tahun 2022 dan tahun 2023 naik menjadi Level 3. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Sistim Pengawasan Internal pada masing-masing OPD. Begitu pula untuk Level Kapabilitas APIP, dari tahun 2018 sampai dengan 2021 adalah berada pada Level 2, dan pada tahun 2022 dan tahun 2023 naik menjadi Level 3. Tetapi peningkatan tersebut belum mampu untuk menaikkan Indeks Reformasi Birokrasi untuk tahun 2022, karena masih banyak unsur/elemen pendukung lainnya yang nilainnya masih rendah.

Untuk persentase tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK-RI, nilainya dari tahun 2019 sampai dengan 2022 mengalami fluktuatif (naik-turun), dimana pada tahun 2020 realisasinya mencapai angka maksimal yaitu 100%. Begitu pula untuk Jumlah temuan BPK, dimana pada tahun 2020 menunjukkan angka terendah selama periode 5 (lima) tahun.

D. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Kinerja kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan di daerah adalah dua aspek vital dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan memberikan layanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Keduanya saling terkait dan memiliki dampak yang signifikan pada efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah. Pemerintah daerah biasanya memiliki rencana pendidikan dan pelatihan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pegawai negeri dan organisasi mereka. Hal ini melibatkan identifikasi kebutuhan pelatihan, pengembangan program yang relevan, dan evaluasi hasilnya. Indikator terhadap kinerja kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan Kabupaten Belitung dilihat dari; Indeks Profesionalitas ASN, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, Persentase ASN yang telah mengikuti

pendidikan dan pelatihan struktural, Persentase pelanggaran pegawai pada tabel 2.80.

Tabel 2.80 Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Profesionalitas ASN	75,96	72,86	68,96	71,56	Data blm di Rilis BKN
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35,64	24,34	39,69	44,13	45,16
3.	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	52,07	50	44,04	39,49	28,82
4.	Persentase pelanggaran pegawai	0,30	0,28	0,03	0,06	0,03

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung, 2024

Selama beberapa tahun terakhir, Kabupaten Belitung telah mengalami fluktuasi dalam beberapa indikator yang terkait dengan Kinerja Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan tahun 2019-2023. Pada tahun 2019, Kabupaten Belitung memiliki Indeks Profesionalitas ASN yang kuat, mencapai 75,96%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar ASN di daerah ini memiliki tingkat profesionalisme yang baik. Namun, pada tahun 2020, indeks ini mengalami penurunan menjadi 72,86%, menandakan kemungkinan adanya tantangan dalam menjaga standar profesionalisme di lingkungan ASN Kabupaten Belitung. Tahun 2021 melihat penurunan lebih lanjut, dengan indeks mencapai 59,96%, yang mungkin mencerminkan adanya perubahan lingkungan kerja yang mempengaruhi kinerja ASN. Tahun 2022 menunjukkan perbaikan dengan indeks kembali naik menjadi 71,56%, menunjukkan upaya untuk

memperbaiki profesionalisme ASN di Kabupaten Belitung. Kemudian, Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020, tetapi kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, ini mengindikasikan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kompetensi pegawai.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural menunjukkan komitmen awal untuk pengembangan kompetensi pegawai. Pada tahun 2019, terjadi penurunan signifikan menjadi 52,07%. Tahun 2020 melihat penurunan lebih lanjut, dengan persentase ASN yang mengikuti pelatihan struktural turun menjadi 50%. Ini menunjukkan potensi tantangan dalam memfasilitasi pelatihan pada tahun yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pada tahun 2021, tingkat ASN yang mengikuti pelatihan struktural lebih lanjut menurun menjadi 44,04%. Tahun 2022 masih mencatat tingkat kehadiran yang rendah, dengan hanya 39,49% dan tahun 2023 kembali menurun sebesar28,82%. Fluktuasi dalam tingkat kehadiran ASN dalam pelatihan struktural mengindikasikan perluasan tantangan dalam memastikan bahwa program-program ini tetap relevan dan dapat diakses oleh pegawai negeri di Kabupaten Belitung.

Tingkat pelanggaran pegawai di Kabupaten Belitung selama beberapa tahun terakhir mencerminkan aspek penting dalam kinerja kepegawaian dan efektivitas pengawasan etika dan perilaku pegawai negeri. Pada tahun 2018, mencapai 0,31%, yang merupakan angka yang cukup rendah. Ini menunjukkan adanya pengawasan yang efektif terhadap perilaku pegawai dan pemahaman yang baik tentang etika dalam pemerintahan daerah. Pada tahun 2019 tetap rendah dengan angka 0,30%, menunjukkan konsistensi dalam menjaga standar etika di kalangan pegawai. Tahun 2020 melihat sedikit penurunan, dengan tingkat pelanggaran sebesar 0,28%. Meskipun penurunan ini tidak

signifikan, tetap penting untuk terus memantau dan memastikan agar standar etika tetap ditegakkan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan yang lebih dramatis, dengan tingkat pelanggaran turun menjadi 0,03%. Ini adalah pencapaian yang positif dan Tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit, dengan tingkat pelanggaran kembali ke 0,06%. Namun pada tahun 2023 tingkat pelanggaran menurun sebesar 0,03% hal ini mencerminkan adanya upaya yang signifikan dalam menjaga integritas dan etika pegawai negeri.

E. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja penelitian dan pengembangan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah unsur penting dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah. Ini tercermin melalui beberapa indikator yang mengukur dampak dari upaya penelitian dan pengembangan dalam administrasi pemerintahan antara lain; Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan, Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Kabupaten Belitung, dapat dilihat pada tabel 2.81.

Tabel 2.81 Kinerja Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	NA	40	33,33	100	100
2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	NA	71,43	68	67,07	72,88%
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	NA	35,29	76,92	38,71	29,03%

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	NA	43,72	93,75	62,50	62,50%

Sumber: IKU Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Belitung Tahun 2024

Apabila ditilik dari tabel diatas, Fluktuasi dalam indikator-indikator penelitian dan pengembangan di Kabupaten Belitung menggambarkan tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan konsistensi dalam implementasi rencana kelitbangan, penerapan inovasi, dan penggunaan hasil penelitian dapat dilihat pada indikator Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan. Pada tahun 2020, Kabupaten Belitung mencatat persentase implementasi rencana kelitbangan sebesar 40%. Angka ini mengindikasikan bahwa implementasi rencana-rencana penelitian dan pengembangan masih memerlukan peningkatan. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan menjadi 33,33%, menunjukkan adanya kendala atau perubahan dalam implementasi rencana kelitbangan. Tahun 2022 dan 2023 mencatat peningkatan signifikan dengan tingkat implementasi mencapai 100%. Ini adalah prestasi yang mengesankan, mengindikasikan upaya yang kuat dalam menerjemahkan hasil-hasil penelitian menjadi tindakan konkret.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Belitung selama beberapa tahun terakhir tetap dalam kisaran yang relatif stabil. Pada tahun 2020, angka ini adalah 71,43%, menurun sedikit menjadi 68% pada tahun 2021, kemudian menjadi 67,07% pada tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 72,88%. Kemudian Pada tahun 2020, indikator persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah adalah 35,29%. Ini menunjukkan tantangan dalam memfasilitasi perangkat daerah dalam mengadopsi inovasi. Tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan, dengan persentase mencapai 76,92%, mencerminkan upaya yang lebih besar dalam

mendukung perangkat daerah dalam menerapkan inovasi . Namun, pada tahun 2022, persentase ini turun menjadi 38,71% dan turun lagi pada tahun 2023 hanya menjadi 29,03%, menunjukkan fluktuasi dalam penerapan inovasi di berbagai perangkat daerah.

Kemudian indikator terakhir Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di Kabupaten Belitung juga mengalami fluktuasi selama beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase ini adalah 43,72%. Tahun 2021 melihat peningkatan yang signifikan, dengan tingkat mencapai 93,75%, menunjukkan komitmen untuk mendorong inovasi melalui kebijakan. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase kebijakan inovasi yang diterapkan turun menjadi 62,50%, mencerminkan kemungkinan perubahan dalam prioritas kebijakan.

F. Sekretariat Dewan

Sekretariat Dewan di Kabupaten Belitung memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung fungsi dan tugas legislasi di tingkat lokal. Kinerja Sekretariat Dewan mencerminkan efisiensi, transparansi, dan kemampuan untuk menyelenggarakan proses legislasi yang baik, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja ini dilihat dari indikator Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu tahun 2019-2023 pada tabel 2.82.

Tabel 2.82 Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu	53,8	28,6	40	81,25	66,67

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Belitung, 2024

Apabila ditilik pada tabel di atas, fluktuasi dalam Persentase Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu di Kabupaten Belitung mencerminkan dinamika dalam kinerja Sekretariat Dewan dan proses legislasi. Pada tahun 2019, Kabupaten Belitung mencatat persentase yang cukup tinggi, yaitu sebesar 53,8% dari peraturan daerah yang berhasil ditetapkan tepat waktu. Ini mencerminkan kemampuan Sekretariat Dewan dan anggota dewan untuk menjalankan proses legislasi secara efisien dan mematuhi jadwal. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan signifikan dalam persentase peraturan daerah yang ditetapkan tepat waktu, yaitu sebesar 28,6%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam prioritas legislasi atau kendala yang mempengaruhi proses legislatif. Tahun 2021 melihat peningkatan sedikit, dengan persentase mencapai 40%. Meskipun masih di bawah angka tahun sebelumnya, peningkatan ini mengindikasikan upaya untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan proses legislasi. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan yang signifikan, dengan persentase mencapai 81,25%. Ini adalah pencapaian yang positif dan mencerminkan kemampuan Sekretariat Dewan dan anggota dewan untuk mengatasi hambatan yang mungkin ada. Namun pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan, hanya 8 (delapan) dari 12 (dua belas) Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu dengan persentase sebesar 66,67%. Hal tersebut dikarenakan dokumen usulan Raperda yang disampaikan Perangkat Daerah kepada DPRD dan siap dibahas hanya 8 (delapan) usulan.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Pada aspek daya saing daerah setidaknya dapat diidentifikasi dari 4 aspek penting yakni kemampuan ekonomi daerah, potensi dan infrastruktur wilayah, iklim investasi dan potensi permintaan.

2.4.1 Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, nilai tukar petani dan nelayan, produktivitas total daerah, dan nilai tukar petani.

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per-Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait kesejahteraan penduduk. Semakin baik tingkat ekonomi penduduk, maka tingkat pengeluaran juga akan semakin bertambah mengikuti kenaikan pendapatan. Pengeluaran rumah tangga tidak hanya diukur atas makanan dan minuman, namun juga termasuk kebutuhan selain makanan dan minuman. Gambaran mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kabupaten Belitung disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.83 Angka Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Rata rata Pengeluaran Rumah Tangga per bulan	NA	1.752.785	1.626.741	1.775.224	1.887.037
2.	Persentase pengeluaran mkanan	NA	47,87	50,94	50,95	47,76

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan yang ada di Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Jumlah rata-rata pengeluaran mengalami penurunan pada tahun 2020 dari yang sebelumnya Rp1.752.785 menjadi RP1.626.224 pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kesejahteraan penduduk di Kabupaten Belitung pada tahun 2021 yang disebabkan pandemi Covid-19. Pemulihan pengeluaran rumah tangga menunjukkan angka positif pada tahun 2022 menjadi

Rp1.775.224 dan Rp1.887.037 pada tahun 2023 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.

Meskipun terjadi penurunan maupun peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga penduduk di Kabupaten Belitung, namun sebagian besar pengeluaran diperuntukkan untuk pengeluaran makanan. Jumlah persentase pengeluaran terhadap makanan sempat naik dari 47,67% pada tahun 2020 menjadi 50,95% pada tahun 2022 dan mengalami penurunan ditahun 2023 menjadi 47,76%. Kenaikan jumlah persentase pengeluaran untuk makanan pada tahun 2021 terjadi karena adanya penurunan jumlah rata-rata pengeluaran rumah tangga pada tahun 2021. Dengan demikian, porsi pengeluaran untuk makanan dan minuman pada dasarnya memiliki kecenderungan yang stabil dari tahun 2020 hingga tahun 2023.Nilai Tukar Petani dan Nelayan.

A. Nilai Tukar Petani dan Nelayan

Nilai tukar petani merupakan indikator yang dihitung dengan membandingkan harga jual barang yang diperoleh oleh petani dengan harga barang modal yang dikeluarkan oleh petani dalam proses produksinya. Nilai ini menggambarkan tingkat kesejahteraan petani yang diukur dari daya beli atas produk yang dihasilkan.

Tabel 2.84 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Indeks Yang Diterima Petani	NA	NA	122,74	124,47	118,93
2.	Indeks Yang Dibayar Petani	NA	NA	108,05	107,04	102,22
3.	Nilai Tukar Petani	NA	NA	113,59	116,29	116,35

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belitung, 2024

Data indeks NTP tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 belum tersedia di Kabupaten Belitung karena belum dilakukan perhitungan pada tahun tersebut. Nilai tukar petani diperoleh dari perbandingan indeks harga terima dan harga bayar petani, juga dapat memberikan informasi tentang nilai tukar komoditas pertanian. NTP dapat digunakan

untuk mengukur kemampuan tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan konsumsi untuk menghasilkan produk pertanian. Petani di suatu wilayah dikatakan sejahtera pada satuan waktu tertentu, jika hasil perhitungan NTP yang diperoleh yaitu lebih besar dari 100 persen. NTP Kabupaten Belitung rata-rata secara umum sebesar 116,29 dan nilai yang diperoleh lebih besar dari 100 persen. Hal ini berarti secara rata-rata NTP, dapat dikatakan petani di Kabupaten Belitung berada pada kategori sudah sejahtera, berdasarkan kemampuan nilai tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan konsumsi untuk menghasilkan produk pertanian.

Capaian NTP tahun 2022 di kabupaten Belitung meningkat sebesar 2% jika dibandingkan tahun 2021 yaitu dari 113,6 menjadi 116,29 sedangkan pada tahun 2023 NTP meningkat sebesar 0,05% dimana pada tahun 2023 sebesar 116,35. Peningkatan NTP kabupaten Belitung secara umum disebabkan adanya peningkatan indeks terima (It) sedangkan indeks bayar (Ib) mengalami penurunan. Sedangkan NTP Provinsi kepulauan Bangka Belitung perkembangannya mengalami penurunan 9,5% yaitu dari 131,5 menjadi 119. Adapun penyebab penurunan tersebut adalah karena penurunan indeks harga yang diterima (It) di tingkat petani sedangkan indeks dibayar (Ib) mengalami peningkatan.

Capaian NTP Kabupaten Belitung tahun 2022 yang dihitung sampai akhir Oktober 2022 ini seiring dengan data BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Oktober 2022 yang menunjukan bahwa NTP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 119,03, dimana kontribusi indeks harga yang diterima petani lebih besar dari indeks harga yang dibayar petani. Konsep NTP sebagai indikator kesejahteraan petani mengacu kepada kemampuan daya beli petani, yaitu kemampuan pendapatan yang diterima petani untuk dapat memenuhi memperbaiki kebutuhan konsumsi. Peningkatan kesejahteraan identik dengan

peningkatan pendapatan untuk memperbaiki/ meningkatkan kebutuhan konsumsi. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan dapat ditempuh melalui upaya untuk meningkatkan pendapatan dan atau meningkatkan kebutuhan konsumsi rumah tangga.

Survey lapangan yang sudah dilaksanakan di 5 Kecamatan di Kabupaten Belitung menghasilkan data yang digunakan dalam perhitungan indeks, dengan menggunakan tahun dasar 2018 (2018=100), artinya nilai rerata masing-masing peubah (harga komoditi yang dijual dan harga barang yang dibeli pada tahun 2018 ditetapkan bernilai 100. Berdasarkan perhitungan Indeks harga yang diterima petani (It) dan Indeks harga yang dibayar petani (It), maka diperoleh NTP Kabupaten Belitung tahun 2023 secara umum yaitu sebesar 116,35. NTP Kabupaten Belitung rata-rata secara umum sebesar 116,35 dan nilai yang diperoleh lebih besar dari 100 persen. Hal ini berarti secara rata-rata NTP, dapat dikatakan petani di Kabupaten Belitung berada pada kategori sudah sejahtera, berdasarkan kemampuan nilai tukar komoditas produk pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga petani dan konsumsi untuk menghasilkan produk pertanian.

Sama halnya dengan nilai tukar petani, nilai tukar nelayan juga menggambarkan tingkat kesejahteraan nelayan dengan membandingkan nilai jual hasil tangkapannya dengan biaya produksi yang dibutuhkan oleh nelayan tersebut. Di Kabupaten Belitung, nilai tukar nelayan disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.85 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Nilai Tukar Nelayan	102,01	110,3	114,4	113,35	112,52

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas, nilai tukar nelayan disajikan selama lima tahun terakhir berfluktuatif meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Kondisi yang secara umum mengalami perbaikan ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan yang semakin membaik dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Dengan kata lain, hasil penjualan tangkapan ikan nelayan dapat mencukupi biaya kebutuhan melaut dan rumah tangganya. Secara lebih rinci, nilai tukar nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini untuk melihat gambaran per kecamatan:

Tabel 2.86 Nilai Tukar Nelayan Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Kecamatan Tanjungpandan	NA	68	92,61	109,18	103,75
2.	Kecamatan Sijuk	NA	101	93,8	136,38	111,67
3.	Kecamatan Membalong	NA	149	191,8	74,96	139,55
4.	Kecamatan Badau	NA	112	109,7	93,3	108,21
5.	Kecamatan Selat Nasik	NA	154	146	136,22	122,48

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel tersebut di atas, nilai tukar nelayan di kecamatan Tanjung Pandan mengalami nilai terendah di Kabupaten Belitung pada tahun 2020. Kondisi ini menggambarkan kondisi kesejahteraan nelayan yang rendah dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan tidak dapat dipenuhi dari hasil melaut. Pada tahun 2021, perbaikan nilai tukar nelayan membaik untuk Kecamatan Tanjung Pandan dan meningkat kembali pada tahun 2022.

Kondisi nilai tukar nelayan yang kurang baik ada di Kecamatan Membalong pada tahun 2022 dengan angka terendah selama tiga tahun terakhir yaitu 74,96. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari tangkapan ikan belum dapat memenuhi biaya-biaya yang diperlukan untuk melaut dan kebutuhan rumah tangga nelayan lainnya sehingga akan menyebabkan penurunan kesejahteraan nelayan secara umum di

Kecamatan Membalong. Kondisi ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Belitung agar para nelayan yang ada dapat terus menjalankan aktivitasnya dalam hal stabilitas perekonomian nelayan serta pemenuhan ketersediaan salah satu bahan pangan di Kabupaten Belitung.

Pada tahun 2023 Nilai tukar nelayan (NTN) pada setiap kecamatan di Kabupaten Belitung tertinggi terdapat kecamatan membalong dengan NTN yaitu 139,55, kemudian diikuti kec. Selat nasik (122,48), kemudian kec. Sijuk (111,67), Kec. Badau (108.21) dan terendah di Kec. Tanjung Pandan (103,75). Hasil nilai tukar nelayan di semua kecamatan di Kabupaten Belitung memiliki nilai > 100. Hasil ini menunjukkan hasil tangkapan nelayan di kecamatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan melaut dan kebutuhan rumah tangga, sehingga sudah dapat dikatakan sejahtera.

Tingginya Nilai Tukar Nelayan di Kecamatan Membalong dan Selat Nasik. Hal ini dikarenakan kecamata tersebut merupakan umumnya mata pencaharian masyarakat yaitu nelayan. Selain itu ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya nilai tukar nelayan di kecamatan tersebut, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 1) Daerah penangkapan (Fishing ground), 2) Kondisi lingkungan perairan masih baik dan 3) Jenis alat tangkap yang digunakan. Daerah tangkapan (fishing ground) adalah lokasi di mana nelayan mencari ikan dan hasil tangkapan mereka. Daerah tangkapan sangat mempengaruhi hasil tangkapan nelayan sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan nelayan atau nilai tukar nelayan. Daerah tangkapan di Kecamatan Membalong dan Selat Nasik nelayan tidak terlalu jauh, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk keperluan melaut.

2.4.2 Fokus Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

A. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah kendaraan di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata 6 persen per tahun, namun demikian panjang jalan di Kabupaten Belitung dalam 5 Tahun terakhir tidak bertambah yaitu sebesar 785,36 km hal ini tentunya berimplikasi pada penurunan rasio antara panjang jalan dan jumlah kendaraan. Pada tahun 2023 rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah 0,30 Lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 yang besarnya 0,29.

B. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Berikut merupakan kinerja perhubungan khususnya jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 2.87 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Arus Penumpang angkutan umum						
1	Tiba	8.325	6.310	9.365	9.745	6.250
2	Datang	10.638	8.725	12.683	12.518	7.655

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum cenderung mengalami naik turun dari tahun ke tahun baik jumlah penumpang tiba maupun penumpang berangkat penumpang yang menggunakan angkutan umum. Pada tahun 2022 ada sebanyak 9.745 penumpang yang tiba dan mengalami kenaikan menjadi sebesar 6.250 penumpang tiba di tahun 2023 sedangkan penumpang berangkat dari terminal Tanjungpandan juga mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 12.518 penumpang menjadi 7.655 di tahun 2023.

C. Jumlah orang/barang yang melalui dermaga/bandara /terminal per tahun

Bandar udara yang melayani angkutan udara di Kabupaten Belitung adalah Bandar Udara H. AS. Hanandjoeddin Tanjungpandan yang saat ini telah berstatus Bandara Internasional. Bandara ini sebelumnya dikelola oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, namun pada tahun 2020, bandara ini telah dikelola oleh PT Angkasa Pura sejak bulan Oktober tahun 2019.

Tabel 2.88 Lalu Lintas Penerbangan di Bandara H.A.S Hanandjoeddin Tanjungpandan Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pesawat Datang (kali)	3.968	2.040	1.733	2.422	2.291
2	Pesawat Berangkat (kali)	3.968	2.040	1.733	2.422	2.291
3	Penumpang Datang (orang)	395.274	160.118	147.363	282.757	323.617
4	Penumpang Berangkat (orang)	396.998	154.898	148.054	282.263	319.660
5	Bagasi Bongkar (kg)	2.257.253	865.005	1.069.262	2.122.153	2.288.350
6	Bagasi Muat (kg)	2.268.547	856.352	1.080.758	2.088.972	2.277.080
7	Barang Bongkat (kg)	2.125.062	1.960.087	3.975.220	4.160.861	3.854.089
8	Barang Muat (kg)	815.580	980.578	1.577.986	1.091.805	1.261.608

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2024

Berdasarkan tabel diatas pada periode tahun 2019–2023 terjadi jumlah pesawat maupun penumpang yang tiba dan berangkat melalui Bandar Udara H. AS. Hananjoeddin Tanjungpandan terjadi secara fluktuatif. Tahun 2019 pesawat yang tiba maupun berangkat sebanyak 7.936 terjadi penurunan sampai tahun 2021 terjadi penurunan sebagai akibat dari adanya pandemi yang mulai terjadi di berbagai negara dan mulai meningkat kembali pada tahun 2022. Di satu sisi, penumpang yang tiba dan berangkat juga mengalami hal yang sama dari tahun 2019

ke tahun 2022. Penumpang yang datang tahun 2019 sebanyak 395.274 orang menurun menjadi 147.363 orang pada tahun 2021, dan meningkat kembali di tahun 2023 menjadi 323.600. Sedangkan penumpang yang berangkat juga mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 396.998 orang menjadi 148.054 orang pada tahun 2021 dan 319.660 orang pada tahun 2023.

Oleh karena perbedaan arus penumpang yang datang dan berangkat, terdapat asumsi bahwasanya terjadi emigrasi penduduk dari Kabupaten Belitung pada rentang waktu tersebut. Hal ini pula selaras dengan arus bagasi yang dibongkar dan dimuat, dengan adanya penurunan penumpang dari tahun 2019 ke 2020, seyogyanya penumpang akan membawa barang dan bagasi untuk masuk sehingga akan meningkatkan jumlah bagasi dibongkar di Kabupaten Belitung. Namun, kontras dengan peningkatan bagasi, total barang yang dimuat masih memiliki kecenderungan penurunan dari tahun 2019 ke 2020.

Terjadinya penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 akibat dari adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di berbagai negara termasuk Indonesia yang berdampak langsung terhadap segala sektor termasuk dengan kondisi jumlah penumpang pesawat sebagai akibat adanya pembatasan pergerakan. Sementara itu, jumlah pengguna angkutan laut mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2023 jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung sebanyak 59.945 orang atau mengalami penurunan sebesar 2,04 persen dari capaian tahun 2022 yang sebanyak 61.194 orang. Penurunan jumlah kapal yang tiba dan berangkat dari pelabuhan tentunya berpengaruh terhadap arus masuk penumpang bahari dari Kabupaten Belitung. Namun penurunan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2020 dimana jumlah penumpang yang tiba dan berangkat dari Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung hanya 24.690 orang. Hal ini disebabkan pembatasan aktivitas masyarakat dalam rangka meminimalisir penyebaran COVID-19.

Berikut disajikan tabel data perkembangan jumlah penumpang berangkat dan jumlah penumpang tiba di Kabupaten Belitung tahun 2019–2023.

Tabel 2.89 Arus Penumpang di Pelabuhan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Tahun 2019–2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penumpang						
1	Berangkat	43.600	12.054	13.358	29.895	29.395
2	Datang	45.410	12.636	15.403	31.299	30.550

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Belitung, 2024

D. Ketaatan terhadap RTRW

Potensi wilayah di Kabupaten Belitung didukung oleh tingginya ketaatan pengguna wilayah sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Dari data yang disajikan dapat dilihat bahwa ketaatan terhadap ketentuan rencana tata ruang wilayah mencapai angka 97,26% pada tahun 2023.

Tabel 2.90 Ketaatan Terhadap RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Realisasi RTRW	227.258,39	223.873,04	224.675,35	228.611,30	223.085,76
2.	Rencana Peruntuk-an RTRW	229.369,00	229.369,00	229.369,00	229.369,00	229.369,00
3.	Rasio	99,07	97,6	98,98	99,67	97,26

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

E. Luas Wilayah Produktif

Dilihat dari potensi wilayah, kabupaten Belitung memiliki potensi lahan yang masih cukup luas. Dari tabel yang disajikan, 58,65% luas wilayah budidaya yang telah digarap secara produktif. Dengan demikian

potensi lahan untuk dikembangkan menjadi lahan yang bernilai tambah masih cukup tinggi.

Tabel 2.91 Persentase Luas Wilayah Produktif Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Luas Wilayah Produktif (Ha)	116.730,48	116.730,48	116.730,48	116.730,48	116.730,48
2.	Luas Seluruh Wilayah Budidaya (Ha)	199.022,48	199.022,48	199.022,48	199.022,48	199.022,48
3.	Rasio	58,65	58,65	58,65	58,65	58,65

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2024

F. Luas Wilayah Industri

Kawasan Industri Suge merupakan kawasan strategis Kabupaten Belitung yang terletak di Kecamatan Badau, Desa Pegantungan. Dalam pengembangannya yang telah direncanakan adalah seluas 1.414 Ha. Dengan perencanaan industri berbasis:

1. Perikanan
2. Pengolahan hasil Tambang
3. Pengolahan Makanan
4. Pergudangan
5. Pengolahan Eksport
6. Perumahan
7. Perkantoran dan komersial
8. Pengembangan Industri

G. Luas Wilayah Kebanjiran

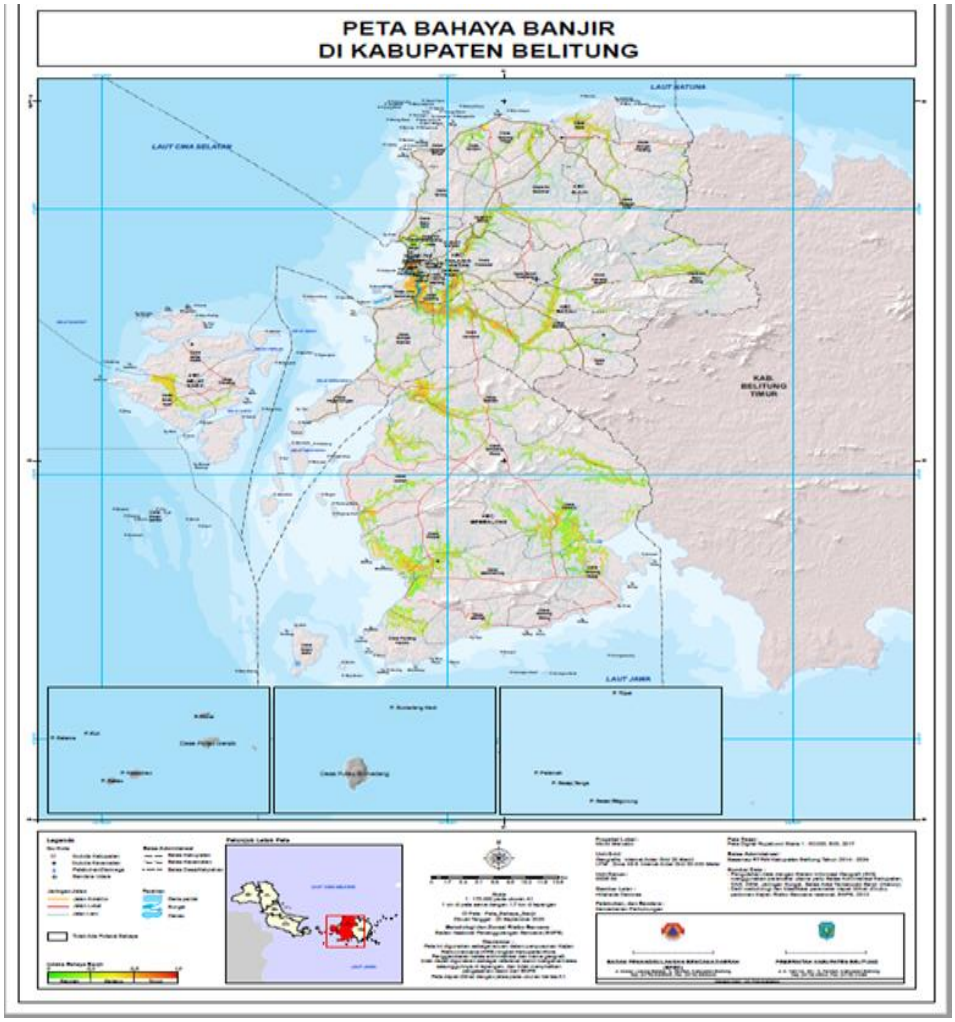
Potensi yang tinggi tersebut memiliki beberapa risiko bencana yang memang secara alamiah terjadi di suatu wilayah. Berdasar data yang disajikan dalam dokumen KLHS terdapat beberapa potensi bencana yang mengancam pembangunan di kabupaten Belitung. Tabel berikut menyajikan potensi bencana yang teridentifikasi mengancam kabupaten Belitung.

Tabel 2.92 Potensi Bahaya di Kabupaten Belitung

No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Banjir	22.936,70	Tinggi
2	Banjir Bandang	2.380,14	Tinggi
3	Gempa Bumi	219.944,00	Rendah
4	Tanah Longsor	12.584,97	Rendah
5	Kekeringan	219.944,00	Sedang
6	Cuaca Ekstrim	180.881,60	Sedang
7	Glombang ekstrim dan abrasi	9,949,50	Sedang
8	Kebakaran Hutan dan Lahan	182.626,58	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Resiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

Banjir terjadi hampir di seluruh wilayah Belitung, namun setiap kecamatan memiliki resiko yang berbeda beda, sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.

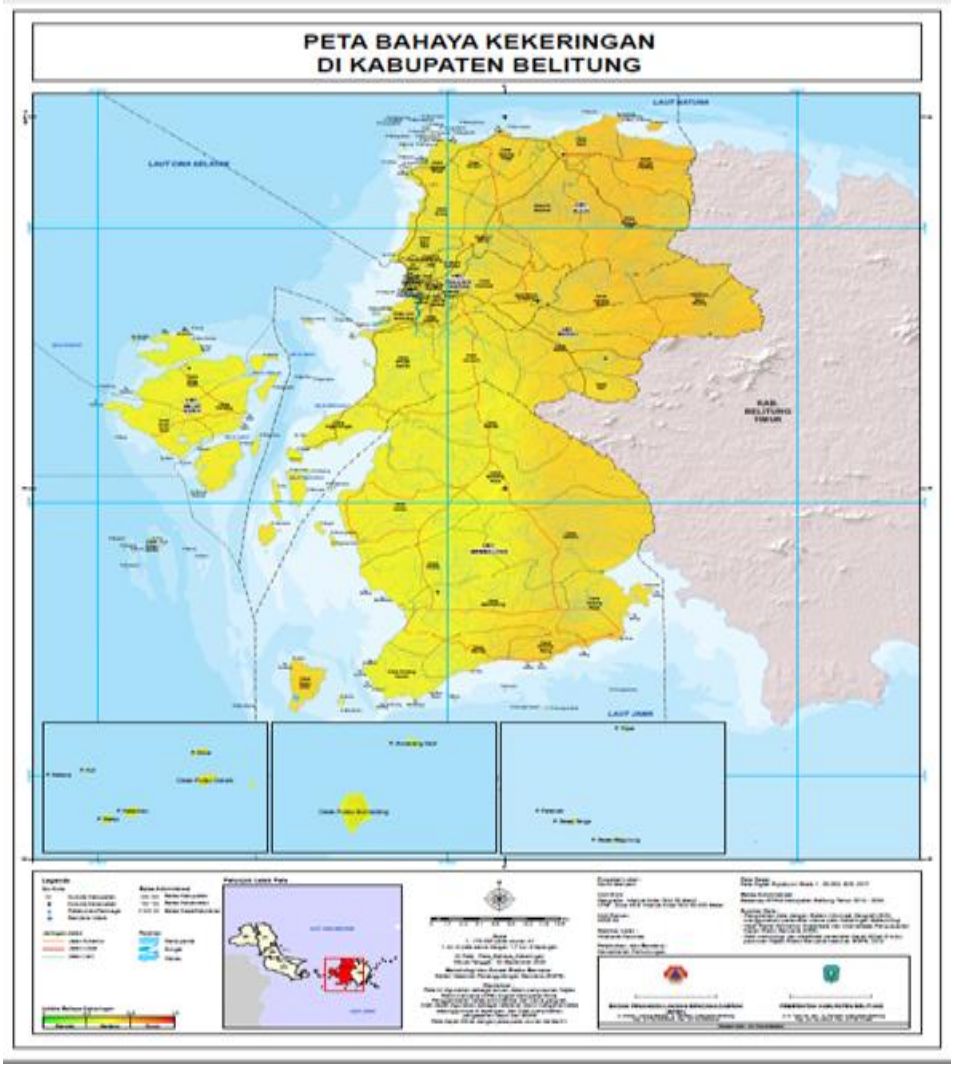


Gambar 2.53 Peta Bahaya Banjir

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Belitung 2021-2025

H. Luas Wilayah Kekeringan

Bencana lain yang acapkali menjadi risiko kabupaten Belitung adalah risiko bahaya kekeringan sebagaimana disajikan dalam gambar berikut.



Gambar 2.54 Peta Bahaya Kekeringan

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. semakin tinggi nilai IKD, maka semakin tinggi pula kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. IKD dapat digunakan untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan risiko bencana.

Nilai IKD Kabupaten Belitung yang dikeluarkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional pada tahun 2020 sebesar 0,28, 2021 sebesar 0,25, 2022 sebesar 0,49 dan pada tahun 2023 sebesar 0,47.

Indeks ketahanan daerah merupakan salah satu komponen perhitungan Indeks Risiko Bencana Indonesia.

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat. IRB di Kabupaten Belitung lima tahun terakhir sebagai berikut pada tahun 2019 sebesar 168,40 , tahun 2020 sebesar 168,40, tahun 2021 sebesar 164,44, tahun 2022 sebesar 148,48, dan tahun 2023 : 158,53.

I. Luas Wilayah Perkotaan

Luas Kawasan permukiman perkotaan sebesar 9.170 ha, kawasan permukiman perkotaan yang terletak di seluruh Ibu kota Kecamatan kawasan perkotaan

Tanjungpandan yang merupakan Central Bussines District dan ter;atak di setiap ibukota Kecamatan di Kecamatan Sijuk, Badau, Membalong dan Selat Nasik.

J. Jenis Dan Jumlah Bank Dan Cabang

Daya tarik investasi juga ditentukan oleh berkembangnya industri jasa seperti perbankan, asuransi juga hotel dan restoran. Jasa keuangan telah tersedia di Belitung. Tercatat 3 cabang bank pemerintah, 2 bank swasta dan 3 BPR dengan 4 asuransi. Jasa keuangan tersebut didukung oleh kantor cabang pembantu yang tersebar di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.93 Jumlah Bank dan Perusahaan Asuransi beserta Cabangnya di Kabupaten Belitung Tahun 2020 - 2023

Jasa Keuangan	2020	2021	2022	2023
Bank pemerintah (kantor cabang) dengan beberapa kantor cabang pembantu	3	3	3	3
Bank Swasta (kantor cabang) dengan beberapa kantor cabang pembantu	2	2	2	2
Bank Perkreditan rakyat	3	3	3	3
Perusahaan Asuransi	NA	4	4	4

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Regional 7 Sumatera Bagian Selatan, tahun 2024

K. Jenis Dan Jumlah Perusahaan Asuransi Dan Cabang

Sebagai salah satu lembaga keuangan non bank, asuransi dikenal sebagai alternatif investasi yang cukup baik dan meminimalisir risiko atas kejadian tak terduga. Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan risikonya. Fokus dan risiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam risiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini digunakan perusahaan asuransi mengantisipasi potensi kerugian serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing.

L. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Restoran

Ketersediaan restoran dan rumah makan merupakan bagian dari fasilitas yang mendukung kenyamanan wisatawan maupun pengunjung lain ke Bangka Belitung, baik penduduk nasional maupun mancanegara. Jumlah restoran dan rumah makan mengalami fluktuasi cenderung meningkat dimana tahun 2019 sebanyak 136 menjadi 259.

Tabel 2.94 Perkembangan Jumlah Restoran dan Rumah Makan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rumah Makan/ Restoran	136	145	150	115	259

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

M. Jenis, Kelas, Dan Jumlah Penginapan/Hotel

Salah satu komponen daya saing daerah, terutama terkait pariwisata, adalah ketersediaan akomodasi. Data jumlah hotel di Kabupaten Belitung dari tahun 2019-2023 mengalami peningkatan 69 hotel pada tahun 2019 menjadi 71 hotel pada tahun 2023. Sedangkan jumlah kamar mengalami peningkatan dari 2.282 tahun 2018 menjadi 2.757 kamar pada tahun 2022.

Tabel 2.95 Perkembangan Jumlah Hotel dan Penginapan Kabupaten Belitung Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Hotel Bintang 5					
	Jumlah Hotel	NA	1	1	1	1
	Jumlah Kamar	NA	164	164	164	164
2	Hotel Bintang 4					
	Jumlah Hotel	5	5	6	6	6
	Jumlah Kamar	552	552	678	678	678
3	Hotel Bintang 3					
	Jumlah Hotel	7	7	10	10	10
	Jumlah Kamar	615	615	669	669	669
4	Hotel Bintang 2					
	Jumlah Hotel	7	7	4	4	4
	Jumlah Kamar	356	356	229	229	229
5	Hotel Bintang 1					
	Jumlah Hotel	4	4	4	4	4
	Jumlah Kamar	107	107	107	107	107
6	Hotel Melati					
	Jumlah Hotel	46	47	47	47	46
	Jumlah Kamar	841	853	906	906	871
	Total Hotel	69	71	72	72	71
	Total kamar	2.471	2.647	2.757	2.757	2.722

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Belitung, 2024

N. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih

Salah satu kebutuhan utama manusia adalah air minum yang bersih untuk dikonsumsi. Berdasarkan tabel di bawah ini, persentase rumah tangga yang menggunakan air minum yang bersih secara umum mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Bila disatukan dengan persentase penggunaan air minum yang layak (tanpa air kemasan/air isi ulang), maka penggunaan air minum yang bersih dan layak telah menunjukkan peningkatan persentase yang cukup signifikan. Selain dari peningkatan kesadaran masyarakat untuk menggunakan air yang bersih dan layak untuk minum, peningkatan infrastruktur penyedia air minum juga turut mendukung hal ini Dengan pola hidup masyarakat yang mengkonsumsi air bersih dan layak untuk minum, maka akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat terutama dari segi kualitas hidup.

Tabel 2.96 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Sumber Air Minum di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

Tahun	Air Minum Bersih	Air Minum Layak (Tanpa Air Kemasan/Air Isi Ulang)
2019	87,58	12,44
2020	91,12	10,80
2021	93,89	66,31
2022	90,24	85,23
2023	92,13	87,47

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024

Jika dilihat dari persentase air bersih dan air minum layak di Kabupaten Belitung tahun 2019 hingga 2023 cenderung meningkat dimana untuk air bersih tahun 2019 sebesar 87,58 persen dan pada tahun 2023 sebesar 92,13 persen, sedangkan untuk air minum layak pada tahun 2019 sebesar 12,44 persen dan ditahun 2023 menjadi 87,47 persen.

O. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Salah satu aspek yang mempengaruhi kinerja infrastruktur adalah rasio ketersediaan daya listrik. Adapun rasio ketersediaan daya listrik di Kabupaten Belitung dapat dilihat pada tabel 2.97 berikut.

Tabel 2.97 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Utama di Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

Tahun	Listrik PLN dengan Meteran	Listrik PLn tanpa Meteran	Listrik Non PLN	Bukan Listrik	Total
2019	93,54	4,71	1,29	0,46	100
2020	95,83	2,79	0,76	0,62	100
2021	96,50	3,12	0,30	0,08	100
2022	98,86	1,00	0,00	0,14	100
2023	99,86	0,00	0,00	0,14	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (Data Susenas, Maret 2024)

Sebagian besar aktivitas rumah tangga ditunjang oleh energi listrik, mulai dari penerangan rumah, alat elektronik, dan lainnya. Berdasarkan data BPS diatas menunjukkan bahwa penggunaan terbesar konsumsi energi rumah tangga di Kabupaten Belitung adalah listrik. Persentase rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik PLN dengan Meteran di Kabupaten Belitung terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Dimana pada tahun 2019 sebanyak 93,54 persen menjadi 99,86 persen pada tahun 2023. Adapun hanya 0,14 persen pada tahun 2023 rumah tangga yang menggunakan penerangan utama bukan listrik. Bahkan, konsumsi listrik rumah tangga selalu mendominasi dalam kurun waktu lima tahun terakhir.

P. Persentase Penduduk Yang Menggunakan HP/Telepon

Informasi penting yang dapat mempengaruhi dalam pembuatan kebijakan tentang komunikasi dan informatika adalah persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon. Berikut merupakan informasi mengenai persentase penduduk yang menggunakan

HP/Telepon di Kabupaten Belitung sebagaimana terlihat pada tabel 2.90 dibawah.

Tabel 2.98 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Genggam di Kabupaten Belitung

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang Memiliki/Menguasai Telepon Genggam	71,89	74,89	76,71	78,56	87,36

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024

Jumlah penduduk berumur 5 tahun ke atas di Kabupaten Belitung yang menggunakan telepon genggam cenderung meningkat dengan pertumbuhan 4,99 persen dalam kurun lima tahun terakhir.

Tabel 2.99 Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Mengakses Internet di Kabupaten Belitung

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas Mengakses Internet Kabupaten/Kota	51,22	57,33	67,82	69,43	73,82

Sumber: BPS Kabupaten Belitung, 2024

Pengguna internet di Kabupaten Belitung terus bertumbuh mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Menurut data BPS dari hasil pendataan Survei Susenas 2023, sebanyak 73,82 persen penduduk Kabupaten Belitung telah mengakses internet di tahun 2023. Jumlah pengguna internet yang besar ini memungkinkan masyarakat Kabupaten Belitung memanfaatkan produk inovasi dan destruksi digital.

Peningkatan persentase penggunaan telepon seluler dan internet tersebut di pengaruhi oleh beberapa hal antara lain:

1. Kemajuan Teknologi, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi namun juga sebagai alat untuk mengakses internet.

2. Ada banyak aplikasi yang tersedia untuk telepon seluler, menjadi lebih bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pengguna cenderung menggunakan telepon seluler mereka lebih sering.
3. Konektivitas yang Mudah sehingga mengakses informasi dan berkomunikasi dengan mudah menggunakan telepon seluler.
4. Gaya hidup modern sering kali membutuhkan keterhubungan yang konstan dan mobilitas tinggi.
5. Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi COVID-19 telah mempercepat adopsi teknologi secara global. Banyak kegiatan yang dulunya dilakukan secara langsung, seperti bekerja, belajar, berbelanja, dan bahkan pertemuan sosial, kini beralih ke platform digital. Hal ini membuat penggunaan telepon seluler semakin meningkat karena menjadi alat utama dalam mengakses layanan-layanan tersebut.

Q. Indeks Kesulitan Geografis

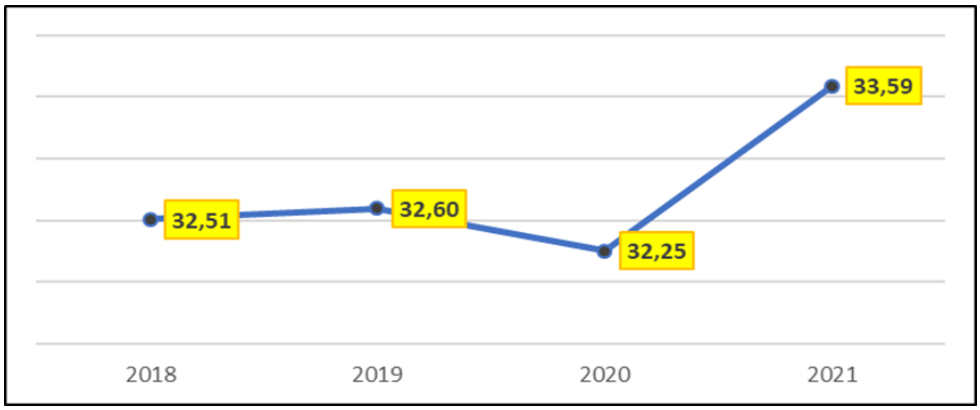
Kabupaten Belitung merupakan kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk memeratakan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Belitung terutama di daerah pedesaan dan pulau terpencil. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Belitung sebagian besar berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi

infrastruktur; dan aksesibilitas/transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan.

Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis (IKG). Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kabupaten Belitung disajikan seperti gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Gambar 2.55 Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Belitung Tahun 2018-2021

IKG Kabupaten Belitung mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Adapun pada tahun 2022 dan 2023 tidak diadakan penghitungan untuk IKG Desa disebabkan *selfblocking* anggaran pusat.

Tabel 2.100 Indeks Kesulitan Geografis Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2021

No.	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Tanjungpandan	28,02	28,34	26,95	28,34
2	Membalong	35,47	35,02	34,28	35,33
3	Sijuk	29,34	29,98	28,38	28,63
4	Badau	31,99	31,73	31,46	32,73
5	Selat Nasik	42,51	42,93	49,20	52,31

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2023 (diolah)

Untuk mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi, dapat digunakan beberapa indikator atau metode pengukuran. Berikut adalah beberapa contoh indikator yang dapat digunakan.

1. **Ketersediaan Pelayanan Dasar**

Indikator ini mencakup akses terhadap air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, dan listrik. Misalnya, persentase penduduk desa yang memiliki akses terhadap air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang layak, tingkat ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di desa tersebut.

2. **Kondisi Infrastruktur**

Indikator ini mencakup kondisi jalan, jembatan, saluran irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Misalnya, panjang jalan yang rusak atau tidak terhubung, kondisi jembatan yang membatasi aksesibilitas, dan kondisi saluran irigasi yang mempengaruhi pertanian.

3. **Transportasi**

Indikator ini mencakup aksesibilitas transportasi ke dan dari desa, termasuk jarak ke jalan raya utama, ketersediaan transportasi umum, dan kualitas jalan. Misalnya, jarak desa dari jalan raya utama, frekuensi dan ketersediaan transportasi umum, serta kondisi jalan yang mempengaruhi mobilitas penduduk.

4. **Komunikasi**

Indikator ini mencakup aksesibilitas telekomunikasi dan internet di desa tersebut. Misalnya, ketersediaan jaringan telepon seluler, akses internet, dan kecepatan koneksi internet di desa tersebut.

Dengan menggunakan indikator-indikator ini, dapat dibuat skala atau indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa.

Skala atau indeks tersebut dapat memberikan gambaran tentang seberapa sulitnya desa tersebut dalam mengakses pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi. Hal ini dapat membantu dalam perencanaan pembangunan dan alokasi sumber daya yang tepat untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh desa-desa dengan tingkat kesulitan geografis yang lebih tinggi.

2.4.3 Fokus Daya Saing Iklim Berinvestasi

A. Jumlah Demonstrasi

Salah satu aspek yang mempengaruhi daya saing iklim berinvestasi adalah jumlah demonstrasi. Berikut merupakan capaian jumlah demonstrasi di Kabupaten Belitung sebagaimana terlihat apda tabel 2.101.

Tabel 2.101 Jumlah Demo di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Ekonomi	1	5	NA	NA	6
2	Kasus Pemogokan Kerja	NA	NA	1	2	0
3	Jumlah Unjuk Rasa	1	5	1	2	6

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas KUKMPTK, 2024

Tingkat partisipasi masyarakat dalam demonstrasi atau unjuk rasa di Kabupaten Belitung cenderung rendah dalam lima tahun terakhir. Demonstrasi dalam hal ekonomi tercatat enam kali sepanjang tahun 2023 terkait perkebunan sawit. Sementara itu unjuk rasa terkait kasus pemogokan kerja pada tahun 2023 tidak ada kasus.

B. Rata-Rata Lama Perijinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Izin merupakan bukti penting secara hukum. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, kinerja

pemerintah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan perizinan. Kebijakan dan implementasi harus dapat bersinergi antara para *stakeholder* perizinan, yaitu pelaksana, konsumen perizinan dan akademisi/universitas. Implementasi pelayanan perizinan berbasis teknologi akan mendorong pelayanan perizinan lebih efisien. Berikut rata-rata lama pelayanan perizinan di Kabupaten Belitung.

Tabel 2.102 Rata- rata lama perijinan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Jenis Perijinan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	SIPA	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
2.	SIPTTK	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
3.	SIPB	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
4.	SIPD	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
5.	SIPF	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
6.	SIPP	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
7.	SIPATLM	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
8.	SIPTGM	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
9.	SIA	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
10.	SIKR	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
11.	SIPPA	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
12	SIKPM	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
13.	SIOPKM	5 hari	5 hari	5 hari	NA	NA
14.	SIKTGZ	5 hari	5 hari	NA	5 hari	5 hari
15.	SIPRO	5 hari	5 hari	5 hari		
16.	IOPKLINIK	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
17.	TO	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
18.	PNF	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
19.	PF	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
20.	SIH	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari	5 hari
21.	SITU	5 hari	NA	NA	NA	NA
22.	TDP	5 hari	NA	NA	NA	NA
23.	SIUP	5 hari	5 hari	NA	NA	NA
24.	P-IRT	5 hari	5 hari	5 hari	NA	NA
25.	IMB	12 hari	12 hari	12 hari	NA	NA
26.	SPPL	6 hari	6 hari	NA	6 hari	6 hari
27.	LB3	6 hari	6 hari	6 hari	NA	NA
28.	IL	12 hari	12 hari	12 hari	NA	NA
29.	BPKP	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber: Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, 2024

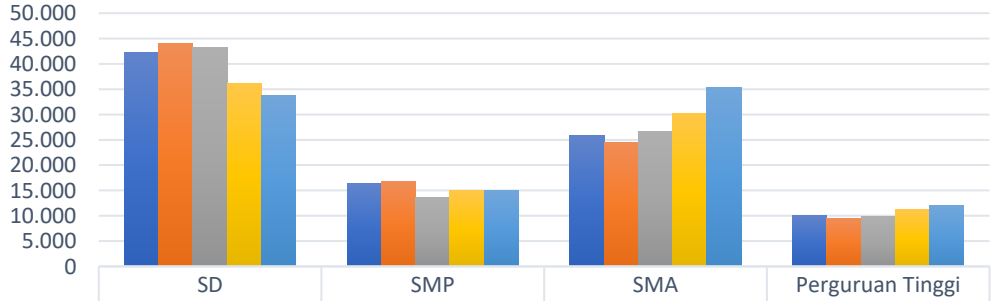
2.4.4 Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas sumber daya manusia dilakukan terhadap indikator rasio ketergantungan dan rasio lulusan S1/S2/S3 yang dijabarkan melalui analisis berikut ini.

A. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan keuntungan yang besar dalam mengurangi disparitas kesejahteraan ekonomi karena berperan penting dalam peningkatan kualitas hidup. Arsitektur persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menunjukkan lapangan pekerjaan yang menjadi tumpuan pergerakan ekonomi pada suatu daerah. Status pekerjaan secara umum terbagi menjadi dua jenis yakni pekerja formal dan informal. Pekerjaan formal meliputi status pekerjaan berusaha dengan dibantu buruh tetap dan kategori buruh/karyawan, Selain itu merupakan pekerjaan informal.

Kondisi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Belitung didominasi pekerja dengan tingkat pendidikan tertinggi adalah setingkat Perguruan Tinggi. Namun penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) sejak tahun 2019-2022 yakni sebanyak 36.149, namun di tahun 2023 penduduk yang bekerja didominasi oleh penduduk dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 35.263 . Hal ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan yang dimiliki oleh pekerja di Kabupaten Belitung.



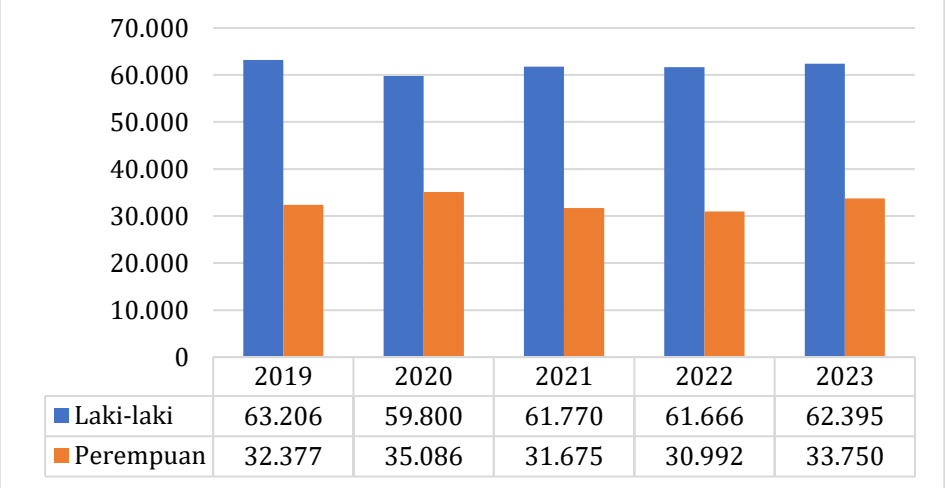
	SD	SMP	SMA	Perguruan Tinggi
2019	42.238	16.399	25.896	10.050
2020	43.993	16.819	24.517	9.557
2021	43.329	13.569	26.702	9.845
2022	36.149	15.002	30.284	11.223
2023	33.831	15.091	35.263	11.960

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.56 Penduduk Bekerja Menurut Pendidikan Tinggi yang ditamatkan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

Pada gambar dibawah menunjukan kecenderungan laki-laki untuk berperan aktif dalam dunia kerja terlihat masih sangat dominan dengan dengan perempuan yang bekerja, dimana pada periode 2019-2023 rata rata penduduk yang bekerja laki laki sebesar 65,34 % sedangkan rata – rata perempuan sebanyak 34,66 %. Hal ini dimungkinkan karena dalam masyarakat masih beranggapan bahwa laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam keluarga sehingga kontribusi perempuan dalam dunia kerja masih kurang diperhitungkan.

Penduduk laki-laki yang bekerja secara proporsi menurun dimana pada tahun 2019 sebesar 63.206 orang atau 66,13 persen dan pada tahun 2023 berjumlah 62.395 orang atau 64,90 persen, sedangkan perempuan yang bekerja secara jumlah dan proporsi memiliki kecendungan peningkatan dimana pada tahun 2019 berjumlah 32.377 orang atau 33,87 persen meningkat menjadi 33.750 orang atau 35,10 persen. Hal ini menujukkan semakin banyaknya perempuan yang bekerja baik pada sektor formal dan informal.



	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	63.206	59.800	61.770	61.666	62.395
Perempuan	32.377	35.086	31.675	30.992	33.750

Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.57 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Belitung

Pada tahun 2023 proporsi pendidikan tertinggi pekerja terbesar adalah setingkat SMA, yakni mencapai 36,65 persen, Kondisi yang tidak seimbang dibandingkan dengan tingginya jumlah lulusan pada jenjang pendidikan S1 sebanyak 7,073, S2 sebanyak 247, sedangkan S3 sebanyak 5 lulusan dengan rasio 3,85 persen. Kondisi ini menunjukkan permasalahan atas penyerapan tenaga kerja pada lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Belitung belum terserap dengan baik.

Tabel 2.103 Rasio Lulusan S1/S2/S3 Kabupaten Belitung Tahun 2019 - 2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah lulusan S1	5,433	5,692	6,094	6,567	7,073
2	Jumlah lulusan S2	181	194	204	229	247
3	Jumlah lulusan S3	3	3	3	3	5
4	Jumlah lulusan S1/S2/S3	5,617	5,889	6,301	6,799	7,315
5	Jumlah Penduduk	173,717	177,472	181,735	185,591	189,945
6	Rasio lulusan S1/S2/S3 (4/5)	3,23	3,32	3,47	3,66	3,85

Sumber: BPS Belitung, 2024 (diolah)

B. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Penduduk merupakan salah satu faktor yang penting dipertimbangkan dalam pembangunan. Pemanfaatan penduduk usia produktif diperhatikan sebagai faktor kunci dalam kemajuan pembangunan. Angka beban tanggungan *(Dependency Ratio*) di Kabupaten Belitung Pada tahun 2023 adalah 44,12 yang artinya 100 orang usia produktif menanggung beban 44 orang usia belum produktif dan tidak produktif lagi. Artinya jumlah penduduk produktif (usia 15-64 tahun) di Kabupaten Belitung lebih tinggi dari pada jumlah penduduk non produktif (usia 0-14 tahun dan > 65 tahun) (Lihat Tabel 2.104).

Tabel 2.104 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Belitung Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	42,811	44,328	44,921	42530	45,475
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	10,327	10,099	10,831	12,929	12,670
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1) & (2)	53,138	54,427	55,752	55,459	58,145
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	120,579	123,045	125,983	130,132	131,800
5	Rasio Ketergantungan (3)/ (4)	44,06	044,23	44,25	42,61	44,12

Sumber: BPS Belitung, 2024 (diolah)

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025

Tabel 2.105 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025

Visi : Terwujudnya Kabupaten Belitung yang Mandiri dan Produktif dengan Memanfaatkan Sumber Daya secara Optimal, Terpadu dan Berkelanjutan bagi Sebesar-besarnya Kesejahteraan Masyarakat

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Misi 1: Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan, khususnya perikanan dan pariwisata secara optimal dan berkelanjutan serta mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi pembangunan sarana dan	meningkatnya aktivitas dan produktivitas ekonomi yang berbasis sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Belitung secara optimal, khususnya di sektor perikanan dan pariwisata dan jasa pelayanan	a	Rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (persen)	5,51	6,57	5,62	6,11	6,37	6,57	5,07	5,73	3,54	5,67	90,21	93,78	55,57	86,30

Misi Daerah	Sasaran Pokok		Indikator	Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
prasara perhubungan sebagai penunjang aktivitas ekonomi perikanan dan pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	perhubungan																
	meningkatnya kontribusi sektor ekonomi berbasis sumber daya sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Belitung, khususnya sektor perikanan dan pariwisata serta pelayanan perhubungan	b	Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) (juta rupiah)	1.127.728	2.049.332	1.158.769	1.370.000	1.694.644	2.049.332	1.087.842	4.658.049	6.030.497	6.901.681	93,88	340,00	355,86	336,78

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Belitung	c	Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) (*juta rupiah*)	2.261.609	14.658.296	2.462.175	3.500.000	8.087.782	14.658.296	2.020.556	5.385.676	8.844.559	11.663.162	82,06	153,88	109,36	79,57
		d	Rata-rata kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (*persen*)	25,3	27,87	26,01	26,61	27,78	27,87	24,03	26,54	26,53	27,52	92,39	99,74	95,50	98,74
		e	Rata-rata kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB ADHB (*persen*)	17,46	20,77	17,67	18,11	19,47	20,77	16,79	13,30	15,57	21,87	95,02	73,44	79,97	105,30
		f	Rata-rata kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB (*persen*)	20,83	21,89	20,97	21,45	21,76	21,89	22,00	13,74	12,20	12,80	104,90	64,05	56,05	58,47
		g	Rata-rata kontribusi sektor perdagangan, hotel dan restoran terhadap PDRB ADHB (*persen*)	14,8	16,27	14,85	15,09	15,78	16,27	14,74	14,09	14,50	14,46	99,29	93,37	91,89	88,89

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		h	Rata-rata kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap PDRB ADHB (*persen*)	4,65	5,77	4,76	4,84	5,27	5,77	4,60	8,60	9,25	9,82	96,64	177,73	175,49	170,19
		i	Rata-rata pendapatan per kapita (*rupiah*)	5.429.369	6.401.018	5.461.511	5.542.874	6.071.141	6.401.018	14.643.266	32.700.800	48.656.716	62.986.477	268,12	589,96	801,44	984,01
		j	Ketersediaan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (*dokumen*)	2	10	10	10	10	10	10	10	12	4	100,00	100,00	120,00	100,00
		k	Rata-rata peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (*persen*)	44.654,32 (*juta rupiah*)	15,75	7,27	10,06	12,78	15,75	12,22	16,36	11,03	7,90	168,11	162,59	86,29	50,19
	Kepariwisataan	a	Rata-rata peningkatan jumlah wisatawan (*orang*)	31.998	15.000	10.235	10.730	12.500	15.000	27.361	115.475	312.543	243.238	267,33	1.076,19	2.500,34	1.621,59
		b	Jumlah destinasi wisata (*unit*)	24	41	29	34	39	41	10	53	68	85	34,48	155,88	174,36	207,32

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	Perikanan dan Kelautan	a	Rata-rata peningkatan jumlah produksi budidaya laut (*ton*)	24,32	30	8	10,5	20,85	30	9,68	32,00	83,66	58,82	121,04	304,79	401,26	196,05
		b	Rata-rata peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap (*ton*)	41.991,00	1.000,00	405	624	850	1.000,00	41046,19	44.998,73	59.238	44.292,90	10134,86	7211,34	6969,18	4429,29
	Pengembangan Perhubungan Laut		Persentase pembangunan dan penataan kawasan pelabuhan laut Tanjung Batu (*persen*)	60	100	75	83	90	97	70	78	79	90	93,3	94,0	87,8	92,8
Misi 2: Meningkatkan kualitas hidup dan partisipasi masyarakat serta para stakeholder lainnya dalam pembangunan daerah	Meningkatnya kesadaran masyarakat dan stakeholder lainnya untuk membangun daerahnya secara optimal dan	a	Rata-rata indeks pembangunan manusia (IPM) (persen)	72,59	83,00	73,67	78,32	81,4	83,00	73,01	69,56	71,7	73,38	n/a	88,82	88,08	88,41

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	berkelanjutan																
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan stakeholder lainnya dalam upaya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Belitung.	b	Rata-rata Angka Partisipasi Kasar (APK) (persen)														
			- SD	106,18	130,00	110,00	119,00	130,00	130,00	114,88	119,73	110,75	97,63	104,44	100,61	85,19	75,1
			- SMP	102,06	113,26	103,00	104,60	110,00	113,26	71,75	80,45	110,75	93,7	69,66	76,91	100,68	82,73
			- SM	73,09	110,00	75,00	79,78	95,00	110,00	83,65	70,62	69,55		111,53	88,52	73,21	0
		c	Rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) (persen)														
			- SD	98,56	100,00	98,78	99,12	99,50	100,00	98,61	98,65	99,59	84,97	99,83	99,53	100,09	84,97
			- SMP	84,35	100,00	86,75	87,94	89,00	100,00	86,19	88,33	79,92	60,2	99,35	100,44	89,8	60,2
			- SM	57,99	100,00	65,00	69,30	90,00	100,00	65,97	75,26			101,49	108,6	0	0
		d	Rata-rata Angka Kelulusan (persen)														
			- SD	97,4	100	98,5	100	100	100	93,55	100	100	100	94,97	100	100	100
			- SMP	46,94	100	60	78,4	90	100	47,23	100	100	100	78,72	127,55	111,11	100
			- SMA	51,21	100	75	90	95	100	64,03	98,22						
			- SMK	46,11	100	80	89,8	95	100	n/a	n/a						
		e	Rata-rata lama sekolah (*tahun*)	7,78	11	7,78	9,04	10,45	11	6,88	8,07	8,15	8,74	88,43	89,27	77,99	79,45
		f	Rata-rata usia harapan hidup (*tahun*)	68,99	74	69,7	71,35	73,2	74	69,08	70,22	70,64	71,31	99,11	98,42	96,5	96,36

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		g	Rata-rata angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup (*orang*)	18	2	15	8	6	2	11	13	12	14,04	15,27	7,38	5	-4,02
		h	Rata-rata angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran (*orang*)	191	100	248	203	150	100	191	120	196	216,14	248,23	203,41	149,69	98,84
		i	Rata-rata angka kesakitan malaria per 1.000 penduduk :														
			- Annual parasite incidence (*API*)	3,2	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	<5,00	3,2	0,25	eliminasi malaria	eliminasi malaria	100	100	eliminasi malaria	eliminasi malaria
		j	Rata-rata rumah tangga miskin (RTM)	5.307	4.511	5.200	5.099	4.776	4.511	8.420	9.949	10.391	20.470	38,08	4,88	-17,56	-253,77
		k	Ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah	6	6	6	6	6	6	12	11	11	12	200	183,33	183,33	200
		l	Tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (*persen*)	70	87	72,4	80	85	87	100	100	100	100	138,12	125	117,65	114,94

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator		Data Capaian pada Awal Tahun Perencanaan (2005)	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan (2025)	Target Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota				Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kab/Kota terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kab/Kota (%)			
						(6)				(7)				(8)			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025	2005-2009	2010-2014	2015-2020	2021-2025
						I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Misi 3: Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan	Terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan Kabupaten Belitung	a	Luasan areal sumber daya alam (terumbu karang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk) yang direhabilitasi (persen)	26,2 (*ha*)	85,00	25,00	45,00	75,00	85,00	n/a	10	174,2	129,3	n/a	22,22	232,27	152,12
	tersedianya ruang konservasi sumber daya alam dan lingkungan di wilayah Kabupaten Belitung	b	Jumlah pengaduan kasus pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang diklarifikasi (kasus)	12	25	13	19	20	25	13	19	37	22	100,00	100,00	185,00	88,00
		c	Persentase penanganan sampah Kabupaten Belitung (persen)	32,11	80,00	35,00	55,60	70,00	80,00	45,00	62,43	55,20	84,25	128,57	112,28	78,85	105,32

Berdasarkan Evaluasi Hasil RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 yang dilaksanakan di tahun 2022, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk capaian sasaran daerah Kabupaten Belitung selama 4 (empat) periode menunjukkan bahwa dari 3 (tiga) misi RPJPD Tahun 2005-2025 di setiap sasaran pada misi tersebut terdapat sasaran yang tingkat ketercapaiannya diatas 100%.
2. Berdasarkan status ketercapaian, capaian misi daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 menunjukkan bahwa dari 36 indikator sebanyak 17 indikator terealisasi 100% atau sekitar 47,22 % indikator sasaran telah terealisasi 100% (tercapai), sedangkan 19 indikator lainnya 52,78% terealisasi masih <100% (tidak tercapai).
3. Capaian Realisasi Program perangkat daerah Kabupaten Belitung tahun 2005-2025 berdasarjan kriteria Permendagri 86 Tahun 2017, dari total 36 indikator sasaran ada 21 indikator yang masuk kriteria capaian realisasi sangat tinggi dengan nilai realisasi ≤ 91%, 8 indikator sasaran indikator masuk kategori tinggi dengan nilai realisasi ≤ 76%, 2 indikator sasaran masuk kategori sedang dengan nilai realisasi ≤ 66%, adapun 1 indikator sasaran berkategori rendah dengan realisasi ≤ 51%, dan 4 indikator sasaran berkategori sangat rendah dengan realisasi di bawah 51%.
4. Rata-rata realiasi program pada RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 dapat dikatakan meningkat dan realtif berhasil, dilihat dari tingkat capaian kinerja RPJPD terhadap sasaran pokok RPJPD diatas 100% salah satunya pada sasaran pokok ” Meningkatnya kontribusi sektor ekonomi berbasis sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Belitung, khususnya sektor perikanan dan pariwisata serta pelayanan perhubungan” dengan indikator Rata-rata Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan (PDRB ADHK) (juta rupiah) dengan tingkat capaian mencapai 336,78%.
5. Faktor Pendukung pencapaian pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 secara umum meliputi:

a) Secara geografis Kabupaten Belitung terletak pada posisi jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI.
b) Kabupaten Belitung memiliki potensi perikanan dan potensi pariwisata.
c) Adanya komitmen pimpinan daerah untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan.
d) Adanya program prioritas dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan.
e) Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas sebagai pedoman pembangunan yang berkelanjutan.
f) Ditetapkannya Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang, Destinasi Pariwisata Prioritas, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional dan Geopark Belitong menjadi Unesco Global Geopark (UGGp).

6. Faktor Penghambat Pencapaian Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025 secara umum meliputi :
   a) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor antar sektor pemerintah, swasta serta masyarakat.
   b) Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian sesuai kebutuhan.
   c) Perubahan Iklim dan bencana alam yang terjadi di Kabupaten Belitung menyebabkan kerusakan infrastruktur dan kerugian ekonomi serta serta menggangu sektor-sektor penting seperti pertanian dan perikanan.
   d) Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan.
   e) Tingkat ketergantungan rantai pasok perdagangan dan distribusi barang yang tinggi.
   f) Masih kentalnya budaya patriarki di masyarakat.
   g) Kualitas SDM masih rendah.

h) Belum masifnya perkembangan produk nilai tambah komoditas unggulan daerah.

Rekomendasi terhadap hasil pelaksanan :

1. Peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belitung sebagaimana tertuang dalam tujuan pembangunan daerah. Dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan program lainnya, menjaga upah minimum untuk memenuhi kebutuhan taraf hidup masyarakat, upaya penting pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung terus berupaya menurunkan angka kemiskinan melalui Program bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah, program pemulihan ekonomi, stabilisasi harga kebutuhan pokok dan ketahanan pangan serta peningkatana resiliensi masyarakat dan pembentukan *herd immunity* melalui vaksinasi booster, kolaborasi antar stakeholder secara terpadu dan perbaikan serta pemutakhiran data kemiskinan agar tercipta data yang akurat dan kredibel.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Perhitungan proyeksi penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Hasil proyeksi penduduk membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pembangunan untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana layanan dasar sehingga mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

2.6.1 Analisis Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk Kabupaten Belitung merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk dari tahun 2025 hingga tahun 2045 berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS). Secara keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Belitung mengalami peningkatan dari

tahun 2025-2045. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2023 adalah sebanyak 189.945 orang dan meningkat menjadi 225.143 orang pada tahun 2045 atau bertambah 35.198 orang.

Sementara itu *sex ratio* atau rasio jenis kelamin penduduk semakin menurun menjadi 98,17 pada tahun 2045 yang dapat diartikan bahwa ada sekitar 98 laki-laki per 100 perempuan di Kabupaten Belitung pada tahun tersebut.

Berikut proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Belitung berdasarkan jenis kelamin tahun 2025-2045.

Tabel 2.106 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Sex Ratio Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

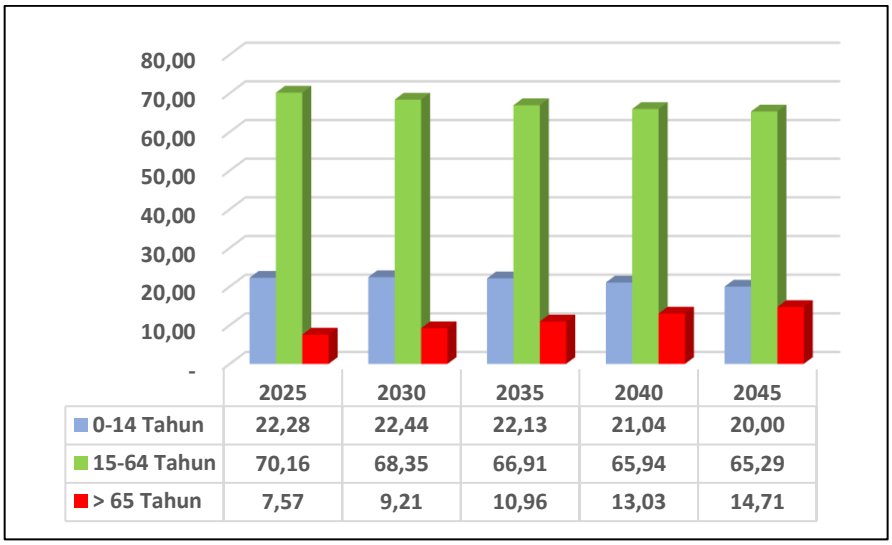
Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	96.541	98.384	102.908	106.619	109.439	111.530
Perempuan	93.404	95.175	100.804	105.797	110.034	113.613
Jumlah	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Sex Ratio	103,36	103,37	102,09	100,78	99,46	98,17

Sumber : Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

Proporsi penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) diproyeksikan akan mengalami penurunan, pada tahun 2023 sebesar 23,94 persen menjadi 20 persen di tahun 2045. Hal yang sama akan terjadi pada penduduk usia produktif (15-64 tahun), pada tahun 2023 sebesar 69,39 persen menjadi 65,29 persen di tahun 2045. Sementara proporsi penduduk tidak produktif atau berusia 65 tahun keatas menunjukkan peningkatan dalam periode 2023-2045, dengan proporsi tahun 2023 sebesar 6,67 persen, yang diproyeksikan menjadi 14,71 persen pada tahun 2045. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kabupaten Belitung sudah mulai memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang

ditandai dengan proporsi penduduk berusia 65 tahun ke atas di Kabupaten Belitung yang sudah melebihi 12 persen dari total penduduk.

Gambar 2.58 Proyeksi Proporsi Penduduk Kabupaten Belitung Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2025-2045 (Persen)



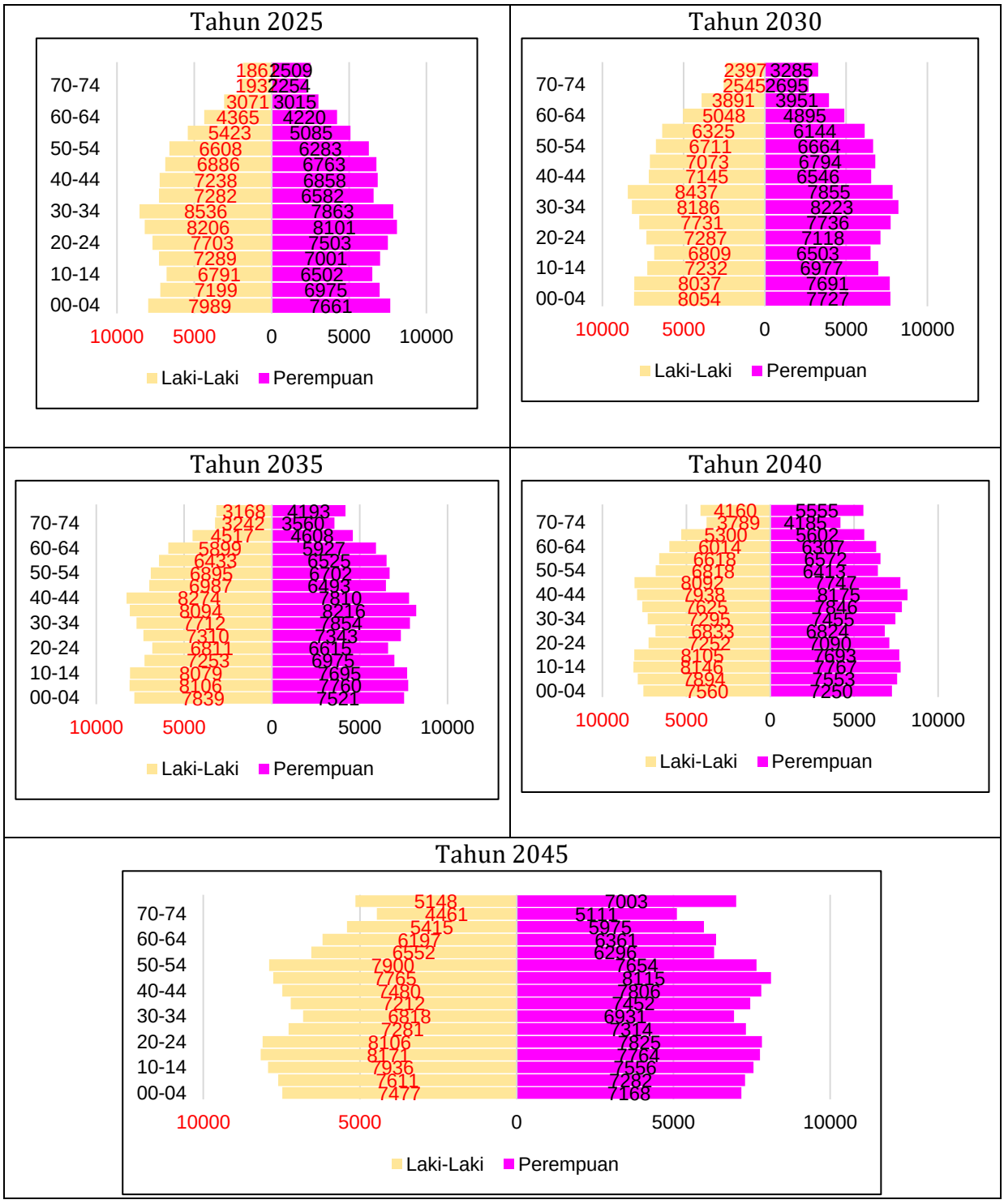
	2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	22,28	22,44	22,13	21,04	20,00
15-64 Tahun	70,16	68,35	66,91	65,94	65,29
> 65 Tahun	7,57	9,21	10,96	13,03	14,71

Sumber : Proyeksi BPS Tahun 2025-2045 dan Tim Penyusun RPJPD kabupaten Belitung, diolah

Bonus demografi akan dialami suatu daerah apabila proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih besar dibandingkan dengan kelompok penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dan kelompok penduduk usia tidak produktif (usia >65 tahun) lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk. Berdasarkan Gambar 2.6.1 terlihat bahwa Kabupaten Belitung mengalami bonus demografi dengan proporsi penduduk usia produktif sebesar 65,29 persen.

Hasil proyeksi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.59 Piramida Penduduk Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045



Sumber : Proyeksi BPS Tahun 2025-2045 dan Tim Penyusun RPJPD kabupaten Belitung, diolah

Bila dicermati lebih lanjut pada Gambar 2.6.2, maka terlihat bahwa bentuk piramida penduduk Kabupaten Belitung tahun 2025 hingga 2035 termasuk tipe ekspansif (muda) yang ditandai dengan pola piramida yang melebar di bagian bawah dan cembung di bagian tengah yang merupakan penduduk usia muda. Kemudian pada tahun 2040 hingga akhir periode (2045) mulai menunjukkan kecenderungan hampir sama untuk tiap kelompok umur sehingga termasuk dalam tipe stasioner.

Selain itu terlihat bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2045 dengan proporsi terbesar pada penduduk perempuan dengan rentang usia 45-49 tahun sebanyak 8.115 orang atau 3,60 persen dari total penduduk. Hal ini menunjukkan penduduk usia produktif perempuan lebih banyak daripada penduduk usia produktif laki-laki sehingga perlu mendapatkan perhatian yang sama oleh pemerintah terkait kebijakan berbasis gender terutama dalam hal kesempatan kerja yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya berdasarkan piramida penduduk periode 2025-2045 terlihat bahwa jumlah penduduk lanjut usia atau berusia lebih dari 75 tahun diproyeksikan cenderung meningkat signifikan yang didominasi oleh kaum perempuan. Tentunya ini mengisyaratkan bahwa optimisme penduduk lanjut usia yang semakin baik kesehatannya sejalan dengan harapan akan semakin baiknya kualitas pelayanan pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Kemudian masih terkait dengan demografi, maka indikator angka ketergantungan merupakan hal yang penting. Semakin tinggi persentase angka ketergantungan akan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian pula sebaliknya. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Belitung tahun 2023 adalah sebesar 44,12 yang kemudian diproyeksikan terus

meningkat hingga mencapai 53,16 pada tahun 2045. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2045 sebanyak 100 penduduk usia produktif menanggung 53 penduduk usia nonproduktif.

Tabel 2.107 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Angka Ketergantungan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Orang)	Proyeksi Penduduk (Orang)				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14 Tahun	45.475	43.117	45.718	47.000	46.170	45.030
15-64 Tahun	131.800	135.795	139.230	142.128	144.712	147.000
> 65 Tahun	12.670	14.647	18.764	23.288	28.591	33.113
Jumlah	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Angka Ketergantungan	44,12	42,54	46,31	49,45	51,66	53,16

Sumber : Proyeksi BPS Tahun 2025-2045

2.6.2 Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik

A. Proyeksi Kebutuhan Rumah / Tempat Tinggal

Tabel 2.108 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	43.044	47.348	52.083	57.292	63.021	69.323

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (2024)

Jumlah penduduk Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebanyak 189.945 jiwa dan untuk proyeksi jumlah penduduk di tahun 2045 meningkat menjadi sebanyak 225.143 jiwa, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk hal tersebut tentunya meningkatkan

kebutuhan rumah di kabupaten Belitung di tahun 2045 diproyeksikan sebanyak 69.323 unit.

B. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Tabel 2.109 Proyeksi kebutuhan Air Minum Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M^3/hari)	1.329,45	3.653,95	7.331,60	11.962,05	16.507,64	19.489,22
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (M3/Tahun)	485.249,63	1.333.692,07	2.676.036,13	4.366.151,53	6.025.289,32	7.113.566,16

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (2024)

Kebutuhan air minum di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebanyak 1.329,45 M^3/hari atau 485.249,63 M3/Tahun, untuk proyeksi di tahun 2045 kebutuhan air minum sebanyak 19.489,22 M^3/hari atau 7.113.566,16 M3/Tahun.

C. Proyeksi Kebutuhan Listrik

Tabel 2.110 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Jumlah Rumah	43.044	47.348	52.083	57.292	63.021	69.323
Proyeksi Kebutuhan Listrik (MW)	26,30	32,64	48,32	59,55	72,06	82,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung (2024)

Kebutuhan rumah di Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebanyak 43.044 unit untuk proyeksi tahun 2045 sebanyak 69.323 unit. Untuk kebutuhan Listrik ditahun 2023 sebanyak 26,30 MW dan proyeksi ditahun 2045 kebutuhan listrik sebanyak 82,898 MW.

D. Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Tabel 2.111 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampaham Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Proyeksi Timbulan Sampah	27.731,97	28.259,61	29.741,95	31.012,73	32.043,05	32.870,87
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	0	0	1	2	3	4

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung, 2024

Volume timbulan sampah di tahun 2023 sebanyak 27.731,97 ton, sedangkan proyeksi untuk tahun 2045 timbulan sampah sebanyak 32.870,87 ton. Sebagai salah satu cara dalam menangani volume sampah yang terus meningkat diperlukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), Proyeksi kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk tahun 2045 sebanyak 4 TPST yang mana di tahun 2023 belum memiliki Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu baru saat ini baru tersedia TPS-3R dan Bank Sampah untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Belitung.

E. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Tabel 2.112 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
Rumah Sakit	3	3	4	4	4	4
Puskesmas	9	9	10	10	10	10
Rumah sakit pratama	0	0	1	1	1	1
Puskesmas Pembantu	31	32	32	32	32	32
Klinik	15	15	16	17	18	19

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung, 2024

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten belitung pada tahun 2023 yaitu Rumah sakit sebanyak 3 unit, Puskesmas 9 unit, Rumah sakit pratama belum ada, Puskesmas pembantu 31 unit dan klinik sebanyak 15 unit, selanjutnya untuk Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Belitung di tahun 2045 yaitu Rumah Sakit sebanyak 4 unit, Puskesmas 10 unit, Rumah Sakit Pratama 1 unit, Puskesmas Pembantu 32 unit dan Klinik 19 unit.

F. Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Tabel 2.113 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Penduduk	189.945	193.559	203.712	212.416	219.473	225.143
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (Sekolah)						
TK	54	54	54	54	54	54
SD/MI	121	121	121	121	121	121
SMP/MTs	26	26	26	26	26	26
SMA/MA/SMK	18	19	21	22	23	25
Proyeksi Fasilitas Pendidikan (Ruang Belajar)						

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
TK	52	54	56	58	60	62
SD/MI	840	845	850	855	860	865
SMP/MTs	288	291	294	301	304	307

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung (2024)
Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung, Cabang Kabupaten Belitung (2024)

Proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana fasilitas di kabupaten Belitung untuk tingkat TK, SD/MI dan SMP/MTs sampai dengan tahun 2045 untuk jumlah sekolah sudah mencukupi, yang masih dibutuhkan adalah jumah ruang belajar, dimana untuk TK kondisi tahun 2023 sebanyak 52 ruang belajar dan dibutuhkan 62 ruang belajar di tahun 2045, untuk SD/MI di tahun 2023 terdapat 840 ruang belajar dibutuhkan 865 ruang belajar di tahun 2045, selanjutnya untuk SMP/MTs pada tahun 2023 terdapat 288 ruang belajar dan dibutuhkan 307 ruang belajar di tahun 2045, kendati demikian untuk sebaran sekolah masih butuh perhatian terutama yang berada di pulau-pulau kecil. Selanjutnya untuk fasilitas pendidikan tingkat SMA/MA/SMK kondisi jumlah sekolah di tahun 2023 yaitu 18 sekolah dan dibutuhkan 25 sekolah di tahun 2045.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Dalam konsep pengembangan wilayah, terdapat teori yang menekankan perkembangan ekonomi yang dinamis dipacu oleh inovasi. Konsep pusat perkembangan ini disebut dengan konsep pusat pertumbuhan *(growth pole)* yang dicetuskan oleh Perroux. Dari pusat pertumbuhan itu diharapkan dapat memberikan efek sentifugal *(spread effect)* yang dapat mendorong perkembangan wilayah disekitar pusat perkembangan *(hinterland)*. Wilayah di sekitar perkembangan memperoleh keuntungan dari ditampungnya hasil pertanian oleh wilayah pusat perkembangan. Wilayah

hinterland ini akan terdorong untuk mempergunakan teknologi yang sudah maju pada aktivitas segala sektor, sehingga dapat menumbuhkan industri-industri tertentu yang menumbuhkan lapangan kerja (Nurzaman, 2012).

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai rencana penataan ruang wilayah bertujuan sebagai alat untuk mengarahkan dan mengendalikan pembangunan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha serta swadaya masyarakat sehingga tercapai keterpaduan program-program sektoral dan daerah.

Tujuan Penataan Ruang wilayah Kabupaten Belitung sampai tahun 2031, diturunkan dari tujuan dan arah pembangunan daerah jangka panjang tahun 2005-2025. Merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahan Nasional. Adapun formulasi tujuan penataan ruang Kabupaten Belitung adalah *Terwujudnya ruang Kabupaten Belitung yang serasi dan lestari dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor perikanan, perhubungan dan pariwisata.* Implementasi tujuan tata ruang tersebut dipahami dengan kata kunci antara lain, *serasi, lestari, daya saing, perikanan, perhubungan,* dan *pariwisata.*

Kebijakan penataan ruang wilayah dalam RTRW Kabupaten Belitung Tahun 2014-2034 meliputi:

1. Pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten;

2. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Wilayah;
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten;
4. Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup;
5. Pengembangan dan pengendalian kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
6. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.

Dari kebijakan penataan ruang tersebut, dijabarkan secara operasional dalam bentuk strategi penataan ruang. Adapun strategi penataan ruang Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut:

1. Strategi pemerataan tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah ke seluruh wilayah kabupaten, meliputi:
   - Memperlakukan sistem perdesaan sebagai kontinum dengan sistem perkotaan dalam kerangka sistem perwilayahan pembangunan Kabupaten Belitung.
   - Mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan, yang meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, perikanan, serta produksi pesisir dan kelautan lainnya, melalui upaya peningkatan produktifitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan.
   - Mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi non-pertanian perdesaan (*rural non-farm sector*), yang berifat padat karya.
   - Mengembangkan pusat pertumbuhan baru di pedesaan untuk pemerataan pemerataan pertumbuhan wilayah.
   - Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

2. Strategi Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Wilayah, meliputi:
    - Menetapkan dan memantapkan Kawasan Tanjungpandan sebagai PKW;
    - Menetapkan PKL di Kecamatan Sijuk, Badau dan Membalong;
    - Mengembangkan PPL yang melayani skala lingkungan wilayah kota pada masing-masing sub wilayah kota secara proporsional;
    - Menghubungkan antar sub pusat kota dan antara masing-masing sub pusat kota dengan pusat kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
    - Menumbuhkan dan mengembangkan kawasan budidaya yang mendukung pelayanan pusat kota dan sub pusat kota secara berimbang.
3. Strategi Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana ke seluruh wilayah kabupaten, meliputi:
    - Mengembangkan, kualitas dan keterpaduan jaringan pelayanan sistem prasarana transportasi;
    - Mengembangkan sistem energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal;
    - Mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah;
    - Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air;
    - Mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah.

4. Strategi Pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup, meliputi:
   - Penetapan kawasan lindung di ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
   - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung untuk memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
   - Mengembangkan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
   - Membatasi kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana.
5. Strategi pengoptimasian pemanfaatan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:
   - Mengembangkan kawasan perkotaan dengan kecenderungan pertumbuhan penduduk yang tinggi dengan pendekatan perencanaan kawasan perkotaan;
   - Mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
   - Mengembangkan kawasan tanah nonproduktif untuk kegiatan nonpertanian guna mempertahankan lahan pangan berkelanjutan;
6. Strategi penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan strategis kabupaten.
   - Menetapkan kawasan strategis kabupaten berfungsi lindung;
   - Mencegah pemanfaatan ruang di kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
   - Membatasi pemanfaatan ruang di sekitar kawasan strategis kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi lindung kawasan;
   - Merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis kabupaten.

Dalam perencanaan struktur ruang wilayah kabupaten, terdiri atas : a) Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b) Pusat Kegiatan Lokal (PKL); c) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp); d) Pusat-pusat lain di wilayah kabupaten. Rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhierarki satu sama lain. dan berfungsi sebagai arahan pembentuk sistem pusat kegiatan wilayah kabupaten.

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kawasan Perkotaan Tanjungpandan di Kabupaten Belitung sebagai salah satu **Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Bangka Belitung**. Selain itu juga Badau akan didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) karena telah dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Belitung dimasa datang apabila Tanjungpandan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.

2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Fungsi kawasan perkotaan lain di Kabupaten Belitung ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten ini sebagai berikut:

1. Sijuk

   Ibu Kota Kecamatan Sijuk diharapkan menjadi pusat pertumbuhan penting di Kabupaten Belitung setelah Tanjungpandan, dengan kekuatan pada sektor perikanan dan pariwisata. Ibu Kota Kecamatan Sijuk nantinya diarahkan melayani kawasan kecamatan di sekitarnya dan juga beberapa kawasan di Kabupaten Belitung Timur.

2. Badau

   Ibu Kota Kecamatan Badau merupakan daerah pusat pengembangan sektor industri dimana dalam wilayah diarahkan menjadi kawasan

industri dan menjadi kawasan pengembangan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Belitung. Selain itu juga Badau dipersiapkan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Belitung dimasa datang apabila Tanjungpandan ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom.

3. Membalong

   Ibu Kota Kecamatan Membalong memiliki potensi sebagai pusat pengembangan sektor pertanian terutama pertanian lahan basah. Pada masa yang akan datang Membalong diarahkan menjadi Kawasan Agropolitan di Kabupaten Belitung.

3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) diarahkan di Kecamatan Selat Nasik. Kecamatan Selat Nasik yang memiliki potensi di sektor perikanan, perkebunan karet diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan lokal yang akan melayani Pulau Gresik dan pulau-pulau disekitarnya.

4. Pusat Kegiatan Lainnya

Pusat kegiatan lainnya adalah pusat permukiman yang menjadi simpul bagi pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan administrasi masyarakat yang dapat berupa pelayanan skala kawasan dan skala lingkungan.

1. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

   Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Belitung berada di 5 (lima) ibukota kecamatan yaitu Tanjungpandan, Sijuk, Badau, Membalong, dan Selat Nasik. Pengembangan PPK ini disesuaikan dengan ketersediaan dan daya dukung lahan.
2. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

   Pusat Pelayanan Lingkungan di Kabupaten Belitung ditetapkan di pusat-pusat desa/kelurahan sebagai pusat pelayanan bagi desa itu sendiri maupun beberapa desa di sekitarnya.

Sejalan dengan penetapan Kawasan Strategis Nasional dan provinsi, maka dapat ditentukan Kawasan Strategis Kabupaten yang menurut UU No. 26/2007 adalah "wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan" (pasal 1 (29) UU No. 26/2007). Kawasan strategis mampu memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Belitung, baik melalui keterkaitan fungsional keterpusatannya maupun melalui fungsi-fungsi ekonomi khusus yang dikembangkan pada kawasan tersebut, dan juga melalui keterpaduan sektor-sektor perekonomian di kawasan tersebut. Yang termasuk dalam kawasan strategis dari sisi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. **Kawasan Pusat Kota Tanjung Pandan**

   Kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan dan berperan melayani kegiatan ekonomi kawasan di Belitung dan sebagian Belitung timur. Di dalam kawasan Pusat Kota Tanjung Pandan terdapat berbagai kawasan yang penting secara ekonomi seperti kawasan perdagangan skala lokal dan regional, kawasan pelabuhan Tanjung Pandan, Bandara H.AS Hanandjoedin, dsb.

2. **Kawasan Pengembangan Ekonomi**

   Kawasan Pengembangan Ekonomi di Kabupaten Belitung di wujudkan dalam suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. KEK terdiri dari satu atau beberapa zonasi, seperti zonasi pengolahan ekspor, logistik, industri, energi, pengembangan teknologi, pariwisata, atau zonasi kegiatan ekonomi lainnya, dan dapat pula dibangun fasilitas pendukung seperti perumahan bagi pekerja. Sesuai dengan amanat undang-undang, di dalam setiap KEK harus disediakan lokasi untuk usaha mikro kecil menengah

(UMKM) dan koperasi, baik sebagai pelaku maupun sebagai pendukung kegiatan usaha di kawasan ini.

Di Kabupaten Belitung, KEK dipusatkan di kawasan Suge yang terletak di Dusun Suge, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, seluas 500 hektar. Rencana Detail Tata Ruang telah ditetapkan melalui Perda Nomor 15 Tahun 2001, dengan luas lahan cadangan pengembangan mencapai 5000 sampai 10.000 hektar. Kawasan ini menjadi unggulan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat memacu masuknya investasi dalam jumlah besar.

Untuk mendukung pengembangan KIS, Pemerintah Kabupaten Belitung sejak tahun 2001 secara bertahap membangun pelabuhan Tanjung Batu di kawasan ini. Untuk menunjang pengembangan pelabuhan ini, Pemerintah Kabupaten Belitung sudah membebaskan lahan seluas 100 hektar. Status pelabuhan ini sendiri sudah ditetapkan sebagai pelabuhan samudera/pelabuhan internasional melalui Keputusan Bupati Nomor 13 Tahun 2001.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan ini ditunjang dengan pembangunan PLTU 2x15 MW di Desa Pegantungan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung dan PT PLN (Persero); pembangunan jalan tembus berikut jembatan yang menghubungi Dusun Air Malik, Desa Bantan, Kecamatan Membalong, ke Dusun Suge; dan pembangunan jalan tembus Bandara HAS Hanandjoeddin ke Dusun Suge melalui Desa Buluh Tumbang, Dusun Air Mungkui, dan Dusun Petikan — sekaligus sebagai pembuka akses ke wilayah Kabupaten Belitung Timur.

3. Kawasan Agropolitan Membalong

Kawasan ini dikembangkan sebagai sentra produksi agriindustri dan agribisnis baik untuk kebutuhan loka, regional dan diharapkan dapat berkiprah dalam skala nasional.

4. Kawasan Wisata Sijuk

Dengan potensi pantai dan bebatuan yang indah, kawasan pantai di Kecamatan Sijuk tepatnya di Tanjung Kelayang dapat menjadi daya tarik wisatawasan domestik dan internasional. Dengan demikian, kawaan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah.



5. Kawasan etalase kelautan Selat Nasik

Besarnya potensi perikanan di Belitung baik perikanan budidaya dan tangkap dijadikan sebagai penggerak ekonomi potensial. Dan selat nasik merupakan pulau yang memiliki kesesuaian sebagai sentra industri, pembudidayaan, dan sekaligus pusat pengolahan hasil turunan dari komoditi ikan.

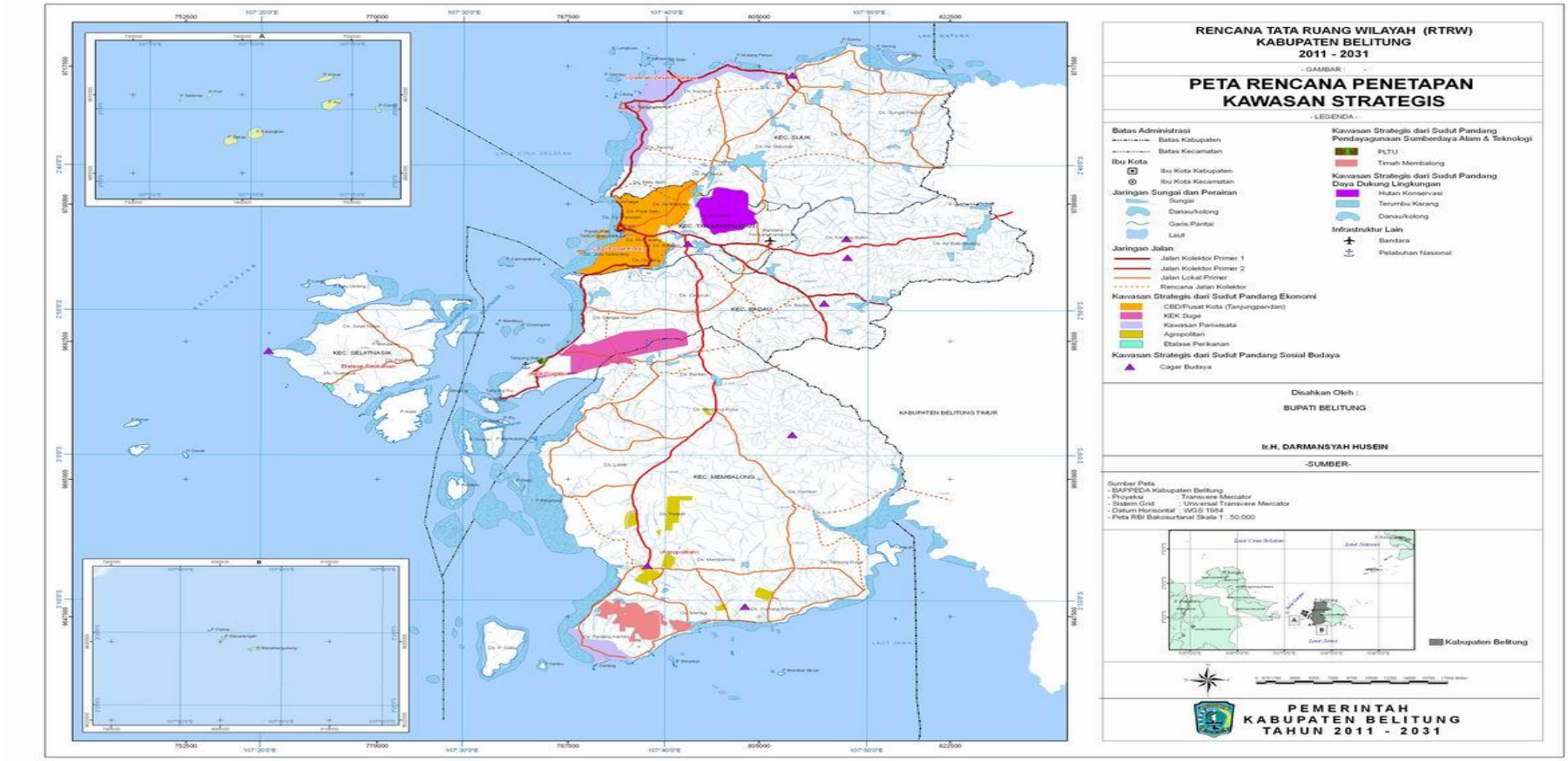


6. Kawasan industri perikanan Tanjung Binga

Industri perikanan di Tanjung Binga sudah tumbuh dengan baik dan potensial untuk dikembangkan dengan skala pelayanan yang lebih luas. Variasi produk dapat mempercepat tumbuhnya kawasan Tanjung Binnga sebagai kawasan yang strategis di Kabupaten Belitung.

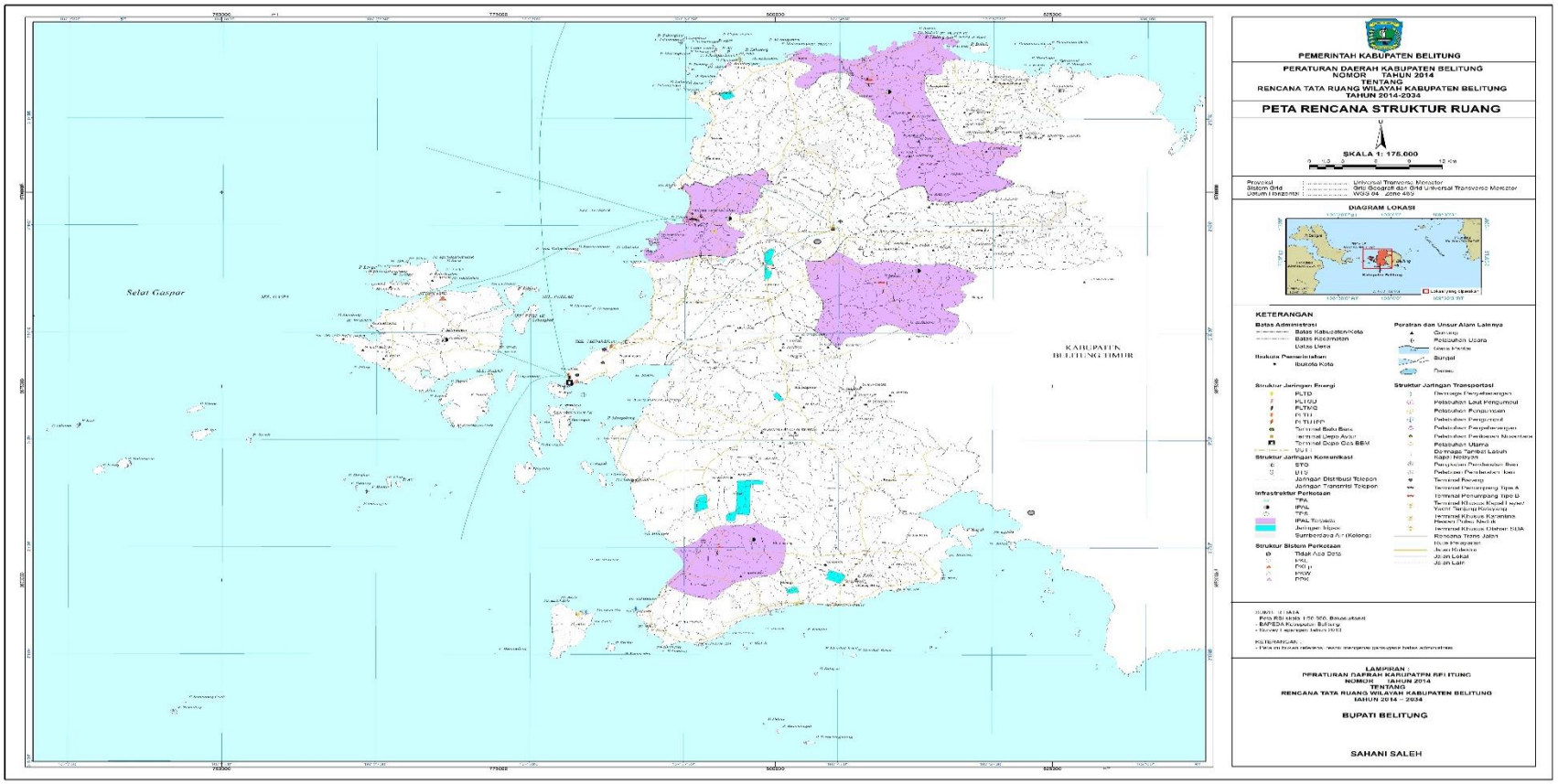


Gambar 2.60 PETA RENCANA PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS



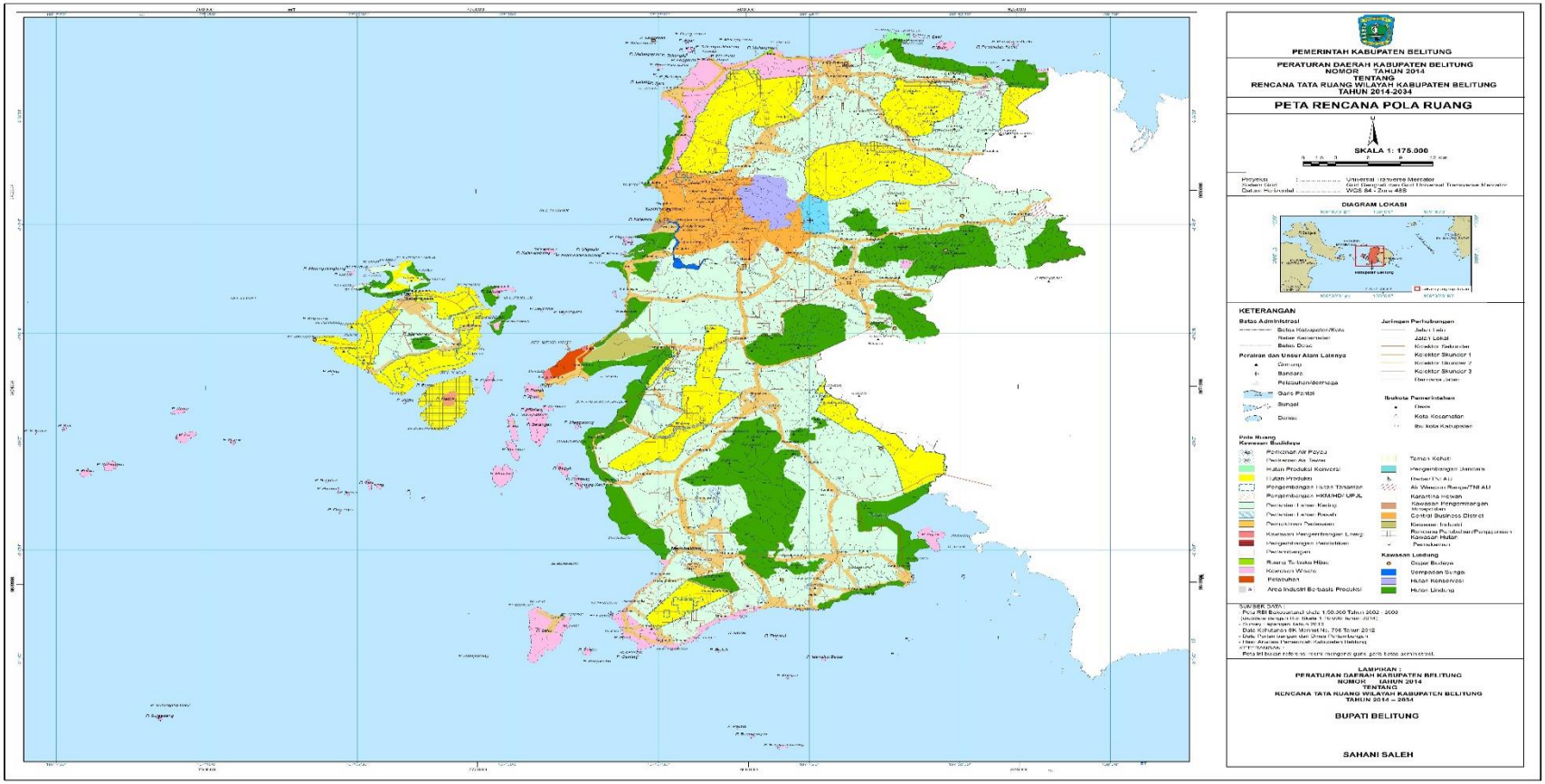
Sumber : RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034

Gambar 2.61 PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Sumber : RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034

Gambar 2.62 PETA RENCANA POLA RUANG



Sumber : RTRW Kabupaten Belitung 2014-2034

2.7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Berdasarkan RPJPN Tahun 2025-2045

Di dalam RPJPN Tahun 2025-2045 terdapat arah kebijakan kewilayahan berdasarkan pulau pulau di Indonesia, termasuk arah kebijakan wilayah Sumatera. Berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045 Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional menjadi 23,0 persen, apabila rata-rata pertumbuhan sekitar 5,7-6,6 persen per tahun. Peluang kontribusi ekonomi Pulau Sumatera bersumber dari letak geografis yang dilalui oleh jalur sutra *(silk road)* dan wilayah ALKI I serta SloC *(Sea Line of Communication)* sebagai jalur perdagangan internasional yang menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia.

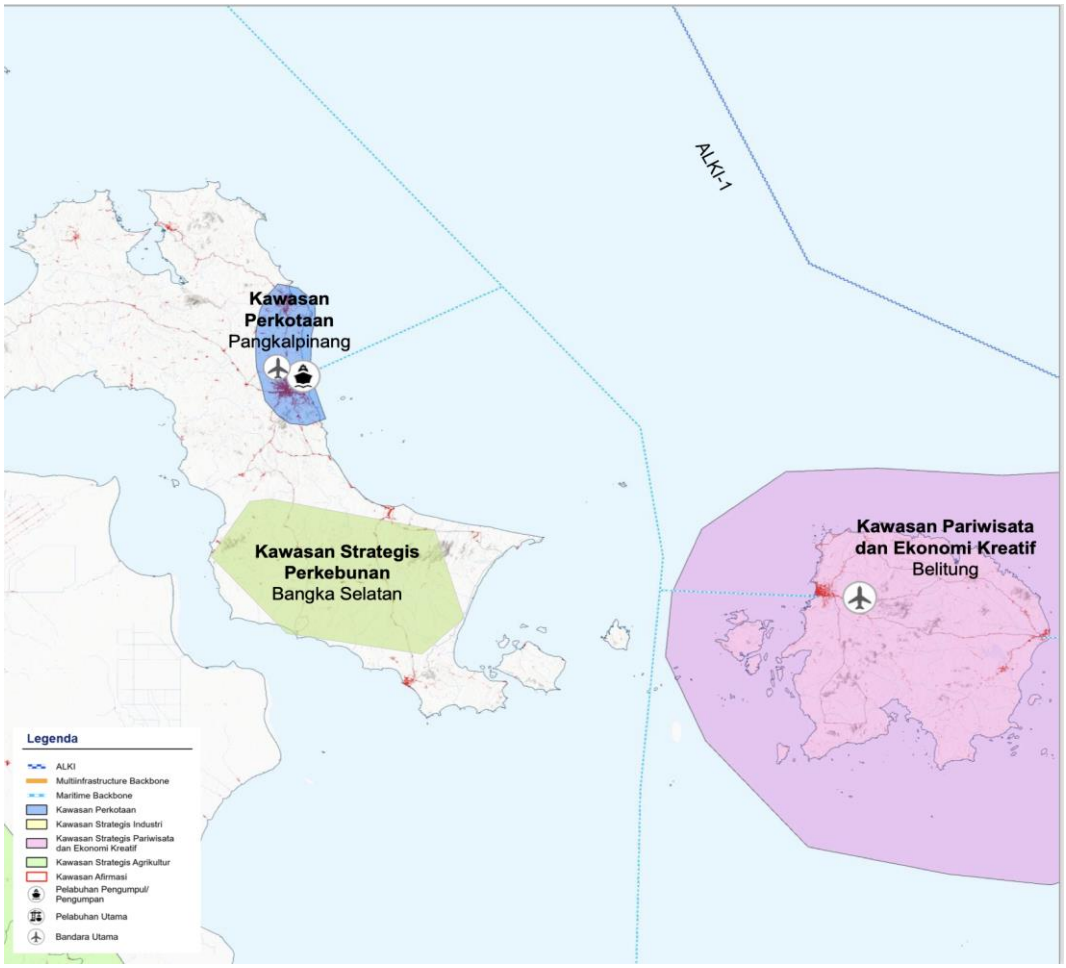
Wilayah Sumatera diarahkan menjadi **"Industri Berbasis SDA dan *Hub* Ekonomi Biru Barat Indonesia".** Dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:

1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;
2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis yang sudah terbangun;
3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkular dan berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-kawasan lindung dan geopark termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan;
4. Pengembangan infrastruktur pendukung yang menciptakan interkoneksi antarkawan strategis; pengembangan jalur konektivitas antarwilayah;
5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema kerja sama regional IMT-GT;

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan resiko bencana.

Tema pengembangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya adalah menjadi **Mandala Pengembangan *Quality Tourism* dan Ekonomi Biru**. Dengan arah kebijakan pengembangan Kabupaten Belitung sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta sebagai koridor multi infrastruktur dan logistik infrastruktur melalui optimalisasi Bandara H.AS Hanandjoeddin dan pengembangan pelabuhan khusus kepariwisataan (marina) di Belitung (sekitar Tanjung Kelayang).

Gambar 2.63 Tema Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung



Sumber : RPJPN 2025-2045

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

"Identifikasi persamasalahan dan analisis isu strategis menjadi dasar penyusunan strategi yang tertuang dalam arah kebijakan dan sasaran pokok daerah"



Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Analisis Permasalahan

Uraian atas permasalahan dilakukan berdasar kelompok masalah sesuai dengan proses bisnis level nol sebuah daerah. Berdasarkan data dan informasi pada BAB II, teridentifikasi 4 kelompok permasalahan penting yang dihadapi Kabupaten Belitung, yaitu permasalahan kesejahteraan ekonomi, permasalahan pengembangan sumber daya manusia, permasalahan tata kelola pemerintahan dan permasalahan infrastruktur dan lingkungan hidup.

3.1.1 Permasalahan Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang ada di suatu daerah merupakan sumbangsih dari pembangunan yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera (Siregar & Wahyuniarti, 2008). Untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik, Kabupaten Belitung diharapkan memiliki motor perekonomian yang kokoh dan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung.

Berdasar data dan informasi yang telah disajikan pada BAB II, selama 5 tahun terakhir, bahkan 10 tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi kabupaten Belitung memiliki kinerja yang jauh lebih baik dibandingkan dengan provinsi maupun angka nasional. Namun demikian pertumbuhan yang dicapai tersebut belum mencerminkan harapan dari rencana nasional untuk menjadikan kabupaten ini sebagai kawasan pariwisata minat khusus yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan. Hal ini dibuktikan dengan berpindah-pindahnya sumber pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan pergerakan pasar. Pada saat harga pasar produk pertambangan naik, maka sektor pertambangan akan menjadi motor penggerak perekonomian. Pada saat lain ketika harga produk tambang turun, maka sektor pertanian yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.

Terdapat beberapa aspek yang dapat diidentifikasi menjadi sebab dari belum kokohnya pertumbuhan ekonomi yang dicapai: (1). Sektor pertanian masih menjadi sektor cadangan. (2). Sektor pertambangan masih memiliki dominasi yang cukup tinggi. (3). Sektor industri pengolahan yang berkembang masih didominasi industri pertambangan. (4). Sektor pariwisata belum mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

A. Sektor Primer

Sebagai sektor primer, pertanian di Belitung masih memiliki kontribusi yang cukup tinggi pada tahun 2023(sebesar 25,56%), namun demikian jika dilihat dari pertumbuhannya sektor ini memiliki pertumbuhan yang unik. Disaat sektor lain (baca pertambangan) mengalami penurunan maka sektor pertanian pertumbuhannya meningkat dan sebaliknya. Artinya sektor pertanian bagi masyarakat bukanlah sektor yang diutamakan, namun hanya menjadi sektor untuk berjaga jaga saat sektor lain kondisinya sedang buruk. Kinerja sektor pertanian yang demikian tidak dapat memberikan jaminan ketahanan pangan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Belitung. Kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Belitung pada tahun 2023 sebanyak 18.428 ton dimana selama lima tahun terakhir tidak menunjukkan fluktuasi yang jauh atau cenderung konstan. Sementara itu, jumlah produksi dalam negeri yang belum mencukupi dimana pada tahun 2023 sebanyak 442,00 ton yang menunjukkan bahwa terjadi defisit yang sangat jauh antara kebutuhan dengan hasil produksi dalam daerah Kabupaten Belitung. Meskipun mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir, namun jumlah produksi pangan tidak pernah mencukupi kebutuhan domestik. Hal inilah yang membuat Kabupaten Belitung sangat tergantung pada kiriman pasokan bahan pangan yang berasal dari luar daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan masyarakat. Ketergantungan akan pasokan bahan pangan dari luar daerah diperparah lagi dengan mencuatnya sektor pertambangan yang

cenderung memberikan return yang lebih baik bagi masyarakat. *Return* yang lebih baik membuat para petani beralih menjadi penambang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dari bertani.

Sektor primer lainnya adalah sektor pertambangan. Sektor ini kontribusi pada tahun 2023 berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan sebesar 6,7 persen cukup tinggi jika dibandingkan sektor hotel dan restoran sebesar 3,8 persen yang dapat digunakan sebagai *proxy* perkembangan pariwisata. Pertumbuhan sektor pertambangan berfluktuasi mengikuti fluktuasi harga tambang di tingkat dunia. Sektor pertambangan ini menjadi dilema yang cukup rumit bagi kabupaten Belitung. Di satu sisi, adalah sebuah realitas bahwa masyarakat masih melakukan penambangan, baik yang **berizin** maupun tidak berizin. Pada sisi lain saat ini kewenangan sektor pertambangan tidak lagi di kabupaten/kota. Dua fakta ini menjadi dilema yang besar bagi pemerintah Belitung. Pemerintah kabupaten hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan tanpa kewenangan untuk melakukan tindakan, karena ijin tambang pun bukan di kabupaten.

B. Sektor Sekunder

Sektor industri pengolahan sejatinya adalah sektor yang memiliki kemampuan untuk mengubah struktur ekonomi, namun demikian yang terjadi di Belitung kondisinya agak berbeda. Sektor industri pengolahan sebelum penetapan Tanjung Kelayang sebagai KEK, perannya cukup tinggi, telah mendekati angka 13%, namun sejalan dengan ditetapkannya KEK justru peran industri pengolahan turun menjadi hanya 11,74% [ada tahun 2023. Jika dilihat pertumbuhannya maka pertumbuhan sektor industri pengolahan juga mengalami fluktuasi yang tidak teratur**.** Ketidakteraturan pertumbuhan sektor industri pengolahan berkaitan dengan karakter industri yang tumbuh. Dari data yang disajikan (lihat penjelasan urusan perindustrian), industri pengolahan Belitung didominasi oleh pengolahan bahan tambang utamanya industri tepung **kaolin**. Informasi ini menyatakan bahwa ternyata perekonomian

Belitung masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi, sementara industri pengolahan berbasis pada sumber daya lokal yang lestari belum cukup dikembangkan.

Kabupaten Belitung hingga saat ini belum memiliki Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai acuan dalam pengembangan kawasan industri yang lebih efektif dan mempermudah tumbuhnya investasi di sektor industri pengolahan pada umumnya. Lebih lanjut, bahan baku industri makanan dan minuman lokal juga masih bergantung pada pasokan dari luar daerah dan bersifat musiman. Hal ini yang membuat industri pengolahan berbasis produk lokal masih belum bisa berkembang dengan baik bila dibandingkan dengan ekstraksi mineral yang memang tersedia di Kabupaten Belitung. Bila dilihat berdasarkan data yang ada, pada tahun 2023, industri pengolahan memang mengalami pertumbuhan namun hanya sebesar 4,92%. Lemahnya sektor industri pengolahan juga dipicu oleh lemahnya investasi di sektor industri pengolahan, Investasi tertinggi berdasar data tahun 2023 didominasi oleh sektor pertanian (secara umum). Dari hasil FGD teridentifikasi bahwa investasi sektor pertanian itu didominasi sub sektor perkebunan khususnya kelapa sawit.

C. Sektor Tersier

Sektor akomodasi dan makan minum merupakan salah satu sektor yang paling dekat untuk menjadi proksi perkembangan pariwisata di sebuah wilayah. Dari angka pertumbuhan yang dicapai dapat dilihat bahwa sejak ditetapkannya KEK Pariwisata, maka sektor ini tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya. Bahwa di tahun 2019-2020 menurun, semua sektor mengalami penurunan saat itu. Namun demikian jika dilihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB belum banyak mengalami peningkatan, jika di tahun 2014 pangsa sektor ini adalah 3,22%, maka pada tahun 2023 naik menjadi 3,84%, sebuah kenaikan yang sangat kecil.

Sektor pariwisata Kabupaten Belitung masih mencoba untuk bangkit setelah adanya pandemi Covid-19. Tercatat jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat dari tahun 2020 hingga ke tahun 2023. Jumlah kunjungan yang meningkat dari 134.266 orang pada tahun 2020 menjadi 301.870 orang pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, jumlah tersebut belum memberikan kontribusi yang diharapkan dimana sektor pariwisata hanya memberikan kontribusi yang masih kecil pada tahun 2023 sebesar 3,84%. Beberapa hal yang membuat sektor pariwisata Kab. Belitung tidak mengalami akselerasi yang cepat adalah karena kunjungan pariwisata ke Kabupaten Belitung lebih didominasi dengan kepariwisataan tujuan/ minat khusus yang bergantung pada *event* yang diselenggarakan di Kabupaten Belitung dan bergantung pada jumlah maskapai dan jumlah penerbangan dari dan ke Belitung.

Berbagai permasalahan tersebut dapat disarikan dalam tabel 3.1 analisis permasalahan ekonomi kabupaten Belitung.

Tabel 3.1 Analisis Permasalahan Ekonomi

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Urusan terlibat
Perekonomian Belitung berkinerja sangat baik namun landasan ekonominya tidak cukup kokoh bagi pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan	Sektor pertanian dan sektor perikanan sebagai unggulan daerah belum mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat	Tingkat return sektor pertanian kurang menarik bagi pelaku ekonomi dibandingkan sektor lainnya, sehingga produktivitas pertanian rendah yang berakibat pada ketahanan pangan yang makin terancam	Pertanian Perikanan Penanaman modal dan investasi
		Hilirisasi sektor perikanan dan pertanian masih rendah	Perindustrian Pertanian Perikanan
		SDM Petani yang semakin berkurang karena alih profesi, dan rendahnya regenerasi petani milenial	Pertanian Perikanan Pemuda Pendidikan informal
		Kab. Belitung belum memiliki *roadmap* pengembangan/ pemanfaatan sektor pertanian dan sektor perikanan	Ketahanan pangan Pertanian Perikanan

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Urusan terlibat
	Sektor pertambangan (ekstraktif) yang masih ada menjadi ancaman terhadap harapan daerah untuk menuju pada pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan	Belum dilakukan penertiban terhadap Penambang Tanpa Izin (PETI) membuat banyaknya penambang ilegal bermunculan Belum optimalnya koordinasi antara Pemkab Belitung dengan Provinsi	Faktor eksternal, urusan pertambangan bukan lagi di Kabupaten/ Kota, fungsi kab/Kota hanya pada lingkungan hidup
	Sektor industri pengolahan belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak perubahan menuju perekonomian Belitung yang berkelanjutan	Pasokan bahan baku industri lokal masih bergantung pada musim dan pasokan dari luar daerah	Perindustrian, koperasi UMKM perdagangan DPMPTSPP DKUKMPTK
		Produk yang dihasilkan IKM belum berdaya saing	Perdagangan
		Masih minimnya pemanfaatan teknologi industri untuk pemanfaatan potensi ekonomi lokal berbasis sumber daya lokal non tambang	Perindustrian
		Kewirausahaan pelaku Usaha ekonomi lokal masih rendah	UKM
		Kelembagaan ekonomi lokal masih belum berkembang	Koperasi
		Kabupaten Belitung hingga saat ini belum memiliki Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten (RIPIK)	Semua urusan yang terlibat
		Investasi lebih tertarik dengan sub sektor perkebunan, utamanya kelapa sawit	
	Sektor pariwisata sebagai sektor yang diunggulkan belum mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi lokal	Pariwisata Belitung sangat bergantung pada aksesibilitas antar pulau dan antar negara, sehingga perubahan kebijakan mengenai transportasi antar pulau/ antar negara menjadi ancaman besar bagi pengembangan pariwisata Belitung	Dinas pariwisata
		Pembangunan pariwisata (4 pilar pariwisata) Belitung yang belum dikelola dengan baik	

Sumber : data primer (diolah)

Permasalahan-permasalahan yang menyebabkan perekonomian di Kabupaten Belitung belum memiliki landasan yang kokoh bagi pengembangan ekonomi lokal adalah karena Sektor pertanian dan sektor perikanan sebagai unggulan daerah belum mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, Sektor pertambangan (ekstraktif) yang masih ada menjadi ancaman terhadap harapan daerah untuk menuju pada pengembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan, Sektor industri pengolahan belum sepenuhnya mampu menjadi motor penggerak perubahan menuju perekonomian Belitung yang berkelanjutan, dan Sektor pariwisata sebagai sektor yang diunggulkan belum mampu menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam melakukan upaya pengembangan ekonomi lokal, pemberdayaan para pelaku ekonomi lokal adalah kuncinya. Dalam melakukan pemberdayaan, para pelaku ekonomi lokal diharapkan dapat meningkatkan kewirausahaannya untuk dapat berkembang. Pelaksanaan pemberdayaan dapat dimulai dengan meningkatkan kapasitas ataupun keterampilan para pelaku usaha dengan pemberian pelatihan dan pemahaman mengenai keterampilan berusaha, manajemen usaha, maupun pemasaran yang baik. Selain itu, akses yang cukup terhadap sumber daya yang dibutuhkan juga akan memberikan dukungan bagi pengembangan para pelaku ekonomi lokal.

Bagi pelaku usaha sektor primer, pemberian akses langsung ke pasar hasil bumi akan membuat para petani mendapatkan harga jual yang lebih baik terhadap hasil pertanian. Untuk mendukung akses terhadap pasar langsung tanpa perantara, maka penguatan kelembagaan petani dapat menjadi salah satu solusi. Dengan adanya kelembagaan yang baik, diharapkan para petani memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam menjual hasil bumi sehingga dapat menjawab isu mengenai return dari sektor pertanian yang cenderung fluktuatif. Selain itu juga dibutuhkan pengawasan dalam alih fungsi lahan di Kabupaten Belitung untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian. Peraturan daerah

mengenai perlindungan lahan pertanian sangat dibutuhkan sebagai dasar hukum dalam melakukan pengawasan untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian. Dalam pengawasan lahan tersebut dibutuhkan Rencana Detail Tata Ruang yang baik agar tidak terjadi alih fungsi lahan secara membabi buta melihat masih banyaknya penambang ilegal yang ada di Kabupaten Belitung.

Para pelaku usaha sekunder sangat membutuhkan peningkatan kapasitas terutama dalam hal pemanfaatan teknologi agar dapat meningkatkan kualitas maupun kuantitas hasil produksi dengan tetap mengedepankan efisiensi. Untuk mendukung sektor primer, industri pengolahan dapat membantu terjadinya hilirisasi produk hasil pertanian dengan bantuan teknologi untuk meningkatkan kualitas ataupun menjaga daya tahan produk sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomisnya. Pemanfaatan teknologi yang tepat dapat diimplementasikan melalui pelatihan maupun pendampingan bagi para pelaku usaha industri pengolahan untuk menjawab tantangan kurangnya penerapan teknologi.

Sektor tersier sangat diharapkan untuk menjadi motor penggerak ekonomi Kabupaten Belitung kedepannya. Untuk mengoptimalkan sektor tersier sangat dibutuhkan peran serta dari semua pihak untuk menjaga keberlangsungan dan kelestariannya. Infrastruktur yang baik serta menjaga kapasitas daya dukung destinasi wisata dalam melakukan pengembangan potensi pariwisata sangat diperlukan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Namun, untuk menarik minat wisatawan datang ke Kabupaten Belitung, pengembangan atas atraksi wisata agar lebih menarik dan tidak terkesan monoton bagi wisatawan merupakan salah satu solusi. Selain pengembangan destinasi wisata agar lebih menarik bagi wisatawan, akses para wisatawan untuk mengunjungi Kabupaten Belitung merupakan hal yang penting juga. Dengan semakin mempermudah akses langsung ke Kabupaten Belitung dengan jalinan kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah pusat,

pihak penyedia jasa transportasi berikut dengan penyedia paket perjalanan wisata merupakan salah satu solusi dalam menjaga dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Belitung.

3.1.2 Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menggambarkan perkembangan suatu daerah atas pembangunan SDM yang dilakukan daerah tersebut. SDM menjadi modal utama sebuah pembangunan. Pembangunan bidang sosial mencakup pembangunan manusia dan masyarakat meliputi pembangunan kependudukan, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pembangunan masyarakat. Pembangunan di berbagai sektor tersebut merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Penduduk dalam pembangunan mempunyai peran sebagai pelaku (subjek) dan juga sebagai tujuan (objek). Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam arti yang luas (misalnya, mengurangi jumlah penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran, dan menyediakan pendidikan yang terjangkau bagi semua penduduk). Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas perekonomian suatu negara dapat berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di tingkat global.

Kualitas sumber daya manusia hingga hari ini masih menjadi tantangan Indonesia. Pada tahun 2023, tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh tamatan sekolah dasar sebesar 51,49 persen dan hanya sekitar 3,41 persen yang berpendidikan diploma (BPS, 2023). Kualitas

sumber daya manusia ini sangat terkait dengan kualitas sarana pendidikan, kesehatan, dan akses ke infrastruktur dasar.

Dalam perspektif sosial, pembangunan tidak saja berfokus dalam pembangunan ekonomi. Negara bertanggung jawab dalam melaksanakan sistem perlindungan sosial untuk melindungi masyarakat terhadap resiko pembangunan ekonomi. Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan manusia adalah manusia karena merupakan tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan manusia yang sama, adil, dan merata. Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai.

Untuk dapat menjelaskan kondisi eksisting pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung, maka analisis ini menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan alat ukur yang diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam Laporan Tahunan *Human Development Report* (HDR). Indeks Pembangunan Indonesia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. IPM ini telah dijadikan sebagai indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) karena IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah/negara, dan bagi Indonesia (BPS, 2020). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek dari IPM yang perlu diperhatikan, yaitu status pencapaian dan tingkat kecepatan.

Berdasarkan status pencapaian, IPM Kabupaten Belitung dalam lima tahun terakhir (2019-2023) berada dalam kategori tinggi (70≤Nilai IPM<80) dengan posisi paling tinggi jika dibandingkan dengan IPM Nasional, Provinsi Bangka Belitung, dan Kabupaten/ Kota Provinsi

Bangka Belitung. Data ini menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir, angka IPM Kab. Belitung lebih tinggi dibandingkan dengan angka IPM Kepulauan Bangka Belitung yang berarti secara rata-rata pembangunan manusia di Kabupaten Belitung di atas rata-rata pembangunan manusia di Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan. Namun, berdasarkan tingkat kecepatan, pertumbuhan IPM Kabupaten Belitung dalam dua puluh tahun terakhir menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang lebih rendah dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, hanya mencapai 0,80 persen.

Walaupun nilai IPM Kabupaten Belitung berada dalam kategori tinggi pada tahun 2023 yaitu 74,49, nilai ini masih belum menunjukkan capaian yang sempurna atas pembangunan manusia, sehingga walaupun IPM Kabupaten Belitung tinggi namun belum merata pada seluruh penduduk yang ada di Kabupaten Belitung. Dengan demikian dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Belitung yang belum merata pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 Analisis Permasalahan SDM

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	OPD Terkait
Kualitas Pembangunan Manusia di Kabupaten Belitung belum merata	Kualitas Pendidikan Penduduk Rendah	Masih terdapat penduduk putus sekolah pada tingkat dasar	Pernikahan dini yang tinggi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Faktor jumlah anak dalam keluarga (TFR di belitung tinggi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Orientasi orang tua dan siswa masih terfokus pada pemenuhan ekonomi daripada pendidikan	

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	OPD Terkait
			Belum semua pesantren menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan	
		Tingkat literasi masyarakat yang rendah	Kegemaran Membaca Masyarakat masih rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Aksesibilitas pada perpustakaan masih rendah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Aksesibilitas pendidikan dasar masih terbatas	Terbatasnya dan tidak meratanya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD, SMP	**DPUPR,** Dinas Pendidikan dan kebudayaan, **BKPSDM**
			Terbatasnya dan belum meratanya sarana dan prasarana sekolah dasar yang sesuai standar	
			Adanya potensi kekurangan satuan pendidikan di tingkat SMP	
	Derajat Kesehatan Masyarakat masih rendah	Masih tingginya angka mortalitas penduduk	Belum meratanya kuantitas dan kualitas layanan kesehatan	Dinas Kesehatan
			Aksesibilitas fasilitas kesehatan terbatas	Dinas Kesehatan
			Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmeet need* yang masih tinggi)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat
			Tingginya kasus kehamilan usia dini	Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	OPD Terkait
			Masih banyaknya kasus bayi dengan BBLR	Dinas Kesehatan
			Masih rendahnya kesadaran ibu hamil akan pemeriksaan kehamilan yang lengkap	Dinas Kesehatan
		Tingkat Morbiditas penduduk tinggi	Masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat	Dinas Kesehatan
			Rendahnya akses masyarakat pada sanitasi layak	Dinas Kesehatan
			Terdapat Lansia terlantar	Dinas Sosial
			Meningkatnya penyakit kesehatan mental masyarakat	Dinas Kesehatan
		Status gizi masyarakat masih rendah	Tingginya Pernikahan Dini	DPPKBPMD
			Pola asuh dan pola makan yang kurang baik	Dinas Kesehatan
	Masih terdapat penduduk yang tidak sejahtera	Daya Beli Masyarakat masih rendah	Biaya hidup semakin tinggi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Pendapatan masyarakat belum merata	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Beban penduduk produktif terhadap penduduk tidak produktif tinggi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Mutu penanganan dan pemberdayaan penduduk kurang mampu masih kurang	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Ketahanan Ekonomi Desa masih rendah	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	OPD Terkait
			Pemajuan kebudayaan daerah masih rendah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Masih terdapat penduduk yang menganggur	Rendahnya kualitas pendidikan dan kompetensi tenaga kerja (55,2% penduduk bekerja lulusan SD-SMP)	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Terbatasnya ketersediaan lapangan pekerjaan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan	Dinas Pemuda dan Olahraga
			Tingginya migrasi penduduk usia kerja yang berada di wilayah perdesaan ke perkotaan dengan tingkat pendidikan rendah	
	Pembangu-nan manusia antargender belum setara	Kualitas pendidikan perempuan lebih rendah dari pada laki-laki	Penduduk perempuan dengan pendidikan SMA ke atas lebih rendah dari laki-laki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan
		Daya beli perempuan lebih rendah dari laki-laki	Partisipasi angkatan kerja perempuan lebih rendah dari laki-laki	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Perempuan pekerja keluarga/tak dibayar jauh lebih besar daripada laki-laki	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
		Pemberdayaan Perempuan Rendah	Keterlibatan perempuan dalam politik rendah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Sumbangan pendapatan perempuan rendah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah	Serabut Masalah	OPD Terkait
				Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja
			Kesempatan perempuan menjadi tenaga profesional masih rendah	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Tenaga Kerja

Sumber : data primer (diolah)

Secara umum, permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kualitas pembangunan manusia yang rendah ditemukan di Kabupaten Belitung adalah kualitas pendidikan yang masih rendah, derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah dan kesejahteraan masyarakat yang belum merata. Masing-masing masalah penyebab pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung masih rendah akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Kualitas pendidikan yang masih rendah

Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Belitung di tingkat global. Penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Permasalahan pendidikan tidak terlepas dari komponen-komponen utama pendukungnya yakni lamanya penduduk dalam menyelesaikan pendidikan dan harapan penduduk untuk bersekolah.

Rata–rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Belitung yang meningkat setiap tahunnya selama tahun 2019-2023, namun tidak serta merta **menunjukkan** kondisi terbaik dari dimensi pendidikan pada daerah ini. Pertumbuhan RLS di Kabupaten Belitung yakni sebesar 1,77 persen pertahunnya memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan RLS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional, selaras dengan RLS Kabupaten Belitung masih lebih tinggi dibandingkan dengan

Provinsi dan Nasional. Sedangkan HLS Kabupaten Belitung di tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional yakni sebesar 11,90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya untuk menjamin penduduk untuk dapat memperoleh pendidikan sesuai dengan usianya belum sepenuhnya berhasil. Beberapa akar masalah yang diidentifikasi menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan adalah sebagai berikut:

1) Masih Terdapat Penduduk Putus Sekolah pada Tingkat Dasar

Partisipasi sekolah masyarakat di Kabupaten Belitung sudah cukup baik namun masih terdapat masyarakat yang tidak menempuh pendidikan maupun tidak melanjutkan pendidikan. Hal ini ditunjukan jumlah peserta didik rentang usia 7-12 tahun yang putus sekolah jenjang pendidikan SD sederajat sebanyak 34 peserta didik pada tahun 2023, dan sebanyak 35 peserta didik usia 13-15 tahun yang putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP Sederajat.

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tentunya dapat mempengaruhi kualitas pengetahuan dan keterampilan yang tidak diperoleh oleh masyarakat akibat tidak menerima dan menempuh pendidikan dengan baik. Tingginya angka putus sekolah teridentifikasi disebabkan oleh beberapa serabut masalah yakni:

a) Masih terdapat pernikahan dini

Pernikahan dini seringkali menjadi penyebab utama putus sekolah, terutama pada anak perempuan. Kabupaten Belitung memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi yakni pada tahun 2022 tercatat sebanyak 94 pernikahan. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab adanya siswa yang putus sekolah akibat pernikahan. Faktor ekonomi keluarga dan tanggung jawab pernikahan yang terlalu berat dapat menghalangi akses pendidikan bagi remaja yang menikah pada usia dini. Putus sekolah

berdampak pada keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja di masa depan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas hidup dan kemampuan seseorang untuk berkontribusi pada pembangunan manusia.

b) Faktor Jumlah Anak dalam Keluarga

Banyak anak putus sekolah memiliki latar belakang ekonomi orang tua yang rendah. Faktor ini dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, termasuk biaya sekolah, buku, dan perlengkapan lainnya. Jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi putus sekolah. Ketika jumlah anak dalam keluarga meningkat, orang tua mungkin menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan semua anak mereka Selama 5 tahun terakhir rata-rata jumlah anak dalam satu keluarga sebanyak 2-3 anak. Kondisi ini menjadi masalah pada saat ekonomi keluarga tidak dapat mendukung pendidikan anak dengan jumlah anak yang banyak.

c) Orientasi Orang Tua Dan Siswa Masih Terfokus Pada Pemenuhan Ekonomi Daripada Pendidikan

Dalam konteks orientasi ekonomi, ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan saat memutuskan antara orientasi ekonomi dan menyekolahkan anak. Orang tua dengan ekonomi yang kurang mampu, lebih memilih untuk tidak menyekolahkan anaknya, dikarenakan untuk membantu mereka bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi.

Orientasi ekonomi menekankan pentingnya pendapatan keluarga yang memadai untuk memberikan kesempatan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak. Dalam kondisi ekonomi yang lemah, orang tua harus bekerja keras untuk menyekolahkan

anak-anak mereka, sehingga permasalahan putus sekolah masih dihadapi di Kabupaten Belitung.

d) Belum Semua Pesantren Menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan

Salah satu jenis pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan, yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah akibat kemiskinan, keterpencilan, dan keterbelakangan. Untuk itulah pendidikan kesetaraan menjadi dasar yang penting bagi seluruh anak bangsa untuk mendapatkan layanan pendidikan, dimanapun berada dan kapanpun waktunya. Dengan adanya anak yang memiliki keterbatasan ekonomi dan belum dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, diharapkan pendidikan kesetaraan dapat memberikan dukungan tersebut.

Pendidikan kesetaraan diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat melalui lembaga-lembaga seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Pelatihan Kursus (LPK), Organisasi Sosial (Orsos), Organisasi Masyarakat (Ormas) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Pondok Pesantren. Namun belum semua pesantren di Kabupaten Belitung menyelenggarakan pendidikan kesetaraan sehingga belum optimal dalam menurunkan permasalahan pendidikan di Kabupaten Belitung.

2) Rendahnya tingkat literasi masyarakat Kabupaten Belitung.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Belitung Tahun 2023 mencapai 74,27 termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan penilaian Tingkat Gemar Membaca (TGM) masyarakat Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 68,77 yang masuk dalam kategori tinggi.

Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Belitung berada pada kategori sedang dan lebih baik dari tahun sebelumnya, hal tersebut selaras dengan meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan pertahun dan diimbangi oleh peningkatan jumlah koleksi judul buku di perpustakaan daerah dan penambahan jumlah pustakawan.

Namun demikian literasi masyarakat perlu ditingkatkan dengan upaya meningkatkan sosialisasi terkait minat baca, meningkatkan promosi perpustakaan dan memperbanyak kegiatan dengan masyarakat dalam rangka promosi peningkatan minat baca dengan melaksanakan acara-acara yang menarik dan kreatif, penambahan akses internet di perpustakaan desa/kelurahan, serta menjalin kerja sama dengan semua instansi dan organisasi kemasyarakatan misalnya Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca (GPMB), Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), dan lain-lain.

a) Aksesibilitas pendidikan masih terbatas

Aksesibilitas memiliki kesesuian dengan masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan akan berdampak pada kualitas mutu sekolah. Oleh karena itu, pendidikan juga dilihat dari segi kualitas, kuantitas, fasilitas, maupun sarana prasarana. Aksesibilitas pendidikan yang terbatas digambarkan masih terdapatnya masyarakat yang tidak menempuh pendidikan SD dan SMP, maupun melanjutkan pendidikan SD maupuan SMP sesuai dengan usianya.

Beberapa penyebab terbatasnya aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Belitung yakni terbatasnya dan tidak meratanya kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.

Rasio siswa dengan ruang kelas pada tahun 2023 menunjukkan kondisi yang masih rendah, pada tingkat SD dengan rasio 22,35 dengan standar rasio 28 siswa per kelas dan SMP sebesar 29,14 dengan standar rasio 32 siswa per kelas.

Rasio guru dan murid jenjang pendidikan SD tahun 2023 yaitu 15,77 dengan standar rasio 20 siswa per guru dan jenjang pendidikan SMP tahun 2023 yaitu 16,89 dengan standar rasio 20 siswa per guru. Namun kondisi ketersediaan guru pada jenjang pendidikan SD dan SMP belum tersebar merata sesuai kebutuhan.

3) Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah

Kualitas kesehatan menjadi indikator penting dalam memberikan gambaran mutu pembangunan manusia dalam suatu wilayah. Kondisi masyarakat yang semakin sehat, maka akan dapat mendukung proses pembangunan suatu daerah yang lebih baik. Sehingga untuk menciptakan kemampuan dan daya saing untuk memperoleh kualitas hidup yang bernilai, maka perlu membangun kapabilitas kesehatan yang baik pula. Dalam menentukan posisi status kesehatan masyarakat di suatu wilayah, aspek umur panjang dan hidup sehat dilihat melalui indikator Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH). Semakin tinggi harapan hidup saat lahir suatu negara, semakin tinggi pula derajat kesehatan suatu negara. Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Belitung walaupun meningkat sejak tahun 2019-2023 namun masih berada dibawah Nasional. Dimana UHH pada tahun 2023 di Kabupaten Belitung berada pada usia 72,52 tahun, sedangkan Nasional berkisar pada usia 73,93 tahun. Tingkat pertumbuhan harapan hidup Kabupaten Belitung sedikit lebih tinggi dibandingkan Provinsi yakni sebesar 0,25 persen dalam 5 tahun terakhir, sedangkan Provinsi Bangka Belitung memiliki laju pertumbuhan sebesar 0,23 persen selama 5 tahun terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan Usia Harapan Hidup Kabupaten Belitung dalam 5 tahun terakhir namun UHH Kabupaten Belitung masih rendah jika

dibandingkan dengan UHH Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, hal tersebut dipengaruhi oleh:

a) Masih Tingginya Angka Mortalitas Penduduk

Angka mortalitas adalah ukuran yang menggambarkan jumlah kematian dalam suatu populasi dalam jangka waktu tertentu. Angka kematian tersebut diakibatkan oleh keadaan tertentu, dapat berupa penyakit maupun sebab lainnya. Angka kematian merupakan salah satu indikator perkembangan kondisi kesehatan masyarakat pada satu kurun waktu yang diukur. Tingginya kematian di suatu wilayah dapat menggambarkan kondisi sarana kesehatan berupa pelayanan kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, disamping kondisi ekonomi juga menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan kesehatan pada suatu daerah dalam satu tahun.

Tinggi rendahnya angka kematian, secara umum erat dipengaruhi dengan tingkat kesakitan pada kelompok bayi, balita dan ibu maternal (hamil, melahirkan, nifas). Sehingga tingginya angka kematian bayi dan ibu dapat mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan suatu wilayah. Angka kematian bayi (AKB) Kabupaten Belitung Tahun 2023 sebanyak 34 kematian bayi atau sebanyak 12,9 per 1000 kelahiran hidup dan kematian pada ibu (AKI) di Kabupaten Belitung sebanyak 6 orang pada tahun 2023 atau 226 per 100.000 kelahiran hidup.

Tingginya mortalitas penduduk Kabupaten Belitung teridentifikasi disebabkan oleh beberapa serabut masalah yakni belum meratanya kualitas dan kuantitas layanan kesehatan yang ditimbulkan dari terbatasnya jumlah tenaga kesehatan untuk disebar pada layanan-layanan kesehatan begitu pula dengan alat kesehatan yang masih terbatas.

Selain itu tingginya kasus kematian bayi juga disebabkan oleh Masih banyaknya kasus bayi dengan BBLR (bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram), Tahun 2023 kasus kematian bayi yang disebabkan oleh BBLR sebanyak 10 kasus. Kondisi ini timbul akibat masih rendahnya kesadaran ibu hamil akan pemeriksaan kehamilan yang lengkap.

b) Tingkat Morbiditas Penduduk Tinggi

Morbiditas dapat diartikan sebagai angka kesakitan di suatu wilayah tertentu dalam kurun waktu tertentu baik angka insiden maupun angka prevalensi dari suatu penyakit. Semakin tinggi angka penyakit di suatu wilayah maka semakin rendah pula tingkat kesehatan dari masyarakatnya. Kondisi morbiditas penduduk di Kabupaten Belitung selama lima tahun terakhir cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari tingginya jumlah kasus penyakit tertinggi di tahun 2023 yakni penyakit Hipertensi sebanyak 37.206 dan penyakit diabetes melitus sebanyak 2.966 dalam kategori penyakit tidak menular. Dua penyakit tidak menular ini terus meningkat sejak tahun 2019. Sedangkan dari sisi penyakit menular tertinggi yakni penyakit Diare sebanyak 2.288 kasus di tahun 2023. Selain itu masih terdapat kasus penyakit lainnya dengan jumlah tinggi yaitu DBD sebanyak 628 kasus pada tahun 2023 dan penyakit TBC sebanyak 424 kasus.

Penyakit dengan jumlah tinggi tersebut erat kaitannya dengan pola hidup sehat yang diterapkan oleh masyarakat di Kabupaten Belitung. Sehingga masalah morbiditas yang tinggi tidak dapat dihindari di Kabupaten Belitung.

Secara geografis daerah di Belitung didominasi oleh rawa dan pantai, sehingga kapasitas air bersih terbatas, hanya di sebagian kecil di dataran tinggi. Maka secara perilaku hidup sehat menjadi akar masalah atas banyaknya kasus penyakit di Kabupaten

Belitung dan berujung pada rendahnya kualitas kesehatan masyarakatnya.

Disisi Lain penyebab morbiditas juga muncul dari penduduk dengan usia lanjut yang tidak memperoleh akses kesehatan yang optimal, kondisi ini akan menimbulkan persebaran penyakit pada penduduk usia rentan menjadi mendominasi. Selain itu penyakit mental juga menjadi permasalahan kesehatan kabupaten Belitung, jumlah ODGJ di Kabupaten Belitung tahun 2023 sebanyak 327 orang.

c) Status Gizi Masyarakat Masih Rendah

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh gizi yang didapatkan. Gizi yang seimbang dapat menunjang proses tumbuh kembang anak dan akan berdampak pada derajat kesehatan masyarakat. Rendahnya kualitas gizi yang diterima dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang saling berkaitan, seperti stunting. Stunting merupakan status gizi yang didasarkan pada indeks tinggi badan menurut umur (TB/U).

Angka stunting tahun 2023 menurut data E-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) di Kabupaten Belitung yaitu 6,8 persen.

Penyebab rendahnya status gizi masyarakat timbul dari masalah tingginya pernikahan dini di Kabupaten Belitung sehingga menyebabkan masalah dalam kualitas kesehatan ibu dan bayi, begitu pula dengan rendahnya pola asuh dan pola makan yang kurang baik dan mengakibatkan bayi tidak mendapatkan nutrisi sehingga menimbulkan permasalahan kesehatan seperti gizi yang rendah.

4) Masih Terdapat Penduduk yang Tidak Sejahtera

Kesejahteraan penduduk dapat diartikan sebagai tingkat kehidupan yang baik, di mana individu atau rumah tangga memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang layak. Sehingga ketika penduduk tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial maka kesejahteraan tidak sepenuhnya dapat dicapai. Salah satu indikator yang menunjukkan masyarakat yang tidak sejahtera yakni angka kemiskinan penduduk pada suatu daerah.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Belitung masih jauh lebih besar daripada angka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah penduduk yang tergolong miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) di Kabupaten Belitung yakni sebanyak 6,46 persen pada tahun 2023. Tingginya persentase penduduk miskin Kabupaten Belitung mencerminkan ketidakmampuan sebagian besar penduduk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Fokus dan perhatian utama dalam paradigma pembangunan adalah manusia sebagai tujuan akhir pembangunan. Setiap individu harus dapat dipastikan agar memiliki kesempatan yang sama dalam memperluas pilihan-pilihannya. Konsep ini akan menjamin bahwa semua individu mempunyai capaian pembangunan yang sama, adil, dan merata. Kenyataannya, hal tersebut tidaklah mudah dicapai. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan kesenjangan pembangunan manusia terjadi pada kesejahteraan dari aspek ekonomi. Pada pembangunan SDM, indikator yang digunakan untuk mengukur disparitas antar individu adalah jumlah penduduk miskin Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Belitung. Secara kuantitas jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan belum sepenuhnya terselesaikan.

Satu hal yang perlu dicermati terkait angka kemiskinan adalah potensi meningkatnya jumlah penduduk yang masuk dalam kategori rawan miskin yang sangat rentan terkena dampak perubahan kebijakan ekonomi. Adapun akar masalah dari adanya penduduk yang tidak sejahtera yakni:

a) Daya Beli Masyarakat yang Masih Rendah

Salah satu determinan dari kesejahteraan ekonomi penduduk adalah kemampuan daya beli penduduk. Peningkatan kemampuan daya beli akan meningkatkan kemampuan penduduk untuk memenuhi kebutuhan pokok. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Karena itu besarnya konsumsi atau pengeluaran penduduk merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan penduduk. Begitu juga sebaliknya. Dari sisi Angka garis kemiskinan di Kabupaten Belitung yang tiap tahun terus meningkat pada tahun 2019-2023. Hal ini membuat daya beli masyarakat miskin menjadi lebih rendah yang berakibat pada ketidakberdayaan masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Angka kedalaman kemiskinan di Kabupaten Belitung memiliki pola yang fluktuatif, dengan kondisi akhir meningkat tajam. Semakin tinggi kedalaman kemiskinan yang dimiliki, maka akan semakin lebar pula gap kemiskinan yang menyebabkan banyak orang yang masuk pada kategori rentan. Hal tersebut juga berjalan beriringan dengan tingkat keparahan kemiskinan. Kabupaten Belitung mendapatkan angka yang tinggi dibandingkan Provinsi yakni pada tahun 2023 sebesar 1,02 pada Indeks Kedalaman Kemiskinan dan 0,20 pada Indeks Keparahan Kemiskinan.

Kemampuan daya beli masyarakat menggambarkan kemampuan penduduk untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok. Maka semakin tinggi daya beli masyarakat akan menunjukkan semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Begitu pula sebaliknya. Meningkatnya daya beli masyarakat dapat terlihat dari meningkatnya pengeluaran masyarakat. Meningkatnya kemampuan daya beli penduduk tentu saja diakibatkan meningkatnya pendapatan. Daya beli masyarakat di Kabupaten Belitung di tahun 2023 mencapai angka Rp. 14.365.000 per kapita per tahun. Jika dibandingkan dengan garis kemiskinan pada tahun yang sama berkisar Rp 896.948 per kapita per bulan.

Beberapa serabut masalah yang menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat di Kabupaten Belitung adalah:

1) Biaya Hidup Semakin Tinggi

Rendahnya daya beli masyarakat timbul dari beberapa permasalahan seperti angka garis kemiskinan di Kabupaten Belitung yang tiap tahun terus meningkat. Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Dalam sepuluh tahun terakhir, garis kemiskinan pada tahun 2023 merupakan garis kemiskinan tertinggi berkisar Rp. 896.948 per kapita per bulan. Semakin tinggi garis kemiskinan di suatu wilayah akan membuat kemampuan daya beli masyarakat menjadi rendah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Garis kemiskinan di Kabupaten Belitung terus berfluktuasi ini disebabkan oleh fluktuasi tingkat inflasi yang belum terjaga, salah satunya adalah dampak dari kenaikan harga listrik dan BBM yang berimbas pada kenaikan harga komoditi lainnya.

2) Pendapatan Masyarakat Belum Merata

Ketergantungan pendapatan Kabupaten Belitung didominasi oleh sektor primer. Sektor primer umumnya terdiri dari kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan sumber daya alam, seperti pertanian, kehutanan dan perikanan. Tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Belitung sebesar 26,56 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melalui data Belitung Dalam Angka Tahun 2024, dominasi sektor primer sebagai penyumbang pendapatan tertinggi di masyarakat selaras dengan kondisi tenaga kerja Kabupaten Belitung yang didominasi oleh pekerjaan sektor informal dengan daya serap tenaga kerja terbanyak adalah lulusan SMA sebesar 36,67 persen pada tahun 2023. Hal tersebut dibuktikan dari tenaga kerja jenjang pendidikan paling banyak diserap dari tingkat SMA yakni sebanyak 35.263 orang dengan jenis pekerjaan tertinggi yakni di sektor jasa/services sebanyak 22.565 orang.

3) Beban Penduduk Produktif Terhadap Penduduk Tidak Produktif Tinggi

Terdapat faktor yang dapat mendorong sekaligus juga dapat menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi yang dibagi kedalam faktor ekonomi dan faktor non ekonomi (Jhingan, 2000). Salah satu faktor dalam non-ekonomi adalah faktor-faktor demografi (kependudukan), yaitu pengaruh akibat struktur dan komposisi penduduk suatu wilayah. Rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi angka rasio ketergantungan menunjukkan semakin besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif karena sebagian dari pendapatannya digunakan untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif (Mantra, 2000:92).

Pada tahun 2023, rasio ketergantungan mencapai 42,61 artinya 100 orang penduduk produktif menanggung 42 orang penduduk tidak produktif atau dapat didefinisikan bahwa 1 orang penduduk menanggung setidaknya 2 orang penduduk yang tidak produktif. Kondisi ini akan menyebabkan daya beli menjadi rendah. Kondisi ini akan diperparah jika di dalam keluarga terdapat penduduk usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan. Ini akan semakin menambah beban tanggungan pada orang yang bekerja dalam keluarganya. Sehingga, penduduk yang memiliki pekerjaan (tanpa melihat usia) masih harus menanggung beban dirinya sendiri dan keluarganya.

4) Mutu Penanganan dan Pemberdayaan Penduduk Kurang Mampu Masih Kurang

Sasaran penanganan masyarakat miskin ditujukan kepada perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 pasal 6 dan 7 disebutkan: "Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang, penyediaan pelayanan perumahan, kesehatan, pendidikan, kesempatan berusaha, kesempatan bekerja, bantuan hukum dan pelayanan sosial. Penanganan fakir miskin dilakukan melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, peningkatan kapasitas fakir miskin, mengembangkan kemampuan dasar, kemampuan usaha, jaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin, kemitraan, kerja sama antar pemangku kepentingan dan koordinasi antara lembaga dan pemerintah daerah". Namun masih terdapat 1,71 persen penduduk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang tidak tertangani di Kabupaten Belitung pada tahun 2023.

5) Ketahanan Ekonomi Desa Masih Rendah

Ketahanan Ekonomi Desa menjadi bagian dari pembangunan yang dilakukan di Desa. Ketahanan Ekonomi Desa terukur melalui adanya keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi atau logistik, akses ke Lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah. Permasalahan dalam ketahanan ekonomi yang ada pada desa-desa di Kabupaten Belitung salah satu diantaranya yaitu rendahnya keberlangsungan Bumdes sebesar 35 persen atau 15 Bumdes dari 42 Bumdes pada tahun 2023 yang berada pada kategori baik atau sehat, dan menyumbang pendapatan asli desa. Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya daya dukung desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

6) Pemajuan Kebudayaan Daerah Masih Rendah

Pemajuan kebudayaan menjadi hal yang penting untuk mempertahankan identitas budaya daerah dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya yang kaya. Upaya pelestarian budaya di Kabupaten Belitung hanya pelestarian cagar budaya dan adanya kelompok kesenian. Namun belum tumbuhnya perkembangan dalam pemajuan budaya di Kabupaten Belitung untuk dapat dikembangkan dalam penyelarasan budaya dan pemajuan ekonomi masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa upaya Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) belum mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

7) Masih Terdapat Penduduk yang Menganggur

Komposisi persebaran jumlah pekerja di suatu daerah menunjukkan lapangan pekerjaan yang menjadi tumpuan pergerakan ekonomi di daerah tersebut. Meningkatnya tingkat pengangguran dapat mendorong kemiskinan ekstrem karena dampak negatif dari pengangguran adalah menurunkan

pendapatan masyarakat (Mohammad & David, 2019), yang pada akhirnya mengurangi tingkat kesejahteraan yang dicapai individu. Merosotnya kesejahteraan masyarakat yang diakibatkan oleh pengangguran dipastikan akan mempertinggi peluang mereka untuk jatuh ke dalam perangkap kemiskinan disebabkan kurangnya pendapatan (Salsabila dkk., 2021). Kondisi Pengangguran di Kabupaten Belitung cukup tinggi yakni Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2023 sebesar 4,14.

Beberapa serabut masalah yang menyebabkan tingginya angka pengangguran di Kabupaten Belitung adalah:

1) Rendahnya Kualitas Pendidikan Tenaga Kerja Dan Kompetensi Tenaga Kerja

Rendahnya kualitas tenaga kerja mengacu pada kurangnya atau tidak memadainya keterampilan, pengetahuan, pendidikan, dan kemampuan pekerja dalam suatu daerah. Ini berarti bahwa tenaga kerja tersebut tidak memiliki standar yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas-tugas pekerjaan dengan efisien dan efektif. Pekerja di Kabupaten Belitung didominasi oleh pekerja dari lulusan SMA sebanyak 36,67 persen pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kualitas tenaga kerja masyarakat Belitung yang terlihat dari jenjang pendidikan yang mendominasi.

2) Terbatasnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Pengangguran yang tinggi juga dipicu dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia di suatu daerah. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Belitung dimana lebih banyak pekerja yang mendaftarkan diri untuk mendaftarkan pekerjaan dibandingkan dengan pekerja yang memperoleh pekerjaan (ditempatkan) yakni pada tahun 2023 tercatat sebanyak 70 pendaftar, namun hanya 45 orang yang ditempatkan. Selain itu

tingginya lulusan tenaga kerja pada pendidikan SMA di tahun 2023 sebanyak 35.263, namun sebanyak 2.368 penduduk yang tidak bekerja. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lapangan pekerjaan di Kabupaten Belitung masih terbatas.

3) Belum optimalnya peran pemuda dalam pembangunan

Pembangunan pemuda, sejalan dengan amanat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, harus benar-benar bermanfaat bagi pemuda Indonesia. Jumlah pemuda (penduduk usia 16 s.d 30 tahun) tahun 2023 sebanyak 45.131 orang atau 23,76 % dari total penduduk di Kabupaten Belitung. Dimana pembangunan pemuda masih minim dijalankan. Salah satunya terlihat dari jumlah pemuda berwirausaha di Kabupaten Belitung tahun 2019-2023 hanya sebesar 566 orang dan tidak ada peningkatan selama lima tahun terakhir. Persentase Wirausaha Muda terhadap total Wirausaha pada tahun 2023 hanya 1,25%. Orientasi pemerintah saat ini belum berfokus pada pengembangan dan pembangunan yang bertumpu pada pemuda.

4) Tingginya Migrasi Penduduk Usia Kerja yang Berada di Wilayah Pedesaan ke Perkotaan dengan Tingkat Pendidikan Rendah

Penduduk usia kerja di Belitung pada tahun 2023 adalah sebanyak 147.292 jiwa. Jika dilihat berdasarkan wilayah tempat tinggalnya, sebanyak 65,46 persen (98.604 jiwa) penduduk usia kerja di Kabupaten Belitung tinggal di wilayah perkotaan, sementara 33,54 persen (49.769 jiwa) tinggal di wilayah perdesaan. Hal ini terjadi dikarenakan wilayah perkotaan yang cenderung memiliki lebih peluang lebih besar untuk memperoleh lapangan pekerjaan, sehingga fenomena penduduk usia kerja yang berada di wilayah perdesaan sering kali melakukan migrasi ke perkotaan dengan tujuan untuk mencari pekerjaan. Kondisi ini semakin diperparah dengan banyaknya penduduk bekerja di

Kabupaten Belitung dengan pendidikan SD. Hal tersebut semakin menimbulkan permasalahan kesejahteraan yang terjadi di Kabupaten Belitung.

5) Pembangunan Manusia Antargender Belum Setara

Pembangunan responsif gender merupakan pembangunan yang menciptakan keadilan dan pemerataan bagi seluruh penduduk. Indeks Pembangunan fokus pada menggambarkan kondisi ketimpangan maupun kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang mana jika capaian IPG semakin mendekati ke arah 100 maka bermakna bahwa semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IDG digunakan untuk menjelaskan sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam ekonomi dan politik (Pembangunan Manusia Berbasis Gender, 2018). Sampai saat ini masih dijumpai kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Belitung. Hal ini terlihat dari Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Belitung masih dibawah nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2023 yakni sebesar 89,25.

Beberapa akar masalah ketimpangan antar gender di Kabupaten Belitung disebabkan oleh:

a) Kualitas Pendidikan Perempuan Lebih Rendah dari pada Laki-Laki

Kesenjangan pendidikan masih dirasakan oleh kaum gender di Kabupaten Belitung dengan rata-rata lama sekolah perempuan di Kabupaten Belitung tahun 2023 sebesar 8,65 tahun lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah laku-laki yaitu sebesar 9,08 tahun. Bukan tanpa sebab bila pendidikan sangat penting bagi perempuan, karena perempuan memiliki peran sangat penting dalam peningkatan kualitas generasi muda.

Dengan demikian diperlukan kesadaran adanya peningkatan kualitas pendidikan bagi perempuan, mengingat tanggung jawab dan perannya sebagai pendidik pertama dan utama. Rendahnya kualitas pendidikan perempuan ini pun akan berdampak pada kemandirian perempuan dalam sosial dan ekonomi di kehidupannya.

b) Daya Beli Perempuan Lebih Rendah dari pada Laki-Laki

Daya beli adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Pembangunan gender di Kabupaten Belitung yang rendah juga ditimbulkan dari rendahnya daya beli perempuan dibandingkan laki-laki yakni pada tahun 2023 hanya sebesar Rp.9.411.000 orang/tahun, sedangkan lak-laki sebesar Rp. 20.771.000 orang/tahun. Kondisi ini menunjukkan perempuan di Kabupaten Belitung belum mandiri secara ekonomi. Penyebabnya adalah partisipasi angkatan kerja perempuan sebagaimana kondisi pada tahun 2023 sebanyak 33.750 orang atau 35,07% jika dibandingkan dengan angkatan kerja laki-laki sebanyak 62.395 orang atau 64,89%.

Tahun 2023, Perempuan mendominasi pada pekerjaan mengurus rumah tangga maupun tidak dibayar sebanyak 30.569 orang. Kondisi ini masih selaras dengan rendahnya pendidikan perempuan dan rendahnya keahlian dan keterampilan perempuan di Kabupaten Belitung untuk dapat memperoleh peran dalam kemandirian secara ekonomi.

c) Pemberdayaan Perempuan Rendah

Begitu Pula dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) kabupaten Belitung yang masih dibawah Nasional dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2022 sebesar 53,42. Hal ini menunjukkan perempuan di Kabupaten Belitung belum diberdayakan dalam keterlibatan politik, hingga kesempatan perempuan di Kabupaten Belitung untuk menjadi tenaga profesional menjadi rendah, untuk itu pemberdayaan perempuan perlu dipersiapkan dan dilaksanakan secara terencana, terarah, terpadu dan berlanjut agar sumber daya ini dapat dioptimalkan perannya dalam kehidupan terutama dalam kesejahteraan masyarakat.

3.1.3 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Perbaikan tata kelola pemerintahan terus diupayakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerapkan reformasi birokrasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 mengisyaratkan bahwa reformasi birokrasi merupakan alat untuk mempercepat tercapainya pembangunan. Reformasi birokrasi bisa berjalan tidak optimal jika Kebijakan reformasi birokrasi terjebak pada "birokratisasi reformasi birokrasi" (Krisnajaya et. al., 2019). Oleh karena itu, Reformasi birokrasi harus dilakukan bersama-sama seluruh aparatur sebagai bagian dari agen perubahan (Prasojo, 2020). Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan dampak, birokrasi yang mampu menjamin setiap manfaat kebijakan dapat dirasakan oleh masyarakat, serta birokrasi yang lincah dan cepat. Sementara, dari segi proses bisnis, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi artinya memperkuat fungsi

manajemen guna mendukung pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi dijadikan sebagai indikator utama dalam menganalisis permasalahan tata kelola pemerintahan.

Permasalahan tata kelola pemerintahan Kabupaten Belitung saat ini dapat dilihat dari kinerja reformasi birokrasi. Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung masih rendah yang ditunjukkan dengan Capaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Tahun 2020-2022 stagnan pada Kategori CC dengan predikat Cukup. Namun pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi mengalami peningkatan menjadi 75,14 terdiri dari Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General sebesar 64,89 dan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Tematik sebesar 10,25 masuk kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik.

Tata kelola pemerintahan yang belum cukup baik disebabkan oleh empat hal yaitu akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung yang masih rendah, akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung sudah baik, namun pengelolaan BMD dan pendapatan daerah masih kurang, proses pemerintahan yang masih belum berjalan efektif, dan kualitas pelayanan publik masih rendah. Apabila ditilik lebih dalam, Akuntabilitas kinerja yang belum optimal disebabkan oleh kualitas perencanaan yang belum ideal, pengukuran kinerja kurang efektif, pelaporan kinerja belum konsisten, dan evaluasi kinerja belum presisi. Sementara, Akuntabilitas keuangan yang rendah disebabkan oleh pengelolaan aset daerah masih menghadapi kendala yang sulit untuk dipecahkan dan pengelolaan pendapatan daerah belum dapat dilakukan secara baik. Lalu, proses pemerintahan yang masih belum berjalan efektif disebabkan oleh manajemen SDM aparatur masih belum sepenuhnya menciptakan ASN yang profesional, pelaksanaan SPBE yang belum ideal, keamanan data dan informasi pemerintah belum maksimal, pengelolaan data belum maksimal, rendahnya kualitas pengelolaan arsip, kualitas kelembagaan yang masih kurang, pengambilan kebijakan

berbasis riset masih rendah, dan implementasi inovasi daerah masih redah. Terakhir, kualitas pelayanan publik yang masih rendah disebabkan oleh disparitas kualitas pelayanan antar unit pelayanan, dan sarana prasarana pelayanan publik inklusif yang belum merata. Dengan demikian dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang menyebabkan kinerja reformasi birokrasi di Kabupaten Belitung masih rendah pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3 Analisis Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	OPD terlibat
Tata Kelola Pemerintahan belum baik	Akuntabilitas Kinerja masih rendah	Kualitas perencanaan belum ideal	Bappeda
		Pengukuran kinerja kurang efektif	Bappeda
		Pelaporan kinerja belum konsisten	Bappeda Setda Selutuh OPD
		Evaluasi kinerja belum presisi	Bappeda Setda Inspektorat
	Akuntabilitas Keuangan sudah baik, namun pengelolaan BMD dan pendapatan daerah masih kurang	Pengelolaan aset masih menghadapi kendala yang sulit untuk dipecahkan	BPKAD
		Pengelolaan pendapatan daerah belum dapat dilakukan secara baik	BPPRD
	Pemerintahan masih belum berjalan efektif	Manajemen SDM aparatur masih belum sepenuhnya menciptakan ASN yang profesional	BKPSDM
		Pelaksanaan SPBE belum ideal	Diskominfo
		Pengelolaan dan pemanfaatan	Diskominfo Dispendukcapil

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	OPD terlibat
		data belum maksimal	Seluruh OPD
		Keamanan data dan informasi Pemerintah belum maksimal	Diskominfo
		Rendahnya kualitas pengelolaan arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Kualitas kelembagaan masih kurang	Bagian Organisasi Setda
		Pengambilan Kebijakan berbasis riset masih rendah	Bagian Litbang Bappeda
		Implementasi inovasi daerah masih rendah	Setda
		penegakan perda dan perkada masih rendah	Satpol PP
	Kualitas Pelayanan Publik masih rendah	Disparitas kualitas pelayanan antar unit pelayanan	Seluruh OPD Unit Pelayanan
		Sarana prasarana Pelayanan publik inklusif belum merata	Seluruh OPD Unit Pelayanan

Sumber : data primer (diolah), 2023

Permasalahan terkait tata kelola pemerintahan yang belum baik disebabkan oleh akuntabilitas kinerja masih rendah, akuntabilitas keuangan sudah baik, namun pengelolaan BMD dan pendapatan daerah masih kurang, pemerintahan masih belum berjalinan efektif, dan kualitas pelayanan publik masih rendah secara umum dapat dijelaskan masing-masing sebagai berikut.

A. Akuntabilitas Kinerja Masih Rendah

Akuntabilitas kinerja suatu daerah dapat dilihat dari capaian nilai SAKIP. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung masih stagnan dengan Capaian Nilai SAKIP Tahun 2021-2023 masih pada kategori B (Baik). Hal tersebut dapat dikatakan tidak optimal karena capaian kategori B masih jauh dari capaian ideal yaitu kategori AA. Guna menuju kategori AA, Pemerintah Kabupaten Belitung masih harus menuju ke kategori BB dan A terlebih dahulu sehingga jalan yang ditempuh masih panjang apabila akar permasalahan tidak segera diselesaikan secara tepat.

Terdapat empat penyebab permasalahan yang mengakibatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung masih belum optimal. Pertama, Kualitas perencanaan belum ideal. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai aspek perencanaan kinerja pada LHE SAKIP 2023 sebesar 22,40 dari 30. Kedua, Pengukuran kinerja kurang efektif. Hal tersebut dapat digambarkan oleh Nilai aspek pengukuran kinerja pada LHE SAKIP 2023 sebesar 16,15 dari 30. Ketiga, Pelaporan kinerja belum konsisten. Hal tersebut tergambar pada Nilai aspek pelaporan kinerja pada LHE SAKIP 2023 sebesar 10,25 dari 15. Keempat, Evaluasi kinerja belum presisi. Hal tersebut dapat dilihat dari Nilai aspek evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada LHE SAKIP 2023 sebesar 14,71 dari 25.

B. Akuntabilitas Keuangan Sudah Baik, Namun Pengelolaan BMD dan Pendapatan Daerah Masih Kurang

Akuntabilitas keuangan suatu daerah dapat dilihat dari capaian Opini BPK. Akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung ternyata sudah baik apabila dilihat dari capaian Opini BPK Tahun 2020-2023 yang sudah WTP. Namun, guna menelusuri akar permasalahan ternyata tidak cukup hanya dengan melihat capaian Opini BPK. Berikut

merupakan elaborasi akar permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan.

Terdapat dua hal yang merupakan akar permasalahan yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan. Pertama, pengelolaan aset milik Pemerintah Kabupaten Belitung masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari Persentase Tanah Milik Pemerintah Daerah yang Belum Tersertifikat sebesar 47,6 persen pada tahun 2023, serta penyelesaian izin lokasi sampai dengan tahun 2023 hanya sebesar 59,09%. Apabila ditilik lebih lanjut ternyata hal tersebut disebabkan oleh pengelolaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Belitung masih sangat rendah. Hal tersebut terlihat dari Indeks Tata Kelola Pengadaan sebesar 72,40 dari 100 dengan predikat baik yang dinilai oleh LKPP pada tahun 2023. Nilai Indeks tersebut meningkat dari tahun 2022 yang hanya 60,3 dengan predikat cukup. Kedua, kinerja pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Belitung masih menurun. Hal tersebut terlihat dari Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar 17,18 persen yang menurun dibanding tahun 2022 sebesar 17,51 persen.

C. Pemerintahan Belum Berjalan Efektif

Pemerintahan yang belum berjalan efektif dapat dilihat dari capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pemerintahan di Kabupaten Belitung masih belum berjalan efektif yang dibuktikan dengan capaian Indeks SPBE Tahun 2023 dengan nilai 3,11 dari bobot maksimal 5 (lima).

Terdapat 9 (sembilan) penyebab pemerintah yang belum efektif. Pertama, Manajemen SDM aparatur masih belum sepenuhnya menciptakan ASN yang profesional. Hal tersebut terlihat dari Nilai Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebesar 75,44 dengan kategori sedang. Selain itu, Nilai Sistem Merit pada tahun 2023 sebesar 250 dari 400 dengan predikat baik.

Kedua, Pelaksanaan SPBE belum ideal. Hal tersebut tergambar dari capaian Nilai SPBE pada tahun 2023 masih sebesar 3,11 dari bobot maksimal 5 dengan predikat baik.

Ketiga, Pengelolaan dan pemanfaatan data belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Statistik masih pada tahun 2023 sebesar 2,12 dari 5 poin, yang merupakan penilaian dari tim penilai pusat. Nilai indeks tersebut menurun dari tahun 2022 sebesar 2,78 karena pada waktu itu Kabupaten Belitung masuk dalam kategori percobaan/persiapan yang dinilai dari tim provinsi. Selain itu, terdapat 23 OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja dari total 31 OPD atau sekitar 76,67 persen pada tahun 2023. Kemudian pelayanan administrasi usia anak masih rendah. Hal tersebut terlihat dari persentase anak usia 1 sampai 17 tahun kurang satu hari yang mendapatkan kartu identitas anak (KIA) masih 59,98 persen pada tahun 2023.

Keempat, Keamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Belitung masih rendah. Hal tersebut terlihat dari capaian tingkat keamanan informasi pemerintah hanya 64,03 persen pada tahun 2023. Selain itu, Indeks Keamanan Informasi pada tahun 2023 masuk kategori tinggi dengan skor 20.

Kelima, pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian Indeks Kearsipan sebesar 71,48 pada tahun 2023 dengan kategori sangat baik dibanding tahun sebelumnya sebesar 48,57 dengan kategori rendah. Selain itu, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip sesuai ketentuan sebesar 76,92 persen pada tahun 2023 dibandingkan pada tahun 2022 sebesar 64,1 persen.

Keenam, Kualitas kelembagaan masih kurang. Hal tersebut tergambarkan dari Implementasi proses bisnis dan SOP masih rendah.

Ketujuh, Pengambilan kebijakan berbasis riset masih rendah. Hal tersebut terlihat dari persentase rekomendasi kelitbangan yang diterapkan yaitu 72,88 persen pada tahun 2023.

Kedelapan, Implementasi inovasi daerah masih rendah. Hal tersebut terlihat dari persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan inovasi masih 29,03 persen. Selain itu, Kebijakan 16 program Inovasi Kepala daerah yang diterapkan sebesar 62,50 persen.

Kesembilan, penegakan perda dan perkada Kabupaten Belitung sudah optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sebesar100 persen pada tahun 2023.

D. Kualitas Pelayanan Publik masih rendah

Kualitas pelayanan publik sebenarnya dapat dilihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian IKM Pemerintah Kabupaten Belitung sudah sangat baik sebesar 3,531 dengan nilai konversi 88,28 persen. Namun, apabila ditilik lebih mendalam, ternyata IKM saja tidak dapat menggambarkan pelayanan publik suatu daerah secara utuh. Terdapat dua hal yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Belitung.

Pertama, Disparitas kualitas pelayanan antar unit pelayanan. Terdapat OPD dengan kualitas pelayanan tinggi dan masih ada OPD dengan kualitas pelayanan yang belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan penanganan kebakaran di Kabupaten Belitung yang sangat baik. Capaian persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi kebakaran pada tahun 2023 sebesar 100 persen. Namun response time pelayanan penanganan kebakaran 19,58 menit, lebih lama dari standar response time yaitu 15 menit.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung sudah cukup baik. Menurut WHO, rasio ideal daya tampung rumah sakit adalah 1.000 penduduk : 1 tempat tidur. Jumlah penduduk Kabupaten Belitung adalah sebanyak 189.945 jiwa dan jumlah tempat tidur sebanyak 242 tempat tidur dari 3 (tiga) rumah sakit (RSUD Marsidi Judono, RS. Alma, RS. Utama). Sehingga rasio daya tampung rumah sakit di Kabupaten Belitung adalah 1,27 atau sudah melebihi rasio ideal daya tampung rumah sakit.

Selain itu, terdapat tiga data pelayanan kesehatan pada tahun 2023 yang memperkuat bahwa kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Belitung sudah cukup baik yaitu persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi sebesar 100 persen, cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar 83,6 persen, dan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 76,1 persen. Sedangkan, pelayanan penanganan anak korban kekerasan sudah sangat baik. Terlihat dari persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait sebesar 100 persen pada tahun 2023.

Akar permasalahan kedua adalah disparitas kualitas pelayanan antar unit pelayanan. Hal tersebut terlihat pada pemanfaatan pelayanan publik berbasis digital oleh masyarakat masih rendah.

3.1.4 Permasalahan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

Aktivitas pembangunan terjadi dalam kawasan dengan segala sumber daya yang dimiliki. Terdapat sejumlah ide yang mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi yang terjadi dengan kelestarian lingkungan hidup. Adalah Simon Kuznet dan Nicholas Kaldor di era 1950-an yang mula mula memperkenalkan trade off ini. Namun demikian belakangan trade off ini banyak diperdebatkan kebenarannya (Grossman and Krueger, 1994; Shafik and Bandyopadhyay, 1992; Selden and Song, 1994).

Belitung sebagai pulau dengan kekayaan timah yang telah dieksploitasi selama ratusan tahun, saat ini berupaya untuk mengubah segala kelemahan dan ancaman dari kekayaan timah dan tambang lainnya menjadi pulau dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Analisis permasalahan bagian ini mendiskusikan permasalahan kesehatan lingkungan dan ketersediaan infrastruktur di kabupaten Belitung.

A. Kualitas Lingkungan Hidup

Berdasar data yang disajikan dalam BAB II, terkait aspek kesehatan lingkungan, kondisi lingkungan hidup di Belitung selama 5 tahun terakhir, tidak stabil dan cenderung semakin jauh dari kinerja lingkungan hidup nasional. Hal ini dapat dilihat dari angka indeks kualitas lingkungan hidup yang pada tahun 2020 perbedaan antara IKLH Nasional dan Belitung adalah 2,96, pada tahun 2022 menjadi 3,15 dan pada tahun 2023 dengan indeks kualias lingkungan hidup nasional sebesar 72,54 poin, perbedaan dengan indeks kualitas lingkungan hidup di Be;itung menjadi 3,64 poin. Kualitas lingkungan hidup Belitung mengalami penurunan di Indeks kualitas udara yang disebabkan oleh gas buang kendaraan ke udara dan kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Begitu juga dengan Indeks kualitas air yang mengalami sedikit penurunan dikarenakan adanya peningkatan titik air sungai dan danau yang tercemar. Tapi Indeks kualitas tutupan lahan meningkat di tahun 2023. Hal ini bisa berarti bahwa kualitas lingkungan hidup Belitung menunjukkan perbaikan walaupun, namun kecepatan perbaikan itu tidak secepat yang terjadi secara nasional.

Berdasar komponen pembentuknya maka terdapat 3 aspek yang berpengaruh terhadap kualitas lingkungan hidup, yakni kualitas air, kualitas udara dan tutupan lahan. Komponen udara, kualitas udara kabupaten Belitung sangat tinggi dan hampir tidak ada permasalahan hingga saat ini, namun demikian kualitas udara ini di masa depan akan berhadapan dengan beberapa ancaman. Ancaman terhadap kualitas

udara muncul dari beberapa aspek berikut: (1) Upaya pengendalian emisi belum optimal dilaksanakan, sebagai misal pemanfaatan bahan bakar fosil untuk sumber energi baik untuk rumah tangga maupun untuk kendaraan dan industri masih dominan, pada sisi lain sumber energi baru terbarukan belum cukup berkembang. (2) Emisi kendaraan bermotor. Seiring perkembangan aktivitas ekonomi maupun sosial masyarakat, pemanfaatan kendaraan bermotor juga akan semakin tinggi. Pemanfaatan kendaraan bermotor dengan gas buang (emisi) yang masih tinggi tentu akan menjadi ancaman bagi kelangsungan kualitas udara. (3) Potensi kebakaran lahan. Sebagai kawasan yang sebagian berbasis lahan gambut dan terletak pada kawasan khatulistiwa, Belitung tidak lepas dari ancaman bahaya kebakaran lahan dan hutan. Ancaman itu menjadi semakin tinggi ketika pengetahuan masyarakat mengenai bahaya kebakaran lahan ini masih rendah. Aktivitas masyarakat untuk berladang atau aktivitas ekonomi lainnya bukan tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya kebakaran baik di kawasan lahan maupun kawasan permukiman. Dampak pertama dari kebakaran tentu adalah asap dan itu artinya kualitas udara yang menurun. (4) Pengelolaan sampah. Saat ini pencemaran udara dari sampah memang belum terjadi, namun demikian di masa datang ketika penduduk dengan berbagai aktivitasnya bertambah dan kemampuan pengelolaan sampah dari pemerintah dan penduduk tidak meningkat, maka ini akan menjadi ancaman bagi turunnya kualitas udara.

1) Kualitas air

Saat ini indeks kualitas air di Belitung terus menunjukkan perbaikan, namun demikian capaiannya masih berada pada ambang batas sedang ke bawah, artinya kualitas air juga mengalami ancaman. Kualitas air terancam dari beberapa aspek berikut: (1). Pengelolaan sampah yang belum baik. Sampah yang tidak terkelola dengan baik tidak hanya berdampak pada kualitas udara, namun terlebih sangat berdampak pada kualitas air. Sampah

yang mengambang di laut misalnya selain merusak pemandangan juga merusak kualitas air. Sampah yang berada di daratan akan merusak air melalui infiltrasi pencemarannya melalui pencemaran terhadap tanah. (2). Aktivitas pertambangan. Saat ini ijin pertambangan memang tidak diterbitkan lagi, namun usaha pertambangan masih beroperasi, yakni pertambangan yang hingga saat ini belum habis masa berlaku ijinnya. Aktivitas pertambangan pada umumnya menggunakan air sebagai media untuk eksploitasi, dan dalam eksploitasi itu bukan tidak mungkin menggunakan bahan bahan kimia. Sisa bahan kimia aktivitas pertambangan inilah yang juga menjadi ancaman bagi kualitas air yang ada di Belitung. (3). Ketidaktaatan pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan. Pelaku usaha secara ideal mendapatkan ijin usaha setelah melalui tahap analisis dampak lingkungan. Dalam analisis itu jika aktivitas usaha menciptakan pencemaran, maka wajib untuk melakukan pengelolaan limbah agar tidak menciptakan pencemaran terhadap lingkungan. Namun demikian dalam kenyataannya pelaku usaha yang tertib untuk melakukan pengelolaan lingkungan ini masih terbatas. kemampuan pemerintah daerah dalam menindak pelaku yang tidak taat ini dihambat oleh adanya fakta bahwa perusahaan tersebut mendapatkan ijin usaha dari pemerintah yang lebih tinggi. (4). Aktivitas ilegal. Dalam masyarakat terdapat aktivitas yang sesungguhnya dilarang, namun tetap dilakukan, misalnya pertambangan, penangkapan ikan secara tidak berkelanjutan, misalnya menggunakan bom atau racun dan aktivitas lainnya. Aktivitas ini sangat sulit dihentikan mengingat berhubungan langsung dengan kondisi sumber hidup sebagian masyarakat. Pelarangan tanpa memberikan solusi sumber hidup lainnya hanya akan menciptakan konflik yang semakin merusak.

2) Kualitas tutupan lahan

Dari data yang disajikan dalam BAB II, indeks tutupan lahan kabupaten Belitung rendah dan terus turun walaupun terjadi peningkatan di tahun 2023 namun masih dikategori kurang. Terdapat 5 (lima) aspek yang menjadi penyebab dari semakin turunnya kualitas tutupan lahan: (1) Kurangnya pengelolaan ruang terbuka hijau. Ruang berfungsi sebagai wadah *(container)* untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan (UUPR no.24/1992). Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan yang berfungsi sebagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Olah Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan. Ruang ini menjadi semakin terbatas dengan bertambahnya penduduk. Untuk itu dibutuhkan pengelolaan yang memadai, namun hingga saat ini pengelolaan ruang terbuka hijau kurang baik sehingga ruang terbuka hijau ini cenderung mengalami penurunan di kawasan hutan/ pertanian namun tidak digantikan oleh ruang terbuka di perkotaan misalnya taman kota ataupun hutan kota. (2) Terjadinya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari ruang terbuka/ areal dengan vegetasi tumbuhan semakin berkurang dengan bertambahnya jumlah penduduk yang membutuhkan ruang untuk beraktivitas. (3) Potensi kebakaran lahan. Kebakaran lahan pada akhirnya tidak hanya berpengaruh pada kualitas udara namun juga langsung berkaitan dengan berkurangnya tutupan lahan. Lahan hutan yang kebakaran misalnya tentu akan berakhir dengan hilangnya vegetasi yang itu bermakna hilangnya tutupan lahan. (4) Abrasi

pantai. Pantai yang berada pada posisi tertentu akan terus menerus mengalami abrasi. Ketika abrasi terjadi maka vegetasi yang terdapat di pantai akan hilang. Hilangnya vegetasi di pantai ini tidak hanya mengurangi tutupan lahan melainkan juga berdampak langsung pada ekosistem yang ada di sekitarnya yang pada akhirnya mengurangi jumlah tangkapan nelayan. (5) Pengelolaan sampah yang belum baik.

Tabel 3.4 Analisis Permasalahan Lingkungan Hidup

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	OPD terlibat
Kualitas lingkungan hidup masih lebih rendah dibandingkan rata rata nasional	Kualitas udara masih sangat baik, namun seiring pertumbuhan aktivitas perekonomian kualitas udara dapat mengalami ancaman	Pengendalian emisi yang belum optimal dan kurang memadai	DLH Perkim Perhubungan BPBD
		Emisi kendaraan bermotor, menyebabkan polusi udara	
		Potensi terjadinya kebakaran lahan	
		Masih rendahnya kinerja pengelolaan persampahan	
	Kualitas dan kuantitas air berada dalam ambang batas sedang ke bawah, artinya kualitas air juga mengalami ancaman	Rendahnya pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup Dinas PU PDAM
		Pencemaran akibat dari Pertambangan	
		Ketidaktaatan dalam pengelolaan lingkungan oleh pelaku usaha	
		Pencemaran air dari aktivitas legal dan ilegal	
	Kualitas tutupan lahan kurang dan dari tahun ke tahun kondisinya terus menurun	Kurangnya pengelolaan lahan terbuka hijau	Tata Ruang Pertanahan kebencanaan

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	OPD terlibat
		Perubahan fungsi lahan akibat dari pertambahan penduduk dan aktivitas ekonomi	bidang ekonomi Sekda Dinas Lingkungan Hidup Dinas Pariwisata Tata Ruang Pol PP DLH
		Potensi terjadinya kebakaran lahan	
		Terjadinya bencana akibat dari abrasi pantai	
		masih rendahnya pengelolaan persampahan	

Sumber : data primer (diolah)

B. Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Aspek ke dua yang didiskusikan dalam bagian ini adalah pengembangan infrastruktur wilayah. Seorang ahli ekonomi pertanian ditanya mengenai apa yang harus dilakukan agar petani menjadi sejahtera, jawaban ahli ini adalah sediakan jalan dan jalan baru tingkatkan produktivitas pertanian. Ilustrasi ini memberikan gambaran betapa pentingnya infrastruktur untuk pembangunan segala bidang. Dalam pembangunan ekonomi, tanpa infrastruktur mustahil mengundang investor untuk masuk. Infrastruktur tentu bukan hanya jalan, melainkan juga infrastruktur lainnya. Ketersediaan infrastruktur pada akhirnya menjadi salah satu penentu kualitas pembangunan sebuah wilayah.

Pada aspek ini, berdasar data dan informasi yang disajikan dalam BAB II, dapat diketahui bahwa ketimpangan antar wilayah kecamatan di kabupaten Belitung masih terjadi. Salah satu indikator untuk itu adalah Indeks Kesulitan Geografis. Terdapat dua variabel penting yang menyumbang ketimpangan antar wilayah yang terjadi itu pertama

adalah aksesibilitas yang tidak merata dan yang kedua adalah ketimpangan infrastruktur dasar antar wilayah.

Aksesibilitas yang tidak merata diidentifikasi disebabkan oleh: (1) Kepadatan penduduk yang rendah. Belitung merupakan kawasan kepulauan dengan kepadatan penduduk yang tidak merata, terdapat wilayah dengan kepadatan tinggi dan juga rendah. Kawasan dengan kepadatan penduduk rendah cenderung tidak mendapatkan akses yang cukup dalam hal infrastruktur transportasi, karena berkaitan dengan permintaan yang rendah. (2) Transportasi ke wilayah kepulauan terbatas. Sejalan dengan rendahnya jumlah penduduk, maka penyediaan transportasi ke wilayah kepulauan menjadi terbatas. (3) Ketidaktepatan penyediaan transportasi dengan kebutuhan masyarakat. Belitung telah menyediakan sarana dan prasarana transportasi publik baik yang berbayar maupun tidak berbayar. Namun demikian pemanfaatan transportasi publik berbayar cenderung rendah hingga biaya pengelolaannya jauh lebih rendah dibandingkan benefit yang diperoleh. (4) Rendahnya aksesibilitas ke wilayah pertumbuhan baru.

Selanjutnya, infrastruktur dasar yang dimaksudkan di sini adalah infrastruktur dasar ekonomi maupun sosial. Di semua kecamatan telah tersedia infrastruktur dasar, namun demikian keberadaannya tidak merata antar kecamatan. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan hal ini: (1) Sarana dan prasarana permukiman yang belum merata. Sarana dan prasarana dalam permukiman meliputi berbagai aspek mulai dari kawasan yang layak huni, rumah layak huni, ketersediaan listrik, air sampai sarana sanitasi dan jalan lingkungan. (2) Ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih belum merata. Saat ini sarana komunikasi menjadi kebutuhan pokok, untuk itu maka sarana komunikasi menjadi variabel penting untuk tersedia di semua wilayah. Namun demikian hingga saat ini masih terdapat beberapa lokasi yang tidak memiliki jaringan komunikasi. (3) Belum adanya detail tata ruang di wilayah kecamatan. Rencana detail tata ruang merupakan landasan

bagi gerak pembangunan di wilayah kecamatan, belum adanya rencana detail tata ruang ini menghambat dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar yang dibutuhkan masyarakat. (4) Sebagai wilayah kepulauan, kabupaten Belitung memiliki kendala tersendiri dalam pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur dasar. Pada satu sisi kawasan memang terbatas, pada sisi lain kemampuan pemerintah daerah untuk mengadakan lahan juga terbatas.

Berbagai permasalahan pengembangan infrastruktur tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.5 Analisis Permasalahan Pengembangan Infrastruktur

Inti Masalah	Masalah	Akar Masalah	Urusan Terlibat
Terdapat ketimpangan antar wilayah (lihat data NTN antar kecamatan dan data lainnya)[n1]	Aksesibilitas antar wilayah yang rendah (lihat data indeks aksesibilitas wilayah)	Tingkat kepadatan penduduk yang masih rendah	Perhubungan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Masih kurang nya transportasi umum ke wilayah desa dan kepulauan	
		Kurang tepatnya penyediaan fasilitas transportasi dengan harapan masyarakat	
		Rendahnya aksesibilitas pusat pertumbuhan baru	
	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar yang belum merata	Pengelolaan sarana dan prasarana pemukiman masih rendah	Permukiman
		Keterbatasan lahan dalam pembangunan infrastruktur	Semua Urusan
		Masih kurangnya infrastruktur komunikasi (SPBE dan Smart City)	Kominfo Semua Urusan
		Belum adanya aturan terkait tata ruang untuk wilayah kecamatan	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sumber : data primer (diolah)

3.2 Analisis Isu Strategis

3.2.1 Isu Strategis Eksternal

A. Isu Strategis Provinsi

1) Adanya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Kepariwisataan

Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kepariwisataan pada 15 Oktober 2021. Pertimbangan dikeluarkannya peraturan daerah ini adalah untuk mendorong pengembangan potensi pariwisata dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Adanya peraturan ini juga untuk melindungi dan menjaga kelestarian alam, budaya, dan kearifan lokal yang ada. Peraturan ini juga dikeluarkan sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun peta pengembangan kepariwisataan di daerahnya masing-masing.

Dengan demikian, peraturan daerah tersebut menjadi peluang bagi Kabupaten Belitung untuk mendorong pengembangan potensi pariwisata yang ada di daerahnya dengan menyusun peta pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Lebih lanjut lagi, adanya peraturan ini juga memberikan kepastian bagi para pelaku di industri pariwisata untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam melaksanakan usahanya di bidang kepariwisataan.

2) Arah pembangunan di dorong kepada ekonomi berkelanjutan berupa "blue economy" dan "green economy'

Penetapan Kabupaten Belitung sebagai tuan rumah ASEAN *Blue Economy* membuat Kabupaten Belitung semakin dikenal di

kancah internasional. Blue economy yang diusung oleh ASEAN membawa dampak regional kepada Kab. Belitung dimana fokus pertumbuhan ekonomi diarahkan kepada pengembangan perekonomian yang berkelanjutan secara terintegrasi, lintas sektor, dan holistik. Arah pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan membuat kelestarian dan keanekaragaman ekosistem yang ada di laut tetap terjaga. Dengan demikian, maka para pelaku ekonomi khususnya yang ada di wilayah pesisir dapat terus memiliki sumber penghasilan yang berkesinambungan. Selain masyarakat yang ada di pesisir, sektor pariwisata maritim juga termasuk yang juga mendapatkan kebaikan dari adanya pelaksanaan kegiatan blue economy karena pengembangan terkait kepariwisataan diarahkan kepada keberlangsungan destinasi wisata yang ada.

Konsep *green economy* yang juga ditetapkan sebagai arah pembangunan ekonomi regional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menjaga dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan sebagai akibat dilakukan aktivitas ekonomi. Secara berkolaborasi, pembangunan ekonomi dengan konsep blue dan green akan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan karena mengutamakan kelestarian wilayah yang ada.

3) Adanya Perda Prov.Kep. Babel no.3 tahun 2020 tentang Rencana Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap ekologi, pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan wilayah pesisir dan laut, pembangunan sosial budaya, serta penataan kelembagaan

terkait pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya wilayah pesisir dan laut. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengembangan ekonomi pesisir dan wilayah laut memperhatikan kelestarian ekosistem.

Peraturan daerah ini menjadi peluang bagi Kabupaten Belitung untuk menjaga kelestarian wilayah di Kabupaten Belitung dimana destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belitung sebagian besar merupakan destinasi wisata alam terutama yang terletak di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dengan terjaganya kelestarian alam, maka jumlah kunjungan wisatawan diharapkan dapat meningkat untuk menikmati pesona wisata alam yang ada di Kabupaten Belitung. Jumlah kunjungan wisatawan diharapkan dapat meningkat dari tahun 2022 dimana terdapat 301.906 wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Belitung.

4) Penetapan kawasan industri di Bangka Selatan (kawasan industri Sadai)

Kawasan industri Sadai (*Sadai Integrated Industrial And Port Estate)* adalah kawasan industri yang berada di Kabupaten Bangka Belitung. Kawasan industri Sadai dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah Bangka Belitung. Dengan ditetapkannya Sadai sebagai kawasan industri yang relatif cukup berdekatan dengan Kabupaten Belitung memberikan peluang tersendiri bagi Kabupaten Belitung. Seperti kita ketahui, pelabuhan Sadai dapat menjadi alternatif bagi pelaku usaha di Kabupaten Belitung sebagai pintu masuk dan keluar barang baik bahan baku ataupun barang jadi yang akan dijual ke luar daerah. Selain itu, adanya kawasan industri Sadai dapat menambah jumlah industri pengolahan yang ada di Kabupaten Belitung dimana saat ini kawasan industri Sadai masih dalam penyempurnaan. Jika sudah beroperasi dengan penuh, maka

kawasan industri Sadai akan memiliki zona industri dan zona penunjang lainnya seperti zona pendidikan.

Jarak Kabupaten Belitung yang relatif dekat dengan kawasan industri tersebut bisa menjadi perangsang bagi pelaku industri yang ada di Kabupaten Belitung untuk menjadi pemasok ataupun menjadi mitra industri bagi industri yang ada di dalam kawasan industri Sadai. Dengan bermitra, maka akan membawa kemajuan bagi industri yang ada di Kabupaten Belitung yang tentunya akan membawa pertumbuhan ekonomi.

B. Isu Strategis Nasional

1) Peluang

No.	Isu Strategis Nasional - Peluang	
1	Pendapatan per kapita tumbuh pesat	Pendapatan per kapita naik 6 kali lipat sejak tahun 2001-2021 dan berhasil menjadi upper middle income country pada tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi pada level 5 - 6 persen dan pulih relatif cepat saat pandemi covid-19. Tingkat inflasi stabil pada rentang 3±1 persen.
2	Kemiskinan dan ketimpangan menurun	Tingkat kemiskinan berada pada level 9,57 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun signifikan pada level 5,86 persen. Kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) meningkat menjadi 21,5 persen. Perbaikan perlindungan sosial dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan mencapai 89,5 persen.
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Perekonomian Indonesia berada pada 16 besar dunia dan terbesar di kawasan ASEAN. Kontribusi industri pertahanan dalam negeri mencapai 57,6 persen dalam pemenuhan alutsista. Kemajuan signifikan pada kualitas demokrasi sejak reformasi.
4	Daya saing sumber daya manusia membaik	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat 0,77 persen per tahun. Umur Harapan Hidup (UHH) meningkat menjadi 71,85 pada tahun 2022. Prevalensi stunting yang terus membaik dan turun menjadi 21,6 persen pada tahun 2022.
5	Intensitas gas rumah kaca (GRK) menurun	Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) kumulatif sebesar 5,65 GtCO2eq atau sebesar 27,07 persen. Inisiasi berbagai kebijakan dan strategi ketahanan bencana seperti Tsunami Early Warning System (TEWS), Meteorology Early Warning System (MEWS), Flood Forecasting Early Warning System (FFEWS) serta kebakaran hutan dan lahan.

2) Ancaman

No.	Isu Strategis Nasional - Ancaman	
1	Produktivitas rendah	Rata-rata total *factor productivity index* Indonesia pada tahun 2005-2019 menurun sebesar -0,66 poin.
2	IPTEKIN dan riset lemah	Komitmen alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi masih rendah hanya 0,28 persen dari PDB yang mana jauh tertinggal dibanding Korea Selatan sebesar 4,81 persen dari PDB, Thailand sebesar 1,31 persen dari PDB dan malaysia sebesar 1,04 persen dari PDB pada tahun 2020.
3	Deindustrialisasi dini	Kontribusi manufaktur terhadap PDB terus menurun dari 27,41 persen pada tahun 2005 menjadi 18,34 persen pada tahun 2022 yang disebabkan oleh pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi, terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi, terbatasnya dukungan ekosistem industri di luar Jawa, dan terjadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya logistik dan tingkat suku bunga. Produktivitas sektor pertanian juga tergolong rendah yang diakibatkan lambatnya regenerasi tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, belum adanya standar proses, masih lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta semakin berkurangnya daya dukung lahan pertanian.
4	Pariwisata di bawah potensinya	Kinerja pariwisata masih dibawah potensinya yang disebabkan masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan cenderung masih rendah. Selain itu, terjadi perubahan preferensi pasar dan distrupsi terkait dengan teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan. Disisi lain, pemanfaatan potensi ekonomi kreatif belum optimal yang disebabkan kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai, transformasi digital yang belum merata, inovasi dan pengembangan produk masih rendah ekosistem yang mendukung komersialisasi belum terbentuk dan akses ke pasar internasional masih terbatas.
5	Ekonomi laut belum optimal	Optimalisasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut serta berkembangnya pemanfaatan *Sea Lines of Communication* (SLoC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sehingga PDB Kemarimian masih berada pada level 7,60 persen. Kontribusi yang rendah tersebut disebabkan karena belum optimalnya tata kelola Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan budidaya perikanan, belum berkembangnya diversifikasi industri dan *emerging sector* lain yang memanfaatkan sumber daya dan kekayaan laut dalam menciptakan nilai tambah ekonomi, serta masih terbatasnya pengembangan riset dan teknologi kelautan. Disisi lain, masih terdapat beberapa isu seperti rendahnya penangan sampah plastik yang mencemari laut, tingginya kegiatan *illegal, unreported,* and *unregulated fishing* (IUUF),

No.	Isu Strategis Nasional - Ancaman	
		serta belum optimalnya tata kelola dan regulasi pemanfaatan ruang laut.
6	Kontribusi UMKM dan koperasi kecil	UMKM dan koperasi mempunyai peran besar dalam serapan tenaga kerja yaitu sebesar 96,92 persen pada tahun 2019, namun kontribusi terhadap perekonomian masih rendah. Kontribusi UMKM terhadap PDB mencapai 60,51 persen pada tahun 2019, sementara proporsi volume usaha koperasi terhadap PDB masih 1,07 persen pada tahun 2019. Tantangan yang harus dihadapi UMKM adalah pekerja UMKM yang berkeahlian rendah (*low-skilled workers*), UMKM masih bergerak pada sektor yang bernilai tambah rendah, rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan investasi untuk pengembangan usaha, rendahnya kapasitas pengelolaan, rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai produksi, dan rendahnya jumlah koperasi yang bergerak pada sektor riil.
7	Infrastruktur dan literasi digital rendah	Masyarakat yang terjangkau jaringan 4G berkualitas dan kecepatan internet yang memadai masih terbatas dan tidak merata. Jumlah pengguna internet hanya 62,1 persen dari total populasi (2021) yang relatif tertinggal dibanding negara sebanding yaitu Malaysia sebesar 96,8 persen dan Thailand sebesar 85,3 persen.
8	Pembangunan belum berkelanjutan	Pembangunan kebudayaan masih rendah sebagaimana tercermin pada indeks pembangunan kebudayaan masih 51,90 pada tahun 2021. Pembangunan keluarga juga masih rendah sebagaimana terlihat pada Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga yang baru mencapai 58,49 di tahun 2022. Sementara, kerukunan umat beragama masih lemah yang terlihat pada Indeks Kerukunan Umat Beragama masih sebesar 73,09 pada tahun 2022. Selain itu, Indeks Ketimpangan Gender masih cukup tinggi yaitu, 0,458 pada tahun 2022.
9	Integrasi domestik terbatas serta Kesejanjangan Jawa dan luar Jawa	Konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antarpulau belum optimal sehingga menjadi tantangan utama konektivitas domestik dan global. Pembangunan selama ini lebih terfokus pada Pulau Jawa (*java centris*), dengan kontribusi Pulau Jawa terhadap nasional sebesar 57,8 persen pada tahun 2022. Sedangkan kontribusi Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih pada angka 20,6 persen pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya ketimpangan antarwilayah indonesia pada aspek SDM, infrastruktur, dan anggaran pemerintah daerah.
10	Kualitas SDM yang makin rendah	Kualitas pendidikan yang masih rendah terlihat dari capaian rata-rata siswa Indonesia untuk semua aspek yaitu membaca, matematika dan sains sebesar 382,00 dimana angka tersebut tertinggal jauh dari rata-rata siswa pada negara-negara OECD sebesar 488,33. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi di tingkat global saat ini juga masih rendah. Hal tersebut terlihat masih lima perguruan tinggi yang berhasil masih dalam peringkat top 500 dunia.

No.	Isu Strategis Nasional - Ancaman	
		Kondisi pendidikan ini berpengaruh ke aspek ketenagakerjaan di pasar kerja. Komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas berdasarkan kualifikasi pendidikan hanya lulusan SMP/MTs sederajat ke bawah yaitu sebesar 59,88 persen. Sedangkan penduduk berpendidikan menengah sebesar 29,97 persen dan berpendidikan tinggi sebesar 10,15 persen. Hal tersebut berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja dimana tercatat hanya 40,49 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi.
11	Tata kelola pemerintahan belum optimal	Tata kelola yang belum optimal disebabkan oleh regulasi yang berlebih (hyper regulation) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun di daerah sebagaimana terdata terdapat 18.045 peraturan menteri dan 18.661 peraturan daerah.. Selain itu, kelembagaan instansi publik masih memiliki struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif sehingga menyebabkan SILO dan ego sektoral. Demikian pula, proses bisnis dan tata kelola pemerintahan juga masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Pada segi SDM aparatur, saat ini manajemen talenta belum sepenuhnya terimplementasi pada kementerian/lembaga/daerah. ASN juga cenderung mempunyai posisi yang rentan terhadap intervensi politik. Data menunjukkan bahwa terdapat 1.703 pengaduan tentang pelanggaran netralitas ASN pada periode 2020-2022. Lalu, kualitas pelayanan publik dan proses pembangunan juga masih belum merata dan belum memenuhi harapan masyarakat. Selanjutnya, masih terdapat disparitas implementasi transformasi digital pemerintahan.
12	Kepastian dan penegakan hukum masih lemah	Potensi pelanggaran HAM masih tinggi, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal dan pengawasan institusi penegak hukum masih lemah, budaya hukum hukum masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum masih rendah yang harus dibenahi.
13	Demokratisasi belum optimal	Terdapat beberapa permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi masih belum optimal. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terbaru diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan. Pada aspek politik, demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis kepemiluan dan hubungan formal kelembagaan.

C. Isu Strategis Internasional

1) Bonus Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Penduduk dunia diprediksi akan berpusat di kawasan Asia dan

Afrika yang disertai dengan negara-negara yang memainkan perekonomian global. Populasi penduduk yang besar dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi daya tarik bagi para investor pada kawasan tersebut. Di sisi lain, kawasan Asia berpotensi menjadi pemimpin teknologi dan inovasi serta perekonomian dunia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan Asia. Dengan adanya bonus demografi ini, tentunya Indonesia memerlukan strategi dan dukungan dari masing-masing daerah untuk dapat memaksimalkan peluang tersebut.

Kabupaten Belitung memiliki jumlah penduduk 185.591 jiwa, dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebesar 94.225 jiwa (50,77%) dan penduduk perempuan sebesar 91.366 jiwa (49,23%). Bonus demografi global ini seharusnya menjadi peluang bagi Kabupaten Belitung untuk meningkatkan perekonomian daerah dan peluang masuknya investasi. Akan tetapi, isu ini justru menjadi ancaman bagi Kabupaten Belitung melihat jumlah penduduk usia produktif/ usia kerja dan usia muda masih mendominasi pertumbuhan penduduk sehingga terjadi ketergantungan yang tinggi terhadap kelompok usia ini. Selain itu, dilihat dari kondisi perekonomian Kabupaten Belitung, sektor industri masih belum mampu menjadi penggerak perekonomian daerah. Hal ini disebabkan adanya kekurangan pasokan bahan baku industri lokal yang masih bergantung pada musim dan pemanfaatan teknologi yang masih rendah di sektor industri lokal. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap daya tarik terhadap investor di masa mendatang.

2) Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara tak terkecuali Indonesia. Hal ini berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan utama dari isu ini adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru ini telah memengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global serta sikap Indonesia dalam dunia internasional. Krisis di berbagai sektor dapat menjadi ancaman kestabilan geopolitik ke depan. Risiko lingkungan, sosial, dan ancaman siber berpotensi mendisrupsi stabilitas geopolitik. Hal ini menyebabkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi secara global. Pada aspek geoekonomi, saat ini sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di negara berkembang melihat ketergantungan yang tinggi akan ekspor komoditas.

Fenomena ini menjadi peluang bagi Kabupaten Belitung untuk meningkatkan kapasitas SDM yang memiliki daya saing. Dengan kebijakan yang tepat, Kabupaten Belitung mampu mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi daerahnya. Selain itu, SDM yang memiliki daya saing yang kuat akan menjadi daya tarik tersendiri bagi Kabupaten Belitung. Lebih dari itu, tantangan geoekonomi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan diversifikasi komoditas lokal dan mutu produk berstandar internasional sehingga dapat bersaing dengan komoditas global.

3) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi telah berdampak pada disrupsi teknologi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan ini memerlukan kesiapan yang adaptif dari

masyarakat. Kemampuan adaptasi tersebut perlu ditopang oleh tingkat literasi pola pikir yang baik agar mampu memanfaatkan teknologi yang berkembang secara maksimal untuk menghindari adanya disrupsi teknologi. Selain itu, perkembangan teknologi juga berpotensi menggantikan 40% dari berbagai pekerjaan yang ada saat ini.

Perkembangan teknologi sendiri mampu membawa peluang sekaligus ancaman bagi Kabupaten Belitung. Teknologi mampu memberikan kemudahan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Belitung. Dengan kata lain, perkembangan teknologi mampu mempermudah akses terhadap pengetahuan dan skill sehingga memiliki potensi untuk menciptakan SDM yang terampil dan berdaya saing. Lebih dari itu, memanfaatkan perkembangan teknologi bagi sektor pertanian dapat menjadi peluang untuk meningkatkan produksi pertanian, ketahanan pangan, dan membantu pemasaran komoditas hasil olahan Kabupaten Belitung. Dari segi ancaman, perkembangan teknologi tidak dapat dimanfaatkan apabila daerah belum memiliki SDM mumpuni justru akan kesulitan dalam mengejar ketertinggalan keahlian dan keterampilan teknologi. Selain itu, isu ini dapat mengancam sektor-sektor lain yang belum tidak dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini.

4) Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan pada jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Menurut UN DESA, dua per tiga penduduk dunia akan tinggal di perkotaan pada tahun 2050. Di Asia, dalam empat dekade ke depan, 1,7 kali lipat penduduk perkotaan diprediksi akan meningkat. Tekanan penduduk dan pembangunan di negara emerging economies yang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik akan memperburuk

pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan perkembangan kota yang berdampak pada lingkungan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi pada perubahan penggunaan lahan produktif menjadi kawasan pemukiman dan perdagangan.

Fenomena urbanisasi ini dapat menjadi ancaman bagi Kabupaten Belitung. Hal ini mengancam kehidupan para lansia yang tinggal sendirian di Kabupaten Belitung. Urbanisasi mampu menyebabkan kerusakan pada jaringan sosial yang menyebabkan lansia yang tinggal sendiri merasa terisolasi serta kesulitan dalam mengakses fasilitas kesehatan yang terpusat di kota. Urbanisasi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan seperti polusi udara yang berdampak negatif terhadap penduduk. Selain itu, perkembangan kota akibat adanya urbanisasi berpotensi menjadi ancaman bagi sektor pertanian karena alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut dapat menurunkan tingkat produksi dan kontribusi pada sektor pertanian di Kabupaten Belitung.

5) Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% terhadap keseluruhan populasi global. Setiap tahunnya, sekitar 140 juta individu masuk ke dalam status kelas menengah. Pertumbuhan ini menciptakan peluang ekonomi. Proporsi kelas menengah yang meningkat pesat semakin mendorong penciptaan jenis dan lapangan kerja baru serta kebutuhan konsumsi yang beragam. Jenis pekerjaan baru ini berhubungan dengan teknologi tinggi serta bersifat fleksibel dan memiliki mobilitas yang tinggi. Pekerjaan baru ini akan mempercepat dan mempermudah proses bisnis da aktivitas ekonomi. Bagi Kabupaten Belitung yang didominasi oleh penduduk dengan usia produktif, pertumbuhan ini menjadi peluang untuk

meningkatkan pendapatan penduduk yang akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

6) Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan SDA sehingga mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran di antaranya efektivitas pengelolaan dan konservasi SDA, pengembangan teknologi, serta perubahan pola konsumsi dan produksi suatu daerah.

Kabupaten Belitung melihat isu ini sebagai peluang dalam meningkatkan tenaga kerja di sektor SDA. Akan tetapi, peluang ini tidak luput dari ancaman kerusakan lingkungan. Penggunaan SDA yang tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik berpotensi menyebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan sehingga Kabupaten Belitung tidak dapat memanfaatkan fenomena ini menjadi hal yang positif bagi daerah dan masyarakatnya.

7) Perubahan Iklim

The Triple Planetary Crisis yang terdiri dari perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta hilangnya keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena tersebut akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan jika masyarakat tidak melakukan perubahan secara signifikan. Isu ini mendorong transformasi paradigma

pembangunan lama secara *business as usual* menuju praktik yang lebih berkelanjutan.

Kerusakan lingkungan dan perubahan iklim ekstrem ini berdampak luas terhadap berbagai sektor pembangunan. Fenomena ini tentunya menjadi ancaman serius bagi Kabupaten Belitung. Perubahan iklim ini secara langsung dapat berdampak kepada kesehatan masyarakat sehingga berpotensi mempengaruhi pengembangan SDM unggul di Kabupaten Belitung. Perubahan iklim ini juga berdampak pada tingkat produktivitas berbagai sektor ekonomi di Kabupaten belitung. Sehingga diperlukan solusi dan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Belitung.

3.2.2 Isu Strategis Internal

Merujuk pada permasalahan yang teridentifikasi pada bagian 3.1 sebelumnya. Sub bab ini menjabarkan terkait isu-isu strategis internal yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Belitung dalam fokus ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kewilayahan dan lingkungan hidup, dan tata kelola pemerintahan sebagai berikut.

Tabel 3.6 Analisis Isu Internal

No.	Kekuatan	Kelemahan
Fokus Kesejahteraan Ekonomi		
Isu Strategis Internal Kurangnya Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan		
1.	Keberpihakan kabupaten Belitung dalam Pembangunan di segala bidang melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata
2.	Memiliki potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan sudah dalam perlindungan kekayaan hayati	Belum masuknya kawasan peruntukan industri Suge dalam Pemetaan Kawasan Industri nasional

No.	Kekuatan	Kelemahan
3.	Adanya pembangunan pusat ekonomi perikanan baru di wilayah utara Belitung	Masih adanya Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing di perairan Kabupaten Belitung
4.	Adanya penguatan eksistensi produk IKM dan UKM hasil ekonomi lokal	
5.	Memiliki Masyarakat adat dengan hukum hukum adatnya yang baik sebagai modal sosial pembangunan	
Fokus Pengembangan Sumber Daya Manusia		
Isu Strategis Internal Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Belum Merata		
1.	Komitmen Tinggi Pemerintah Daerah dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan gender	Terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, kependidikan dan kesehatan.
2.	Tersedianya pendidikan Non Formal	Rendahnya pembangunan berbasis pemuda
3.	Tersedia lapangan pekerjaan di sektor informal	Belum ada komitmen perusahaan untuk menyerap tenaga kerja lokal
4.	Tersedianya tenaga kerja dengan pendidikan tinggi	Rendahnya keahlian, keterampilan dan pendidikan tenaga kerja yang terserap
5.	Komitmen Kepala Daerah untuk memberikan perlindungan jaminan kesehatan untuk penduduk miskin dan tidak mampu	Rendahnya pembangunan dan pemberdayaan perempuan
Fokus Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan Hidup		
Isu Strategis Internal Rendahnya kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur		
1.	Komitmen Kepala Daerah untuk pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan air minum di Kabupaten Belitung	Rendahnya konektivitas dan aksesibilitas di Kabupaten Belitung
2.	Kabupaten Belitung ditetapkan menjadi Kawasan Pariwisata Nasional	Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar di Kabupaten Belitung
3.	Kabupaten Belitung Ditetapkan Sebagai Geopark Nasional dan Internasional	Distribusi kepadatan penduduk yang belum merata di Kabupaten Belitung

No.	Kekuatan	Kelemahan
4.	Adanya kebijakan tentang perlindungan keberadaan masyarakat hukum adat dan perlindungan lahan	Belum adanya kebijakan terkait tata ruang dan wilayah pada tingkat kecamatan
Fokus Tata Kelola Pemerintahan		
Isu Strategis Internal Tata Kelola Pemerintah Belum Baik		
1.	Perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan evaluasi kinerja sudah berbasis digital	Keselarasan antar dokumen perencanaan belum tercermin pada seluruh OPD
2.	Ekosistem keuangan elektronik sudah diterapkan	Kompetensi SDM Aparatur masih rendah
3.	Sudah tersedianya Aplikasi Khusus dan Umum Pemerintahan untuk mendukung SPBE	Pembinaan Manajemen ASN masih belum ideal (Anjab, ABK, SKJ, SKP, Evajab)
4.	Hasil laporan kinerja instansi pemerintah sudah menjadi dasar perhitungan tambahan penghasilan pegawai	Sistem merit belum diterapkan dengan baik
5.		Belum terintegrasinya manajemen data dan informasi terpadu pemerintahan

Sumber : data primer (diolah)

Uraian atas isu-isu strategis internal Kabupaten Belitung dijabarkan sebagai berikut:

A. Fokus Kesejahteraan Ekonomi (Kurangnya Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan)

Secara ekonomi, Kabupaten Belitung memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi daerahnya dengan potensi sumber daya alam yang sangat kaya dan telah berada dalam perlindungan kekayaan hayati. Potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung juga didukung dari adanya keberpihakan kabupaten Belitung dalam pembangunan di segala bidang yang ditunjukan melalui Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah seperti, adanya Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung

Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, adanya Perda Kab.Belitung no.9 tahun 2022 tentang perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, adanya Perda Kab.Belitung no.9 tahun 2022 tentang perubahan atas perda No.5 tahun 2020 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, adanya perda Kabupaten Belitung No.7 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis, dan masih banyak lagi. Pembangunan ekonomi pun tidak berhenti dalam satu wilayah yang ada di Kabupaten Belitung. Dalam mendukung pemerataan ekonomi, makanya adanya pembangunan pusat ekonomi perikanan baru di wilayah Belitung utara menjadikan pembangunan ekonomi Belitung dapat dijalankan di seluruh wilayahnya. Selain itu penguatan eksistensi produk-produk IKM dan UKM lokal juga tengah digencarkan oleh pemerintah. Dukungan inipun tidak terlepas dari dukungan masyarakat melalui hukum-hukum adat yang baik sebagai modal sosial pembangunan di Kabupaten Belitung.

Namun masih terdapat kelemahan dalam pengembangan ekonomi di Kabupaten Belitung yakni belum optimalnya pengembangan potensi pariwisata. Hal ini muncul akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung, dimana kondisi tersebut disebabkan atas adanya disparitas pembangunan antardaerah. Potensi pariwisata yang belum maksimal juga disebabkan oleh rendahnya kualitas lingkungan hidup sekitar objek-objek pariwisata. Selain itu kelemahan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung timbul dari belum masuknya kawasan peruntukan industri Suge dalam pemetaan kawasan industri nasional, serta masih adanya Illegal Unreported and Unregulated (IUU) fishing di perairan Kabupaten Belitung, sehingga potensi-potensi daerah belum dapat dimanfaatkan dengan optimal.

B. Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia (Pembangunan Manusia yang Belum Merata)

Dalam rangka mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang baik, dukungan pemerintah Kabupaten Belitung dalam berkomitmen pada pembangunan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dan kesetaraan gender. Bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Belitung seperti Kebijakan dalam pembangunan pendidikan melalui penyelenggaraan jam belajar, bantuan pendidikan dan kesehatan, pengendalian penduduk hingga penanggulangan kemiskinan dan pengarusutamaan gender. Dukungan pemerintah tidak hanya berasal dari kebijakan maupun regulasi, namun melalui penyediaan pendidikan Non Formal yakni UPT Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Belitung dapat menjadi kekuatan bagi Kabupaten Belitung dalam memberikan pendidikan yang merata dan peningkatan kapasitas SDM. Selain itu tenaga kerja dengan pendidikan tinggi mulai berkembangan di Kabupaten Belitung dengan jumlah 9.845 tenaga kerja berpendidikan tinggi, hal ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Belitung untuk memiliki SDM yang berkompetensi tinggi dan dapat bersaing secara global. Selain tenaga kerja yang mulai meningkatkan kompetensinya, Kabupaten Belitung juga didominasi lapangan pekerjaan informal seperti pariwisata, pertambangan, dan lainnya sehingga semakin terbukanya pilihan pekerjaan yang ada di Kabupaten Belitung. Untuk memberikan kesejahteraan yang optimal bagi masyarakatnya, pemerintah Kabupaten Belitung juga menyediakan perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin dan tidak mampu, sehingga dapat menciptakan pembangunan manusia yang merata di Kabupaten Belitung.

Namun, kondisi angka putus sekolah Kabupaten Belitung yang masih tinggi dan tingginya angka kemiskinan juga masih menjadi persoalan dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Belitung. Akan tetapi persoalan terbatasnya kuantitas dan kualitas

tenaga pendidik, kependidikan dan kesehatan, menjadi kelemahan Kabupaten Belitung untuk dapat memberikan pemerataan pendidikan, kesehatan hingga peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dukungan pemuda pun sebagai agen pembangunan belum optimal untuk dikembangkan, dengan rendahnya pemuda yang berwirausaha. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, pemerintah dan perusahaan yang ada di Kabupaten Belitung belum membuat komitmen dalam menyerap tenaga kerja lokal, sehingga walaupun tenaga kerja dengan lulusan pendidikan tinggi mulai bertumbuh di Kabupaten Belitung, namun masih banyak tenaga kerja kerja yang tidak terserap akibat rendahnya keahlian, keterampilan dan pendidikan tenaga kerja. Selain itu pada aspek kesejahteraan gender juga menjadi kelemahan bagi Kabupaten Belitung, walaupun kebijakan pengarusutamaan gender telah diterapkan namun, pemberdayaan perempuan belum optimal terlaksana dengan masih rendahnya pendidikan perempuan hingga kemandirian perempuan secara ekonomi. Hal ini menjadi perhatian penting dalam pembangunan manusia di Kabupaten Belitung yang merata dan mendukung kesejahteraan masyarakat bersama.

C. Fokus Infrastruktur, Kewilayahan, dan Lingkungan Hidup (Rendahnya kualitas Lingkungan Hidup dan Ketersediaan Infrastruktur)

Kabupaten Belitung sebagai kawasan pariwisata nasional dan ditetapkannya sebagai Geopark Nasional dan Internasional memerlukan pembangunan dalam Infrastruktur, Kewilayahan dan Lingkungan untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung melalui beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah, salah satunya melalui komitmen kepala daerah untuk pemanfaatan sumber daya air dan pengelolaan air minum di Kabupaten Belitung melalui peningkatan kualitas air, pencegahan pencemaran air hingga pemerataan air bersih bagi masyarakat. Selain itu pemerintah juga berkomitmen dalam kebijakan tentang perlindungan keberadaan

masyarakat hukum adat dan perlindungan lahan, sebagai upaya dalam menjaga kelestarian kewilayahan dan lingkungan.

Namun Kabupaten Belitung masih memiliki kendala dalam konektivitas dan aksesibilitas yang terbatas, kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang belum memadai. Hal ini berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat baik dalam memperoleh akses terhadap sarana pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan pemerintah dan masyarakat. Sehingga ketersediaan infrastruktur menjadi hal utama yang perlu dipenuhi. Disisi lain, Kabupaten Belitung memiliki kelemahan dalam distribusi kepadatan penduduk yang belum merata, sehingga tidak hanya berdampak pada kepadatan penduduk yang timpang, namun juga berdampak pada kesejahteraan yang timpang antar wilayah, selain itu belum adanya kebijakan terkait tata ruang dan wilayah pada tingkat kecamatan menjadi permasalahan yang juga berdampak dalam pembangunan wilayah yang merata di Kabupaten Belitung.

D. Fokus Tata Kelola Pemerintahan (Tata Kelola Pemerintah Belum Baik)

Pada aspek tata kelola pemerintahan, penganggaran yang cenderung menambah pekerjaan administratif, kurang fleksibel, kurang akomodatif masih menjadi tantangan dalam pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Belitung mengatasinya dengan mengembangkan mekanisme perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan, dan evaluasi kinerja berbasis digital. Hal ini menjadi kekuatan bagi Kabupaten Belitung untuk dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pengelolaan data keuangan daerah seperti penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan efisien, penyimpanan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya , hingga penyajian informasi keuangan yang akurat. Ekosistem keuangan elektronik juga

telah diterapkan di Kabupaten Belitung. Mekanisme ini tidak terlepas dari salah satu bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengembangan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), tidak hanya dalam rangka perencanaan dan penganggaran namun tersedia pula aplikasi khusus dan umum pemerintah yang mendukung SPBE. Selain itu dalam urusan manajemen kepegawaian, hasil laporan kinerja instansi pemerintah telah menjadi dasar bagi perhitungan tambahan penghasilan pegawai pemerintah Kabupaten Belitung. Hal tersebut menjadi kekuatan bagi pemerintah Kabupaten Belitung dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam yakni keselarasan antar dokumen perencanaan belum tercermin pada seluruh OPD hal ini dapat berdampak pada capaian pembangunan kedepannya. Selain itu kompetensi SDM Aparatur di Kabupaten Belitung masih rendah juga menjadi daya dukung lemahnya kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah yang rendah juga disebabkan oleh rendahnya pembinaan manajemen ASN dalam penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Standar Kompetensi Jabatan, Sasaran Kinerja Pegawai dan Evaluasi Analisis Jabatan. Begitu pula dengan sistem merit yang belum diterapkan dengan baik, serta belum terintegrasinya manajemen data dan informasi terpadu pemerintahan. Hal-hal ini menjadi kelemahan dalam tata kelola pemerintah di Kabupaten Belitung.

BAB IV
VISI DAN MISI

"Belitung MAJU (Mandiri dan Berkelanjutan) menjadi mimpi masyarakat Kabupaten Belitung untuk 20 tahun kedepan"



Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB IV
VISI DAN MISI DAERAH

Bab ini menjabarkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Belitung untuk 20 tahun mendatang. Selama dua dekade mendatang Kabupaten Belitung telah merumuskan visi pembangunan yang menggambarkan cita-cita tinggi masyarakatnya. Lebih lanjut dalam membahas visi dan misi Kabupaten Belitung maka menjadi landasan utama sebagai pendorong arah dan tujuan pembangunan di tingkat lokal. Visi dan misi sebagai fondasi yang mengarahkan perencanaan dan kebijakan guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan khususnya dalam 20 tahun mendatang.

4.1 Visi

Visi yang menjadi gambaran ideal masa depan Kabupaten Belitung menjadi langkah konkret untuk mewujudkannya. Pemahaman mendalam terhadap visi menjadi kunci bagi pemerintah daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diemban oleh pemerintah dan menciptakan keterlibatan aktif dalam mewujudkannya. Visi Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 adalah: **"Belitung MAJU (Mandiri dan Berkelanjutan)".** Adapun artikulasi atau penjelasan kata-kata kunci dari pernyataan visi adalah sebagai berikut:

Maju: Mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada sehingga mampu berdaya saing dan memberikan layanan berkualitas bagi masyarakat. Sehingga dalam 20 (dua puluh) tahun kedepan, diharapkan Belitung dapat berkembang dan menciptakan perbaikan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan wilayah. Perbaikan yang mencakup aspek ekonomi, aspek sosial dan sumber daya manusia, aspek tata kelola pemerintahan dan juga aspek infrastruktur dan lingkungan hidup.

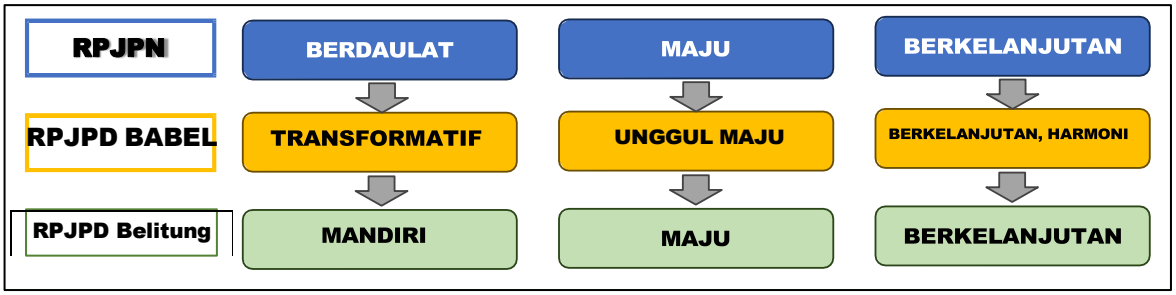
Mandiri: Mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Mandiri merupakan suatu kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam hidup tanpa mengandalkan terlalu banyak bantuan dari pihak luar. Mandiri melibatkan sikap positif terhadap tanggung jawab diri

sendiri, serta kemampuan untuk merencanakan, mengatur, dan mengejar tujuan tanpa perlu bergantung pada bantuan eksternal. Selain itu mandiri juga mengedepankan kemampuan untuk mengatasi hambatan dan menemukan solusi kreatif untuk masalah yang muncul. Orang mandiri cenderung berpikir *out-of-the-box* dan tidak takut mencoba pendekatan baru. Akhir yang diharapkan dari 'mandiri' adalah terwujudnya pemerintahan daerah maju yang bisa mengatur rumah tangganya sendiri secara transparan dan akuntabel.

Berkelanjutan: Pembangunan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang. Persepsi jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim; keadilan dan kesetaraan; serta ketangguhan ekonomi berlandaskan ekonomi lestari.

Visi jangka panjang periode 2025-2045 merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kabupaten Belitung, yang juga telah diselaraskan dengan visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kata **Maju** dan **Berkelanjutan** merupakan komitmen bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dalam melaksanakan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung dan RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045, disajikan dalam gambar dan tabel berikut:

Gambar 4.1 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Belitung dengan Visi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045



Sumber: hasil analisis, 2024

Tabel 4.1 Penyelarasan Visi RPJPN, RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Visi RPJPN	Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Visi RPJPD Kabupaten Belitung
Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Babel BERTUAH 2045: Berkelanjutan, Transformatif, Unggul, Maju, dan Harmoni	Belitung MAJU (Mandiri dan Berkelanjutan)

Dalam upaya pencapaian Visi Kabupaten Belitung Tahun 2045 tersebut ditetapkan 5 (lima) sasaran visi RPJPD, yaitu :

1. Peningkatan pendapatan per kapita.
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan.
3. Kepemimpinan daerah di tingkat nasional.
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.
5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Penyelarasan juga dilakukan terhadap Sasaran Visi RPJPD, dengan menerjemahkan 5 (lima) Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 ke dalam sasaran visi RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045, beserta indikator dan target kinerja sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2 Penyelarasan Sasara Visi RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				RPJPD Kabupaten Belitung			
Sasaran Visi	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**	**Sasaran Visi**	**Indikator**	**Baseline 2025**	**Target 2045**
Pendapatan Per Kapita setara negara maju	a. PDRB per kapita (Juta rupiah)	72,18	465,81	Peningkatan Pendapatan Per Kapita	a. PDRB per kapita (Juta rupiah)	72,18	392,22
	b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	26,49	73,69		b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,89	29,48
	c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	21,48	30,4		c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	12,83	11,89
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat kemiskinan (%)	3,92	0,5	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat kemiskinan (%)	3,92	0,50
	b. Rasio Gini (Indeks)	0,239	0,21		b. Rasio Gini (Indeks)	0,251	0,162
	c. Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,49	0,50		c. Kontribusi PDRB Kabupaten Terhadap Provinsi (%)	13,45	15,03
	d. Pertumbuhan Ekonomi	4,46	0,50		e. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4 – 5,75	5,5 – 6,25
Kepemimpinan Kepala Daerah di Dunia Internasional meningkat	Indeks Inovasi Daerah	47,5	61,98	Kepemimpinan Daerah di Tingkat Nasional	Indeks Inovasi Daerah	40,07	60,01
	Indeks Daya Saing Daerah	3,40	4,75		Indeks Daya Saing Daerah	3,18	3,44
Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72	Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	0,55	0,72
Penurunan Emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	54,55	89,71	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	54,55	90
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,66	82,88		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,81	80,23

Sumber : Hasil analisis Tim RPJPD, 2024

4.2 Misi

Misi akan memandang lebih dekat pada setiap langkah konkrit yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui rancangan mengenai misi yang telah dirumuskan. Penjabaran Misi bukan sekadar sejumlah pernyataan, melainkan peta jalan yang menandai komitmen penuh terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan untuk 20 (dua puluh) tahun mendatang. Berikut Misi Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas.
   Meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kohesif.

2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing.
   Meningkatkan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat.
   Menciptakan lingkungan kelembagaan yang dapat menghasilkan regulasi dan tata kelola yang berintergritas dan adaptif.

4. Mewujudkan kondusivitas daerah.
   Memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.

5. Mewujudkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan.

   Memantapkan ketangguhan individu, keluarga, masyarakat dan lingkungan yang mampu mengoptimalkan modal social budyaa, menjaga keberlanjutan sumber daya alam, serta tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan.

6. Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.

   Peningkatan pemerataan dan kualitas pembangunan dapat diwujudkan melalui pengembangan kebijakan pembangunan daerah secara umum dan penterjemahan agenda transformasi dan landasan transformasi.

   Misi ini juga dapat dimaknai dengan meningkatkan pembangunan daerah; mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi; serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

7. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

   Misi ini merupakan faktor kunci dan sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan daerah serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

   Pembangunan infrastruktur yang inklusif harus memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin dan rentan, dapat mengakses dan memanfaatkan infrastruktur tersebut. Sementara itu, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan harus memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan tersebut.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan merupakan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada satu sudut pandang saja, tetapi juga memperhatikan semua aspek dari hulu ke hilir yang terdampak dari pembangunan infrastruktur tersebut. Untuk itu, infrastruktur yang akan dibangun harus memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan dari masyarakat sekitar. Konsep ini juga berkaitan dengan sistem infrastruktur yang dibangun, yaitu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan, jembatan, telekomunikasi, pembangkit listrik, dan sebagainya dengan memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan. Dengan konsep pembangunan berkelanjutan, tidak ada lagi infrastruktur yang terbangun dengan mengabaikan aspek ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan.

8. Kesinambungan pembangunan.

   Kesinambungan pembangunan diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan yang inovatif. Kesinambungan dalam pembangunan bersifat terbuka untuk publik atau menciptakan aksebilitas bagi seluruh lapisan masyarakat agar semakin maksimal dalam menghadirkan kebangkitan ekonomi, merata dalam melakukan pembangunan, serta menciptakan keharmonisan pada masyarakat.

   Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu. Demikian juga dengan pendekatan inovatif pembiayaan di daerah dapat dilakukan dengan kebijakan proaktif dan peraturan yang memfasilitasi investasi dari sektor publik dan swasta.

Selain itu kesinambungan pembangunan mesti dijaga karena merupakan syarat mutlak untuk keluar dari jebakan *middle-income* dan batu ujian apakah negeri ini sungguh pantas menjadi panutan di masa depan.

Misi RPJPD Kabupaten Belitung dirumuskan dengan mempertimbangkan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045. Penyelarasan dilakukan untuk mewujudkan sinergi perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten. Misi Kabupaten Belitung merupakan harapan di masa depan yang diharapkan dapat terwujud secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga tidak saja dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat, namun juga mendukung pencapaian visi dan misi provinsi dan nasional. Keterkaitan tersebut digambarkan pada Tabel 4.3.

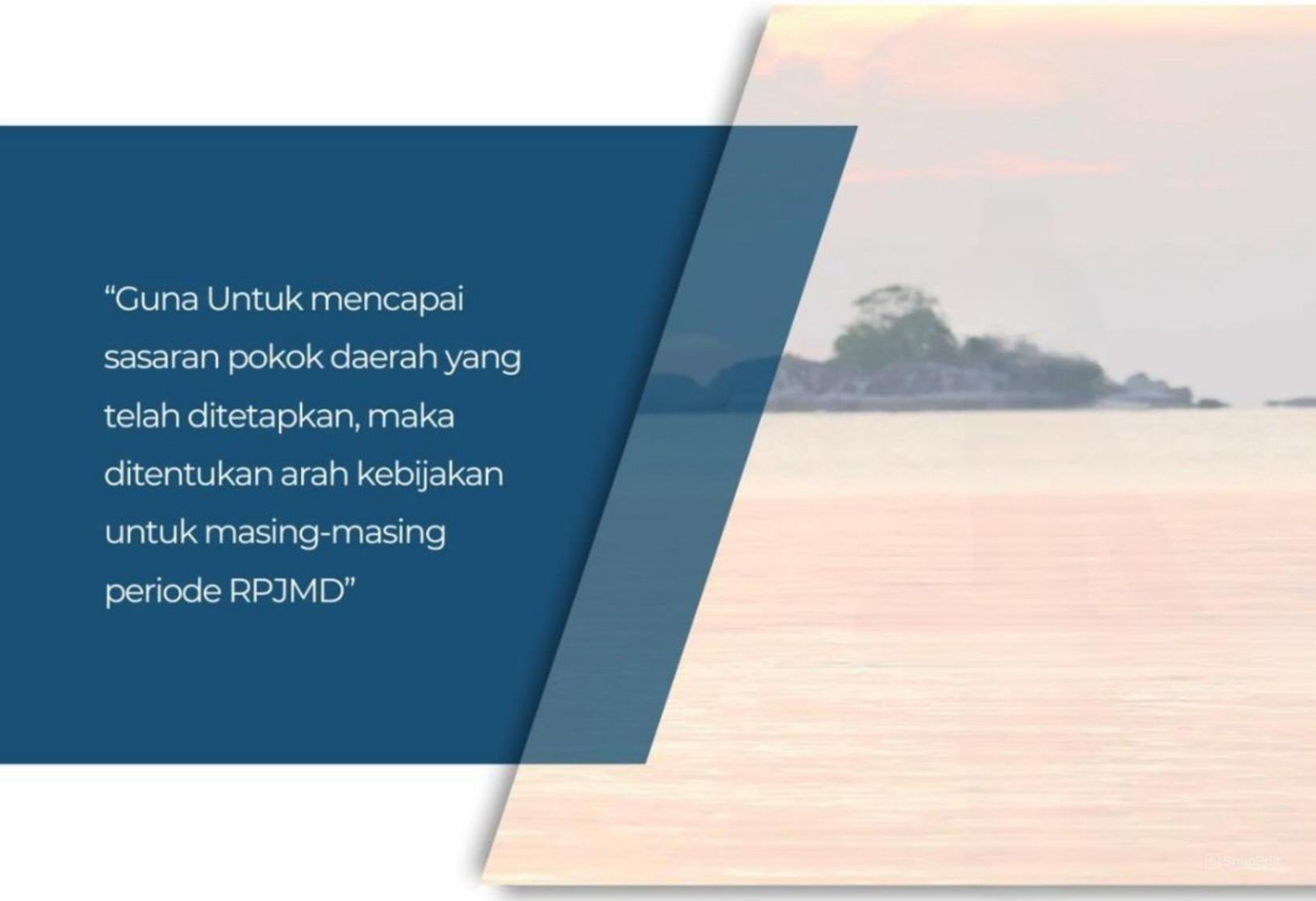
Tabel 4.3 Penyelarasan Misi RPJPD Kabupaten Belitung dengan Misi RPJPN dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045	RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045
Kelompok Agenda/Misi	**Agenda/Misi**	**Misi**	**Misi**
Transformasi Indonesia	Transformasi Sosial	SDM unggul dan berdaya saing	Misi ke-1 : Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas
	Transformasi Ekonomi	Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau	Misi ke-2 : Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing
	Transformasi Tata Kelola	Transformasi Tata Kelola	Misi ke-3 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat
Landasan Transformasi	Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi	Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Daerah	Misi ke-4 : Mewujudkan Kondusivitas Daerah
	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Misi ke-5 : Mewujudkan masyarakat berbudaya

RPJPN 2025-2045		RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045	RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045
Kelompok Agenda/Misi	Agenda/Misi	Misi	Misi
			dan berwawasan lingkungan
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Pembangunan Kepulauan Bangka Belitung yang Merata dan Berkeadilan	Misi ke-6 : Pembangunan kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan
	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Misi ke-7 : Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan
	Kesinambungan Pembangunan	Kesinambungan Pembangunan	Misi ke-8 : Kesinambungan Pembangunan

Sumber : hasil analisis Tim RPJPD, 2024

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH



"Guna Untuk mencapai sasaran pokok daerah yang telah ditetapkan, maka ditentukan arah kebijakan untuk masing-masing periode RPJMD"

Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Tema pembangunan Kabupaten Belitung merupakan hasil sinergi antara tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk pembangunan jangka panjang periode tahun 2025-2045. Tema pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 adalah : : **"Quality Tourism, ekonomi kreatif, agromaritim dan pulau-pulau kecil".** Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Belitung, dilaksanakan dalam empat tahapan.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi (Permendagri No. 86 Tahun 2017). Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan misi pembangunan jangka panjang dibagi kedalam 4 (empat) tahapan yaitu Tahap I (tahun 2025-2029), Tahap II (tahun 2030-2034), Tahap III (tahun 2035-2039), dan Tahap IV (tahun 2040-2045).

Pada tahap pertama diarahkan untuk fokus kepada penguatan fondasi pembangunan, di tahap kedua diarahkan untuk akselerasi pembangunan, selanjutnya pada tahap ke tiga Kabupaten Belitung diarahkan untuk pemantapan pembangunan sehingga diharapkan pada akhir periode dapat terwujud visi jangka panjang Kabupaten Belitung yaitu Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan) yang mendukung pencapaian visi Babel Bertuah 2045, dan Visi Indonesia Emas 2045, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 5.1 Pentahapan Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Belitung

Sumber : Data diolah, 2024

Penjabaran dari masing-masing pentahapan pembagunan adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pertama (2025-2029) Penguatan Fondasi Pembangunan.

Pada tahapan penguatan fondasi merupakan langkah penting dalam proses pembangunan untuk memastikan sumber daya yang dimiliki memiliki kestabilan dan kesinambungan pembangunan untuk meningkatkan capaian kinerja yang belum optimal. Upaya dalam penguatan fondasi pembangunan ini antara lain:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia yang lebih berakhlak dan berbudaya.
2. Penguatan fondasi kebudayaan lokal untuk membentuk sumber daya manusia lebih berakhlak.
3. Penguatan potensi unggulan daerah sebagai pengungkit perekonomian daerah.
4. Penguatan kawasan yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata.
5. Penguatan pelayanan publik supaya lebih berkualitas.

2. Tahapan Kedua (2030-2034) Akselerasi Pembangunan.

Pada tahapan kedua ini, merupakan upaya untuk mempercepat proses pembangunan dalam suatu wilayah. Dengan menerapkan arah kebijakan yang telah dirumuskan untuk meningkatkan kecepatan dan efektifitas pembangunan di berbagai sektor. Akselerasi pembangunan dilakukan pada berbagai aspek pembangunan, mencakup:

1. Peningkatan kapasitas SDM supaya lebih kompeten, berkualitas dan inovatif.
2. Pengembangan potensi unggulan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi.
3. Peningkatan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan.
4. Inovasi dan teknologi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Tahapan Ketiga (2035-2039) Pemantapan Pembangunan.

Pada tahapan ketiga ini, merupakan upaya untuk memastikan bahwa proses pembangunan yang telah dilakukan mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Upaya pemantapan pembangunan mencakup antara lain:

1. Pemantapan kompetensi sumber daya manusia yang produktif.
2. Resiliensi ekonomi daerah supaya berkelanjutan.
3. Akuntabilitas tata kelola pemerintahan.
4. Pemantapan infrastruktur inklusif dan berkelanjutan.

4. Tahapan Keempat (2040-2045) Perwujudan Belitung MAJU (Mandiri dan Berkelanjutan)

Pada tahap keempat ini, merupakan langkah untuk mengimplementasikan rencana dan konsep yang sudah disusun. Memastikan bahwa ide, rencana ataupun konsep yang sudah direncanakan dapat memberikan hasil nyata dan memberikan manfaat serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup antara lain:

1. Perwujudan sumber daya manusia Kabupaten Belitung yang berakhlak, berbudaya, kompetitif dan produktif.
2. Perwujudan perekonomian Kabupaten Belitung yang resilien, maju dan berkelanjutan.
3. Perwujudan Kabupaten Belitung sebagai simpul pariwisata global yang dapat menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
4. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bermartabat.
5. Perwujudan perlindungan budaya dan kearifan lokal Kabupaten Belitung,
6. Perwujudan kondusivitas dan stabilitas daerah.
7. Perwujudan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan.

Urutan arah kebijakan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya akan memberi panduan untuk penyusunan RPJMD. Berlandaskan pada penyelarasan arah kebijakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan arah kebijakan transformasi nasional, maka arah kebijakan RPJPD Kabupaten Belitung untuk setiap misi dapat diindentifikasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Arah Kebijakan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)	Misi 1 : Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas;	Penguatan Sumber Daya Manusia melalui Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Sosial	Percepatan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas	Pemantapan pembangunan Sumber Daya Manusia yang produktif, demokratis, tangguh	Sumber Daya Manusia Belitung yang unggul, mandiri dan berdaya saing
	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing	Penguatan sektor perekonomian Kabupaten Belitung melalui potensi unggulan daerah dan kearifan lokal	Peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Belitung yang produktif secara masif	Pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Belitung yang berkelanjutan	Perekonomian Kabupaten Belitung yang inklusif dan berdaya saing
	Misi 3: Mewujudkan	Penguatan Regulasi dan	Pengembangan kualitas,	Pemantapan kemandirian	Perwujudan Tata Kelola

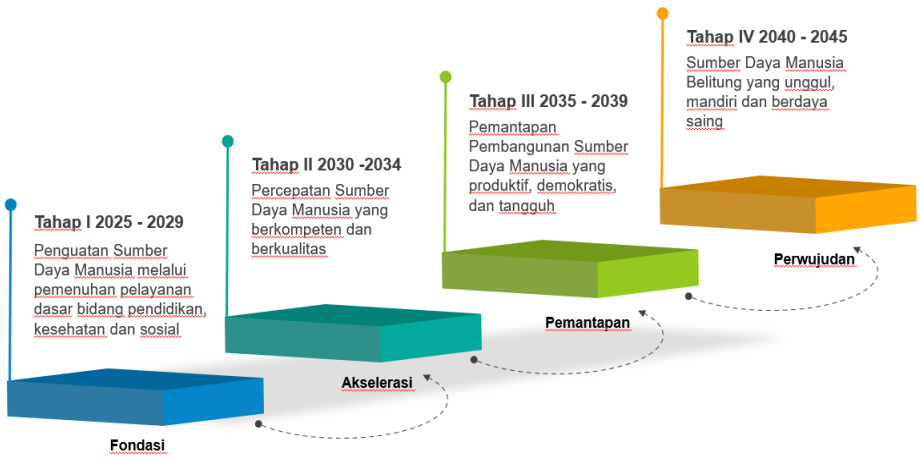
Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
		Fondasi	Akselerasi	Pemantapan	Perwujudan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat	Kelembagaan yang Transformatif	aksesibilitas dan inklusifitas pelayanan publik bagi masyarakat	daerah melalui pemerintahan yang efektif, efisien, adaptif, transparan dan responsif	Pemerintahan yang bersih dan bermartabat
	Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas Daerah	Penguatan kelembagaan dan pranata sosial untuk mewujudkan kondusivitas daerah dan stabilitas ekonomi	Percepatan koordinasi dan sinergi antar lembaga dan pemangku kebijakan untuk mendukung kerjasama antar daerah dan kondusivitas daerah	Pemantapan implementasi kebijakan untuk percepatan kerjasama antar daerah dan kondusivitas daerah	Perwujudan kondusivitas daerah yang mendukung stabilitas ekonomi dan iklim investasi yang kondusif
	Misi 5: Mewujudkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan	Penguatan karakter dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan sebagai modal dasar pembangunan	Pemajuan karakter dan budaya masyarakat yang berwawasan lingkungan sebagai pendorong pembangunan yang inklusif	Pemantapan masyarakat yang tangguh dan berbudaya serta pengelolaan Sumber Daya Alam secara konsisten dalam menghadapi berbagai tantangan	Perwujudan masyarakat Belitung yang Berbudaya dan berwawasan Lingkungan menuju pariwisata berkualitas
	Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Penguatan jaringan transportasi sebagai tulang punggung konektivitas yang terpadu sampai dengan pulau-pulau kecil dengan mengacu pada tata ruang	Percepatan Integrasi jaringan transportasi untuk percepatan konektivitas yang terpadu	Pemantapan integrasi antarmoda transportasi untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang	Perwujudan pembangunan kewilayahan yang berkualitas dan terintegrasi untuk mendukung konektivitas perekonomian yang merata dan berkeadilan
	Misi 7: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Penguatan pembangunan infrastruktur untuk pengelolaan wilayah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu ke hilir	Percepatan pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan	Perwujudan Infrastruktur yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata berkualitas
	Misi 8 : Kesinambungan Pembangunan	Sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, Tata Kelola dan Lingkungan	Akselerasi sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan	Pemantapan sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan	Konsistensi pembangunan menuju Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan) 2045 dan menjadi Simpul Pariwisata Global

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

Penjabaran dari tiap arah kebijakan berdasarkan misi dan pentahapanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1 Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, maka arah kebijakan pada tiap periodenya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2 Misi 1 Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Tahapan Arah Kebijakan Misi 1 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi I	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	**Penguatan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial**	**Percepatan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Berkualitas**	**Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Demokratis dan Tangguh**	**Sumber Daya Manusia Belitung yang unggul, Mandiri dan Berdaya Saing.**
	Penguatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara lebih berakhlak dan berbudaya dalam	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara yang berakhlak dan berkarakter, sehinga	Pemantapan kompetensi sumber daya manusia, baik aparatur dan masyarakat sehingga menjadi semakin produktif dan inovatif.	Menciptakan sumber daya manusia yang sehat, mandiri, tangguh dan berdaya saing untuk mencapai

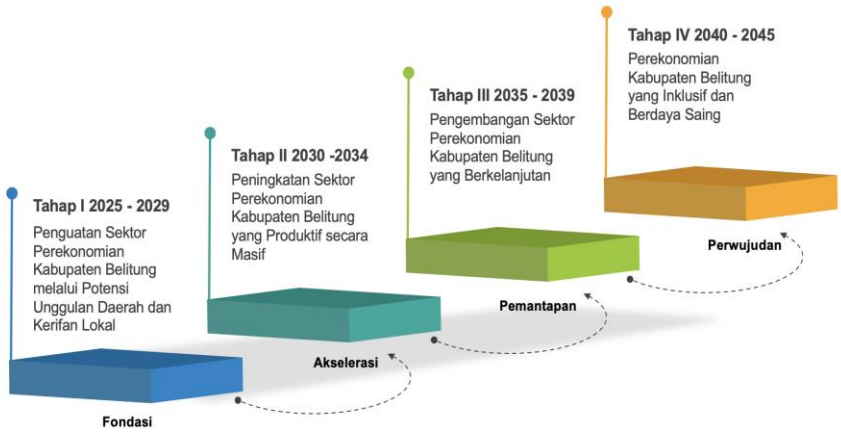
Misi I	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	**Penguatan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial**	**Percepatan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Berkualitas**	**Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Demokratis dan Tangguh**	**Sumber Daya Manusia Belitung yang unggul, Mandiri dan Berdaya Saing.**
	memberikan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial.	dapat memberikan pelayanan dasar yang optimal bidang pendidikan, kesehatan dan sosial		masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.
	Penguatan budaya dan akhlak sumber daya manusia berdasarkan kebudayaan dan kearifan lokal setempat sehingga dapat membentuk manusia yang berkarakter.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam mengikuti perkembangan pendidikan yang berbasis teknologi informasi.	Sumber daya manusia aparatur dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan serta berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif.	Mendorong pengembangan pendidikan tinggi yang merata dan berkualitas unggul.
	Penguatan pemenuhan akses pendidikan yang merata ke seluruh wilayah Kabupaten Belitung.	Peningkatan kualitas kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan sehingga berkualitas dan inovatif.	Perwujudan pengelolaan tenaga pendidik dengan peningkatan kualitas, kesejahteraan dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif.
	Penguatan pemenuhan akses pendidikan berkebutuhan khusus dan pendidikan non formal.	Percepatan penuntasan dan pencegahan *stunting.*	Peningkatan kualitas dan kuantitas Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang inklusif dan memberdayakan masyarakat lokal.	Perwujudan perlindungan sosial masyarakat yang adil dan inklusif bagi masyarakat rentan.
	Penguatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Peningkatan kompetensi masyarakat lokal untuk dapat diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Pemantapan pemenuhan penyediaan jaminan sosial.	Pemantapan ketahanan dan keamanan pangan.
	Penguatan penyediaan jaminan sosial dan sistem penyediaan bantuan sosial.	Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Pemantapan upaya preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat serta pengendalian penyakit dengan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan budaya.	Pencegahan dan penuntasan stunting.
	Penguatan pembudayaan perilaku hidup sehat.	Peningkatan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia untuk pengembangan	Pemutakhiran rutin data sosial ekonomi agar program pemerintah dapat tepat sasaran.	Pemenuhan akses informasi, edukasi, dan edukasi sehingga dapat mewujudkan sumber daya manusia

Misi I	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	**Penguatan Sumber Daya Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan dan sosial**	**Percepatan Sumber Daya Manusia yang Berkompeten dan Berkualitas**	**Pemantapan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Produktif, Demokratis dan Tangguh**	**Sumber Daya Manusia Belitung yang unggul, Mandiri dan Berdaya Saing.**
		ekonomi berbasis potensi unggulan.		yang mandiri, tangguh dan berdaya saing.

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing

Dalam rangka mewujudkan perekonomian daerah yang inklusif, produktif dan berdaya saing, maka pentahapan pada tiap periodenya dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut:



Gambar 5.3 Misi 2 Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

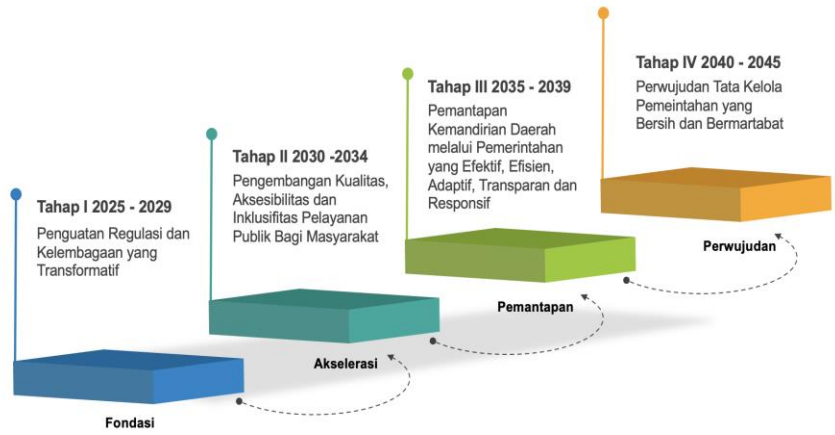
Tabel 5.3 Tahapan Arah Kebijakan Misi 2 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi 2	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing	**Penguatan sektor perekonomian Kabupaten Belitung melalui potensi unggulan daerah dan kearifan lokal**	**Peningkatan sektor perekonomian Kabupaten Belitung yang produktif secara masif**	**Pengembangan sektor perekonomian Kabupaten Belitung yang berkelanjutan**	**Perekonomian Kabupaten Belitung yang inklusif dan berdaya saing**
	Penguatan peran ekonomi lokal pada sektor-sektor unggulan sebagai penggerak ekonomi daerah	Peningkatan peran ekonomi lokal supaya lebih produktif	Pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan	Penguatan kemitraan usaha, proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi dan inovasi
	Penguatan nilai tambah ekonomi sektor unggulan dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kearifan lokal	Percepatan transformasi digital dengan peningkatan kapasitas penggunaan teknologi pada sektor perekonomian	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan dan implementasi teknologi	Pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan berbasis kearifan lokal namun berorientasi ekspor
	Kolaborasi pemerintah, swasta, masyarakat, dan akademisi dalam penataan dan penguatan *quality tourism*	Pemenuhan aksesibilitas, amenitas dan atraksi destinasi wisata berbasis seni budaya dan alam	Pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam sehingga lebih berdaya saing	Peningkatan konektivitas dan jalur distribusi antar sentra produksi, pengolahan dan pasar baik lokal, nasional dan global
	Peningkatan kontribusi masyarakat pada sektor unggulan pariwisata melalui penguatan UMKM	Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penopang sektor-sektor unggulan Kabupaten Belitung	Pengembangan pusat-pusat inkubasi usaha kreatif dan digital yang berorientasi pada pengembangan dan komersialisasi kekayaan intelektual	Penerapan moderninasi ekonomi lokal
	Pengembangan pertanian dan perikanan pada sentra-sentra produksi komoditas unggulan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan *up-skilling* dan *re-skilling* SDM, terutama pada sektor-sektor unggulan dan prioritas daerah	Keterkaitan UMKM pada rantai industri domestik dan global untuk peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi dan kemitraan usaha	Pengembangan riset dan inovasi untuk pengembangan produk menjadi lebih berdaya saing
	Penguatan identitas kebudayaan lokal pada kehidupan masyarakat sebagai pondasi pengembangan pariwisata	Pengembangan industri pariwisata dan pendukungnya dengann standarisasi dan kerjasama regional	Pemantapan industri pariwisata berkualitas berskala regional dan nasional	Perwujudan sektor pariwisata berbasis *quality tourism*, nilai-nilai kebudayaan dan pengembangan pulau-pulau kecil
	Pengembangan klaster pariwisata terpadu yang mencakup aspek perencanaan, kapasitas lokal dan pengelolaan yang berkelanjutan			

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bermartabat, maka dirumuskan arah kebijakan per periode sebagai berikut:



Gambar 5.4 Misi 3 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.4 Tahapan Arah Kebijakan Misi 3 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

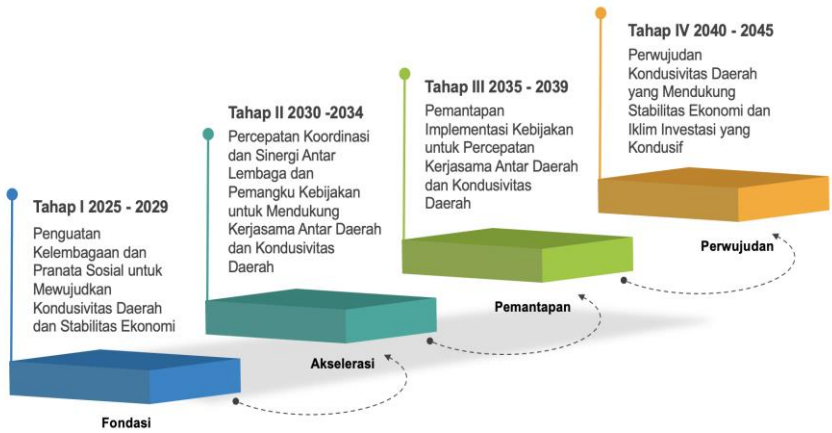
Misi 3	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat	**Penguatan Regulasi dan Kelembagaan yang Transformatif**	**Pengembangan Kualitas, Aksesibilitas dan Inklusifitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat**	**Pemantapan Kemandirian Daerah Melalui Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Adaptif, Transparan dan Responsif**	**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat**
	Penyelenggaraan SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan dan perluasan digitalisasi pelayanan publik	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik yang terintegrasi dan responsif	Optimalisasi penyelenggaraan SPBE sehingga terwujud pelayanan publik yang bersih dengan berbasis digital
	Peningkatan kualitas regulasi dengan pengembangan transformasi digital yang memperhatikan	Percepatan transformasi digital berbasis riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas regulasi dan	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah berbasis riset dan inovasi	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih dan bermartabat

Misi 3	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat	**Penguatan Regulasi dan Kelembagaan yang Transformatif**	**Pengembangan Kualitas, Aksesibilitas dan Inklusifitas Pelayanan Publik Bagi Masyarakat**	**Pemantapan Kemandirian Daerah Melalui Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Adaptif, Transparan dan Responsif**	**Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat**
	harmonisasi teknologi, manusia dan lingkungan	kelembagaan lebih inklusif		
	Penguatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif	Pemantapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang adaptif dsn responsif untuk mendukung kemandirian daerah	Perwujudan pemerintah daerah yang akuntabel dengan kelembagaan dan aparatur daerah yang adaptif danresponsif
	Penguatan transformasi birokrasi yang berkualitas	Percepatan transformasi birokrasi kolaboratif, efisien dan adaptif	Pemantapan birokrasi kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika zaman	Perwujudan birokrasi yang responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.4 Mewujudkan Kondusivitas Daerah

Dalam rangka mewujudkan kondusivitas daerah, maka dirumuskan arah kebijakan pada tiap periode adalah sebagai berikut:



Gambar 5.5 Misi 4 Mewujudkan Kondusivitas Daerah

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

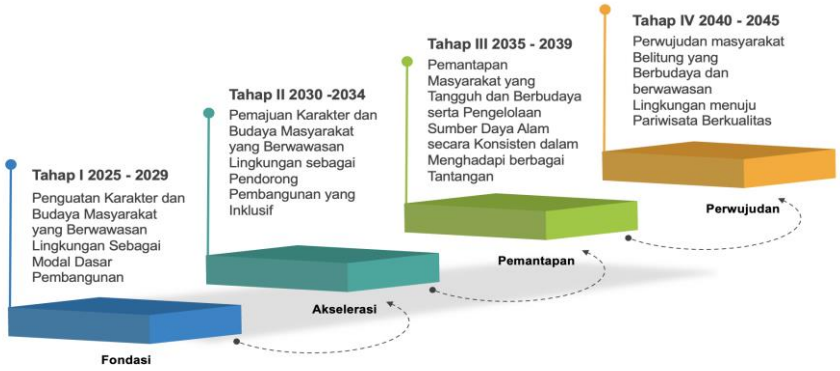
Tabel 5.5 Tahapan Arah Kebijakan Misi 4 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi 4	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Kondusivitas Daerah	**Penguatan Kelembagaan dan Pranata Sosial untuk Mewujudkan Kondusivitas Daerah dan Stabilitas Ekonomi**	**Percepatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga dan Pemangku Kebijakan untuk Mendukung Kerjasama antar Daerah dan Kondusivitas Daerah**	**Pemantapan Implementasi Kebijakan untuk Percepatan Kerjasama Antar Daerah dan Kondusivitas Daerah**	**Perwujudan Kondusivitas Daerah yang Mendukung Stabilitas Ekonomi dan Iklim Investasi yang Kondusif**
	Penguatan peran desa dan lembaga masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial dan pengawasan penegakan hukum	Percepatan koordinasi antar aparat keamanan pemerintah dan aparat desa dalam menjaga stabilitas keamanan dan sosial	Pemantapan peran desa dan lembaga masyarakat dalam penyelesaian konflik sosial dan pengawasan penegakan hukum	Optimalisasi peran desa dan lembaga masyarakat dalam penyelesaian konflik dan pengakan hukum untuk mndukung stabilitas ekonomi
	Sosialisasi keamanan dan ketertiban kepada masyarakat untuk peningkatan penegakan hukum	Perluasan kerja sama dan sinergi lintas pemerintahan untuk mewujudkan stabilitas sosial	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	Perwujudan keamanan dan ketertiban, stabilitas sosial dan ekonomi yang mendukung iklim investasi
	Penguatan partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan progresif	Pembudayaan semangat gotong royong dan solidaritas antar warga untuk mewujudkan lingkungan yang aman	Pemantapan kerja sama antar pemerintah, lembaga penegak hukum dan masyarakat untuk mengatasi berbagai tantangan keamanan	Perwujudan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pembangunan dengan pendekatan proaktif dalam pencegahan konflik dan penyelesaian perselisihan
	Penaataan dan pengembangan sistem kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Percepatan dan perluasan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penguatan dan pemantapan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah	Penerapan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.5 Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan

Dalam rangka mewujudkan berbudaya dan berwawasan lingkungan, maka dirumuskan arah kebijakan pada tahapan tiap periode adalah sebagai berikut:



Gambar 5.6 Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

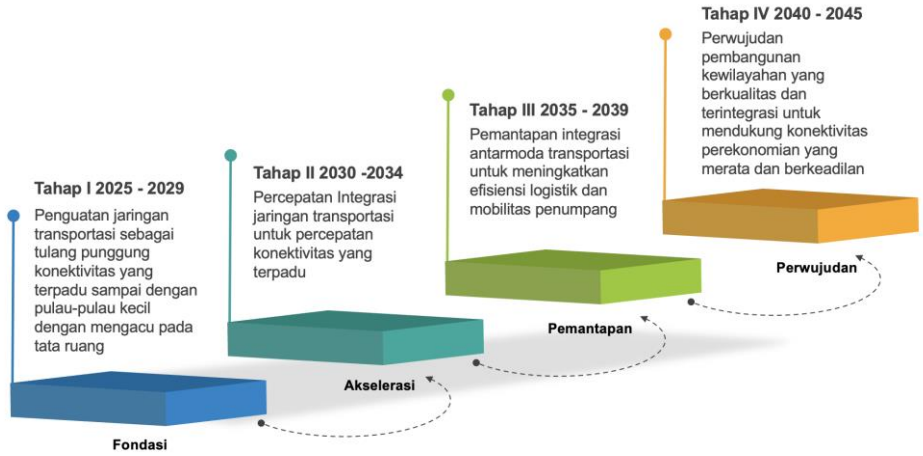
Tabel 5.6 Tahapan Arah Kebijakan Misi 5 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi 5	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan	**Penguatan Karakter dan Budaya Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan sebagai Modal Dasar Pembangunan**	**Penguatan Karakter dan Budaya Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan sebagai Pendorong Pembangunan yang Inklusif**	**Pemantapan Masyarakat yang Tangguh dan Berbudaya serta Pengelolaan Sumber Daya Alam secara Konsisten dalam Menghadapi Berbagai Tantangan**	**Perwujudan Masyarakat Belitung yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan Menuju Pariwisata Berkualitas**
	Implementasi nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat untuk pondasi pembangunan	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat	Pemantapan moderasi beragaman dan keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat	Penerapanmoderasi beragaman dan keberagaman budaya dalam kehidupan masyarakat
	Pengembangan dan perluasan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal berbasis masyarakat	Percepatan pengembangan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal berbasis masyarakat	Pemantapan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal berbasis masyarakat	Optimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata kebudayaan yang dapat menggerakkan perekonomian lokal berbasis masyarakat
	Perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Percepatan perluasan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Pemantapan pemanfaatan sumber energi baru terbarukan	Optimalisasi pemanfaatan sumber energi baru terbarukan
	Penguatan dan perluasan mitigasi bencana pada skala mikro	Percepatan mitigasi bencana pada skala mikro	Pemantapan mitigasi bencana pada skala mikro	Penerapan mitigasi bencana pada skala mikro
	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Percepatan reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Pemantapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Penerapan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, maka arah kebijakan pada tiap periode dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 5.7 Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.7 Tahapan Arah Kebijakan Misi 6 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

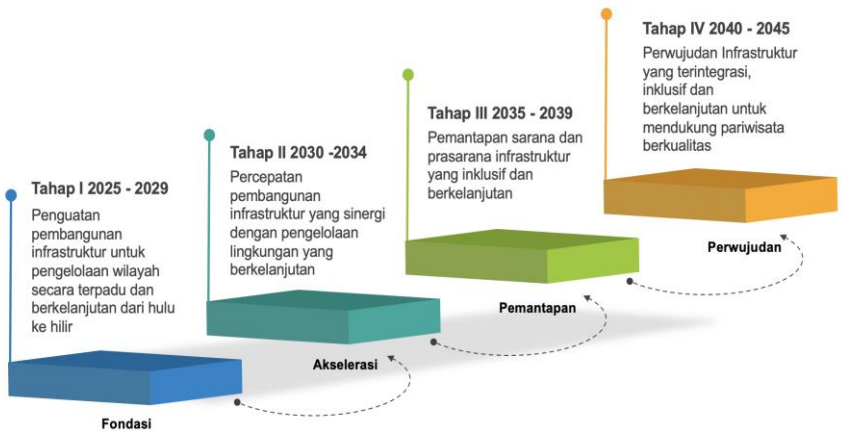
Misi 6	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	**Penguatan Jaringan Transportasi sebagai Tulang Punggung Konektivitas yang Terpadu sampai dengan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengacu pada Tata Ruang**	**Percepatan Integrasi Jaringan Transportasi untuk Percepatan Konektivitas yang Terpadu**	**Pemantapan Integrasi Antarmoda Transportasi untuk Meningkatkan Efisiensi Logistik dan Mobilitas Penumpang**	**Perwujudan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Terintegrasi untuk Mendukung Konektivitas Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan**
	Penguatan tata kelola, sistem dan sarana prasarana transportasi antar wilayah dan pulau-pulau kecil	Peningkatan pengelolaan tata kelola, sistem dan sarana prasarana transportasi antar wilayah dan pulau-pulau kecil	Pemantapan tata kelola, sistem dan sarana prasarana transportasi antar wilayah dan pulau-pulau kecil secara merata	Optimalisasi tata kelola, sistem dan sarana prasarana transportasi antar wilayah dan pulau-pulau kecil secara merata
	Penyediaan dan penataan infrastruktur penunjang	Percepatan penataan infrastruktur	Pemantapan penataan infrastruktur penunjang	Percepatan penataan infrastruktur

Misi 6	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	**Penguatan Jaringan Transportasi sebagai Tulang Punggung Konektivitas yang Terpadu sampai dengan Pulau-Pulau Kecil dengan Mengacu pada Tata Ruang**	**Percepatan Integrasi Jaringan Transportasi untuk Percepatan Konektivitas yang Terpadu**	**Pemantapan Integrasi Antarmoda Transportasi untuk Meningkatkan Efisiensi Logistik dan Mobilitas Penumpang**	**Perwujudan Pembangunan Kewilayahan yang Berkualitas dan Terintegrasi untuk Mendukung Konektivitas Perekonomian yang Merata dan Berkeadilan**
	aktivitas perekonomian antar pulau yang handal	penunjang aktivitas perekonomian antar pulau yang handal	aktivitas perekonomian antar pulau yang handal	penunjang aktivitas perekonomian antar pulau yang handal, inklusif dan berkelanjutan
	Pengembangan tranportasi publik terintegrasi yang handal dalam melayani mobilitas penumpang	Percepatan pengembangan tranportasi publik terintegrasi yang handal dalam melayani mobilitas penumpang	Pemantapan pengembangan tranportasi publik terintegrasi yang handal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang	Penataan dan optimalisasi tranportasi publik terintegrasi yang handal dan modern dalam melayani mobilitas penumpang

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.7 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang inklusif merata dan berkelanjutan, maka arah kebijakan pada tiap periode dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 5.8 Misi 7 Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

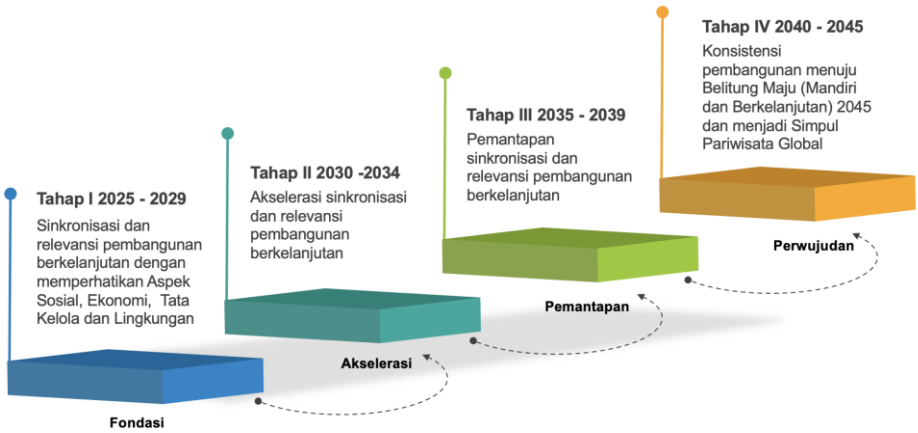
Tabel 5.8 Tahapan Arah Kebijakan Misi 7 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi 7	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan	**Penguatan Pembangunan Infrastruktur untuk Pengelolaan Wilayah secara Terpadu dan Berkelanjutan dari Hulu ke Hilir**	**Percepatan pembangunan infrastruktur yang sinergi dengan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan**	**Pemantapan sarana dan prasarana infrastruktur yang inklusif dan berkelanjutan**	**Perwujudan Infrastruktur yang terintegrasi, inklusif dan berkelanjutan untuk mendukung pariwisata berkualitas**
	Penguatan koordinasi dan kerja sama dengan *stakeholder* dalam penyediaan infrastruktur air minum aman dengan jaringan perpipaan	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) melalui penyediaan infrastruktur air minum yang berkualitas dan aman dengan jaringan perpipaan	Pemantapan penyediaan infrastruktur air minum terpadu yang aman dan berkualitas dengan jaringan perpipaan	Pemenuhan penyediaan air minum yang aman dan berkualitas serta terintegrasi dengan jaringan perpipaan
	Penyediaan lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Pemantapan kualitas perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan	Penataan perumahan dan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan
	Penguatan tata kelola dan penyediaan infrastruktur pendukung kualitas air, udara dan tutupan lahan	Percepataan pengelolaan tata kelola dan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan	Pemantapanpengelolaan tata kelola dan keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Optimalisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup
	Pengembangan dan perluasan akses sanitasi yang aman dan terpadu sesuai karakteristik daerah	Percepatan pengembangan akses sanitasi yang aman dan terpadu sesuai karakteristik daerah	Pemantapan akses sanitasi yang aman dan terpadu sesuai karakteristik daerah	Penataan dan optimalisasi akses sanitasi yang aman dan terpadu sesuai karakteristik daerah
	Pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terpadu hari hulu ke hilir untuk meminimalisasi residu	Percepatan pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terpadu hari hulu ke hilir untuk meminimalisasi residu	Pemantapan pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terpadu hari hulu ke hilir untuk meminimalisasi residu	Optimalisasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang terpadu hari hulu ke hilir untuk meminimalisasi residu
	Penguatan penanganan kawasan permukiman kumuh secara komprehensif	Percepatan penanganan kawasan permukiman kumuh secara komprehensif	Pemantapan penanganan kawasan permukiman kumuh secara komprehensif	Penataan permukiman kumuh secara komprehensif

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.1.8 Kesinambungan Pembangunan

Dalam rangka mewujudkan kesinambungan pembangunan, maka dirumuskan arah kebijakan pada tiap tahapan periodenya sebagai berikut:



Gambar 5.9 Misi 8 Kesinambungan Pembangunan

Penjabaran pentahapan tiap periodenya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.9 Tahapan Arah Kebijakan Misi 8 RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

Misi 8	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Kesinambungan Pembangunan	**Sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, Tata Kelola dan Lingkungan**	**Akselerasi sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan**	**Pemantapan sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan**	**Konsistensi pembangunan menuju Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan) 2045 dan menjadi Simpul Pariwisata Global**
	Penguatan koordinasi pusat dan daerah untuk sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dengan memperhatikan hasil riset dan inovasi	Pemantapan koordinasi pusat dan daerah untuk sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dengan memperhatikan hasil riset dan inovasi	Pemantapan sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dengan memperhatikan hasil riset dan inovasi	Optimaliasi sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah dengan memperhatikan hasil riset dan inovasi
	Penguatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh	Percepatan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh	Pemantapan pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh	Optimalisasi pengendalian pembangunan dan evaluasi yang terpadu dan menyeluruh
	Penguatan pengembangan sistem elektronik secara	Percepatan pengembangan sistem elektronik secara	Pemantapan sistem elektronik secara terpadu melalui	Optimaliasi sistem elektronik secara terpadu melalui

Misi 8	Tahap 1 (2025-2029)	Tahap 2 (2030-2034)	Tahap 3 (2035-2039)	Tahap 4 (2040-2045)
Kesinambungan Pembangunan	**Sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan Aspek Sosial, Ekonomi, Tata Kelola dan Lingkungan**	**Akselerasi sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan**	**Pemantapan sinkronisasi dan relevansi pembangunan berkelanjutan**	**Konsistensi pembangunan menuju Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan) 2045 dan menjadi Simpul Pariwisata Global**
	terpadu melalui kebijakan satu data pembangunan	terpadu melalui kebijakan satu data pembangunan	kebijakan satu data pembangunan	kebijakan satu data pembangunan
	Penyusunan dan penyesuaian rencana pengembangan wilayah dengan mempertimbangkan resiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim	Implementasi rencana tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan pemanfaatan ruang melalui penerapan resiko bencana	Pemantapan implementasi rencana tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Optimalisasi penataan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis dan pemanfaatan ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya tari Belitung menjadi Simpul Pariwisata Global

Sumber : hasil analisis (diolah, 2024)

5.2 Sasaran Pokok Pembangunan

Sasaran pokok merupakan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung untuk mencapai visi Belitung Maju (mandiri dan berkelanjutan) yang dilakukan melalui langkah-langkah kebijakan transformasi hasil penyelarasan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan RPJPN, yang telah disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Belitung. serta Indikator Utama Pembangunan (IUP) berupa indikator hasil penyelarasan RPJPN-RPJPD sebagaimana Buku II SEB penyelarasan RPJPD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 yang juga telah disesuaikan dengan karakteristik Kabupaten Belitung.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Berpijak pada analisis permasalahan dan isu strategis yang telah di petakan dalam Bab III dan visi misi yang telah ditetapkan dalam Bab IV, berikut disajikan sasaran pokok, 17 (tujuh belas) arah pembangunan dan 45 (empat puluh lima) Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Belitung 20 (dua puluh) tahun ke depan yang telah diselaraskan dengan Indikator Utama

Pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045 pada Tabel 5.10

Tabel 5.10 Perumusan Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
Transformasi Sosial									
Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,15	79,50	Meningkatnya Kesehatan untuk Semua
			2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	2.	Kesehatan Ibu dan Anak:			
			3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.		a). Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	16	
			4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.		b). Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,30	5,50	
			5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):	597	109	
			6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.		a). Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	66	95	
			7	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.		b). Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,43	98	
			8	Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	4.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	100	100	
			9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.					
			10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.					
			11	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			12	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.					
			39	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.					
	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Inklusif	13	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	5.	Hasil Pembelajaran:			Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Inklusif
			14	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.					
			15	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.					
			16	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.					
			17	Pemenuhan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.		a) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			
			18	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).		i). Literasi Membaca			
			19	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).		-SD	78,25	83,00	
			20	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.		-SMP	84,25	89,00	

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			21	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.		ii). Numerasi			
			22	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.		-SD	62,54	72,04	
			23	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.		-SMP	75,59	85,09	
			24	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.		b) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,02	11,32	
			25	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.		c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,42	15,00	
			26	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics*).	6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,73	9,62	
			27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Perusahaan	21	65	
			28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.					
			32	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.					
	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	29	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.	8.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,92	2,21	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif
			30	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion.	9.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Level Kabupaten (%)	35,53	55,77	
			31	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.	10.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	26	53	

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			33	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand*.					
			34	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.					
			35	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.					
			36	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat.					
			38	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.					
			80	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.					
Transformasi Ekonomi									
Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	37	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	12,83	11,89	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi
			42	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (*smart farming*, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).	12.	Pengembangan Pariwisata			

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			43	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.		a). Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	4,54	6,54	
			44	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.		b). Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	7,55	24,60	
			45	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	34,48	36,7	
			46	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD :			
			47	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.		a.i Proporsi jumlah Usaha Mikro non pertanian pada level Kabupaten (%)	78,16	79,17	
			48	Pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian.		a.ii Proporsi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada level Kabupaten (%)	99,7	99.35	
			50	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.		b). Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,94	12	
			51	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan,		c). Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,72	2,41	

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
				teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.					
			52	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.		d). Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,86	3,42	
			53	Pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	15.	Penciptaam Lapangan Kerja yang Baik			
			54	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.		a). Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	1,5	
			55	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		b). Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	50,00	94,45	
			56	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,79	62,22	
			57	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	17.	Tingkat Penguasaan IPTEK:			
			79	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global.		Indeks Kapabilitas Inovasi	2,07	3,00	
			82	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.					
			70	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Belitung.					
			71	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			72	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.					
			73	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.					
			77	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Belitung.					
	IE5	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	49	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	18.	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau : a). Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,45	89,92	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru
			81	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, *offsetting*, dan pajak karbon.					
	IE6	Transformasi Digital	89	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritasmelalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).	19.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan komunikasi	5,9	7,3	Terwujudnya Transformasi Digital
			65	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan infrastruktur *mobile connection* pada area-area *weak coverage* di kawasan perkotaan.					
	IE7	Integrasi Ekonomi	83	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke					Terwujudnya Integrasi

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
		Domestik dan Global		sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.					Ekonomi Domestik dan Global
			84	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.					
			85	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	20	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	22,29	21,80	
			86	Peningkatan produktivitas BUMD.	21	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	14,17	14,33	
			87	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.					
	IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.	22	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
			41	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau *urban renewal* pada area yang telah mengalami *urban decay* dalam suatu kawasan perkotaan.		a). Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	75	100	
			58	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/*stockyard* yang modern terintegrasi).		b). Persentase Desa Mandiri	59,52	100	
			59	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan *grid* tenaga listrik, terutama *green/low-carbon electricity*; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja;					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
				Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.					
			60	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.					
			61	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).					
			66	Pembangunan dan perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.					
			67	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.					
			68	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.					
			69	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan.					
			74	Pengembangan *multi-infrastructure backbone & maritime backbone*, yang menginterkoneksikan antar kawasan strategis.					
			75	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.					
			76	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul, terutama di pelabuhan.					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			78	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif, terutama pada Bandar Udara H. A. S. Hanandjoeddin.					
Transformasi Tata Kelola									
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat	IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	90	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	23	Indeks Reformasi Hukum	70	100	Tersedianya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
			91	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	24	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4	5,00	
			92	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	25	Indeks Pelayanan Publik	4,1	5,00	
			93	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	26	Indeks Integritas	78,00	89,20	
			94	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah Kabupaten Belitung, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Belitung yang profesional dan bebas korupsi.					
			95	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.					
			96	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, *reward*, dan *punishment*, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.					
			97	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.					
			98	Penguatan integritas partai politik.					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			115	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).					
			116	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.					
			117	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, *trust*, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.					
			118	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke *green/low-cost financing*, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.					
			119	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.					
			120	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.					
			123	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.					
			124	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.					

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			125	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Provinsi dan Nasional.					
			126	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.					
			127	Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.					
Keamanan daerah tangguh, demokrasi subtansial dan stabilitas ekonomi makro daerah									
Mewujudkan Kondusivitas Daerah	IE10	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	99	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	27	a). Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas
						b). Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	80	90	
					28	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	65,91	83,29	
					29	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	
	IE11	Stabilitas Ekonomi daerah	100	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	30	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,72	0,46	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi daerah
			101	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	31	Tingkat Inflasi (%)	2,84	0,5	

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
					32	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan a). Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%) * b). Total Kredit / PDRB (%)	 26,78 16,50	 57,90 50,00	
					33	Kontribusi PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	2,48	3,02	Kontribus PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)
	IE12	Kerjasama antar daerah	102 114 122	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya. Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	34	Jumlah kerjasama Kabupaten	17	20,00	Meningkatnya Kerjasama antar daerah
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi									
Mewujudkan Masyarakat Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan	IE13	Mewujudkan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang berbudaya	103 104	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	35	a. Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran b.Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	26,32 9,03	100,00 73,14	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan masyarakat yang berbudaya

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
					36	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,66	83,71	
	IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	108	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	37	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,56	74,51	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif
			109	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	38	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,275	0,112	
			110	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.					
			111	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.					
Implementasi Tansformasi									
	IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	105	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	39	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif di hutan dan lahan; perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat (Kumulatif)	6	25	Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas
			106	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.					
			64	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju *zero solid waste city* dan mendukung *circular economy* pada kawasan perkotaan.					
			113	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	40	Kualitas Lingkungan Hidup : a). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,81	80,23	

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
						b). Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%) c). Pengelolaan Sampah Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%) Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	6,12 8 40	50 84,00 100,00	
	IE16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	62 88	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui *cofiring* dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (*smart grid*) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (*isolated mini/micro-grid*) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan.	41	Ketahanan Energi, Air dan Pangan a) Ketahanan Energi			Terwujudnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Misi	Arah Pembangunan		Arah Kebijakan Transformasi Daerah		Indikator Utama Pembangunan		Target RPJPD 2025-2045		Sasaran Pokok
							Baseline 2025	Target 2045	
			112	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.		- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	1477	3225	
						b) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment* (%))	11,94	0,23	
						c) Ketahanan Air :			
						- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,55	2,05	
						- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30,97	100	
	IE17	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	63	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*) pada kawasan perkotaan.	42	Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,14	99,76	Terwujudnya Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
			107	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	43	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
			121	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.		a. Kumulatif	17,93	37,56	

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Sebagai bentuk kesinambungan terhadap arah kebijakan pembangunan kewilayahan yang termuat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2025-2045, maka dilakukan pentahapan arah kebijakan transformasi untuk dikembangkan di Kabupaten Belitung. Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi Kabupaten Belitung untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, dalam kerangka perwujudan Indonesia Emas. Berikut arah kebijakan transformasi Kabupaten Belitung.

Tabel 5.11 Arah Kebijakan Transformasi

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)						
	Misi 1 : Mewujudkan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas;	1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Percepatan dan perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Pemantapan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan.	Perwujudan masyarakat dengan derajat kesehatan yang baik dan membudayakan perilaku hidup sehat
		2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Pemantapan pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal.	Perluasan akses layanan kesehatan universal bagi seluruh masyarakat
		3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Percepatan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pemantapan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.	Pemenuhan dan pemerataan peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan.
		4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Perluasan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Percepatan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.	Pemantapan pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya.
		5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penguatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemantapan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan.
		6	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Percepatan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Penguatan peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan.	Pemantapan dan pemerataan kesejahteraan tenaga kesehatan.
		7	Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Perluasan dan percepatan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemantapan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.	Pemerataan kompetensi tenaga kesehatan.
		8	Penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung	Percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian	Pemantapan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung	Pemerataan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.	dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan.
		9	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Percepatan upaya pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Penguatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.	Pemantapan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas.
		10	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting.	Percepatan penuntasan *stunting* dan pencegahan *stunting*.	Pencegahan stunting.	Pencegahan stunting.
		11	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Penguatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Pemantapan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Optimalisasi ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.
		12	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Pemantapan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Penuntasan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Perluasan pemantauan hasil eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.
		13	Percepatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Penguatan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Pemantapan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).	Penuntasan wajib belajar 10 tahun (1 tahun pra sekolah dan 9 tahun pendidikan dasar).
		14	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan/non formal.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan.	Pemantapan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan.	Perwujudan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan pendidikan kesetaraan.
		15	Bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Pemenuhan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.
		16	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Percepatan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemantapan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		17	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penguatan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemantapan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Pemenuhan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		18	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, *digital literacy*, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Pemantapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penerapan dan pemerataan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Optimalisasi penerapan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		19	Penguatan koordinasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan koordinasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan koordinasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan koordinasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).
		20	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Pemantapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penerapan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Optimalisasi manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		21	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		22	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Pemenuhan dan pemerataan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		23	Peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemenuhan dan pemerataan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		24	Penguatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	Percepatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	Pemantapan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.	Penuntasan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		25	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Perluasan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Pemantapan pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.	Kemandirian masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
		26	Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terhadap akses pendidikan tinggi	Percepatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terhadap akses pendidikan tinggi	Penguatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terhadap akses pendidikan tinggi	Pemantapan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat terhadap akses pendidikan tinggi
		27	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Perluasan pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Penguatan penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.	Pemantapan dan pemerataan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.
		28	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Perluasan dan peningkatan layanan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Pemantapan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.	Optimalisasi layanan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama.
		29	Percepatan penuntasan kemiskinan.	Penguatan penuntasan kemiskinan.	Pemantapan penuntasan kemiskinan.	Optimalisasi penuntasan kemiskinan.
		30	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Percepatan akses infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Perluasan akses infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion	Pemerataan akses infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
		31	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pengembangan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pemantapan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendayagunaan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (*unique & high-value economy*), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		32	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui *upskilling* maupun *reskilling.*	Penguatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.	Pemantapan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif.	Perwujudan sumberdaya manusia yang terampil, memiliki keahlian dan produktif
		33	Pengembangan/peningkatan *government-induced activities* dalam	Percepatan peningkatan *government-induced activities* dalam	Penguatan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan	Pemantapan *government-induced activities* dalam rangka peningkatan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand.*	rangka peningkatan pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand.*	pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand.*	pergerakan orang dan barang yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya *demand.*
		34	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Percepatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pemantapan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Pemerataan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		35	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.	Penguatan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.	Pemantapan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya.	Pemenuhan bantuan sosial secara tepat sasaran.
		36	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua.	Percepatan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua.	Pemantapan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua.	Pemenuhan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua.
		38	Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan peningkatan dan perluasan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pemantapan akses layanan air minum dan sanitasi.	Pemerataan akses layanan air minum dan sanitasi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		39	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Penuntasan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	-	-
		80	Penyediaan fasilitasi perumahan yang layak dan terjangkau.	Pemerataan fasilitasi perumahan yang layak dan terjangkau .	Perluasan fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.	Optimalisi fasilitasi penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau .
	Misi 2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Inklusif, Produktif dan Berdaya Saing	37	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Perluasan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.	Pemantapan pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan.
		40	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Perluasan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemantapan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Pemerataan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		41	Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak	Pemantapan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian	Optimalisasi akses rumah tangga terhadap hunian layak
		42	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Percepatan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Penguatan peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, modifikasi cuaca, dan lainnya).	Pemantapan Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		43	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pemerataan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pemerataan penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Optimalisasi penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		44	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pemerataan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Pemerataan penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Optimalisasi penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		45	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	Percepatan peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	Optimalisasi peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya	Optimalisasi peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		46	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
		47	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Pemerataan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Optimalisasi terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		48	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Percepatan pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pemerataan pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Optimalisasi pengembangan *closed loop model* pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, bank, dan asuransi pertanian
		49	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Percepatan pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pemerataan pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Optimalisasi Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.
		50	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan	Percepatan peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka	Pemerataan peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan	Optimalisasi peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.
		51	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya	Percepatan peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya	Optimalisasi peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya	Optimalisasi peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.
		52	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.
		53	Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Percepatan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Pemerataan pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan.	Optimalisasi pengembangan *closed loop model* perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan *market*, *bank*, dan asuransi perikanan.
		54	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya	Percepatan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya	Pemerataan penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya	Optimalisasi penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		55	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Percepatan pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Optimalisasi pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan	Optimalisasi pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi *monitoring*, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan *insentif* dan *disinsentif*.
		56	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Percepatan modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Optimalisasi modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.
		57	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Pemerataan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Pemerataan penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Optimalisai penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.
		58	Penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal	Pemerataan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal	Optimalisasi infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan
		59	Penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal,	Optimalisasi penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal.	Optimalisasi infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.
		60	Penyediaan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.	Percepatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.	Pemerataan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan
		61	Peningkatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan,	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan.	Pemantapan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan.	Pemantapan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb).
		65	Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet	Penguatan coverage dan kecepatan akses internet	Pemantapan coverage dan kecepatan akses internet	Peningkatan *coverage* dan kecepatan akses internet melalui penggelaran *fixed connection* dan/atau pembangunan *infrastruktur mobile connection* pada area-area *weak coverage*
		66	Pembangunan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi.	Perluasan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi.	Pemerataan coverage sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi.	Optimalisasi *coverage* sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi yang saling terintegrasi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		67	Penyediaan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.	Pemerataan aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.	Pengelolaan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.	Optimalisasi tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal.
		68	Penyediaan infrastruktur energi rendah emisi.	Percepatan infrastruktur energi rendah emisi.	Pemerataan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi.	Optimalisasi infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas.
		69	*City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.	Percepatan dan perluasan *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.	Pemantapan *City beutification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.	Optimalisasi *City beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism.
		70	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik.	Penguatan pengambangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik.	Pemantapan pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik.	Optimalisasi kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Belitung.
		71	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Percepatan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Pemantapan penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Perwujudan daya tarik wisata bertaraf internasional
		72	Percepatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Perluasan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Pemantapan pemasaran pariwisata bertaraf internasional
		73	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Percepatan peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Penguatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Pemantapan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.
		74	Penyediaan multi-infrastructure backbone & maritime backbone.	Pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone..	Percepatan pengembangan multi-infrastructure backbone & maritime backbone.	Optimalisasi *multi-infrastructure backbone* & *maritime backbone*, yang

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						menginterkoneksikan antar kawasan strategis.
		75	Peningkatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Pembangunan jalan daerah dan jalan desa.	Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.	Pemantapan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa.
		76	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan penyeberangan
		77	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata.	Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata.
		78	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara	Peningkatan status bandara menjadi Bandara Internasional	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional	Percepatan peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif
		79	Penyediaan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah	Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK	Optimalisasi penerapan hasil riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional
		81	Penyediaan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau.	Pengembangan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau.	Pendayagunaan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau dengan mengedepankan proses produksi ramah lingkungan yang didukung skema tata kelola limbah yang modern.	Pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau secara berkelanjutan.
		82	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah.	Percepatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah.	Penguatan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan.	Pemantapan industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		83	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.	Percepatan peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Pemantapan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan kontribusi UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global.
		84	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional.	Percepatan peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Pemantapan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerja sama internasional lainnya.	Pendayagunaan rantai nilai global untuk perkembangan daerah pariwisata dan optimalisasi pengembangan sektor unggulan
		85	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital.	Pengembangan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Pemantapan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Perwujudan UMKM yang mandiri dan berdaya saing
		86	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Peningkatan produktivitas BUMD.	Optimalisasi produktivitas BUMD.
		87	Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Optimalisasi penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.
		89	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.	Percepatan pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital digital.	Pemantapan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital.	Optimalisasi ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
						digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
	Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Bermartabat	90	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Percepatan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Pemantapan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah.	Penerapan regulasi di daerah yang mendukung investasi dan meningkatkan daya saing daerah
		91	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Penguatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	Perluasan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Pemantapan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
		92	Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Penguatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pemantapan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat.	Pendayagunaan digitalisasi pelayanan publik yang prima.
		93	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Percepatan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Pemantapan penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.	Perwujudan kelembagaan dan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
		94	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah	Pemantapan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah	Optimalisasi tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah, menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.	Perwujudan penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi.

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			daerah yang profesional dan bebas korupsi.	daerah yang profesional dan bebas korupsi.		
		95	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	Penguatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	Pemantapan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.	Perwujudan e-government dan smart city
		96	Pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Percepatan pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Penguatan pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pemantapan pengembangan karir ASN berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.
		97	Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Pemantapan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	Perwujudan kehidupan demokrasi yang sehat.
		98	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.	Penguatan integritas partai politik.
		115	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	Penerapan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Pemantapan penerapan dan monev panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).	Optimalisasi penerapan dan monev panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.).
		116	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.	Penguatan perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir	Implementasi dan monitoring evaluasi rencana tata ruang	Pemantapan implementasi dan monitoring evaluasi rencana tata ruang
		117	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-	Penguatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-	Pemantapan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C	Penuntasan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas.	3C (*Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	(*Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated*) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	(*Land Acquisition and Resetlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated*)
		118	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		119	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria.
		120	Pengembangan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset	Pengembangan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.
		123	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		124	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW.
		125	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Provinsi dan Nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Provinsi dan Nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Provinsi dan Nasional.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Provinsi dan Nasional.
		126	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.
		127	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Misi 4: Mewujudkan Kondusivitas Daerah	99	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Perluasan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Pemantapan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas.	Perwujudan daerah yang aman dan tertib
		100	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan	Penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan	Pemantapan kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan	Optimalisasi kapasitas fiskal daerah serta sinergi perencanaan dan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		101	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Percepatan pengendalian inflasi daerah.	Pemantapan pengendalian inflasi daerah.	Optimalisasi pengendalian inflasi daerah.
		102	Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.	Peningkatan dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.	Penguatan dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.	Pemantapan dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya.
		114	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		122	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Percepatan pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.	Perecepatan pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.
	Misi 5: Mewujudkan masyarakat berbudaya dan berwawasan lingkungan	62	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.	Pemerataan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.	Optimalisasi penyediaan infrastruktur air baku dan air minum.
		63	Peningkatan ketahanan bencana.	Penguatan ketahanan bencana.	Pemantapan ketahanan bencana.	Pemantapan ketahanan bencana melalui pendekatan *hybrid* (*green & grey infrastructure*).
		64	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Penguatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Penguatan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu	Pemantapan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu
		88	Penjaminan ketersediaan listrik untuk mendukung pembangunan	Pemerataan akses listrik untuk mendukung pembangunan yang	Perluasan pemerataan akses listrik untuk mendukung pembangunan	Optimalisasi pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
		103	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Perluasan upaya penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Pemantapan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.	Optimalisasi penerapan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		104	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Pemantapan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Optimalisasi kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.	Perwujudan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.
		105	Pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Percepatan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pemantapan pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
		106	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
		107	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		108	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Penguatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Pemantapan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Perwujudan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		109	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Penguatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemantapan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemerataan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		110	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas,	Penguatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang	Percepatan pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang	Optimalisasi Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang

Visi	Misi	Arah Kebijakan Transformasi				
		No	Tahap I (2025-2029)	Tahap II (2030-2034)	Tahap III (2035-2039)	Tahap IV (2040-2045)
			Penguatan Fondasi Pembangunan	Akselerassi Pembangunan	Pemantapan Pembangunan	Mewujudkan Belitung Maju (Mandiri dan Berkelanjutan)
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
			dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.	disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		111	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Pemantapan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Optimalisasi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penurunan ketimpangan gender dalam pembangunan.
		112	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		113	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy.*	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy.*	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*.
		121	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim

5.2.3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan, baik tingkat provinsi maupun nasional. Rumusan Indikator Utama Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 merupakan penjabaran lanjut terhadap konteks keterkaitan dari visi, misi maupun arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Belitung 2025-2045.

Terdapat 43 (empat puluh tiga) Indikator Utama Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045 sebagai penjabaran terhadap 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Daerah. Masing-masing Indikator Utama Pembangunan Daerah memiliki angka *baseline* sebagai dasar perhitungan awal pada tahun 2025, serta target yang ditetapkan pada tahun 2045.

Berdasarkan kerangka dan periodesasi pembangunan, target tesebut terbagi dalam target fase periode pembangunan jangka menengah lima tahunan yang kemudian diterjemahkan dalam rumusan program pembangunan. Rincian Indikator Utama Pembangunan Daerah dalam RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 dijabarkan lebih lanjut pada tabel 5.12.

Tabel 5.12 Sasaran Pokok, Arah Pembangunan dan Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Belitung 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
TRANSFORMASI SOSIAL							
1.	Meningkatnya Kesehatan untuk Semua	Kesehatan untuk Semua	**IE1**	**Kesehatan Untuk Semua**			
			1.	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	74,15	79,50	
			2.	Kesehatan ibu dan anak:			
			2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	146	16	
			2.b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	18,30	5,50	
			3.	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):			
			3.a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	66	95	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			3.b	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,43	98	
			4.	Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)	100	100	
2.	Meningkatnya Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Inklusif	Pendidikan Berkualitas yang Merata dan Inklusif	**IE2**	**Pendidikan Berkualitas yang Merata**			
			5.	Hasil Pembelajaran			
			5.a.i	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca			
				- SD	78,25	83,00	
				- SMP	84,25	89,00	
			5.a.ii	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi numerasi			
				- SD	62,54	72,04	
				- SMP	75,59	85,09	
			5.b	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,02	11,32	
			5.c	Harapan lama sekolah (tahun)	12,42	15,00	
			6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	8,73	9,62	
			7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Perusahaan	21	65	
3.	Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Perlindungan Sosial yang Adaptif	**IE3**	**Perlindungan Sosial yang Adaptif**			
			8.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,92	2,21	
			9.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten (%)	35,53	55,77	
			10.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	26	53	
TRANSFORMASI EKONOMI							
4.	Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	**IE4**	**IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi**			
			11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	12,83	11,89	
			12.	Pengembangan Pariwisata			
			12.a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	4,54	6,54	
			12.b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)	7,55	24,60	
			13.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional (%)	34,48	36,70	
			14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, dan BUMD			
			14.a.i	Proporsi jumlah usaha mikro non pertanian pada level Kabupaten (%)	78,16	79,17	
			14.a.ii	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Kabupaten (%)	99,7	99,35	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
			14.b	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	5,94	12	
			14.c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,72	2,41	
			14.d	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,86	3,42	
			15.	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik			
			15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,74	1,5	
			15b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	50,00	94,45	
			16.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	50,79	62,22	
			17.	Indeks Kapabilitas Inovasi	2,07	3,00	
5.	Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	**IE5**	**Penerapan Ekonomi Hijau**			
			18.	Tingkat Penerapan ekonomi hijau			
			18.a.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,45	89,92	
			18.b	Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)			
6.	Terwujudnya Transformasi Digital	Transformasi Digital	**IE6**	**Transformasi Digital**			
			19.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	5,9	7,3	
7.	Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	**IE7**	**Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**			
			20.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (%PDRB)	22,29	21,80	
			21.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDB)	14,17	14,33	
8.	Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	**IE8**	**Perkotaan dan Pedesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**			
			22.	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan :			
			22.a	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	75	100	
			22.b	Persentase Desa Mandiri	59,52	100	
TRANSFORMASI TATA KELOLA							
9.	Tersedianya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	**IE9**	**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**			
			23.	Indeks Reformasi Hukum	70	100	
			24.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,4	5,00	
			25.	Indeks Pelayanan Publik	4,10	5,00	
			26.	Indeks Integritas	78,00	89,20	
KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH							
10.	Meningkatnya keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	Peningkatan keadilan hukum dan demokrasi yang berkualitas	**IE10**	**Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh dan Demokrasi Substansi**			
			27.a	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100	
			27.b	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	80	90	
			28.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	65,91	83,29	
			29.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi	

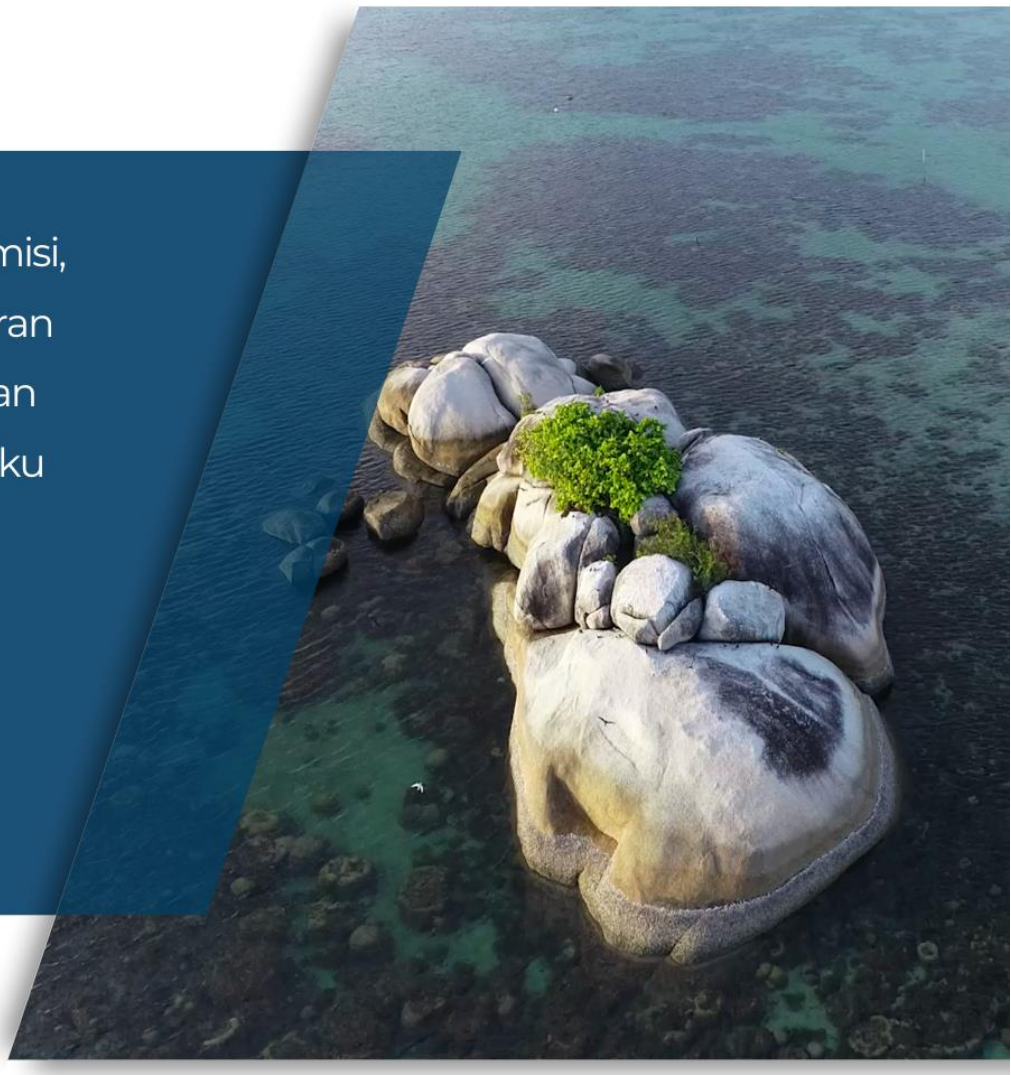
No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
11.	Meningkatnya Stabilitas Ekonomi daerah	Stabilitas Ekonomi daerah	**IE11**	**Stabilitas Ekonomi Makro**			
			30.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%):	0,72	0,46	
			31.	Tingkat Inflasi (%)	2,84	0,5	
			32.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
			32.a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	26,78	57,90	
			32.b	Total Kredit/PDRB (%)	16,50	50,00	
			33	Kontribusi PDRB Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (%)	2,48	3,02	
12.	Meningkatnya Kerjasama antar daerah	Kerjasama antar daerah	**IE12**	**Ketangguhan Diplomasi dan Berdaya Gentar Kawasan**			
			34.	Jumlah Kerjasama Kabupaten	17	20	
KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
13.	Terwujudnya kerukunan umat beragama dan masyarakat yang berbudaya	Mewujudkan kerukunan umat beragama dan masyarakat yang berbudaya	**IE13**	**Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**			
			35.a	Persentase benda, bangunan, struktur, situs dan kawasan cagae budaya yang telah ditetapkan terhadap total pendaftaran	26,32	100	
			35b.	Persentase warisan budaya tak benda yang telah ditetapkan terhadap total pencatatan	9,03	73,14	
			36.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,66	83,71	
14.	Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	**IE14**	**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif**			
			37.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,56	74,51	
			38.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,275	0,112	
15.	Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	**IE15**	**Lingkungan Hidup Berkualitas**			
			39.	Jumlah Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat yang dapat mengakses pemanfaatan keanekaragaman hayati secara partisipatif di hutan dan lahan; perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil (Kelompok Masyarakat Lokal dan/atau Adat (Kumulatif)	6	25	
			40.	Kualitas Lingkungan Hidup			
			40 a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	76,81	80,23	
			40.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	6,12	50	
			40.c	Pengolahan Sampah			
				Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	8	84	
				Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	40	100	
16.	Terwujudnya Ketahanan Air dan	Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan	**IE16**	**Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**			
			41.	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Target		Ket
					Baseline 2025	Target 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)
	Kemandirian Pangan		41.a	Ketahanan Energi			
			-	Konsumsi Listrik per Kapita	1477	3225	
			41.b	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment* (%))	11,94	0,23	
			41.c	Ketahanan Air			
			-	Kapasitas Air Baku (M3/detik)	0,55	2,05	
			-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum {erpipaan (%)	30,97	100	
17.	Terwujudnya Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	**IE17**	**Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**			
			42.	Indeks Risiko Bencana (IRB)	117,14	84,84	
			43.	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)			
			43a.	Kumulatif	17,93	37,56	

Sumber : hasil analisis (diolah)

BAB VI
PENUTUP

"RPJPD yang berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah merupakan pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah untuk 20 tahun yang akan datang"



Belitung MAJU
Mandiri dan Berkelanjutan

BAB VI
PENUTUP

6.1 Kaidah Pelaksanaan

Mempedomani Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. RPJPD ini juga menjadi acuan dan pedoman bagi calon Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung yang berdimensi waktu lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung yang berdimensi tahunan. Selain itu RPJPD merupakan acuan dasar pemecahan permasalahan daerah melalui koordinasi antar pelaku pembangunan, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar fungsi pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat, partisipasi masyarakat, serta penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Belitung dalam mewujudkan visi “Kabupaten Belitung MAJU (Mandiri dan Berkelanjutan)” harus dikawal dengan kaidah pelaksanaan yang efektif.

Kaidah pelaksanaan diperlukan sebagai norma-norma agar visi dan misi dapat dilaksanakan dan diukur keberhasilannya. Di samping itu, juga diperlukan komunikasi publik yang efektif penting dalam rangka membangun kesamaan pemahaman serta meningkatkan rasa kepemilikan dan partisipasi bermakna seluruh pelaku pembangunan di daerah. Kaidah pelaksanaan yang harus diikuti meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Belitung menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 sebagai bentuk keterbukaan informasi publik;
2. Unsur pemerintah, masyarakat serta dunia usaha berkewajiban melaksanakan atau mendukung program-program dalam RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045 dengan sebaik-baiknya;
3. Pemerintah Kabupaten Belitung wajib menjamin konsistensi antar dokumen perencanaan tersebut, selaras dengan RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 serta kebijakan pemerintah pusat yang terbit setelah penetapan Perda tentang RPJPD ini;
4. Pemerintah Kabupaten Belitung berkewajiban memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPJPD tersebut untuk memastikan bahwa dokumen telah dipedomani dalam penyusunan RPJMD dan dilaksanakan sesuai rencana;
5. Berdasarkan hasil evaluasi, dokumen RPJPD dapat diubah dengan tahapan dan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJPD ini ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran dua puluh tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

6.2 Mekanisme Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan daerah. Pengendalian dan evaluasi penting

untuk menjamin keberhasilan pencapaian rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan konsistensi antardokumen rencana pembangunan daerah dan penganggaran dengan pelaksanaannya serta memastikan agar keberhasilan pembangunan daerah dapat dicapai sesuai dengan indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berikut mekanisme pengendalian dan evaluasi RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045.

1. Identifikasi indikator kinerja sasaran pokok RPJPD, pemenuhan syarat indikator yaitu harus jelas, terukur, dapat diuji, relevan dan berwaktu.
2. Sistem pelaporan berkala dalam kemajuan implementasi RPJPD.
3. Monitoring dan pemantauan, dengan pembentukan tim khusus pemantauan pelaksanaan RPJPD.
4. Pengukuran kinerja dan capaian tujuan, membandingkan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi dan memastikan kesesuaian progress dengan rencana.
5. Identifikasi faktor-faktor penghambat RPJPD kemudian dilakukan penanganan yang tepat untuk mengatasi kendala/hambatan tersebut.
6. Evaluasi akhir dan penilaian kinerja yang dilakukan pada akhir periode RPJPD dan merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan RPJPD.
7. Keterlibatan pihak eksternal, ada *feedback* atau umpan balik dari sektor swasta, masyarakat dan Lembaga swadaya masyarakat.
8. Penyesuaian dokumen perencanaan, hasil evaluasi RPJPD dapat digunakan untuk melakukan penyesuaian/perbaikan yang meliputi perubahan target, kebijakan baru atau penyesuaian strategi dalam mencapai tujuan .
9. Transparansi dan publikasi hasil, kemajuan implementasi RPJPD dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka.

6.3 Pembiayaan

Dalam rangka percepatan pembangunan daerah diperlukan peningkatan kapasitas pendanaan baik yang bersumber dari sektor publik maupun non publik. Adapun alternatif sumber pembiayaan lain diluar APBD dan bantuan pemerintah pusat menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2045. Hal ini dimungkinkan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerjasama dengan pihak swasta dan badan usaha maupun pihak lainnya juga menjadi perhatian untuk kedepan dengan penguatan komitmen bersama antara pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta demi terwujudnya capaian RPJPD.

6.4 Manajemen Risiko

Dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah perlu melakukan manajemen risiko yang terintegrasi. Risiko pembangunan daerah adalah efek dari ketidakpastian pada sasaran pembangunan daerah, Untuk itu diperlukan manajemen risiko pembangunan daerah, yakni kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas yang terkait sehubungan dengan adanya risiko pembangunan daerah. Sebagaimana dilansir dari *kwikkiangie.ac.id*, strategi manajemen risiko meliputi:

a. Menerima risiko (*Risk Acceptance*); Mengakui adanya risiko tanpa mengambil langkah-langkah untuk menguranginya. Strategi ini cocok untuk risiko dengan dampak rendah atau risiko yang sulit dihindari
b. Pemindahan risiko (*Risk Transfer*); Mengalihkan risiko kepada pihak ketiga, seperti perusahaan asuransi. Ini sering digunakan untuk risiko finansial atau risiko yang dapat diasuransikan
c. Pengurangan risiko (*Risk Reduction*); Mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan atau dampak risiko. Ini dapat melibatkan perubahan proses, investasi dalam teknologi, atau pelatihan pegawai

d. Penghindaran risiko (*Risk Avoidance*); Menjauhi kegiatan atau keputusan yang dapat menghasilkan risiko yang tidak dapat diterima

Jadi segala hambatan dalam pelaksanaan RPJPD Kabupaten Belitung tahun 2025-2045 dapat diminimalisir dengan mengimplementasikan manajemen risiko dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan RPJPD tersebut.



PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG